



Khairil Miswar telah akrab dengan kehidupan dayah sejak masih berusia 7 tahun dan sempat menjadi santri di Dayah Darussa'dah dari tahun 1987-1999. Saat ini, penulis aktif menuangkan gagasan dan pikirannya melalui tulisan di berbagai media, seperti Serambi Indonesia, Waspada Medan, Pikiran Merdeka, Rakyat Aceh, Analisa Medan, dll. Akhir-akhir ini penulis juga fokus melakukan penelitian tentang Wahabi di Aceh.



Jl. Anggrek I Dusun Malahayati,
Lampulo, Banda Aceh
email: padebooks@gmail.com
www.padebooks.com



"Khairil dengan berani memasuki perdebatan sensitif perihal aliran dalam Islam di Aceh dengan ringan, cerdas dan jenaka. Kadang dia mengkritik kaum reformis, lain waktu dengan kecintaan yang sama dia menyentil kubu tradisional. Khairil tak memihak, dia hanya ingin meluruskan 'sesat pikir' yang bisa menghinggapi siapa saja, dan biasanya menjadi penyebab saling hujat plus aksi intoleransi. Dengan gaya bertutur lancar dan segar khas anak dayah, dia mengajak kita melihat semua wacana itu dengan akal sehat. Melalui buku ini, bolehlah kita mencatat Khairil sebagai salah satu komentator sosial dan politik penting dari generasi muda Aceh. Buku ini adalah sebuah cubitan yang menyehatkan pikiran."

Nezar Patria
(Wartawan, Anggota Dewan Pers)

"Buku ini menyadarkan kita pada fakta terbangunnya watak authoritarianisme di kalangan masyarakat Aceh. Salah satu ciri dominan watak ini adalah sikap intoleran pada perbedaan. Intoleransi ini menjadi lebih menarik untuk dibaca dan diteliti ketika dilekatkan pada bangunan politik Aceh yang juga penuh pertarungan merebut kudi-kudi kekuasaan. Pada titik ini, maka terlihatlah wajah-wajah agama yang terpolitikan. Politisasi agama pun menjadi niscaya. Buku ini menarik dan penting untuk dibaca guna memahami satu fragmen penting politik di Aceh."

Dr. Fajran Zain
(Direktur Eksekutif The Aceh Institute)

HABIS SESAT
TERBITLAH STRES;

KHAIRIL MISWAR



PADÉBOOKS

KHAIRIL MISWAR

HABIS SESAT TERBITLAH STRES; Fenomena Anti Wahabi di Aceh

Kata Pengantar:
Dr. Dedi Sahputra, MA

Epilog:
Dr. Danial, M. A

KHAIRIL MISWAR

HABIS SESAT TERBITLAH STRES

Fenomena Anti Wahabi Di Aceh

**KATA PENGANTAR:
DR. DEDI SAHPUTRA, MA**

**EPILOG:
DR. DANIAL, MA**

**EDITOR:
MUHAMMAD ALKAF**

HABIS SESAT TERBITLAH STRES

Fenomena Anti Wahabi di Aceh

Khairil Miswar

Copyright © 2017, pada penulis

Hak cipta dilindungi undang-undang
All rights reserved

Cetakan pertama: Juni 2017

ISBN 978-602-60562-1-4

xx + 246 hlm. 14,5 x 21 cm.
Editor : Muhammad Alkaf

Desain Cover dan Layout : aSOKA communications (www.asoka.web.id)

Diterbitkan oleh:
Pade Books
Jl.Anggrek Dusun Malahayati,
Lampulo Kec.Kuta Alam, 23127, B.Aceh
email : padebooks@gmail.com
web : www.padebooks.com

Dilarang memperbanyak, menyalin, merekam sebagian atau seluruh bagian buku ini dalam bahasa atau bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit atau penulis

APA KATA MEREKA

“Ada satu pesan penting dari buku ‘Habis Sesat Terbitlah Stress’. Penulis mengajak siapa pun untuk tidak cepat-cepat men-*judge* seseorang sesat. Tak seorang pun punya hak memberi penilaian atas pemikiran seseorang.”

Taufik Al Mubarak

(Mantan Redaktur Pelaksana Harian Aceh –

Penulis Buku Aceh Pungo)

“Sebuah buku yang mengajak pembaca untuk melihat bagaimana harusnya menyikapi perbedaan pemahaman dalam Islam. Selama ini, perbedaan selalu dibesar-besarkan tanpa kita memahami akar permasalahannya. Meski persoalan yang dituliskan Khairil Miswar hanya bersifat lokal – terjadi di Aceh, namun kegelisahan penulis yang tertuang dalam buku ini merupakan kegelisahan besar umat Islam yang menjadi mayoritas penduduk negeri ini.”

Mohammad Akbar

(Editor Republika Online)

“DISKUSI aliran sesat, Wahabi dan gerakan lainnya yang dianggap tidak sejalan dengan semangat Ahlussunnah Waljamaah menjelma menjadi sebuah gerakan terstruktur bahkan liar tak terkendali meninggalkan pokok persoalan. Tidak banyak penulis Aceh yang mau memberi warna lain dari alur diskusi yang sedang berkembang tentang aliran sesat, Wahabi dan Ahlussunnah Waljamaah. Khairil Miswar hadir dan memberikan argumentasi akademik di tengah derasnya arus penolakan sesuatu yang dianggap di luar amalan Ahlussunnah Waljamaah. Tidak mudah melakukan hal itu, namun Khairil Miswar berani bayar mahal tentang yang apa dikerjakannya sebagai sebuah upaya memberi jalan bagi para pencari kebenaran. Buku ini merekam jejak setiap diskusi dan peristiwa yang terjadi dalam dinamika Aceh saat ini.”

Arif Ramdan

(Redaktur Multimedia Serambi Indonesia)

“Membaca buku ‘Habis Sesat Terbitlah Stress’ seperti menyelam samudera. Ingin menyelam lebih dalam untuk menemukan mutiara. Asyiknya, di setiap bagian buku ini selalu ditemukan mutiara yang mencerahkan pikiran. Dan inilah daya rayu dari penulis. Kita tidak ingin melepas sebelum usai sebab penuh mutiara berkilau. Adalah label sesat itu tidak sepenuhnya agamis, melainkan politik. Buku ini kilauan yang menggetarkan hati pembaca sehingga dalam relasi sosial klaim sesat tidak berujung pada stress massal.”

Risman A. Rachman

(Pemimpin Umum AceHTrend.co)

“Trend pertumbuhan dan perkembangan pemikiran Wahabi tidak bisa dibendung di Aceh. Indikator itu dapat dilihat dari pemikiran Islam modernis yang berkembang di lembaga-lembaga pendidikan formal dan informal. Sekarang, pemikiran Wahabi dilihat dari fenomena yang ada sedang melembaga sehingga perkembangannya

akan lebih cepat dan pesat lagi. Saya perkirakan 30 tahun ke depan wujud pemikiran Wahabi dan lembaganya akan dapat kita saksikan sebagai fakta baru di Aceh. Karena itu, apa yang ditulis dalam buku ini akan terus mengalir sampai pada tahap mewujudkan Aceh yang benar-benar menerapkan syariat Islam secara *kaffah*. Dan itu hanya dapat dilakukan oleh pemikiran Islam Wahabi.”

Sayed Muhammad Husen

(Pemimpin Redaksi Tabloid Gema Baitturrahman)

“Penulis buku ini mengajak kita untuk saling memahami dan saling berdiskusi dalam menyikapi setiap persoalan dalam kehidupan sosial keagamaan.”

Tgk. Musbani, MA

(Muballigh Muda Bireuen)

“Saya bersahabat dengan penulis ini sejak masih masih duduk di bangku sekolah pada tahun 1996. Hubungan persahabatan masih terjaga sampai saat ini. Saya melihat Khairil Miswar sebagai sosok penulis yang berani tidak populer dalam mengungkapkan fakta dan kebenaran yang diyakininya. Ia selalu berusaha bersikap objektif melalui tulisan-tulisannya sebagai bentuk komitmennya dalam mengabdikan diri demi terbinanya toleransi antar sesama muslim, khususnya di Aceh”

Budi Azhari, M. Pd

(Akademisi UIN Ar-Raniry)

RENUNGAN

“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah,
dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah
kepadamu
ketika dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah
mempersatukan hatimu,
lalu karena nikmat Allah, jadilah kamu orang yang bersaudara; dan
kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan
kamu daripadanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk”
(Ali Imran:103)

“Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai
dan berselisih
sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah
orang-orang yang mendapat siksa yang berat”
(Ali Imran: 105)

“Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya. Ia tidak
boleh tidak menzaliminya, merendahnya dan tidak pula
meremehkannya. Taqwa adalah di sini. – Beliau menunjuk dadanya
sampai tiga kali (kemudian beliau bersabda lagi): Cukuplah
seseorang dikatakan buruk bila meremehkan saudaranya sesama

muslim. Seorang Muslim terhadap Muslim lain; haram darahnya,
kehormatannya dan hartanya”
(HR. Muslim)

“Janganlah kalian saling membenci, saling mendengki dan saling
membelakangi. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang
bersaudara”
(*Muttafaq ‘Alaihi*)

“Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat bangunan, satu sama
lain saling menguatkan”
(*Muttafaq ‘Alaihi*)

“Perumpamaan kaum mukminin satu dengan yang lainnya dalam hal
saling mencintai, saling menyayangi dan saling berlemah-lembut di
antara mereka adalah seperti satu tubuh. Apabila salah satu anggota
badan sakit, maka semua anggota badannya juga merasa demam dan
tidak bisa tidur”
(HR. Bukhari dan Muslim)

“

Buku Sederhana ini
adalah Wujud Baktiku kepada:

Ayahandaku Tgk. H. Ismail Sarong

&

Ibundaku Hj. Mudiah Affan (Almarhumah)

Yang telah mengajarkanku banyak hal
tentang hidup di dunia ini
dan mengenalkanku akan akhirat

Dan...

Guruku, Pak M. Jafar

(Guru Bahasa Indonesia MTsN Matangglumpangdua)
Yang Telah Menumbuhkan Minatku untuk menulis

”

KATA PENGANTAR

Dr. Dedi Sahputra, MA

Redaktur Opini Harian *Waspada* Medan

Sampai kata sambutan ini saya tulis, Khairil Miswar adalah orang yang belum pernah saya temui secara fisik. Saya mengenalnya dari tulisan-tulisannya yang dikirim ke Harian *Waspada* Medan. Sebagai redaktur halaman Opini Harian *Waspada*, saya memang sering hanya berkenalan dengan penulis dari tulisannya ketimbang bertemu orangnya.

Dari ribuan tulisan *inbox* di email Opini *Waspada* yang tak terseleksi untuk dibaca, tulisan Khairil Miswar termasuk sering dimuat di Harian *Waspada* karena penilaian terhadap tema dan *content*-nya. Saya kira Khairil Miswar adalah orang yang cakap dalam menangkap peristiwa untuk kemudian dituangkan menjadi sebuah tulisan populer. Kecakapan menangkap peristiwa inilah yang memang harus dimiliki seorang penulis, di mana pun ia menulis.

Buku yang Anda pegang ini saya kira juga merupakan bagian dari kecakapannya menangkap peristiwa atau fenomena yang terjadi di Aceh. Fenomena ini merupakan soal yang sering menjadi buah bibir, tidak saja di Aceh, bahkan di Medan, mungkin juga dalam skala yang lebih luas. Akibatnya ia menjadi menarik untuk dibaca.

Seperti kita maklumi, frasa “klaim kebenaran” sejak lama basah di lidah kaum liberal-sekuler. Tujuannya tidak lain sebagai jalan masuk bagi pengakuan kebenaran bagi “klaim kebenaran” mereka sendiri. Dengan menghalangi orang untuk meyakini kebenaran yang dia yakini, maka mereka kemudian menawarkan kebenaran yang mereka yakini kebenarannya.

Tapi “klaim kebenaran” kali ini beda dimensinya. Saya ingin menyebutnya sebagai makna dari frasa “klaim kebenaran” yang sesungguhnya. Bahwa “klaim kebenaran”—dalam hal ini menyangkut soal mazhab fikih—dalam makna negatif adalah menghalangi umat Islam meyakini dan menjalani mazhab yang berbeda, yang bahkan Imam Syafii pun menghormatinya.

Karena para imam mazhab adalah orang-orang yang memiliki hubungan antara guru dan murid yang diikat oleh adab yang tinggi. Rasanya tidak pernah terdengar di antara para imam mazhab tersebut mengklaim kebenaran pendapatnya sendiri dibanding pendapat imam mazhab lain. Akan halnya faham dalam mazhab Wahabiyah, tak terlepas dari bentuk ijtihad pengusungnya, sebagaimana ijtihad pada imam mazhab.

Malah Imam Syafii pernah berkata: *“Jika terdapat hadits yang shahih, maka lemparlah pendapatku ke dinding. Jika engkau melihat hujjah diletakkan di atas jalan, maka itulah pendapatku”*. Pernyataan ini mengisyaratkan rasa rendah hatinya sang Imam, bahwa dirinya pun

berpeluang untuk salah.

Mengingat hangatnya perbincangan tentang soal “klaim kebenaran” ini, tentu saja buku ini tidak akan surut dari pro dan kontra. Namun sebagai sebuah produk pemikiran, buku ini mestinya menjadi sebuah sumbangan berharga bagi dinamika yang terjadi. Bahwa di Aceh pernah terjadi suatu perdebatan tentang persoalan mazhab. Karena itu, untuk membaca buku ini, kiranya perlulah untuk membebaskan diri dari syak wasangka terlebih dahulu, agar kandungan kebenaran di dalamnya bisa terserap.

Akhirnya selamat membaca.

Medan, 30 Maret 2017

KATA SAMBUTAN

Pencerahan Dalam Memaknai Perbedaan

Mengemas kumpulan tulisan menjadi sebuah buku memiliki keunikan tersendiri. Kadang tulisan-tulisan tersebut bisa menyatu dalam sebuah tema besar, namun sering juga sulit dicarikan benang merahnya. Ada kalanya pembaca dibiarkan mencari sendiri keterkaitan tulisan yang satu dengan tulisan lainnya, hingga mewakili judul buku. Ini pula yang ditawarkan Khairil Miswar dalam buku “**Habis Sesat Terbitlah Stres.**”

Menyimak tulisan-tulisan dalam buku ini, secara gamblang pembaca—khususnya muslim—bisa mendapatkan “pencerahan lebih” dalam memaknai perbedaan. Pesan tentang pentingnya menghargai perbedaan muncul dalam setiap tulisan. Mulai perbedaan pemahaman dalam pelaksanaan ibadah hingga perbedaan pendapat dalam menyikapi

suatu peristiwa, semuanya disajikan dengan dalil-dalil kuat—umumnya merujuk Alquran dan As-sunnah. Ditambah lagi dengan pendapat para ulama, sehingga pembaca memahami konstalasi perdebatan dalam setiap perbedaan.

Dalam beberapa tulisan, Khairil Miswar juga berupaya mengajak pembaca untuk tidak tergesa-gesa memberikan label “kafir” atau “sesat” kepada pribadi maupun kelompok tertentu sebelum adanya Fatwa Ulama. Di bagian lain, Khairil mengkritisi stigma-stigma negatif terhadap Wahabi dengan memberikan gambaran jelas tentang paham tersebut. Dalam mengupas persoalan ini, Khairil tetap mengedepankan pendapat para ulama dengan merujuk berbagai referensi karya ulama besar yang membedah khilafiah di kalangan umat Islam.

Menariknya, dalam menawarkan solusi atas berbagai persoalan yang dikemukakan, Khairil sama sekali tidak terkesan menggurui. Kepiawaiannya dalam meramu persoalan kekinian dengan solusi-solusi cemerlang, menjadikan artikel-artikel dalam buku ini tidak tergilas zaman dan enak dibaca oleh semua generasi.

Tak kalah pentingnya, Khairil bisa memposisikan diri dengan tepat saat mengulas perbedaan pendapat dalam beribadah umat Islam di Aceh. Berbicara tentang perbedaan rakaat salat terawih tentu tidak sesulit berbicara tentang Wahabi di saat berbagai stigma sesat dilontarkan terhadap paham tersebut. Bisa-bisa masyarakat salah mengartikannya. Namun Khairil berani mengambil posisi dengan memaparkan persoalan sebenarnya terkait Wahabi.

Akhirnya, sebagai editor di media massa—Harian Aceh dan Pikiran Merdeka—yang kerap bersentuhan dengan tulisan Khairil Miswar, saya sangat mengapresiasi kelahiran buku ini. Bagi saya, ini tidak sekedar menambah pembendaharan buku karya penulis Aceh di

pasaran. Lebih dari itu, buku ini hadir di tengah minimnya buku dengan tema khilafiah di kalangan masyarakat Aceh.

Buku ini menggugah kita untuk selalu berpikir sehat dalam menghadapi perbedaan antar sesama muslim. Untuk menghasilkan sebuah kesimpulan yang tepat, kita tidak cukup hanya memadukan akal dan hati, tetapi juga harus memadukan ayat qauliyah dan ayat kauniyah-Nya. Dengan merangkum semua perpaduan tersebut, Insya Allah kita akan terhindar dari “Habis Sesat Terbitlah Stres.”

Banda Aceh, 21 Maret 2017

Ariadi B Jangka

Pemimpin Redaksi Pikiran Merdeka

PENGANTAR PENERBIT

Akhir-akhir ini, Indonesia didera oleh persoalan intoleransi yang semakin tajam. Aksi-aksi intoleran terus bermunculan bagai jamur di musim hujan. Aceh sebagai salah satu provinsi yang telah menerapkan syariat Islam pun tidak luput dari aksi-aksi intoleran yang dilakukan oleh kalangan tertentu. Aksi-aksi ini terus bermunculan di beberapa tempat di Aceh yang pada puncaknya telah melahirkan gerakan massa.

Kemunculan aksi-aksi intoleran di Aceh tentunya tidak terlepas dari kondisi sosial politik Aceh yang baru saja keluar dari konflik panjang. Disadari atau pun tidak, aksi-aksi ini telah mengganggu keharmonisan dan juga memunculkan gejala sosial di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kita dituntut untuk bijak dalam menyikapi perdebatan tentang siapa yang lebih mewakili Islam di Aceh. Sikap-sikap memonopoli kebenaran harus dihentikan.

Melalui buku ini, Khairil Miswar mencoba merangkum berbagai fenomena sosial keagamaan yang berlangsung pasca konflik Aceh. Penulis buku ini merupakan intelektual muda yang konsisten memberikan pemikiran-pemikiran tajam terkait aksi-aksi intoleran atas nama agama di Aceh. Dan ini adalah sebuah pekerjaan besar yang tentunya patut dihargai.

Buku ini merangkum kumpulan tulisan penulis yang tersebar di beberapa media. Sebagai sebuah kumpulan tulisan, tentunya pembaca juga diajak untuk sedikit kembali ke belakang terkait berbagai fenomena sosial keagamaan yang muncul di Aceh

Padebook sebagai penerbit yang berkomitmen untuk menyuarakan segala hal dengan berimbang merasa berkepentingan menerbitkan buku ini guna mengisi beberapa ruang kosong yang ditinggalkan oleh penulis lain, tentunya dengan tetap mempertimbangkan dasar-dasar akademik.

Akhirnya, kami dari *Padebooks* mengucapkan selamat membaca!

Banda Aceh, 27 April 2017

Padebooks

Muhammad Alkaf

HABIS SESAT TERBITLAH STRES

Sebuah Pengantar

Judul ini berasal dari salah satu tulisan saya yang terbit di Harian Aceh pada 09 April 2011. Awalnya saya terinspirasi dari judul buku Kartini, “Habis Gelap Terbitlah Terang.” Satu-satunya alasan saya mengangkat tajuk “Habis Sesat Terbitlah Stres” sebagai judul buku karena judul inilah menurut saya paling representatif dan mampu merangkum keseluruhan topik dalam buku ini. Buku ini berisi beberapa tulisan terkait dengan isu aliran sesat, beberapa tradisi yang diperdebatkan, klaim *Ahlussunnah Waljama’ah* dan juga gerakan penolakan Wahabi di Aceh. Secara umum buku ini mencoba memberikan gambaran kepada para pembaca terkait berbagai fenomena sosial keagamaan yang terjadi di Aceh. Tulisan-tulisan dalam buku ini ditulis dalam rentang waktu selama enam tahun sejak 2011 sampai 2017.

Kegemaran dalam melemparkan klaim-klaim sesat terhadap pihak yang berbeda pemikiran keagamaan terkadang melahirkan berbagai perilaku “stres” yang tidak disadari oleh pelakunya. Tindakan

berteriak-teriak dalam mesjid ketika khatib sedang membaca khutbah misalnya, adalah salah satu bentuk perilaku “stres” yang muncul secara tidak sadar (atau mungkin sengaja?). Demikian pula dengan aksi merebut mesjid pun masuk dalam katagori “stres.” Tidak hanya di dunia nyata, perilaku “stres” juga banyak bermunculan di media sosial dengan lahirnya komentar-komentar “stres” seperti aksi caci maki terhadap Wahabi, dan bahkan ada pihak yang berkeyakinan mencaci maki Wahabi akan mendapatkan pahala. Tentunya hanya orang-orang “stres” yang mengatakan perilaku ini tidak “stres.” Aksi-aksi bernuansa “stres” ini muncul dengan sendirinya ketika keadaan mental seseorang tidak stabil alias labil.

Buku ini mencoba merangkum beberapa perilaku “stres” yang marak akhir-akhir ini di Aceh. Gerakan-gerakan “stres” ini dalam kondisi tertentu juga berdampak pada lahirnya suasana “stres” di Aceh. Saya sendiri juga sering merasa “stres” menyimak berbagai fenomena sosial keagamaan di Aceh. Dan bahkan beberapa tulisan dalam buku ini saya tulis dalam kondisi “stres.” Dengan demikian, pembaca tidak perlu “stres” ketika menemukan beberapa tulisan dalam buku ini yang bernada “stres.” Akhirnya buku ini menjadi sangat penting dibaca oleh siapa pun agar terhindar dari perilaku “stres” yang kian mewabah akhir-akhir ini.

Namun demikian, perlu diingatkan bahwa istilah “stres” dalam buku ini tidak berarti gila atau pun sakit jiwa. Penggunaan kata “stres” dalam buku ini hanya dimaksudkan sebagai sebuah kondisi ketakutan berlebihan dan ketakutan tak beralasan terhadap perbedaan. Ketakutan berlebihan inilah yang akhirnya melahirkan sikap-sikap tak patut di ruang publik.

Buku ini bukan Alquran, dan bukan pula kalam NabiNya, tapi hanya buah pikiran insan yang faqir lagi *dhaif* yang merindukan

ukhuwah Islamiyah kekal abadi. Buku ini lahir dari kegelisahan saya terhadap rapuhnya *ukhuwah* di Aceh akhir-akhir ini. Beberapa kritik saya terhadap beberapa kalangan dalam buku ini tidak didasarkan pada kebencian, tapi sebagai sebuah bentuk kecintaan saya kepada saudara seiman yang dengan kecintaan itu pula bangunan *ukhuwah* akan kokoh berdiri.

Ide menerbitkan buku ini berasal dari saya sendiri. Tidak ada yang “mendesak” dan “memaksa” saya – sebagaimana sering diakui oleh penulis lain bahwa mereka sering didesak oleh kawan-kawan atau pihak lainnya. Mungkin hanya kondisi “stres” yang mampu mendesak saya hingga akhirnya saya berkesimpulan untuk menerbitkan buku ini. Setelah merasa “terdesak” saya pun berdiskusi dengan beberapa teman terkait ide menerbitkan buku ini. Awalnya saya berdiskusi dengan sahabat saya Munawar (Apa Yeuk). Hasil diskusi dengan Apa Yeuk membuat saya membulatkan tekad untuk menerbitkan buku ini. Dan Apa Yeuk bersedia membantu prosesnya. Dengan demikian saya patut berterima kasih kepada Apa Yeuk. Kemudian saya menghubungi sahabat saya Muhammad Alkaf (Bung Alkaf) guna berdiskusi tentang topik dalam buku ini apakah cocok diterbitkan atau tidak. Alkaf menjawab cocok, maka saya pun sepakat untuk menerbitkan buku ini di Penerbit *Padebook* yang “diasuh” oleh Alkaf dkk.

Dengan terbitnya buku ini tentunya saya patut berterima kasih kepada guru bahasa Indonesia saya di MTsN Matangglumpangdua (1996), Bapak M. Jafar. Bagi saya, beliau adalah inspirator yang telah menggerakkan tangan saya untuk menulis. Berkat motivasi dari beliaulah saya mencintai dunia kepenulisan sampai saat ini. Kepada rekan-rekan dan sahabat-sahabat saya yang terus menyemangati saya untuk menulis juga saya ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Mungkin saya perlu menyebut beberapa nama, seperti Tgk. Faisal Ridha, Faurizal Moechtar

dan Farizal. Tiga orang ini adalah sahabat sekaligus senior-senior saya dan saya banyak menyerap ilmu dari mereka. Tidak lupa pula ucapan terima kasih kepada rekan-rekan Jeumpa Mirah, Zulfahmi, Baihaqi, Junadi, dkk.

Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bang Ariadi B. Jangka yang telah bersedia menerbitkan beberapa artikel saya di Harian Aceh, Harian Pikiran Merdeka dan juga Tabloid Pikiran Merdeka. Tanpa Bang Ariadi mungkin tulisan-tulisan saya hanya tertinggal di komputer atau buku catatan. Sebagian tulisan dalam buku ini berasal dari beberapa Koran lokal yang pernah diasuh oleh Bang Ariadi. Terima kasih juga buat sahabat lama saya Taufik Al-Mubarak, penulis buku *Aceh Pungo* atas kebaikan-kebaikannya.

Saya juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada sahabat-sahabat saya di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang selama ini telah bersedia menghabiskan waktu untuk berdiskusi tentang berbagai topik tidak penting di kedai kopi. Mereka adalah Ramli Cibro, Munazir Khalis, Khairul Laweung, Irvan Daraftucy, Fajrizal dan Nukman Muhammed.

Terima kasih kepada Bang Ariadi B. Jangka dan Dr. Dedi Sahputra, MA yang telah bersedia menuliskan pengantar untuk buku ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Budi Azhari, sahabat saya sejak di MAN Peusangan dan juga kepada seluruh rekan redaksi di media dan juga para senior yang telah bersedia memberikan *endorsement* untuk buku ini, pertama-tama Bang Nezar Patria, Arif Ramdan, Dedi Sahputra, Mas Mohammad Akbar, Bang Risman Rachman, Bang Sayed Muhammad Husen, Dr. Fajran Zain dan terima kasih juga kepada senior Ustaz Dr. Danial yang telah bersedia menulis epilog untuk buku ini.

Ucapan terima kasih terbesar untuk Ayahanda tercinta dan

sekaligus guru spiritual saya, Tgk. Ismail Sarong semoga senantiasa diberi kesehatan dan diberkati umurnya dan *Almarhumah* Ibunda tercinta Mudiah Affan, semoga dilapangkan kuburnya. Kepada adinda-adinda saya (Rahmi, Chairal, Syukran, Syarizal, Rahmad dan Masna) sebagai teman *meudawa* (berdebat) juga saya ucapkan terima kasih. Salam rindu juga kepada adik kecil saya, almarhum Muhammad yang telah mendahului kami dalam usia cukup belia.

Tidak lupa juga ucapan terima kasih yang terdalem atas dukungan kekasih hati Linda Zahrianur dan sepasang buah hati tercinta, Sameer Al-Qarni dan Syahira Fathul Kirami. Tanpa mereka tentunya saya terpaksa bicara dengan tembok dan *tahe gante*.

Sebaik-baik kalam adalah kalam Allah Swt dan sebenar-benar petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. Untuk itu saya selalu mengartikan kritik sehat untuk kebaikan buku ini. Akhirnya, buku ini saya persembahkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, baik Wahabi maupun Aswaja. Selamat Membaca!

Bireuen, 16 Maret 2017

Khairil Miswar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	VIII
KATA SAMBUTAN.....	XI
PENGANTAR PENERBIT.....	XIV
PROLOG: ACEH DAN WAHABI.....	1

BAGIAN KESATU:

- SIAPA SESAT ? -

Terminologi Sesat Di Aceh	12
Habis Sesat Terbitlah Stres	18
Beda Belum Tentu Sesat, (Tetapi) Sesat Sudah Pasti Beda	25
Agar Penulis Jangan Tersesat (Menanggapi Tulisan Aria Sandra; “Aceh Dalam Bidikan Misionaris)	30
Memahami Dakwah Salaf	35
Siapa Ahlussunnah Waljama’ah?	41

BAGIAN KEDUA:

- WAHABI ACEH -

Stigma Sesat Terhadap Wahabi Di Indonesia.....	50
Hentikan Stigma Sesat Terhadap Wahabi.....	55
Pengaruh Stigma Wahabi Terhadap Pendidikan Islam.....	61
Wahabi Dalam Pandangan Orang Aceh	65
UIN Ar-Raniry Sarang Wahabi ?.....	71
Wahabi, Wahabi dan Wahabi	76

Wahabi Baca Qunut di Aceh.....	81
Aceh Dan Wahabi, Sebuah Wacana Menarik.....	85

**BAGIAN KETIGA:
- MONOPOLI MAZHAB -**

MPU Aceh dan “Fatwa Pujangga”.....	94
Rezim Mutazilah Dan Konflik Mazhab Aceh.....	101
Mitos Wahabi Dalam Tragedi Baiturrahman.....	111
Insiden Baiturrahman Dan Ukhuwah Islamiyah.....	116
Rebutan Mesjid Di Aceh.....	122
Mendamaikan Kaum Muslimin Di Aceh.....	127
Monopoli Mazhab Di Aceh.....	133
Teuku Wisnu, Wahabi Dan Khilafiyah Karet.....	139
Insiden Fatihah Dan Caci Maki Ala Netizen.....	143
Mazhab Dan Toleransi.....	146
Menyoal Pelarangan Mesjid Muhammadiyah.....	151
Aceh Dan Toleransi Umat Yang Gagal.....	157
Wafatnya Toleransi Di Bireuen.....	164
Toleransi Hanya Di Bibir.....	169
Warga Muhammadiyah Ditindas, Di Mana Peran Negara?.....	174

**BAGIAN KEEMPAT:
- WAHABI DALAM PERBINCANGAN -**

Antara Ki Joko Bodo, Yahudi Dan Sunnah Jenggut.....	182
Menjawab Kegundahan Muhammad Iqbal Jalil Cs Terhadap Wahabi.....	187

Kutup Pemikiran Teuku Zulkhairi, Nauval Dan Syah Reza	192
Idrus Ramli, Jangan Ganggu Aceh Kami	199
Mengintip Tuntutan Aswaja Aceh	203
Raja Salman, Aceh Dan Wahabi.	207

**BAGIAN KETUJUH:
- BIOGRAFI ABU INDRAPURI -**

Abu Indrapuri, Seorang Mujahid Wahabi”	214
--	-----

**BAGIAN KEDELAPAN:
- BUKAN SYAIR FANSURI -**

Bukan Syair Fansuri	232
-------------------------------	-----

EPILOG: Perbedaan, Kepenatan Dan Lautan	234
--	-----

DAFTAR PUSTAKA	241
---------------------------------	-----

BIOGRAFI PENULIS	244
-----------------------------------	-----

PROLOG:

ACEH DAN WAHABI

Saya dilahirkan di sebuah kampung yang mayoritas penduduknya menganut pemikiran Islam tradisional, di mana sebuah tradisi adalah hal terpenting yang harus tetap dipertahankan. Bagi mayoritas masyarakat kampung saya, dayah masih dianggap sebagai sebuah institusi pendidikan yang memiliki otoritas menafsirkan teks-teks agama. Artinya, setiap persoalan agama yang benar hanya terdapat di dayah. Seorang teungku dayah menduduki posisi penting dalam struktur sosial di kampung saya. Seorang imam mesjid misalnya, haruslah berasal dari alumnus dayah, seorang imam desa pun harus

PROLOG

diduduki oleh anak-anak dayah. Bahkan seorang khatib Jumat pun hanya boleh diisi oleh kader-kader dayah.

Saya sendiri adalah kader dayah dan telah akrab dengan kehidupan dayah. Pada saat masih kecil dan masa remaja, selain belajar di sekolah agama (MIN, MTsN dan MAN), di sore harinya saya juga belajar di sebuah dayah yang ada di kampung saya. Sepulang sekolah saya diwajibkan oleh ayah saya untuk belajar di dayah. Pada saat itu, ayah saya membelikan saya sepeda sebagai alat transportasi untuk belajar di dayah, padahal ayah saya shalat tarawih delapan rakaat dan tidak membaca *qunut* waktu shubuh, tetapi saya justru dititipkan untuk belajar di dayah. Sejak kecil, Ayah mendidik saya untuk terbiasa dengan perbedaan. Saya menempuh pendidikan di dayah selama lebih kurang 12 tahun, sejak usia 7 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Saya meninggalkan dayah setelah lulus dari MAN pada tahun 1999, karena harus berangkat ke Banda Aceh untuk melanjutkan pendidikan di IAIN Ar-Raniry. Sejak saat itulah saya sudah tidak lagi belajar di dayah.

Sejak kecil, meskipun saya belajar di dayah, saya juga sangat gemar membaca buku-buku koleksi ayah saya. Sebagian buku yang dimiliki oleh ayah saya ditulis oleh tokoh-tokoh yang oleh sebagian oknum masyarakat dayah sering disebut sebagai Wahabi, di antaranya buku Teungku Hasbi Ash-Shiddiqiey dan Fiqih Sunnah karya Sayyid Sabiq. Tapi, pada saat itu, istilah yang digunakan oleh orang kampung saya adalah MD (disingkat dari Muhammadiyah). Orang yang shalat tarawih delapan rakaat, yang tidak melaksanakan *njuoeh* (kenduri hari ketujuh kematian), dan orang yang tidak melakukan maulid sering disebut sebagai MD. Istilah Wahabi sendiri tidak begitu populer pada masa itu.

Keterarikan saya untuk melakukan kajian terhadap “Wahabi” berawal dari pengalaman-pengalam pribadi yang saya alami sendiri

ketika saya menjejakkan kaki di IAIN. Pada saat saya pulang kampung ketika libur kuliah saya sering terlibat diskusi dengan kawan-kawan saya yang pada saat itu sudah menjadi teungku dayah. Di antara topik diskusi yang sering melahirkan “perdebatan panas” antara saya dan kawan saya adalah tentang buku dan kitab. Menurut kawan saya yang sudah menjadi teungku itu, membaca buku bisa membuat kita sesat. Untuk belajar agama kita harus baca kitab, tidak boleh baca buku, seperti bukunya Hasbi Ash-Shiddiqiey. Saya katakan bahwa buku dan kitab itu sama saja. Buku adalah kitab dan kitab adalah buku, dalam bahasa Inggris disebut *book*.

Kawan saya menyanggah dan mengatakan bahwa kitab itu ditulis dalam bahasa Arab, sedangkan buku ditulis dalam bahasa Latin, itu bedanya. Saat itu saya menjawab, kalau begitu Koran Arab bisa menjadi kitab dan buku Matematika yang diterbitkan di Arab pun bisa disebut kitab. Akhirnya perdebatan ditunda dan kami masuk ke dalam topik lain, seperti *nujoeh* dan maulid.

Adapun yang menjadi motif kawan saya mengajak berdebat karena pada saat itu saya tidak lagi belajar di dayah dan sudah belajar di IAIN. Sampai dengan saat itu saya dianggap sebagai MD oleh kawan saya karena membaca buku, padahal saya sampai saat ini tidak pernah menjadi kader Muhammadiyah. Bahkan pada saat kuliah di IAIN, saya juga sempat aktif di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) yang berafiliasi dengan Nahdatul Ulama (NU). Adapun berbagai ritual seperti *tahlilan*, *maulid* dan *nujoeh*, meskipun saya kurang sepatok, jika mendapat undangan tetap saya hadir sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan sosial di kampung saya.

Bagi saya keharmonisan itu penting demi kenyamanan sosial. Namun demikian, ketika salah seorang anggota keluarga kami meninggal, kami sekeluarga tidak mengadakan *nujoeh*. Di kampung

saya, tidak *nujoeh* adalah sebuah tindakan yang tabu. Meskipun bagi masyarakat kampung saya terlihat aneh, tapi mereka masih mampu menghargai perbedaan, lagi pula kami sekeluarga selalu hadir ketika ada masyarakat yang membuat *nujoeh*. Di kampung, kami bisa hidup harmonis dan saling menghargai satu sama lain.

Seiring waktu bergulir, istilah MD bagi orang-orang yang tidak *nujoeh* pun berevolusi menjadi Wahabi. Istilah Wahabi ini tentunya lebih kelihatan sangar karena sering dikaitkan dengan berbagai aksi kekerasan dan terorisme. Istilah Wahabi di Aceh semakin populer pasca musibah gempa dan tsunami Aceh pada akhir Desember 2004.

Pada tahun-tahun berikutnya, kampanye anti-Wahabi terus digelorakan oleh sebagian kalangan di Aceh dengan memanfaatkan berbagai forum keagamaan, seperti pengajian, dakwah maulid dan khutbah Jumat. Seiring munculnya media sosial pada tahun 2000-an, kampanye anti-Wahabi di Aceh pun semakin marak. Pada saat itu, saya menyaksikan orang-orang yang dituduh sebagai Wahabi memilih diam seribu bahasa, “lemah tak berdaya dan tidak berkutik.” Mungkin mereka tidak ingin terlibat dalam polemik. Kondisi ini tentunya semakin memberi ruang kepada pihak-pihak yang anti-Wahabi (anti-perbedaan) untuk terus melakukan kampanye menolak Wahabi di tempat-tempat terbuka.

Aksi diam yang dilakukan oleh mereka yang dituduh sebagai Wahabi di Aceh mungkin bisa dimengerti, karena arus besar tidak bisa dilawan, dan melawan bisa mengakibatkan masalah semakin “runyam.” Artinya, mereka lebih memilih diam agar tidak muncul ketegangan. Akhirnya, Wahabi terus menjadi bulan-bulanan di Aceh. Siapa saja yang tidak turut dalam ritual *tahlilan*, *nujoeh* dan *maulid* langsung dituduh sebagai Wahabi. Tidak membaca *qunut* pada saat shalat Shubuh juga Wahabi. Belajar di sekolah-sekolah agama dan Perguruan Tinggi Islam

dituding sebagai Wahabi. Alhasil isu Wahabi pun semakin liar tak tentu arah. Dalam kondisi inilah, saya berusaha *ubena daya* (sebatas mampu) untuk mengisi ruang kosong guna mengimbangi serangan-serangan terhadap Wahabi yang wujudnya selalu saja abstrak dan bahkan bias.

Pada tahun 2011 saya mulai menulis beberapa artikel sederhana terkait Wahabi di beberapa media lokal, seperti Harian Aceh dan Harian Pikiran Merdeka. Beberapa kali saya juga sering menulis topik yang sama di media *Hidayatullah.com*. Beberapa tulisan saya tentang Wahabi di Harian Aceh saat itu (2011-2012) juga sempat ditanggapi oleh beberapa kalangan. Oleh sebagian kalangan, tulisan-tulisan saya tentang Wahabi disambut dengan *teumeunak* (makian) melalui kolom komentar di website Harian Aceh dan juga melalui kolom *sms* dalam Harian Aceh versi cetak.

Pada tahun 2015, gerakan anti-Wahabi di Aceh telah sampai pada titik klimaks dengan digelarnya Parade Aswaja di Banda Aceh. Aksi Parade Aswaja yang melibatkan seorang kader Nahdatul Ulama dari Jawa seolah menjadi pertanda bahwa keberadaan Wahabi di Aceh akan segera berakhir. Pasca aksi Parade Aswaja, gerakan “merebut” mesjid pun semakin bermunculan di beberapa daerah, di antaranya Mesjid Al-Izzah di Krueng Mane, Aceh Utara. Beberapa pihak yang menyebut diri insan dayah menginginkan mesjid-mesjid di Aceh diberlakukan tata cara ibadah sesuai dengan Mazhab Syafii yang disimbolkan dengan khatib pegang tongkat, azan Jumat dua kali dan khutbah diulang.

Menyikapi gerakan-gerakan tersebut, saya terus mencoba berbuat ala kadar guna mengimbangi isu-isu liar yang berkembang melalui tulisan-tulisan sederhana di beberapa media cetak dan online. Saya yakin bahwa apa yang saya lakukan tersebut tentunya tidak akan mampu mengubah keadaan, tapi setidaknya saya tidak memposisikan diri sebagai penonton yang hanya bisa menunduk atau bertepuk tangan

ketika *ukhuwah* itu “dirusak.”

Dalam buku ini, saya mengumpulkan kembali tulisan-tulisan yang tersebar di beberapa media tersebut agar mudah dibaca oleh generasi setelah kita – agar mereka tahu bahwa Aceh masih dalam proses menuju kedewasaan dalam beragama. Bagi anak-anak Aceh yang sempat menyaksikan kejadian-kejadian ini berlangsung, mungkin buku ini tidak terlalu penting. Dan buku ini akan menjadi penting bagi generasi yang lahir kemudian karena berisi beberapa catatan terkait fenomena “radikalisme” di Aceh.

Seperti telah disinggung di atas bahwa buku ini adalah kumpulan tulisan saya di beberapa media. Karena buku ini berisi kumpulan tulisan, maka tulisan yang saya rangkum dalam buku ini terdiri dari beragam topik, seperti fenomena aliran sesat, kekerasan terhadap tertuduh aliran sesat, berbagai tradisi yang dipertentangkan dan juga fenomena penolakan terhadap Wahabi di Aceh.

Karena buku ini berisi kumpulan tulisan, nantinya pembaca akan menemukan berbagai topik tulisan yang terkadang terkesan meloncat-loncat – dan kondisi ini tentunya tidak bisa dihindari. Ketika membaca buku ini, pembaca juga diajak untuk memutar kembali memori ke belakang ketika kejadian itu berlangsung. Dalam beberapa bagian tulisan, saya juga mencoba memberi catatan akhir (*end note*) terkait beberapa kejadian yang mungkin sudah hilang dari memori pembaca.

Secara umum, tulisan dalam buku ini sudah pernah dipublikasikan dalam beberapa media cetak dan online, baik di Aceh dan juga media di luar Aceh. Sebagiannya juga sudah pernah diposting dalam blog pribadi penulis di *patahkekeringan.blogspot.com* dan *khairilmiswar.com*. Hanya bagian pendahuluan dari buku ini yang

belum pernah dipublikasikan.

Tulisan-tulisan dalam buku ini sudah pernah diterbitkan di Harian Aceh, Harian Pikiran Merdeka, Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada Medan, Majalah Santunan dan Tabloid Pikiran Merdeka (media cetak) dan *hidayatullah.com*, *acehtraffic.com*, *atjehlink.com*, *wartaaceh.com*, *kompasiana.com*, *rubric kupi beungoh serambinews.com* dan *republika.co.id* (media online).

Sebagai sebuah buku yang berisi kumpulan tulisan, tentunya tujuan penulisan sangat tergantung pada topik yang dibahas. Sebagian tulisan dalam buku ini dimaksudkan untuk menyikapi berbagai isu keagamaan yang berkembang di Aceh, dan sebagian lainnya ditujukan sebagai jawaban kepada pihak-pihak yang melancarkan isu-isu liar terhadap Wahabi melalui media sosial.

Buku ini bukanlah buku ilmiah murni yang dimaksudkan untuk menjawab berbagai persoalan keilmuan, tidak dimaksudkan untuk menguji teori atau pun melahirkan sebuah teori baru. Buku ini adalah kumpulan tulisan yang mencatat berbagai fenomena sosial keagamaan di Aceh, khususnya terkait gerakan anti-Wahabi yang secara umum bersifat deskriptif-kritis. Dengan demikian, dalam penulisan artikel-artikel dalam buku ini saya tidak terikat dengan metode atau pun pendekatan tertentu yang lazim digunakan dalam tradisi penelitian ilmiah.

Namun demikian, dalam beberapa tulisan buku ini saya cenderung menggunakan sudut pandang sosiologis untuk menganalisis berbagai fenomena yang terjadi. Sebagian tulisan lainnya saya gunakan pendekatan teologi-normatif, khususnya dalam pembahasan tentang beberapa ritual keagamaan yang diperdebatkan masyarakat Aceh. Adapun tulisan tentang biografi singkat Abu Indrapuri ditulis dengan

bersandarkan kepada beberapa literatur yang ada.

Penting pula ditegaskan bahwa kumpulan tulisan dalam buku ini lebih bersifat kajian ilmiah populer dan banyak menggunakan redaksi bahasa media.

Sistematika penyusunan bab-bab dalam buku ini sepiantas juga terlihat tidak beraturan dan sering didapatkan pengulangan dalam beberapa bagian. Dan ini adalah salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi penulis ketika tulisan-tulisan yang berserak itu disatukan dalam satu buku. Namun demikian, untuk mempermudah dalam membaca, saya membagi buku ini dalam beberapa bab dengan memilih tulisan sesuai topik yang saya anggap cocok dan relevan.

Karena buku ini berisi kumpulan tulisan, pembaca tidak perlu membaca buku ini sesuai urutan bab. Artinya, pembaca boleh saja mulai membaca dari bab terakhir, boleh membaca dari pertengahan bab dan boleh pula membaca dengan pola meloncat antar bab.

Bagian *pertama* dalam buku ini mencoba memberi penjelasan ringkas tentang “kenapa” dan “untuk apa” saya menulis buku ini serta sedikit keterangan “dari mana” tulisan ini berasal. Dalam bab pertama saya juga memberikan sedikit gambaran tentang “bagaimana” saya menyusun buku ini.

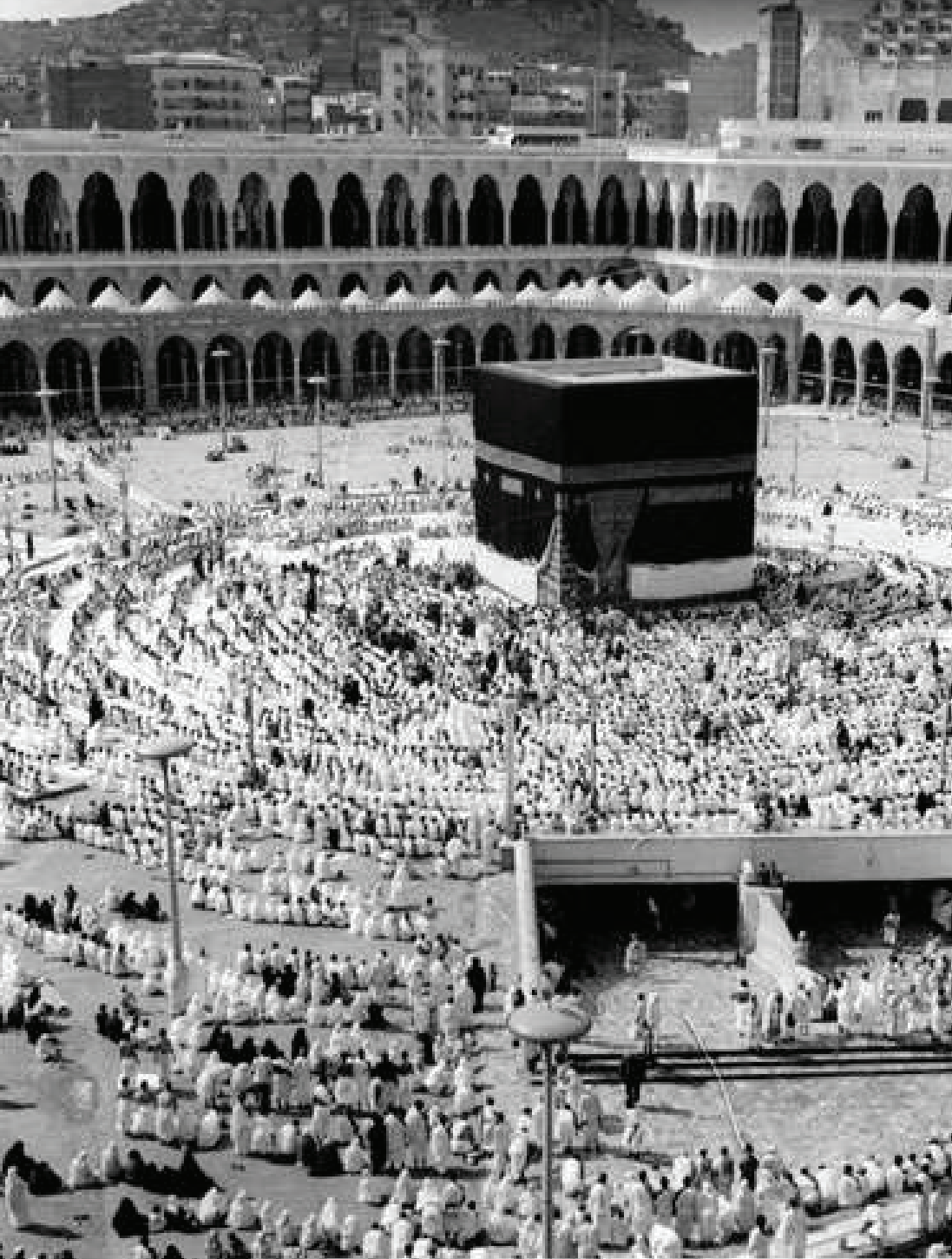
Bagian *kedua* menjelaskan tentang terminologi sesat di Aceh dan juga fenomena aliran sesat yang sempat menghebohkan Aceh beberapa tahun terakhir. Bagian *ketiga*, memuat berbagai artikel terkait isu-isu Wahabi dan juga stigma sesat terhadap Wahabi, khususnya isu-isu yang berkembang di Aceh. Bagian *keempat*, berisi beberapa artikel yang berkaitan dengan fenomena penolakan Wahabi dan juga upaya monopoli mazhab di Aceh yang berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Bagian *kelima*, masih membahas isu-isu Wahabi dan

PROLOG

juga beberapa perbincangan terhadap Wahabi di Aceh serta gerakan penolakan Wahabi oleh Aswaja Aceh.

Bagian *keenam* buku ini saya isi dengan biografi singkat seorang ulama Aceh yang dalam banyak literatur sering disebut-sebut sebagai ulama “Wahabi.” Saya merasa biografi ringkas ini sangat penting untuk memberi penyadaran kepada masyarakat Aceh, bahwa pemikiran keagamaan yang sering diidentikkan dengan pemikiran Wahabi sebenarnya sudah lama berkembang di Aceh dan juga dianut oleh beberapa ulama besar Aceh.

Bagian terakhir memuat coretan saya tentang aksi “perebutan” Mesjid Baiturrahman yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengklaim diri sebagai Aswaja.





BAGIAN KESATU:

SIAPA SESAT ?

TERMINOLOGI SESAT DI ACEH

Bagai jamur di musim hujan, aliran sesat di Aceh terus bermunculan, entah hanya sekedar klaim atau memang fakta. Telah pula menjadi pengetahuan umum, bahwa masyarakat Aceh memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap istilah “sesat”. Kasus terbaru yang sempat membuat seantero Aceh terhenyak adalah dugaan aliran sesat yang melibatkan Tgk. Ahmad Barmawi Cs di Aceh Selatan. Terbunuhnya seorang caleg dari salah satu parlok di musim kampanye 2014 lalu akibat ulah Barmawi Cs juga telah melahirkan problema tersediri dalam penyelesaian kasus aliran sesat di tengah masyarakat.

Tidak hanya itu, aksi bentrok antara personil TRA dan masyarakat di Laweung Pidie¹ beberapa waktu lalu yang disinyalir terkait dengan dugaan aliran sesat juga telah turut menambah rentetan

aksi kekerasan di Aceh. Di samping itu, baru-baru ini MPU Aceh juga telah mengeluarkan fatwa sesat terhadap pengajian kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya, Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie.²

Setelah mencermati berbagai fenomena aliran sesat yang marak dalam beberapa tahun terakhir, penulis melihat bahwa terminologi “sesat” di Aceh telah menjadi kabur, bias, multi tafsir dan bahkan semakin liar. Dalam sebagian kasus, perbedaan *furu'iyah* dalam agama juga menjadi salah satu faktor yang mendorong timbulnya “klaim” sesat terhadap kelompok tertentu. Adalah fakta yang tak perlu ditutupi, bahwa di Aceh sendiri telah lahir dan berkembang dua pemikiran keagamaan, di mana antara satu dan lainnya memiliki corak yang berbeda. Dua corak pemikiran tersebut diwakili oleh Nahdatul Ulama (NU/Nahdiiyin) dan Muhammadiyah yang lazim disebut dengan MD atau dalam situasi tertentu terkadang juga disebut “Wahabi”. Realitas lainnya yang sulit dipungkiri, bahwa perbedaan corak pemikiran tersebut telah berimplikasi pada lahirnya perbedaan dalam tata cara ibadah. Ekseks lainnya adalah timbulnya saling rebut “kekuasaan” dan pengaruh, di mana sebagian mesjid “dikuasai” oleh Nahdiiyin, dan sebagian lainnya “dikuasai” oleh MD.

Tragisnya lagi, perbedaan pemahaman agama antara NU dan MD juga telah mengakibatkan kedua pihak saling “cap sesat” satu sama lain. Kondisi ini akan semakin parah ketika di sebagian daerah muncul “aliran sesat”, maka terminologi sesat pun menjadi bias dan semakin “menggelikan”. Akhirnya konflik di tengah masyarakat pun semakin sulit untuk dihindari. Di sisi lain, kemunculan aliran sesat di Aceh juga sering ditanggapi dengan aksi kekerasan, semisal pembakaran, pemukulan dan bahkan pembunuhan.

Berawal dari berbagai fenomena yang berkembang di Aceh akhir-akhir ini, penulis merasa “tertantang” untuk ikut nimbrung guna

membahas isu sensitif ini. Menurut hemat penulis, langkah pertama yang harus ditempuh dalam menyikapi fenomena aliran sesat adalah melakukan “redefinisi” tentang terminologi sesat agar pemaknaannya tidak menjadi bias dan kabur sehingga menimbulkan delusi (sesat pikir) di tengah masyarakat. Redefinisi ini juga diperlukan agar kita terhindar dari kesalahan bertindak dan berguna pula untuk “meredam” motivasi sebagian pihak dalam menciptakan stigma-stigma buruk terhadap sesama muslim, mengingat setiap mukmin itu bersaudara (*ikhwah*).

Selama ini, ada dua kata yang sering disandingkan dengan kata sesat, yaitu aliran dan paham, sehingga muncul-lah istilah aliran sesat dan paham sesat. Ahmad Jaiz (2012), mengemukakan bahwa kata aliran dan paham, meskipun tampak sama, namun kedua kata tersebut memiliki makna yang berbeda. Paham adalah sebuah pemikiran yang menganut prinsip tertentu dan memiliki pengikut yang kritis. Sebuah paham tidak memiliki pemimpin layaknya aliran, namun mereka memiliki seorang figur sentral. Di antara paham yang telah berkembang di Indonesia adalah; Sekulerisme, Liberalisme, Pluralisme dan Humanisme.

Adapun aliran, masih menurut Ahmad Jaiz, adalah sebuah pemikiran yang terorganisir dengan baik dan memiliki seperangkat aturan yang diikuti oleh setiap anggotanya. Sebuah aliran memiliki pemimpin dan anggotanya adalah orang-orang yang telah terdoktrin pikirannya serta anti kritik dan dogmatis. Di antara aliran yang telah berkembang di Indonesia adalah: Syi'ah, Ahmadiyah, Baha'i, Millata Abraham, Lia Eden dan Laduni.

Aliran Sesat

Bruinessen, seorang orientalis asal Belanda, dalam Jurnal Ulumul Quran, mengemukakan bahwa aliran sesat (sempalan) adalah

sebuah gerakan menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Kemunculan aliran sesat (sempalan) adalah sebagai sebuah bentuk penolakan terhadap faham dominan dan merupakan bentuk protes sosial atau politik. Menurut Bruinessen, sebelum menentukan aliran sesat, terlebih dahulu harus didefinisikan mainstream ortodoks.

Bertolak dari paparan Bruinessen, kiranya dapat dipahami bahwa penyimpangan yang dilakukan oleh aliran sesat hanya bisa diukur dengan terlebih dahulu memahami konsep-konsep dasar yang dianut oleh mainstream ortodoks. Khususnya di Aceh dan di dunia Islam pada umumnya, telah jamak dipahami bahwa yang menjadi aliran arus utama (maentream) adalah Ahlussunnah wal Jama'ah.

Siapa Ahlussunnah wal Jama'ah?

Jika dirujuk dalam literatur teologi, term Ahlussunnah wal Jama'ah sering dilekatkan dan bahkan di-indentikkan dengan pemikiran Asy'ariyah yang digagas oleh Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidiyah yang didirikan oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Namun menurut hemat penulis, pembatasan istilah Ahlussunnah wal Jama'ah hanya kepada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dilakukan oleh sebagian pihak (ulama dan intelektual Islam) adalah kurang tepat, untuk tidak menyebut keliru. Jika penyebutan Ahlussunnah wal Jama'ah hanya terbatas pada aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah, lantas bagaimana dengan umat Islam yang hidup sebelum kemunculan kedua aliran tersebut? Apakah mereka tidak tergolong ke dalam Ahlussunnah wal Jama'ah?

Di samping dua aliran tersebut di atas, telah pula diketahui bahwa dalam dunia Islam juga pernah tumbuh dan berkembang aliran Salafiyah yang dipopulerkan oleh Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dari Damaskus. Aliran Salafiyah dimaksud juga sempat dikampanyekan kembali oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabiya. Dalam

berbagai literatur disebutkan bahwa dalam bidang fiqh, aliran Salafiyah berafiliasi dengan Mazhab Hanbali. Adapun Aliran Asy'ariyah pemahaman fiqhnya lebih banyak merujuk kepada Mazhab Syafi'iyah, sedangkan Aliran Maturidiyah lebih cenderung kepada Mazhab Hanafiyah.

Di sisi lain, Rasul sebagai pembawa risalah juga telah menjelaskan dalam berbagai hadits, bahwa beliau telah meninggalkan dua perkara kepada umatnya berupa Alquran dan Sunnah, sehingga siapapun yang berpegang kepada keduanya, maka ia tidak akan tersesat selamanya. Dalam hadits lain, ketika ada sahabat yang menanyakan tentang siapa jamaa'ah yang dimaksud dalam hadits, Rasul menjawab bahwa mereka adalah siapa saja yang berada di atas jalan Nabi dan sahabatnya (ma ana 'alaihi wa ash-habi).

Dari ulasan singkat tersebut, dapat dipahami bahwa Ahlussunnah wal Jama'ah adalah siapa saja yang berpegang teguh kepada Alquran dan Hadits serta mengikut ajaran yang diamalkan oleh sahabat (salafusshalih). Penentuan Ahlussunnah wal Jama'ah tidak-lah dilihat dari golongan mana ia berasal, tapi lebih tertumpu pada ajaran apa yang diamalkan. Dengan demikian Ahlussunnah wal Jama'ah tidak hanya terbatas kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah saja, tetapi juga termasuk aliran Salafiyah di dalamnya.

Perbedaan Mazhab

Sebagaimana telah kita ketahui bahwa dalam dunia Islam juga telah berkembang berbagai mazhab fiqih. Di antara mazhab mu'tabar adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah. Keempat mazhab tersebut juga masuk dalam lingkup mazhab Ahlussunnah wal Jama'ah. Perbedaan yang terjadi dalam mazhab tersebut hanyalah perbedaan ijthadiyah dalam menafsirkan masalah furu'iyah sehingga tidak-lah

dapat dijadikan alasan untuk saling “menyesatkan”. Perselisihan antar sesama muslim hanya akan membuat kita menjadi lemah dan akhirnya menjadi sasaran empuk para missionaris-orientalis anti Islam untuk menerapkan praktik *divide et empera*.

Di akhir tulisan ini penulis mengajak kita semua agar tidak terburu-buru menyandangkan cap sesat kepada sesama muslim, kecuali jika telah terbukti secara sah bahwa mereka menganut aliran sesat. Terminologi sesat juga harus dipahami secara benar dengan melakukan tabayyun sebelum vonis dijatuhkan. Khususnya di Aceh, penetapan kriteria sesat berada di tangan MPU sesuai dengan Qanun No. 11 tahun 2002. Adapun vonis sesat merupakan tugas Mahkamah Syar’iyah, setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan dan proses peradilan. Adalah tidak adil jika vonis sesat dijatuhkan hanya melalui kajian tanpa proses peradilan. Wallahu A’lam.

[Harian Waspada Medan, Selasa, 21 Oktober 2014]

HABIS SESAT TERBITLAH STRES

Secara sederhana aliran sesat dapat diartikan sebagai sebuah aliran atau sekte dalam suatu agama yang sebagian atau seluruh ajarannya bertentangan dengan aturan dasar agama tersebut. Dalam Islam, aliran sesat ini sering disebut dengan istilah *firqah dhallah*. Sebenarnya istilah aliran sesat bukanlah hal baru dalam Islam. Salah satu aliran sesat terbesar yang masih eksis sampai sekarang adalah Ahmadiyah.

Pelopop Aliran Sesat

Dalam catatan sejarah disebutkan bahwa aliran dalam Islam pertama kali muncul setelah terbunuhnya Khalifah Usman Bin Affan R.a. Pada saat itu aliran tersebut masih dalam bentuk aliran politik, bukan aliran agama. Di antara aliran-aliran besar yang lahir kala itu adalah Khawarij, Syi'ah dan Mu'tazilah. Pada perkembangannya kemudian, semua aliran tersebut berubah dari aliran politik menjadi aliran agama

(sekte) dengan lahirnya faham-faham yang saling bertentangan satu sama lain. Adapun ciri-ciri utama aliran khawarij adalah kegemaran mereka dalam mengkafirkan orang Islam hanya karena orang tersebut melakukan dosa besar. Aliran ini juga mengkafirkan para shahabat Nabi Saw seperti Ali Bin Abi Thalib, Mu'awiyah, Amru Bin Ash, Abu Musa Al-Asy'ari dan sahabat-sahabat lain yang terlibat dalam peristiwa *tahkim*.

Aliran Syi'ah adalah aliran yang berlebihan memuja Ali Bin Abi Thalib r.a bahkan sebagian dari mereka ada yang meyakini bahwa malaikat Jibril as tersalah dalam menyampaikan wahyu yang seharusnya diturunkan kepada Ali bukan kepada Nabi Muhammad Saw. Aliran ini dilahirkan oleh seorang tokoh Yahudi dari Yaman yang bernama Abdullah Bin Saba'. Ciri-ciri khusus dari aliran ini adalah mereka meyakini bahwa imam-imam mereka *ma'sum* (terjaga dari kesalahan). Mereka juga percaya bahwa imam-imam mereka mengetahui hal-hal gaib.

Aliran *Mu'tazilah* adalah aliran yang lahir di kota Basrah yang dipelopori oleh Wasil Bin `Ata. Salah satu keyakinan menyimpang dari aliran ini adalah mereka menafikan sifat-sifat Allah Swt, mereka juga memfatwakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Aliran ini juga dikenal dengan aliran rasionalis. Selain dari tiga aliran tersebut masih banyak lagi aliran lain seperti *Murji'ah*, *Jabariah*, *Najariyah* dan *Musyabbihah*. Dari tujuh *firqah* tersebut kemudian lahir beberapa aliran lagi yang jumlah seluruhnya berkisar 73 aliran atau lebih.

Ciri-Ciri Umum Ahlusunnah Waljama'ah

Secara singkat *Ahlusunnah Waljama'ah* dapat diartikan sebagai sebuah golongan yang tetap berpegang teguh dengan *aqidah* Nabi Saw dan para shahabatnya *radhiallahu 'Anhum*. Siapa saja yang

masih setia berpegang teguh kepada Alquran dan Sunnah Nabi Saw serta *atsar* para shahabat dapat dipastikan bahwa dia adalah *Ahlusunnah Waljama`ah*.

Nabi Saw pernah bersabda dalam sebuah hadits yang bersumber dari Irbadh Bin Sariyah dan diriwayatkan diantaranya oleh Imam Ahmad Bin Hambal dan Abu Daud yang berbunyi: “*Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Swt, dengarkan dan patuhilah walaupun kalian diperintah oleh seorang budak Habsyi. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kamu akan menyaksikan perselisihan yang banyak. Maka berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah khulafaurrasyidin yang diberi petunjuk setelahku. Berpegang teguhlah dengannya dan gigitlah dengan gigi gerahammu dan jauhilah perkara-perkara yang baru, sesungguhnya setiap perkara baru itu adalah bid`ah.*” Dalam riwayat yang lain disebutkan “*dan setiap bid`ah adalah sesat, setiap yang sesat tempatnya di neraka.*”

Dalam hadits tersebut Nabi Saw memerintahkan kita untuk tetap berpegang kepada Alquran dan Sunnah serta *atsar* para shahabat. Nabi Saw juga mengingatkan kita agar tidak terpengaruh dengan hal-hal yang baru (yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan para shahabat) agar kita tidak tersesat. Nabi Saw juga pernah bersabda bahwa umat Islam akan berpecah menjadi 73 aliran, semuanya masuk neraka kecuali *Ahlusunnah Waljama`ah*. Agar kita tidak mudah terpengaruh dengan aliran sesat kita dituntut untuk benar-benar memahami apa itu *Ahlussunnah Waljama`ah*. Pengetahuan tentang keyakinan *Ahlussunnah Waljama`ah* sangat penting karena kita mustahil menuduh orang lain sesat sedangkan kita sendiri tidak tahu di mana letak kebenaran diri kita. Setelah kita benar-benar faham apa itu kebenaran maka sangat mudah bagi kita untuk mengenal apa itu kesesatan. Bagaimana kita bisa membedakan warna kuning dan ungu jika kita sendiri buta warna?

Saat ini, hampir semua media lokal yang ada di Aceh cuma mengabarkan tentang penangkapan dan kecaman terhadap pelaku aliran sesat dan sampai hari ini belum ada penjelasan yang memadai baik oleh pihak MPU, dayah dan juga pakar hukum Islam tentang apa itu *i'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah*, padahal penjelasan tersebut sangat penting. Dalam tulisan singkat ini saya akan mencoba memaparkan beberapa keyakinan *Ahlussunnah Waljama'ah* yang saya kutip dari beberapa sumber rujukan di antaranya *Kitab Fathul Majid Syarh Kitabut Tauhid* karangan Syaikh Abdurrahman Bin Hasan Alu Asy-Syaikh yang *dita'liq* oleh Syaikh Abdul Aziz Bin Abdullah Bin Baaz. Di antara keyakinan *Ahlussunnah Waljama'ah* adalah sebagai berikut:

Pertama, meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah Swt dan memurnikan ibadah hanya kepada Allah Swt serta tidak menyekutukanNya dengan sesuatu apapun. Kita dituntut untuk tidak meminta kepada selain Allah ; memakai jimat, percaya kepada dukun dan meminta berkah kepada kubur adalah syirik.

Kedua, Mengakui bahwa Muhammad Saw adalah hamba dan rasul Allah Swt yang diutus untuk seluruh umat manusia dan beliau Saw adalah penutup para Nabi dan Rasul; tidak ada Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad SAW. Faham Ahmadiyah sesat karena meyakini Mirza Ghulam Ahmad sebagai Nabi, demikian juga dengan *Millata Abraham* dikatakan sesat karena meyakini Ahmad Mushaddeq sebagai Nabi.

Ketiga: Tidak menghina dan mencaci shahabat Nabi Saw. Untuk itu, kita mengharapkan kepada para guru, ustaz dan teungku untuk tidak lagi mempopulerkan cerita Tsā'labah, karena Tsā'labah Bin Hathib Al-Anshary adalah seorang shahabat Rasulullah SAW yang ikut dalam perang badar seperti dijelaskan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam *Al-Ishaabah fi Tamyiz Ash-Shahabah*. Allah SWT telah memaafkan dosa orang-orang yang ikut dalam perang badar baik dosa

yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Rasulullah SAW juga bersabda: “*Tidak akan masuk neraka seseorang yang ikut serta dalam perang badar*” (Hadits riwayat Ahmad).

Keempat, menjauhi *bid'ah*. Tentang *bid'ah* banyak sekali hadits Nabi yang melarang kita untuk mengerjakannya. Nabi Saw telah bersabda bahwa setiap *bid'ah* adalah sesat. Secara singkat *bid'ah* dapat diartikan sebagai sebuah amalan yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Saw. Khususnya di Aceh perilaku *bid'ah* ini sudah merajalela dan mengakar.

Kelima, percaya kepada qadha dan qadar, azab kubur, syurga, neraka dll. Masih banyak lagi keyakinan *Ahlussunnah Waljama'ah* yang tidak mungkin semuanya kita uraikan di sini. Beberapa poin di atas cukuplah sebagai gambaran umum tentang keyakinan *Ahlussunnah Waljama'ah*. Untuk lebih jelas silahkan mempelajarinya dalam kitab-kitab Tauhid baik yang ditulis oleh Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab atau ulama-ulama lainnya.

Sikap Terhadap Aliran Sesat

Mengutip pernyataan ketua PGRI Aceh di Harian Aceh (Selasa, 5 April 2011) yang menyatakan; “kita tidak mau keyakinan anak didik kita dirusak gara-gara aliran sesat, kita harus menolaknya.” (Maaf) menurut saya pernyataan seperti ini justru menjadi bukti tentang lemahnya ketekunan kita dalam mendidik anak-anak. Sebenarnya sekolah dan dayah harus lebih serius mendidik anak-anak jangan sampai kalah dengan aliran sesat. Jika ternyata ada anak didik kita yang terpengaruh dengan aliran sesat, kita jangan hanya mampu menyalahkan aliran sesat lantas kita melupakan kelalaian kita. Kita harus menyadari bahwa kurikulum kita lemah sehingga dapat disaingi oleh kurikulum aliran sesat. Coba bayangkan, kita punya gedung tempat

belajar, kita punya buku yang cukup bahkan lebih dan kita juga punya guru dan teungku-teungku yang profesional, kita juga bisa mengajar bebas di tempat terbuka tanpa diawasi. Bandingkan dengan aliran sesat, mereka tidak punya tempat khusus untuk mengajarkan ajarannya, mereka tidak punya cukup buku, mereka juga tidak punya guru yang profesional, buktinya banyak pentolan aliran sesat yang tertangkap dan bahkan sebagian dari mereka tidak begitu faham dengan ajaran sesatnya. Mereka juga tidak bisa mengajar terang-terangan seperti kita, mereka harus mencari tempat yang tersembunyi agar tidak diawasi dan ditangkap oleh masyarakat. Lantas kenapa kita bisa dikalahkan oleh mereka? Mari kita berfikir jernih, apa pantas seorang tentara yang gagah dan bersenjata lengkap (guru/ustaz/teungku) dikalahkan oleh seorang preman pasar (aliran sesat) yang sama sekali tidak punya senjata? *Han ek takhem.*

Jika kita tidak ingin anak-anak kita terluka akibat terkena peluru di medan perang, solusinya adalah memakaikan baju besi kepada mereka, bukan sebaliknya malah menyalahkan peluru. Jika kita tidak ingin anak-anak kita tersesat, solusinya adalah kita harus serius menanamkan iman dan aqidah kepada mereka, tidak cukup dengan mengutuk aliran sesat. Jika pendidikan aqidah tidak ditanamkan kepada anak sejak dini, percayalah tanpa aliran sesatpun anak-anak kita akan sesat dengan sendirinya.

Namun demikian saya sangat sepakat dengan pernyataan Sekjend HUDA di media Harian Aceh yang mengusulkan agar pelaku aliran sesat dihukum mati. Sah-sah saja jika ada pihak yang menginginkan para pelaku aliran sesat dihukum mati. Namun kita harus adil pada saat menjatuhkan hukuman tersebut. Diakui ataupun tidak, di Aceh masih banyak pelaku-pelaku sesat yang aktivitasnya dilakukan oleh pribadi-pribadi masyarakat. Sampai sekarang masih

banyak masyarakat kita yang menggunakan jimat, meminta bantuan dukun untuk mencari barang hilang, *peuglah kaoy* di kuburan orang alim dll. Apa perilaku ini tidak sesat?

Pengajian Alquran Hadits sesat?

Dari beberapa nama aliran sesat yang diumumkan MPU Aceh salah satunya adalah pengajian Alquran dan Hadits. Pihak MPU seharusnya menjelaskan di mana letak kesesatan pengajian Alquran dan Hadits agar tidak terjadi salah faham di tengah masyarakat. Jika membaca sepintas terkesan bahwa pihak MPU melarang belajar Alquran dan Hadits. Di sini butuh penjelasan apakah aliran Quran Hadits (nama aliran) yang sesat atau pekerjaan belajar quran hadits? Jangan sampai masyarakat dibingungkan dengan pernyataan yang tergolong *syubhat* dan tidak jelas seperti ini. Pihak MPU harus segera memperjelas persoalan ini jangan sampai menjadi masalah baru di tengah masyarakat. Aneh memang jika MPU menyesatkan orang yang belajar Quran dan Hadits. Jika belajar Quran dan Hadits itu sesat lantas apa yang harus kita pelajari? Apa kita harus belajar Injil dan Taurat supaya tidak sesat? *Allahu Akbar*. Ada-ada saja MPU. *Wallahu A 'lam*.

[*Harian Aceh*, 09 April 2011]

BEDA BELUM TENTU SESAT, (TETAPI) SESAT SUDAH PASTI BEDA

Setelah saya membaca Fatwa MPU Aceh di salah satu Harian lokal di Aceh (Jumat, 11/3/2011) tentang ciri-ciri aliran sesat, secara prinsip saya sangat sepakat untuk menumpas aliran sesat sampai ke akar-akarnya. Namun dalam fatwa tersebut saya menemukan satu poin yakni poin ke 3 yang berbunyi; “meyakini atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan iktikad *Ahlussunnah wal Jamaah*.” Menurut saya, pihak MPU harus menjelaskan secara detil bagaimana yang dimaksud dengan *Aqidah Ahlussunnah Waljama'ah* sehingga masyarakat benar-benar faham dan tidak salah dalam bertindak. Penjelasan ini sangat penting karena pengikut aliran sesat juga bisa mengaku sebagai *Ahlussunnah Waljama'ah*. Bahkan saya berani menebak banyak

masyarakat kita yang tidak faham apa itu *Ahlussunnah Waljama`ah*. Bagaimana mereka bisa mengenali para pengikut aliran sesat sedangkan mereka sendiri tidak faham tentang *i`tiqad Ahlussunnah Waljama`ah*.

Di poin terakhir fatwa MPU Aceh tentang ciri-ciri aliran sesat (Poin 13) ; “Mengafirkan sesama muslim tanpa dalil *syar’i* (kuat) yang sah, seperti mengafirkan muslim hanya karena bukan merupakan anggota kelompoknya.” Saya sangat sepakat dengan poin ini. Tetapi kita juga berharap kepada masyarakat untuk tidak mudah-mudah menuduh orang lain sesat sebelum ada pembuktian dari instansi terkait seperti Mahkamah Syar’iyah. Menuduh orang lain sesat sedangkan kesesatannya belum terbukti sama saja dengan mengkafirkan orang lain. Saya teringat sebuah hadits Nabi Saw yang bersumber dari Abu Dzarr r.a dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya; “*Barang siapa yang memanggil seseorang dengan sebutan kafir, atau menyebutnya sebagai musuh Allah, sedangkan dia (orang tersebut) bukan kafir, maka kekafiran tersebut akan kembali kepadanya (si penuduh).*”

Hadits tersebut menjadi *hujjah* bagi kita semua untuk tidak sembarangan menuduh orang lain sesat. Saya juga sangat sepakat dengan tulisan Prof. DR. Alyasa’ Abubakar di salah satu media lokal di Aceh tgl 14/03/2011 dengan tajuk “Mengenali Aliran Sesat”. Dalam tulisan tersebut, Pak Alyasa’ menyebutkan bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran, sehingga berhak menyalahkan semua pendapat lain. Poin ini sangat penting untuk dicermati oleh masyarakat dan tokoh-tokoh agama yang ada di Aceh. Jangan sampai ada pihak-pihak yang memanfaatkan isu aliran sesat untuk melakukan fitnah kepada orang lain. Jangan sampai hanya karena ada sedikit perbedaan dalam ibadah lantas dituduh sesat.

Saya pernah mendengar masyarakat di beberapa tempat di kabupaten Bireuen yang dengan mudah menyesatkan orang lain hanya

karena orang tersebut pada saat shalat shubuh tidak membaca doa qunut. Demikian juga ketika ada orang yang tidak membuat acara *Nujoeh* (kenduri hari ketujuh kematian) juga sering divonis sesat. Fenomena ini sangat berbahaya dan akan membuat masyarakat terpecah belah.

Kembali kepada tulisan Pak Alyasa', bahwa dalam Islam tidak ada kelompok yang berhak memonopoli kebenaran. Jika ada pihak yang mudah menuduh orang sesat hanya karena ada sedikit perbedaan dalam amalan, berarti dia telah memonopoli kebenaran dan menganggap hanya dialah yang paling benar sedangkan orang lain adalah sesat. Dalam tulisan tersebut, Pak Alyasa' menyatakan bahwa masyarakat atau orang secara pribadi tidak boleh menghakimi serta menghukum seseorang yang tidak (belum) dinyatakan bersalah oleh pengadilan. Kita berharap kepada masyarakat untuk tidak main hakim sendiri pada saat ada orang yang terindikasi mengikuti aliran sesat. Jika memang ada orang yang kita curigai sebagai anggota aliran sesat yang masuk ke kampung kita, lebih baik masyarakat segera melaporkan kepada pihak terkait untuk diamankan dan diperiksa. Kalau bisa masyarakat jangan melakukan penggrebekan atau penjemputan paksa terhadap pelaku aliran sesat karena ditakutkan akan terjadi kekerasan yang bisa menghilangkan nyawa orang lain. Kekerasan tidak dapat dihindari jika masyarakat memaksa melakukan penggrebekan. Kita berharap agar masyarakat bisa bersabar dan tidak mengedepankan emosi dalam menyikapi penyebaran aliran sesat. Kita harus sadar bahwa para pelaku aliran sesat tersebut juga masyarakat dan saudara-saudara kita yang mungkin tersilap hingga terjerumus ke dalam aliran sesat.

Selanjutnya kepada para teungku dan ustaz kita berharap agar turut serta memberi perhatian terhadap maraknya aliran sesat di Aceh. Para teungku dan ustaz dituntut untuk lebih aktif dalam mendidik masyarakat terutama masalah *'aqidah* agar mereka tidak mudah

terjerumus ke dalam aliran sesat. Pendidikan masalah *'aqidah* sangat penting jika hendak memberantas aliran sesat. Diakui ataupun tidak, masih ada masyarakat kita yang tidak mengenal rukun iman, tidak tahu apa itu Islam sehingga mereka mudah dipengaruhi.

Mari kita saling mengingatkan kepada saudara-saudara kita untuk mempelajari ilmu agama, sehingga mereka faham apa itu *Ahlussunnah waljama'ah* sehingga mereka tidak mudah terjerumus kepada *'aqidah* sesat. Kita juga berharap kepada para teungku dan ustaz untuk menjelaskan ilmu agama kepada masyarakat sedetil-detilnya, sehingga tidak ada masyarakat yang mengklaim orang lain sesat hanya karena ada sedikit perbedaan seperti saya sebutkan di atas.

Jika ada tata cara ibadah yang kadang-kadang masuk dalam lingkup *khilafiyah* (seperti *qunut* dan tidak *qunut*) harus dijelaskan bahwa keduanya berada dalam lingkup *Ahlussunnah waljama'ah*. Demikian juga dengan perbedaan mazhab harus dijelaskan kepada masyarakat walaupun mayoritas masyarakat Aceh menganut Mazhab Syafi'i tetapi jangan sampai menafikan mazhab lain (Hanafi, Maliki dan Hambali). Perlu dijelaskan juga kepada masyarakat bahwa berbeda mazhab tidak bisa dikategorikan sesat. Siapa tahu di antara kita ada yang menganut mazhab Hambali atau Maliki, jangan sampai mereka divonis sesat oleh masyarakat karena ada sedikit perbedaan dalam ibadah. Perlu kita fahami bahwa tidak semua yang berbeda itu sesat, tetapi yang sesat itu sudah pasti berbeda.

Sebagai contoh kecil ada mazhab yang menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika *tasyahud* dalam shalat dan ada juga mazhab yang tidak mengerak-gerak jari. Apakah pengikut mazhab yang mengerak jari tersebut bisa kita tuduh sesat karena berbeda dengan mazhab yang kita anut? Semudah itukah kita menyesatkan orang? Saya bukannya hendak menjelaskan masalah fiqih di sini, tetapi saya kira hal-hal

SIAPA SESAT?

semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari para teungku dan ustaz agar masyarakat kita faham dan tidak semudahnya menyesatkan orang lain. Apalagi sekarang sedang gencar-gencarnya isu aliran sesat. Saya yakin ada oknum-oknum yang akan memanfaatkan momen ini untuk memecah belah umat Islam. Jangan sampai tujuan kita untuk membasmi aliran sesat malah yang terjadi sebaliknya yakni fitnah memfitnah sesama *Ahlussunnah*.

Di akhir tulisan ini saya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi penyebaran aliran sesat di Aceh. Jangan sampai terjadi kekerasan di dalam masyarakat. Kita semua membenci aliran sesat, tetapi kita tidak boleh mengedepankan emosi dan hawa nafsu. Semoga Allah Swt senantiasa merahmati kita semua. *Wallahu 'Alam*.

[*Harian Aceh*, 25 Maret 2011]

AGAR PENULIS JANGAN TERSESAT

(Menanggapi Tulisan Aria Sandra;
“ACEH DALAM BIDIKAN MISIONARIS”³)

Menarik sekali membaca tulisan sahabat kita Aria Sandra (AS) di Media Serambi Indonesia (Rabu, 11/09/2013) dengan tajuk “*Aceh dalam Bidikan Misionaris*”. Dalam tulisannya tersebut AS terlihat begitu bersemangat dalam membeberkan serentetan informasi terkait aksi Kristenisasi yang terjadi di Aceh baru-baru ini. AS juga mengisahkan bahwa aksi Kristenisasi yang beliau (AS) istilahkan dengan “Gerilya Salib” di Aceh, bukan hanya terjadi pasca tsunami 2004, tapi aksi tersebut telah muncul jauh sebelumnya – yaitu ketika para penjajah memasuki tanah Aceh. Menurut AS, Aceh adalah benteng Islam terkuat di seluruh persada Nusantara sehingga para armada salib tidak mampu menaklukkan Aceh. AS juga mengemukakan bahwa dalam peta penyebaran salib, Aceh diberi tanda garis hitam pekat sebagai isyarat bahwa wilayah Aceh tidak mampu dijangkau Injil.

Dalam pandangan penulis, informasi yang dipaparkan oleh AS tersebut telah memberikan sebuah semangat baru bagi kita semua untuk selalu sigap dan siap sedia dalam menghadang berbagai upaya Kristenisasi yang dilakukan oleh para misionaris di tanah Aceh. Kita-pun pantas berbangga memiliki santri yang kritis semisal AS sehingga umat Islam di Aceh tercerahkan dengan pemikiran dan wejangan yang disuguhkan oleh AS dalam tulisannya tersebut. Kepedulian AS terhadap kondisi terkini yang terjadi di Aceh merupakan sebuah kecerdasan dan keberanian yang patut dipuji dan diapresiasi oleh semua pihak, tak terkecuali oleh para misionaris itu sendiri, mengingat putra-putra Aceh masih sangat loyal kepada agamanya – Islam.

Namun, penulis sedikit tercengang ketika membaca sebuah tulisan di rubrik “Droe Keu Droe” pada Serambi edisi Kamis, 12 September 2013 dengan tajuk “Staf CMH Bantah Isu Pemurtadan” yang ditulis oleh staf Centre Mulia Hati (CMH). Dalam tulisannya tersebut staf CMH membantah beberapa informasi yang telah disampaikan oleh AS dalam opininya dan menganggap bahwa tuduhan-tuduhan yang disampaikan oleh AS adalah fitnah belaka.

Setelah membaca tulisan dari staf CMH tersebut, penulis mencoba mencari kembali Koran Serambi Indonesia yang terbit pada Rabu (11/09/2013) untuk memastikan kebenaran informasi terkait beberapa tuduhan yang dibantah oleh CMH di rubrik “Droe Keu Droe”. Namun setelah penulis membaca kembali tulisan AS, ternyata penulis juga menemukan kekeliruan lainnya dalam tulisan tersebut.

AS menulis: “Berbagai macam misi mereka jalankan, ada yang berkedok pendidikan seperti di Aceh Barat, ada yang berkedok ekonomi seperti di Aceh Tengah, dan adapula yang berkedok akidah seperti komunitas Millata Abraham, dan faham yang dibawa oleh Muhammad Abduh bin Abdul Wahab yang sekarang berkembang pesat

di Aceh” (kolom 4 baris ke 2 sampai 9 dari atas).

Dari kutipan tulisan AS tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa di antara misi pemurtadan (Krestenisasi dan aliran sesat) para missionaris menggunakan berbagai kedok untuk melancarkan aksinya, di antaranya kedok pendidikan, kedok ekonomi dan kedok akidah. Terkait kedok-kedok misionaris yang diutarakan oleh AS tersebut, penulis sangat sepakat dan apa yang telah disampaikan oleh AS memang benar adanya.

Namun penulis kurang sepakat ketika AS memasukkan nama Muhammad Abduh bin Abdul Wahab sebagai bagian dari misi pemurtadan tersebut. Di samping itu, nampaknya nama yang ditulis oleh AS tersebut juga keliru, pasalnya kita tidak pernah mendengar nama “Muhammad Abduh bin Abdul Wahab”. Namun menurut penulis, nama yang dimaksud oleh AS tersebut bisa jadi adalah Syaikh Muhammad Abduh (Ulama Mesir) atau mungkin pula Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab (Ulama Saudi Arabiya).

Sebagaimana di ungkapkan oleh Nasution (1987) bahwa ayah dari Muhammad Abduh adalah Abduh Khairullah – bukan Abdul Wahab. Demikian pula dengan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, di antara putra-putra beliau sebagaimana disebutkan oleh Abu Hudzaifah (2008) adalah Syaikh Husein, Syekh Ali, Syekh Abdullah dan Syekh Ibrahim, jadi tidak ada putra beliau yang bernama Muhammad Abduh. Dengan demikian jelaslah bahwa sahabat kita AS telah keliru dalam menulis nama, atau pura-pura tidak tahu?

Agar tuduhan yang ditulis oleh AS dalam tulisannya tersebut tidak disalah-fahami oleh masyarakat kita, baiknya secara singkat dikemukakan siapa Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh yang oleh sahabat kita AS dituding sebagai bagian

dari faham pemurtadan (sesat). Dalam tulisannya AS menyatakan bahwa Aceh beraliran Sunni dan beri'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah. Perlu diketahui oleh AS bahwa Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh juga ulama-ulama Sunni. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana disebutkan oleh ahli-ahli sejarah adalah salah seorang ulama yang gigih memperjuangkan "Tauhid" di Jazirah Arab, di mana saat itu masyarakat Jazirah Arab, khususnya Nejd telah terperosok ke dalam jurang kesyirikan dan bid'ah yang merajalela. Jadi klaim AS bahwa faham Muhammad bin Abdul Wahab sebagai bagian dari akidah sesat adalah "dha'if jiddan" dan tidak berdasar sama sekali, atau mungkin fitnah?

Demikian pula dengan Syaikh Muhammad Abduh, beliau adalah seorang ulama besar asal Mesir yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan di abad modern. Adapun klaim Harun Nasution (1987), bahwa Muhammad Abduh cenderung kepada paham Mu'tazilah adalah keliru, sebagaimana hal ini telah dibantah oleh Eka Putra Wirman dalam tulisannya di Jurnal Pemikiran Islam Islamia-Republika bertajuk "Membongkar Mitos Harun Nasution" sebagaimana dikutip oleh Hidayatullah.com (27/03/2013).

Di samping itu, pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab juga merambah dalam beberapa organisasi besar di Indonesia, di antaranya Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad (Al-Thalibi, 2006: 10). Di Aceh sendiri, pengaruh kedua tokoh ini juga cukup besar, khususnya di era pra dan awal-awal kemerdekaan. Tgk. Hasballah Indrapuri adalah salah satu tokoh yang paling gencar melakukan pemurnian akidah umat, kitab pegangan beliau adalah "Kitab Tauhid" karangan Muhammad bin Abdul Wahab (Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1978: 34).

Berdasarkan penjelasan singkat di atas, dapatlah dipahami

bahwa tulisan yang ditulis oleh AS sebagian besarnya adalah benar dan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, namun di sisi lain AS juga telah melakukan kekeliruan berupa tuduhan terhadap Muhammad bin Abdul Wahab dan Muhammad Abduh yang pada prinsipnya bertolak belakang dengan fakta sejarah. Namun demikian, semangat dan keikhlasan AS dalam menyikapi badai pemurtadan di Aceh patut di hargai dan dipuji oleh semua pihak.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak kita semua untuk tetap konsisten kepada akidah kita sesuai “Al-Qur’an dan Hadits” dan menolak dengan tegas berbagai bentuk pemurtadan dan penyesatan yang dilancarkan oleh para misionaris di Aceh. Namun penulis ingin menitip sebuah pesan kepada AS dan kita semua tentang adab seorang penulis yang harus tetap dipegang erat.

Abdul Hamid Al-Khatib, seorang penulis besar di lingkungan istana Bani Umayyah sebagaimana dikutip oleh HAMKA (1980) menulis dalam Risalatu Ilal Kuttabi; “Jangan terlalu boros mengeluarkan suatu pendapat”. Sebagai seorang penulis, AS harus memahami kaidah yang telah disampaikan oleh Hamid Al-Khatib tersebut agar tidak berlebihan dalam mengeluarkan pendapat sehingga merusak pemahaman masyarakat tentang kebenaran. Satu hal lagi yang perlu diingat oleh AS, seperti pepatah Aceh: “Beutaturi Keumong ngon Tumbon” (harus bisa dibedakan antara bengkak dan gemuk), artinya jangan sampai yang sesat kita katakan benar, dan yang benar justru kita golongkan sesat. Na’uzubillah. Wallahu Waliyut Taufiq.

[Bireuen, 12 September 2013]

MEMAHAMI DAKWAH SALAF

Sebelumnya penulis pernah menulis sebuah tulisan di Koran Harian Aceh dengan tema yang hampir sama dengan tulisan ini yang berjudul “*Hentikan Stigma-Stigma Sesat Terhadap Wahabi*” yang dimuat pada Jumat 20 Januari 2012. Tulisan tersebut sempat dibantah di media yang sama oleh saudara kita Umar Rafsanjani dengan tulisannya yang berjudul “*Pro Kontra Soal Wahabi Tiada Akhir*” pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012. Namun demikian dalam tulisan kali ini penulis tidak bermaksud untuk berbantah-bantahan dengan siapa pun. Tulisan ini hanya sebagai pencerahan bagi saudara kita yang ingin memahami hakikat dakwah salaf yang oleh sebagian orang diklaim sebagai Wahabi. Kepada rekan-rekan yang mungkin memiliki pikiran dan pemahaman yang berbeda hendaknya menahan diri dan tidak terbakar emosi yang menyala-nyala sehingga tertanam kebencian antara sesama muslim.

Rasul yang mulia Muhammad *Shallallahu ‘alaihi wasallam*

dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari menegaskan bahwa tidak beriman seseorang sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tulisan ini adalah sebuah wujud kecintaan penulis kepada sesama muslim dengan cara mengabarkan apa yang penulis ketahui meskipun pengetahuan penulis masih belum memadai. Namun dalam hadits lain Rasul pernah bersabda “Sampaikan dariku walau satu ayat.”

Penamaan Salaf

Sofyan Chalid bin Indham Ruray dalam bukunya “Salafi antara Tuduhan dan Kenyataan” yang merupakan bantahan ilmiah terhadap buku “Sejarah Sekte Salafi – Wahabi” karya Syaikh Idahram, menyebutkan bahwa salafi adalah orang-orang yang mengikuti manhaj salaf, dan salaf itu sendiri adalah Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan para sahabatnya Radhiallahu ‘anhum. Golongan inilah yang selamat sebagaimana disebutkan oleh Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abdullah bin ‘Amr bin ‘Ash dan dihasankan oleh Syaikh Muhammad Nashieruddin Al-Albani dalam Shahihul Jami’, bahwa umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan dan semuanya akan masuk neraka kecuali satu yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul dan sahabatnya.⁴

Mazhab Salaf bukanlah mazhab baru yang dibawa oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan Syaikh Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahab sebagaimana dituduhkan oleh sebagian kalangan. Mazhab ini sudah ada sebelum Ibnu Taimiyah dan Muhammad bin Abdul Wahab lahir ke dunia ini. Dalam bukunya tersebut Sofyan Chalid menyebutkan nama-nama ulama yang pernah menyebut Mazhab Salaf dalam kitab-kitabnya, di antaranya; Imam Al Baihaqi, Al Khatib Al Baghdadi, Imam An-Nawawi, Imam Adz-Zahabi, Imam Ibnu Qudamah, Imam Abul Ala’ Al-Mubarakfuri dan sejumlah ulama besar lainnya.

Abu Mujahid dan Haneef Oliver dalam bukunya “Virus Wahabi” menyebutkan bahwa kata salaf juga pernah dipakai sendiri oleh Rasul Shallallahu ‘alaihi wasallam pada saat beliau berkata kepada putrinya Fathimah “Aku adalah sebaik-baik salaf bagimu”. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari no 2652.⁵

Dalam Mauqif Ahlussunnah Waljama’ah sebagaimana dikutip oleh Ustaz Abdul Qadir Abu Fa’izah Al-Atsary, disebutkan bahwa para ulama *muhaqqiqin* juga menjelaskan bahwa istilah salaf muncul ketika terjadi perselisihan seputar prinsip-prinsip agama di antara kelompok-kelompok ahli kalam dan semuanya berusaha menisbatkan diri kepada Salafusshalih. Munculnya penamaan salafi hanyalah untuk membedakan antara orang-orang yang mengaku sebagai Salafiyun dengan orang-orang yang memang masih berpegang teguh dengan Alquran dan Sunnah.⁶

Dengan demikian jelaslah bahwa istilah salaf bukanlah istilah baru sebagaimana disangka oleh sebagian kalangan sampai-sampai sebagian mereka menuduh dakwah salaf sebagai agama baru. Bahkan ada sebagian orang yang mempelesetkan kata salafi dengan sebutan “Salah Fikir”.

Hakikat Dakwah Salaf

Dakwah salaf adalah dakwah yang mengajak umat ini untuk kembali kepada petunjuk Alquran dan Sunnah Nabi yang shahih serta meninggalkan taqlid buta kepada mazhab tertentu dengan tanpa ilmu. Dakwah salaf tidak melarang kita untuk bermazhab sebagaimana dituduh oleh sebagian orang. Sebagaimana kita ketahui bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang dituduh sebagai pembawa ajaran baru juga bermazhab dengan mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal (mazhab Hambali), meskipun ia tidak membatasi diri dalam mazhab

tersebut.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam bukunya menyebutkan bahwa walaupun Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab bermazhab dengan mazhab Hambali namun beliau tidak fanatik terhadap Imam Ahmad, jika ada pendapat lain yang lebih shahih dari pendapat Imam Ahmad maka beliau dengan segala kerendahan hati akan meninggalkan pendapat tersebut dan beralih kepada pendapat lain yang lebih sesuai dengan dalil.⁷

Dakwah salaf bukanlah dakwah untuk memecah umat sebagaimana dituduh oleh sebagian orang yang mungkin merasa alergi dengan istilah salaf. Bahkan ada tokoh intelektual Islam Indonesia yang menyamakan dakwah salafi yang biasa mereka sebut dengan nama Wahabi sebagai aliran teroris. Tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar dan merupakan sebuah upaya untuk menanamkan keraguan terhadap dakwah salaf yang mulia.

Sebagian kalangan juga menuduh bahwa dakwah salaf adalah dakwah yang suka mencela dan menghujat sesama muslim. Penilaian tersebut sebenarnya merupakan penilaian yang tidak adil dan terlalu tendensius. Hampir di setiap khutbahnya, Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab yang oleh mereka dituduh sebagai pelopor gerakan wahabi mengajak untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah. Tidak ada celaan terhadap kaum muslimin sebagaimana dituduh oleh para pendengki dakwah beliau.⁸

Syaikh yang mulia ini juga tidak pernah mengajak kita untuk menyembah selain Allah. Beliau (Muhammad bin Abdul Wahab) tidak pernah mengajak kita untuk menyembah Ibnu Taimiyah, beliau juga tidak memaksa kita untuk bertaqlid kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Yang beliau serukan hanyalah agar kita memurnikan tauhid kepada

SIAPA SESAT?

Allah dan berpegang teguh kepada sunnah Rasul serta meninggalkan segala bentuk syirik.

Akhirnya hanya kepada Allah kita akan kembali, semoga saja tulisan ini bisa diterima dengan menggunakan hati nurani dan tidak ditanggapi dengan emosi yang membabi buta. Wallahul Musta'an.

[Bireuen, 2 Mei 2012]

(Endnotes)

1. Pada 18 Juli 2014 terjadi bentrokan antara masyarakat dengan sejumlah anggota TRA di Desa Blang Raya, Kecamatan Muara Tiga Kabupaten Pidie. Kejadian ini diawali dengan munculnya tuduhan bahwa ada oknum TRA yang menganut aliran sesat. Dalam bentrokan tersebut lima unit sepeda motor serta sebuah rumah milik anggota TRA dibakar massa dan tujuh anggota TRA dikabarkan kritis (*m.detik.com*).
2. Polres Pidie menghentikan pengajian kelompok Salafi di Pulo Raya untuk menyahuti fatwa MPU Aceh pada tahun 2014 (*rakystateh.co*).
3. Tulisan ini awalnya dikirim ke Harian Serambi Indonesia, tetapi tidak dimuat, kenapa? *Wallahu A'lam*.
4. Sofyan Chalid bin Idham Ruray, *Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2011), hal 43.
5. Abu Mujahid&Haneef Oliver, *Virus Wahabi*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2010), hal 187.
6. Abdul Qadir Abu Fa'izah Al Atsary, *Beda Salafi dengan Hizbi*, cet.3, (Bandung: Toobagus Publishing, 2010), hal. 131.
7. Syaikh Muhammad bin Jami Zainu, *Mitos Wahabi*, terj. Abu Muhammad Farhan, (Jogjakarta: Al Husna, 2010), hal 88.
8. Baca Raid Shabri Ahmad Abu Alfah, *Kumpulan Khutbah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab*, terj. Abu Mujahid, (Bandung: Toobagus Publishing, 2011).

SIAPA AHLUSSUNNAH WALJAMA AH?

Bagi umat Islam, term Ahlussunnah Waljama'ah bukanlah istilah asing dan bahkan istilah tersebut terus terucap dari mulut para da'i dalam setiap khutbahnya. Istilah tersebut tidak hanya familiar bagi tokoh-tokoh agama dan kalangan penuntut ilmu, namun juga sangat populer bagi kalangan awam. Namun demikian tidak ada salahnya jika dalam tulisan singkat ini penulis kembali mengulas tentang istilah tersebut, setidaknya untuk memperbaiki ingatan saja, sebagaimana kata pepatah: "lancar kaji karena diulang."

Pembahasan ini menjadi penting, mengingat – meskipun istilah tersebut telah populer, namun bukan tidak mungkin sebagian dari kita hanya terjebak dalam terminologi – tanpa memahami esensi dari terminologi tersebut. Perlu penulis tegaskan bahwa tulisan ini tidak bermaksud menggurui siapa pun – apalagi menghakimi.

Baiklah, menurut penulis beberapa baris kalimat di atas sudah cukup – sekedar sebagai pengantar alias basa-basi agar pembahasan ini tidak terkesan kaku sehingga menjadi tidak menarik untuk dibaca. Mari

kita masuk dalam pembahasan.

Secara ringkas dapat dikemukakan bahwa Ahlussunnah Waljama'ah adalah sebuah pemahaman dalam beragama. Sebagaimana dicatat oleh para penulis sejarah, bahwa dalam Islam telah tumbuh dan berkembang berbagai aliran keagamaan yang berawal dari tragedi politik pasca wafatnya Khalifah 'Utsman bin Affan Radhiallahu 'Anhu. Pada perkembangan selanjutnya aliran-aliran bernuansa politik tersebut berevolusi (atau revolusi?) menjadi aliran theologi. Tentang sebab kemunculan aliran-aliran ini di antaranya telah pernah dibahas oleh Harun Nasution (1986) dan Muhammad Ahmad (1998) dalam buku mereka masing-masing.

Sebagaimana dicatat oleh Nasution (1986) bahwa kelahiran Ahlussunnah Waljama'ah merupakan reaksi terhadap perkembangan aliran Mu'tazilah yang ketika itu sangat berpengaruh di dunia Islam. Dalam bukunya, Nasution mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan Ahlussunnah Waljama'ah adalah para pengikut Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Hal senada juga diutarakan oleh Asmuni (2000) dan Sirajuddin Abbas (2008). Klaim yang dikemukakan oleh Nasution, Asmuni dan Abbas sah-sah saja jika statement tersebut bermaksud untuk memasukkan kedua aliran di atas (Asy'ariyah dan Maturidiyah) sebagai bagian dari Ahlussunnah Waljama'ah. Namun hemat penulis, jika klaim tersebut dimaksudkan sebagai "pengkhususan", bahwa Ahlussunnah Waljama'ah hanya golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah, maka tesis ini adalah keliru.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam pernah bersabda tentang terpecahnya umat Islam dalam 73 golongan. Berdasarkan hadits tersebut – sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, dapat dipahami bahwa umat Islam akan terpecah ke dalam 73 aliran, 72 akan masuk neraka dan hanya satu aliran

yang selamat alias masuk surga, yaitu Ahlussunnah Waljama'ah. Atas dasar pemahaman ini maka klaim Nasution, Asmuni dan Abbas adalah keliru dan bertentangan dengan fakta sejarah. Seandainya klaim tersebut "dipaksakan untuk benar", maka konsekwensinya kita telah menuduh orang-orang sebelum kemunculan Asy'ariyah dan Maturidiyah sebagai golongan di luar Ahlussunnah Waljama'ah – disebabkan mereka bukanlah pengikut Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Timbul pertanyaan, apa mungkin para sahabat Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassallam, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan para Imam Mazhab bukan Ahlussunnah Waljama'ah karena mereka hidup jauh sebelum munculnya Asy'ariyah dan Maturidiyah? Jika kita sepakat dengan konsep yang dikemukakan Nasution, Asmuni dan Abbas, maka terpaksa kita katakan "ya". Lantas apa benar demikian?

Berpijak kepada penjelasan yang telah disampaikan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassallam dalam hadits, dari 73 golongan yang selamat hanya satu golongan yaitu "Al-Jama'ah". Saat para shahabat bertanya kepada Nabi, siapa "Al-Jama'ah", Nabi menjawab "ma ana 'alaihi wa ashabi". Jawaban Nabi tersebut mengisyaratkan kepada kita semua bahwa Ahlussunnah Waljama'ah adalah orang-orang yang secara konsisten berpegang kepada Al-Qur'an dan Hadits serta mengikuti pemahaman agama sebagaimana telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu 'Alaihi Wassallam dan para shahabatnya Radhiallahu 'Anhum. Teori ini juga dikuatkan dengan sebuah hadits dari Al-Irbadh bin Sariyah, di mana dalam hadits tersebut Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wassallam berwasiat kepada para shahabat agar berpegang teguh dengan sunnah beliau Shallallahu 'Alaihi Wassallam dan sunnah para Khulafaurrasyidin. Dengan demikian "pengkhususan" Ahlussunnah Waljama'ah kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah menjadi terbantahkan dari segi dalil.

Di samping itu, sebagaimana telah dicatat oleh para ahli sejarah

bahwa ketika Khalifah Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq dari Daulah Abbasiyah berkuasa, mereka dengan tegas memaksakan Mazhab Mu'tazilah kepada kaum muslimin. Sebagaimana diriwayatkan oleh ahli Tarikh Islam, bahwa ketika seluruh kaum muslimin – meskipun dengan terpaksa telah terpengaruh dengan Mazhab Mu'tazilah dan mengatakan bahwa Alquran adalah makhluk. Dalam kondisi yang serba genting tersebut cuma tinggal dua orang ulama yang tetap bersikukuh bahwa Alquran adalah kalam Allah dan bukan makhluk. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabatnya Muhammad bin Nuh yang tetap ber'aqidah dengan 'aqidah Ahlussunnah Waljama'ah dan secara tegas menolak keyakinan Mu'tazilah. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum kelahiran Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (260 H) dan Abu Mansur Al-Maturidi (±238 H).

Berdasarkan fakta sejarah tersebut, jika-pun hendak ditetapkan siapa Imam Ahlussunnah Waljama'ah, maka hemat penulis yang lebih layak dianggap sebagai Imam Ahlussunnah Waljama'ah sebenarnya adalah Imam Ahmad bin Hanbal, bukan Asy'ariyah ataupun Maturidiyah. Hal ini dikuatkan dengan pujian yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam Kitab Al-Ibanah 'an Ushuli ad-Diyanah (t.t: 9) Imam Al-Asy'ari menyebut bahwa Imam Ahmad bin Hanbal adalah Imam yang utama. Dengan demikian menjadi teranglah bahwa tesis yang dikemukakan oleh Nasution, Asmuni dan Abbas, bahwa Ahlussunnah Waljama'ah adalah pengikut Asy'ari dan Maturidi tertolak dengan sendirinya.

Pembahasan di atas menjadi penting dalam rangka menepis segala syubhat yang terjadi selama ini, baik di Indonesia pada umumnya maupun di Aceh secara khusus. Sebagaimana kita lihat bahwa tesis tentang pembatasan golongan Ahlussunnah Waljama'ah hanya kepada Asy'ariah dan Maturidiyah, terutama yang disampaikan

oleh Sirajuddin Abbas dalam buku-bukunya telah ikut merusak opini publik, khususnya di Indonesia, terhadap golongan yang berada di luar Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dianggap sebagai golongan di luar Ahlussunnah Waljama'ah.

Di samping itu, sebagaimana kita lihat, (bisa dikatakan) mayoritas masyarakat dan bahkan sebagian ulama, khususnya di Aceh menyatakan bahwa di luar golongan Asy'ariyah dan Maturidiyah bukanlah Ahlussunnah Waljama'ah. Jika hal ini hanya sebatas klaim mungkin masih bisa ditolerir, namun faktanya statement tersebut telah melahirkan konsekuensi yang cenderung destruktif – di mana golongan selain Asy'ariyah dan Maturidiyah justru dianggap sesat oleh sebagian pihak. Tentunya fenomena ini akan berakibat kepada rusaknya ukhuwah Islamiyah yang seharusnya kita pelihara bersama.

Kondisi tersebut akan lebih fatal lagi jika dikaitkan dengan penyebaran aliran sesat yang akhir-akhir ini kian marak di Indonesia – di mana hal ini telah menyulitkan kita untuk mendefinisikan istilah “aliran sesat” atau “sempalan”. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang Sosiolog Belanda, Martin Van Bruinessen, bahwa jika ditinjau dari perspektif Sosiologi, aliran sesat adalah aliran yang bertentangan dengan “Maenstream Ortodoks”. Penulis yakin, mayoritas kaum muslimin di Indonesia sepakat bahwa yang menjadi Maenstream Ortodoks adalah Ahlussunnah Waljama'ah. Namun pertanyaannya, siapakah Ahlussunnah Waljama'ah itu?

Di sinilah terjadi “pertentangan hebat” antara pihak mayoritas dan minoritas. Di mana pihak mayoritas yang menisbatkan diri kepada Asy'ariyah dan Maturidiyah secara tegas menyatakan bahwa mereka-lah Ahlussunnah Waljama'ah dan kaum muslimin di luar golongan mereka bukanlah Ahlussunnah Waljama'ah. Dengan demikian tidaklah heran jika di dunia Islam juga dikenal istilah “Wahabiyah” yang ditujukan

kepada para pengikut dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebagaimana telah kita kenal, bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab merupakan penerus perjuangan Syaikhul Islam Ibn Taimiyah yang hakikat pemahaman tauhidnya berpunca kepada Imam Ahmad bin Hanbal dan merujuk kepada pemahaman Salafusshalih.

Golongan Salafiyah ini yang oleh sebagian pihak disebut dengan Wahabi menurut golongan mayoritas tidak dianggap sebagai bagian dari Ahlussunnah Waljama'ah hanya disebabkan mereka bukan pengikut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Padahal, sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri setelah bertaubat dari Mazhab Mu'tazilah, beliau menyatakan bahwa teologi beliau merujuk kepada keyakinan yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, yaitu Ahlussunnah Waljama'ah. Namun fakta yang terjadi hari ini sungguh paradoks dan menjadi "tidak lucu" – di mana, di satu sisi Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai pelopor Asy'ariyah menyatakan sepakat dengan teologi Imam Ahmad bin Hanbal, namun orang-orang yang menisbatkan teologi mereka kepada Al-Asy'ari (Asy'ariyah) justru menolak golongan Salafiyah yang notabene merupakan penerus pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal sebagai bagian dari Ahlussunnah Waljama'ah.

Kecuali itu, perlu pula diingat bahwa di Indonesia sendiri sebagaimana diungkapkan oleh Al-Thalibi (2006), bahwa dakwah Salafiyah yang dikembangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab telah masuk ke Indonesia pada awal abad ke-19 melalui tokoh-tokoh Paderi di Sumatera Barat. Di samping itu, pengaruh dari gerakan Salafiyah ini juga berkembang dalam beberapa ormas berhaluan modernis di Indonesia, di antaranya Muhammadiyah, Persis, Syarikat Islam dan Al-Irsyad.

Perlu pula dicatat, bahwa berkembangnya pendidikan di

Indonesia, termasuk di Aceh tidak terlepas dari peran besar kaum modernis yang pemahaman teologinya identik dengan Salafiyah. Sebagaimana telah kita saksikan bersama di Indonesia pada pra dan pasca kemerdekaan banyak bermunculan lembaga-lembaga pendidikan yang didirikan oleh kaum modernis. Di Sumatera Barat ada “Sumatera Thawalib” dan di Aceh di antaranya ada “Djami’ah Al-Muslim” yang keduanya merupakan buah karya tokoh-tokoh Salafiyah di masa lalu.

Akhirnya dengan meminjam istilah Profesor Al-Yasa’ Abu Bakar, penulis mengajak kita semua untuk tidak “memonopoli” kebenaran – di mana kita mengklaim bahwa kita-lah yang paling benar. Setiap kaum muslimin berhak menyandang predikat Ahlussunnah Waljama’ah selama mereka tetap konsisten dengan Al-Qur’an dan Hadits, tentunya dengan pemahaman Salafusshalih. Wallahu Waliyut Taufiq.

[Atjeh Link, 14 Februari 2014]



Sumber Foto: Tempo.



BAGIAN KEDUA:
WAHABI ACEH

STIGMA SESAT TERHADAP WAHABI DI INDONESIA

Meskipun terkesan telah usang dimakan waktu, namun perbincangan tentang Wahabi masih saja berlangsung hampir di seluruh pelosok tanah air. Stigma buruk yang disematkan kepada Wahabi masih kekal hingga hari ini. Virus-virus kebencian terhadap Wahabi masih terus ditanam oleh generasi tua kepada generasi muda tanpa henti.. Mulai dari cap sesat, anti adat dan bahkan lebih ngeri dari itu, bahwa ada sebagian pihak yang tanpa basa-basi dengan lantang menyebut Wahabi sebagai Kafir.

Berbagai propaganda terus dimunculkan untuk meyakinkan kalangan awam bahwa umat Islam menolak Wahabi, karena menurut

keyakinan mereka Wahabi telah keluar dari Islam. Sebuah tuduhan miris yang tak pernah terbukti. Kebencian terhadap Wahabi yang merupakan warisan dari para tetua terus dipertahankan oleh sebagian anak negeri. Sebuah warisan “keramat” yang serta merta diterima sebagai dogma dan haram untuk dibantah.

Di antara tokoh yang dikenal gencar menghasut dan menanamkan kebencian terhadap Wahabi di Indonesia adalah Sirajuddin Abbas, seorang tokoh asal Sumatera Barat yang oleh sebagian pihak dianggap sebagai ulama yang otoritatif. Abbas melalui buku-bukunya, di antaranya *40 Masalah Agama* jilid 1-4 dan juga buku *I'tiqad Ahlussunnah Walja'ah* dengan penuh semangat terus melakukan “penyerangan” bertubi-tubi terhadap Wahabi. Namun sayangnya, segala klaim dan tuduhan yang dilontarkan Abbas terhadap Wahabi tak pernah ia buktikan secara ilmiah.

Setelah sekian lama redup, kebencian terhadap Wahabi menemukan kelahirannya kembali dengan terbitnya sebuah buku yang ditulis oleh seorang *Jubun* (pengecut) dengan nama samaran Syaikh Idahram. Buku yang berjudul *Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi* tersebut dengan sangat provokatif menyerang Wahabi habis-habisan dengan beragam fitnah yang tak berdasar. Dalam buku tersebut, Syaikh Idahram yang pola pikirnya identik dengan *Syi'ah Rafidhah* menyajikan sejuta kebohongan terhadap Wahabi. Meskipun telah dibantah secara ilmiah dan objektif oleh beberapa penulis, namun kebencian terhadap Wahabi masih tetap bersemi.

Sikap menurut dan tunduk kepada klaim generasi tua semisal Sirajuddin Abbas (semoga Allah merahmatinya), semakin meyakinkan kita bahwa berkembangnya pengetahuan dan modernnya masa tidak mampu mengubah paradigma keliru terhadap Wahabi yang telah meradang di benak sebagian generasi hari ini. Mereka (generasi

muda) telah teracuni pikiran dan hatinya akibat virus kebencian yang disuntikkan oleh generasi tua yang hingga kini terus menjalar di segenap urat-urat mereka. Mereka (generasi muda) tidak sadar bahwa sikap tunduk dan patuh berlebihan kepada alur pikir generasi tua telah membuat pola pikir mereka (generasi muda) menjadi ternoda sehingga membuat mereka hilang akal, karena telah menganggap “warisan” generasi tua sebagai wahyu yang tak boleh dibantah.

Kebencian terhadap Wahabi terus beranak-pinak dari generasi ke generasi. Kebencian tersebut tidak hanya tumbuh di benak kalangan awam, tapi bahkan kalangan terpelajar pun ikut terpenjara pikirannya oleh “fatwa” tak berdasar yang dihembuskan oleh sebagian kalangan tua di masa lalu. Padahal, seorang terpelajar dituntut untuk berpikir kritis dan objektif untuk membedakan diri dengan pola pikir awam yang dalam setiap kondisi hanya cenderung “mengangguk”.

HAMKA (2005: 109) dalam bukunya *Tasauf Modern* menulis: “*manusia diciptakan Tuhan bukan buat menjadi Pak Turut, sebab Pak Turut itu adalah binatang ternak.*” Mungkin sebagian kita akan bertanya, kenapa HAMKA menyamakan Pak Turut dengan binatang ternak? Jawabannya singkat saja, binatang ternak itu tidak diberikan akal oleh Allah sehingga dia menurut saja kehendak tuannya. Ketika sang tuan menariknya ke kanan, maka dia akan berjalan ke kanan demi menyelamatkan hidungnya yang terikat tali. Jika si binatang ternak membantah tentunya hidungnya akan copot. Begitu pula jika si tuan mengarahkannya ke lubang biawak, si binatang ternak pun terpaksa menuruti. Dengan demikian sangat tepat-lah jika HAMKA menyebut Pak Turut sebagai binatang ternak, dikarenakan Pak Turut pekerjaannya hanya “menurut” saja dan dia lupa bahwa Allah telah menganugerahkan akal kepadanya.

Di banyak tempat dalam Alquran Allah juga senantiasa

memerintahkan kita untuk menggunakan akal yang telah diberikan oleh-Nya sebagai identitas khusus yang membedakan kita dengan binatang ternak. Manusia akan disebut sebagai makhluk waras ketika dia masih mampu menggunakan akalnya, sebaliknya dia akan dicap sebagai gila ketika akalnya telah pergi alias hilang.

Lantas apa hubungannya antara penggunaan akal dengan Wahabi? Bagi generasi muda yang memiliki jiwa ilmiah tentunya dia tidak akan serta merta menerima hasutan sebelum dia melakukan penelitian secara ilmiah dan objektif. Terkait dengan Wahabi, sebagaimana disebutkan oleh Ruray (2011) dalam bukunya bahwa istilah Wahabi pertama sekali dimunculkan oleh penjajah Inggris terhadap para mujahid di India. Kebencian Inggris terhadap Wahabi adalah wajar karena menurut Inggris, keberadaan Wahabi telah mengganggu praktek kolonialisme dan imperialisme di India dan dunia Islam lainnya, termasuk Indonesia.

Pada awal abad ke 19, sebagaimana dipaparkan oleh Thalibi (2006) sejarah juga telah mencatat bagaimana gigihnya para pejuang Paderi bersama Tuanku Imam Bonjol melakukan perlawanan sengit terhadap Belanda di Sumatera Barat. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa gerakan Kaum Paderi di Sumatera Barat juga terinspirasi dari Gerakan Wahabi yang berkembang di Jazirah Arabiyya. Dalam beberapa literatur juga disebutkan bahwa berdirinya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) sedikit banyaknya juga diilhami oleh gerakan Wahabi.

Akibat gigihnya perlawanan tokoh-tokoh yang terpengaruh Gerakan Wahabi terhadap penjajahan, baik di Indonesia maupun di negeri muslim lainnya, maka sangat logis ketika para penjajah yang notabene adalah *Kafir* menanamkan kebencian kepada Wahabi dengan maksud melumpuhkan perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Namun fenomena ini akan menjadi aneh, pada

BAGIAN KEDUA:

saat umat Islam tanpa sadar juga turut “mengekor” terhadap isu yang kampanyekan oleh *Kafir* Barat tersebut sehingga ikut-ikutan memusuhi Wahabi yang *notabene* seiman dan seagama.

Jika dicermati dengan seksama, stigma sesat yang selama ini disematkan kepada Wahabi telah melahirkan konsekwensi yang cenderung *destruktif* dan dapat merusak tatanan dan persatuan kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Berdasarkan berbagai kajian yang telah dilakukan, para tokoh Sekuler dan Liberal di Indonesia juga turut memberi saham besar bagi timbulnya kebencian sebagian umat Islam terhadap Wahabi.

Di sebalik itu, kita juga tidak mengingkari bahwa ada sebagian kecil tokoh-tokoh Salafi (yang disebut sebagai Wahabi) di Indonesia yang bersikap sedikit ekstrim dalam dakwahnya. Namun hal tersebut tidaklah menjadi dalil bagi kita untuk menjustifikasi tindakan penyebaran kebencian terhadap Wahabi, apalagi jika kita sampai “mengkafirkan” mereka. *Wallahu Waliyut Taufiq.*

[Bireuen, 15 Maret 2014]

HENTIKAN STIGMA SESAT TERHADAP WAHABI

Sebelum menulis tulisan ini penulis sempat berfikir ratusan kali tentang efek negatif dari sebagian sahabat yang nantinya kebetulan membaca tulisan ini. Sebenarnya, penentangan yang akan datang dari sebagian sahabat menurut penulis wajar-wajar saja dan merupakan konsekuensi yang harus diterima sepenuh hati. Sebelumnya beberapa tulisan dengan tema hampir serupa, baik yang dimuat oleh Harian Aceh maupun di beberapa media online banyak mendapat kritik dan kecaman dengan bahasa yang kurang sedap.

Kecaman dan kritik tersebut biasanya terjadi di kolom komentar yang biasanya terletak di bawah tulisan (edisi website).

Membaca komentar-komentar tak sedap tersebut penulis bukannya menjadi gentar tapi malah tambah bersemangat untuk menulis. Semakin banyak komentar (meskipun tak sedap) setidaknya menjadi bukti kecil bagi penulis bahwa tulisan tersebut dibaca orang. Persoalan idea tau gagasan dalam tulisan tersebut diterima atau ditolak mentah-mentah itu adalah urusan yang sangat tidak penting untuk digubris. Yang penting tulisannya dibaca dulu, dari dua puluh orang pembaca bukan tidak mungkin ada satu orang yang bisa menerima ide atau pendapat penulis. Bukankah sesuatu yang banyak itu berawal dari sedikit? Hitungan normal selalu dimulai dari angka satu kemudian dilanjutkan dengan dua dan seterusnya.

Menurut penulis, beberapa kalimat di atas sudah memadai sebagai pengantar tulisan singkat ini. Selanjutnya kita akan membahas sebuah topik simalakama sekaligus dilematis, kritis dan kontroversi namun tidak provokatif.

Siapa Wahabi?

Bagi sebagian orang (mayoritas) ketika mendengar istilah wahabi wajahnya menjadi merah menyala, telinga mengembang (bahasa Aceh; *capang puny'ung*), tangan menggepal, kaki menghentak dan dilengkapi dengan pertemuan dua sisi gigi (atas dan bawah) atau dalam bahasa keren sering distilahkan dengan “*kab igoe*”. Mereka adalah orang-orang yang (mungkin) salah faham dan tidak mengenal apa itu wahabi. Namun demikian ada sebagian kecil orang (minoritas) yang tersenyum, hati tenang, pikiran dingin sambil tertunduk dan mengucap doa dalam hati. Mereka adalah orang yang kenal baik dengan wahabi atau setidaknya pernah membaca sejarah wahabi.

Syaikh Muhammad bin Manzhur An-Nu'mani dalam “*Di'ayaan Mukatsafah Diddu Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab*” hal 105-

106 sebagaimana dikutip oleh Sofyan Chalid bin Idham Ruray, dalam bukunya “*Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan*”, menyebutkan bahwa sejarah telah mencatat bahwa istilah wahabi pertama sekali disematkan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya oleh penjajah Inggris ketika mereka mendapat perlawanan keras dari para mujahid India. Seorang ulama dari Al-Azhar Mesir, Syaikh Muhammad Hamid Al-Faqi menyatakan bahwa penisbatan nama Wahabi kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab salah dalam bahasa Arab, yang benar penisbatannya adalah Muhammadiyah (bukan wahabiyah) karena nama beliau adalah Muhammad, sedangkan Abdul Wahab adalah nama ayahnya.¹

Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dilahirkan di ‘Uyainah (Nejd) pada tahun 1115 H. Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah seorang reformis Islam yang telah berjasa memurnikan Islam dari unsure-unsur *syirik*, *bid’ah* dan *khurafat* yang merajalela di wilayah Nejd dan sekitarnya.²

Benarkah Wahabi Mengkafirkan Kaum Muslimin?

Berkembang fitnah di dunia Islam bahwa Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab mengkafirkan kaum muslimin yang tidak sependapat dengannya. Beliau juga dituduh telah membawa agama baru yang bertentangan dengan *Ahlussunnah Waljama’ah*. Isu-isu ini masih sangat hangat di Indonesia, khususnya di Aceh mitos ini sudah mengakar yang diturunkan oleh seorang guru kepada muridnya dalam bentuk dogma yang tidak boleh dibantah. Dalam pandangan penulis, cerita-cerita tersebut adalah fitnah besar yang sengaja dihembuskan oleh orang-orang yang tidak senang dengan dakwah tauhid yang beliau bawa.

Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu dalam risalahnyanya menyebutkan bahwa Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dalam

suratnya yang dikirimkan kepada salah seorang ulama Iraq bernama As-Suaidi telah membantah berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya. Dalam surat tersebut Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab berkata (menulis): *“Adapun saya menjelaskan kepada manusia pemurnian agama kepada Allah, saya melarang mereka dari menyeru kepada orang-orang yang masih hidup namun tidak hadir di tempat tersebut atau orang shalih yang telah mati. Saya juga melarang mereka dari mempersekutukan Allah. Di antara apa yang anda sebutkan bahwasanya saya mengkafirkan seluruh manusia kecuali yang mengikuti saya, betapa mengherankannya hal ini. Bagaimana hal ini bisa masuk ke dalam akal seorang yang berakal? Apakah ada seorang muslim yang mengatakan hal ini? Saya berlepas diri kepada Allah dari ucapan yang tidak keluar kecuali dari orang yang kurang akal ini.”*³

Dalam isi surat tersebut nampak jelas bahwa Syaikh Muhamamd bin Abdul Wahab membantah tuduhan dari orang-orang yang anti terhadap dakwah beliau.

Benarkah Wahabi Sesat?

Salah satu kitab yang pernah ditulis oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab adalah *“Kitabut Tauhid”*, di dalamnya banyak berisi ayat-ayat Alquran dan juga hadits Nabi Saw. Dalam kitab tersebut terdapat dalil-dalil tentang keutamaan tauhid. Dalam kitab tersebut beliau tidak pernah mengajak untuk menyembah selain Allah, dan malah beliau adalah orang yang paling tegas dalam menolak segala jenis kesyirikan.⁴

Tentang aqidah yang dianut oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab juga sudah banyak disyarah oleh para ulama, di antaranya *Syarah Aqidah Muhammad bin Abdul Wahab* yang ditulis oleh Syaikh Zaid bin Muhammad Al-Madkhaly. Di dalam kitab tersebut beliau

membahas secara jelas dan rinci tentang aqidah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.⁵

Seorang ulama besar Saudi, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin juga telah banyak melakukan pensyarahan terhadap kitab-kitab Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab, di antaranya *Syarah Tsalasatul Ushul* yang berisi tentang tiga landasan agama; pengetahuan hamba terhadap Rabbnya, pengetahuan hamba terhadap agamanya, pengetahuan hamba terhadap Nabinya.⁶

Dari sumber-sumber yang penulis sebutkan di atas tidak ditemukan adanya penyelewengan atau pun kesesatan yang selama ini dituduhkan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Jika ada sahabat yang ingin meneliti lebih dalam bisa merujuk kepada beberapa sumber tersebut dan juga sumber-sumber lain yang tidak mungkin semuanya penulis sebutkan di sini. Penulis menyarankan para sahabat untuk membaca langsung di kitab aslinya. Namun jika tidak faham bahasa Arab para sahabat bisa juga mencari edisi terjemahan yang sudah banyak beredar di Indonesia.

Jangan Lagi Menghujat.

Di akhir tulisan ini penulis mengajak para sahabat yang selama ini sudah terlanjur menghujat dan menyesatkan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dan juga pejuang sunnah lainnya seperti Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, Syaikh Ibnu Qayyim Al Jauziyah, Syaikh Muhammad Abduh, Syaikh Rasyid Ridha, Syaikh Abdul ‘Aziz bin Abdullah bin Bazz, Syaikh Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaimin, Syaikh Muhammad Nashieruddin Al-Al Bani, Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan dan sederetan ulama lainnya yang tidak mungkin penulis sebutkan semuanya di sini.

Berhentilah menghujat mereka, apalagi sebagian dari mereka

BAGIAN KEDUA:

telah meninggal dunia dan tidak lagi mampu membalas fitnah-fitnah yang selama ini kita tuduhkan kepada mereka. Apa gunanya menghujat orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Jika memang ada pendapat atau pun fatwa mereka yang mungkin tidak bersesuaian dengan pandangan kita, maka jangan diikuti tanpa perlu mencela. Ulama-ulama tersebut yang oleh sebagian orang diklaim sebagai “WAHABI” bukanlah kumpulan malaikat, mereka manusia biasa seperti kita, mereka tidak *ma'shum*. Mereka juga tidak terlepas dari salah dan silap, namun berjiwa besarlah terhadap kebenaran yang mereka bawa. Kita tidak bisa menafikan jasa-jasa mereka terhadap umat ini. Jika ada kesilapan yang telah mereka lakukan jadikanlah sebagai alasan bagi kita untuk mendoakan mereka, jangan sebaliknya menjadikan kesilapan dan kesalahan mereka sebagai bibit kebencian dan alasan untuk menghujat para ulama. Ingatlah, ulama adalah pewaris para Nabi. *Wallahul Waliyut Taufiq.*

[*Harian Aceh, 20 Januari 2012*]

PENGARUH STIGMA WAHABI TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM

Meskipun isu wahabi terkesan sudah usang namun kontroversi terhadap wahabi terus terjadi sampai hari ini. Bagi kaum modernis Wahabisme merupakan sebuah gerakan pembaharuan dan pemurnian ajaran Islam sedangkan bagi kaum tradisional/konservatif Wahabisme dianggap sebagai ajaran baru yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Terlepas dari kontroversi tersebut dalam tulisan singkat ini penulis akan mencoba mengulas kembali isu-isu seputar Wahabisme dan pengaruhnya terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

Mengenal Wahabi.

Istilah wahabi merupakan istilah yang dinisbatkan kepada para pengikut dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab meskipun

para pengikut dakwah tauhid ini tidak pernah menamakan dirinya sebagai wahabi. Namun nama wahabi sengaja dihembuskan oleh orang-orang anti dakwah tauhid sebagai bentuk pelecehan terhadap dakwah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab. Gerakan dakwah yang dipelopori oleh Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab merupakan lanjutan dari perjuangan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Inti dakwah mereka adalah mengajak manusia untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah serta meninggalkan taqlid buta terhadap mazhab-mazhab fiqh yang telah membekukan potensi akal manusia pada saat itu.

Dalam perkembangan selanjutnya di Mesir juga muncul tokoh pembaharu seperti Syaikh Muhammad Abduh dan Syaikh Rasyid Ridha. Di Indonesia gerakan pembaharuan ini dipelopori oleh KH. Ahmad Dahlan (pendiri organisasi Muhammadiyah). Di beberapa belahan dunia lain juga banyak bermunculan tokoh-tokoh pembaharu yang bertujuan memurnikan ajaran Islam dari praktek *bid'ah*, *syirik* dan *khurafat*.

Yang sangat disayangkan adalah banyak kalangan, khususnya dari oknum kalangan ulama tradisional menghembuskan klaim-klaim sesat terhadap para pembaharu. Mereka menganggap dakwah yang dilakukan oleh Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab adalah faham sesat dan tidak sesuai dengan prinsip *Ahlussunnah Waljama'ah*. Namun sayang, klaim sesat yang mereka lontarkan terkadang tidak sanggup dibuktikan secara ilmiah. Akhirnya pertentanganpun terus terjadi sampai hari ini. Khususnya di Indonesia bahkan ada beberapa tokoh Islam konservatif yang menyamakan wahabi dengan teroris.

Pengaruh terhadap Pendidikan Islam

Diakui atau pun tidak, klaim-klaim sesat yang dihembuskan oleh kalangan konservatif terhadap tokoh-tokoh wahabi telah membawa

pengaruh buruk terhadap perkembangan pendidikan Islam. Khususnya di Aceh, tuduhan sesat terhadap wahabi masih terus terjadi sampai saat ini. Bahkan ada sebagian tokoh-tokoh agama di Aceh khususnya yang berasal dari kalangan oknum pesantren/dayah yang tidak segan-segan mengkafirkan orang-orang yang dianggap sebagai Wahabi. Penyesatan ini tidak saja dilakukan di tempat-tempat pengajian tetapi juga di forum-forum terbuka seperti khutbah Jum'at.

Pernah pada suatu ketika, beberapa murid di sekolah tempat penulis mengajar menjadi malas ke sekolah karena menganggap pendidikan di sekolah adalah pendidikan Wahabi. Penulis sempat berfikir, tidak mungkin anak kecil seperti dia mengenal istilah Wahabi jika tidak ada orang yang mengajarkan padanya. Setelah penulis teliti rupanya beberapa murid tersebut pada sore hari juga belajar di sebuah pesantren yang tidak seberapa jauh dari sekolah.

Dalam kesempatan lain penulis juga sempat terjebak perdebatan kecil dengan seorang oknum guru pesantren (di Aceh dikenal dengan sebutan *teungku*). Sebelum terjadi perdebatan, kami sempat shalat bersama di sebuah mesjid di Bireuen, Aceh. Kebetulan *teungku* tersebut yang menjadi imam shalat. Selepas shalat, *teungku* tersebut memulai zikir bersama dan dilanjutkan dengan berdoa. Rupanya sambil berdoa *teungku* tersebut melirik ke arah sebagian jamaah yang tidak ikut berzikir dan tidak mengangkat tangan sewaktu *teungku* tersebut memimpin doa, karena mereka berdoa sendiri-sendiri.

Waktu itu penulis yang duduk pas di samping imam. Selepas berdoa *teungku* tersebut berkata kepada penulis; "*Wahabi itu sesat dan bukan Ahlusunnah, masa berdoa saja tidak mau.*" Penulis hanya tersenyum sambil berkata kepada *teungku* tersebut; anda punya ilmu dan mereka (yang tidak angkat tangan) juga punya ilmu sedikit yang mungkin berbeda dengan ilmu *teungku*." "*Pokoknya wahabi itu sesat*",

sambung *teungku* tersebut. Melihat kondisi sudah kurang kondusif penulis pamit dan keluar dari mesjid. Menurut penulis tidak ada gunanya melakukan debat kusir dengan oknum *teungku* tersebut yang cuma mengandalkan dalil “POKOKNYA.”

Pada suatu malam penulis juga sempat mengikuti pengajian di *meunasah* (surau) di sebuah tempat. Pada malam tersebut pengajian membahas tentang tata cara shalat. Sang *teungku* dengan semangatnya mengajarkan cara-cara shalat sampai pada bab meletak tangan sang *teungku* berkata; “*meletakkan tangan dalam shalat harus di atas pusar agak ke kiri, jangan letak di atas dada seperti orang kedinginan*”. Penulis mencoba menyanggah pendapat *teungku* tersebut; “*saya pernah membaca di kitab shifat shalat Nabi yang ditulis oleh Syaikh Al-Bani bahwa meletak tangan di atas dada itu ada haditsnya dan shahih*”. *Teungku* tersebut menjawab; “*itu kitab wahabi kamu baca, apa kamu tidak tau wahabi itu sesat?*”

Beberapa kasus yang pernah penulis temui tersebut setidaknya menjadi bukti kecil bahwa klaim-klaim sesat terhadap tokoh-tokoh pendidikan Islam berhaluan wahabi (dituduh sebagai wahabi) telah merusak khazanah pendidikan Islam. Kita semua juga yakin bahwa kejadian-kejadian serupa juga terjadi di daerah lain. Dalam majelis-majelis tertentu materi pendidikan Islam cuma terbatas pada pemikiran dan pendapat-pendapat tokoh pendidikan dari kalangan tradisional. Referensi pendidikan yang berasal dari tokoh (yang dituduh) Wahabi menjadi terpinggirkan dan nyaris tidak terpakai. Dengan demikian pendidikan Islam menjadi sempit karena mereka terkurung dengan fatwa-fatwa ulama konservatif semata. *Wallahul Musta'an*.

[*Hidayatullah.com, 09 Januari 2012*]

WAHABI DALAM PANDANGAN ORANG ACEH

Istilah “Wahabi” bukanlah istilah baru yang asing bagi masyarakat muslim, khususnya masyarakat Aceh yang kental rasa keagamaannya. Jika dibanding dengan daerah lain di Nusantara. Istilah wahabi itu sendiri telah muncul dalam literatur sejarah pada seputaran abad ke 18 Masehi atau selaras dengan abad ke 12 Hijriah, telah berlalu dua abad dari sekarang.

Syaikh Muhammad bin Manzhur An-Nu'mani sebagaimana dikutip oleh Ruray (2011: 38) mengungkapkan bahwa penjajah Inggris-lah yang pertama sekali memunculkan *term* wahabi dan dialamatkan kepada para pejuang mujahidin yang dipimpin oleh Ulama Deoband di India. Hal itu dilakukan oleh Inggris akibat kerasnya perlawanan ulama Deoband terhadap penjajahan Inggris. Sikap anti penjajahan yang

dilakoni oleh para mujahidin Deoband ketika itu sedikit banyaknya juga dipengaruhi oleh dakwah tauhid yang dikampanyekan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabiya.

Menurut Nasution (1996: 23), pemikiran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab ketika itu merupakan reaksi terhadap rusaknya faham tauhid di kalangan umat Islam, khususnya di Saudi Arabiya. Ketika itu kaum muslimin telah terjerumus ke dalam kesyirikan dan *bid'ah* yang merajalela. Dikisahkan bahwa pada saat itu orang-orang sudah tidak lagi berdoa kepada Allah, tetapi mereka meminta pertolongan, kekayaan, kesembuhan dan berbagai permohonan lainnya kepada kuburan syaikh-syaikh tarekat dan para wali yang telah meninggal. Fenomena ini-lah yang akhirnya menjadi pemicu lahirnya gerakan pemurnian yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab.

Pembaharuan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab pada prinsipnya juga merupakan kelanjutan dari dakwah Salafiah yang dipopulerkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, seorang ulama besar dari Damaskus. Abu Mujahid dan Haneef Oliver (2010: 44) mengisahkan bahwa Muhammad bin Abdul Wahab banyak menyalin dan menelaah karya-karya Ibn Taimiyah dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah sehingga konsep tauhid yang diserukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab banyak menyerupai pemikiran tauhid Ibn Taimiyah.

Nasution (1986a: 96) juga menegaskan bahwa gerakan yang dilakukan oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabiya pada perkembangan selanjutnya telah membawa pengaruh besar terhadap pemikiran dan pembaharuan yang timbul di periode modern. Di antara sejumlah tokoh yang terinspirasi oleh pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab adalah Muhammad Abduh dan muridnya Rasyid Ridha.

Khususnya di Indonesia, pengaruh gerakan Wahabi pertama sekali masuk ke Indonesia melalui ulama-ulama di Sumatera Barat pada abad ke 19 Masehi. Dakwah yang digerakkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab membawa pengaruh besar terhadap gerakan kaum Paderi yang dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol dalam mengusir penjajah Belanda di Sumatera Barat. Di samping itu pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab juga merambah dalam beberapa organisasi besar di Indonesia, di antaranya Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad (Al-Thalibi, 2006: 10).

Seperti halnya di daerah lain, pengaruh Muhammad bin Abdul Wahab juga terasa di Aceh, khususnya di era perjuangan kemerdekaan. Di antara tokoh dan ulama Aceh yang terpengaruh dengan dakwah Muhammad bin Abdul Wahab adalah Tgk. Muhammad Daud Beureueh, Tgk. Hasbi Ash-Shiddiqie, Ayah Hamid Samalanga, Tgk. Hasballah Indrapuri dan masih banyak lagi tokoh-tokoh lainnya yang tidak mungkin disebut satu-persatu.

Tgk. Hasballah Indrapuri adalah tokoh yang paling gencar melakukan pemurnian akidah umat, khususnya di Aceh Besar. Kitab pegangan beliau adalah Kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab (Lembaga Research dan Survey IAIN Ar-Raniry, 1978: 34).

Di samping itu, masuk dan berkembangnya beberapa organisasi berhaluan modernis di Aceh, seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah dan Al-Irsyad juga menjadi bukti bahwa masyarakat Aceh sebenarnya telah akrab dengan gerakan Wahabi.

Tokoh lainnya yang memiliki banyak kontribusi terhadap perkembangan ilmu Fiqh di Aceh adalah Tgk. Hasbi Ash-Shiddiqie. Beliau adalah ulama Aceh yang pernah belajar di Al-Irsyad Surabaya dan pernah menjabat sebagai direktur Madrasah Al-Irsyad cabang

Lhokseumawe (Ismuha dalam Taufiq Abdullah, 1983 : 26). Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Al-Irsyad adalah salah satu organisasi yang banyak terpengaruh dengan gerakan Wahabi.

Pandangan Masyarakat Aceh

Setelah menikmati sajian singkat di atas tentang asal-usul dan perkembangan gerakan Wahabi, baik di dunia Islam secara umum, di Indonesia dan di Aceh secara khusus, teranglah bahwa gerakan Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab yang kemudian di sambut oleh ulama di Sumatera Barat dan disahuti pula oleh para tokoh bangsa melalui berbagai organisasi Islam seperti Syarikat Islam, Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad telah jua mengalir melalui nadi para ulama Aceh tempo dulu dan turut menjadi bagian dari corak pemikiran keagamaan di Aceh.

Lantas bagaimana tanggapan masyarakat Aceh hari ini ketika mendengar nama Wahabi? Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian masyarakat Aceh menjadi merah mukanya ketika mendengar nama Wahabi disebut di hadapan mereka. Hal ini wajar-wajar saja, mengingat kondisi keagamaan sebagian masyarakat Aceh telah terbelenggu dengan fanatisme alias *ta'ashub* terhadap satu mazhab saja dan cenderung “menolak” mazhab lain, sehingga memunculkan sikap *jumud* dan bekunya pemikiran.

Di samping itu, di sebagian tempat – provokasi terhadap Wahabi juga kian gencar dilakukan di forum-forum keagamaan seperti khutbah Jum'at, perayaan maulid dan juga pengajian di sebagian mesjid dan menasah di Aceh. Stigma sesat terhadap Wahabi terus dihembuskan di beberapa tempat sehingga melahirkan paradigma keliru di tengah masyarakat Aceh terhadap orang-orang yang menurut mereka berfahaman Wahabi. Kebencian berlebihan yang tertanam

di benak sebagian masyarakat Aceh terhadap Wahabi pada akhirnya akan menjalar ke dalam berbagai persoalan lainnya, khususnya dalam praktek beragama.

Tragisnya lagi perbedaan dalam persoalan *furu'iyah* terkadang juga memunculkan stigma-stigma sesat terhadap Wahabi yang oleh sebagian teungku di Aceh dianggap telah keluar dari barisan *Ahlussunnah Waljama'ah*. Padahal jika diteliti secara ilmiah-objektif, banyak pendapat-pendapat Wahabi yang selaras dengan pemahaman Abu Hasan Al-Asy'ari yang oleh mayoritas masyarakat Aceh dianggap sebagai imam-nya *Ahlussunnah Waljama'ah* – meskipun tidak dapat dipungkiri dalam sebagian perkara juga terdapat perbedaan yang tajam.

Menurut penulis, perbedaan pemahaman antara Wahabiyah dengan Asy'ariyah tidak-lah menjadi tolok ukur untuk mengeluarkan Wahabi dari lingkungan *Ahlussunnah Waljama'ah*. Logikanya, dalam beberapa pendapatnya, Abu Mansur Al-Maturidi juga memiliki pandangan yang bertolak belakang dengan Asy'ari dan malah lebih menjurus kepada pendapat Mu'tazilah, hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Nasution (1986b: 76-78). Lantas haruskah kita mengeluarkan Abu Mansur dari *Ahlussunnah Waljama'ah*? Jawabannya, tentu tidak.

Paradigma keliru terhadap Wahabi hendaknya dapat dihilangkan secara perlahan dari benak sebagian masyarakat Aceh yang mungkin selama ini telah terdoktrin pikirannya sehingga melahirkan sikap yang keliru. Hal ini penting untuk diperhatikan, khususnya para *teungku* kita agar bisa bersikap objektif dalam menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Di samping itu pihak MPU juga harus mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Mimbar Jumat seharusnya menjadi media untuk

BAGIAN KEDUA:

mempersatukan umat, jangan sebaliknya malah digunakan untuk memporak-porandakan persatuan umat Islam, khususnya di Aceh yang sekarang sedang gencarnya melaksanakan Syari'at Islam. *Wallahu Waliyut Taufiq.*

[*Harian Waspada Medan, 14 Februari 2014*]

UIN AR-RANIRY SARANG WAHABI ?

Pada saat saya membolak-balikkan halaman (membaca) Koran Waspada Medan pada 13 Juli 2015, tanpa sengaja saya menemukan sebuah berita dengan tajuk “UIN Ar-Raniry Dituding Sarang Wahabi”. Dalam berita yang dilansir Harian Waspada tersebut, Rektor UIN Ar-Raniry, Prof. Dr. Farid Wajdi, MA, mensinyalir bahwa ada pihak-pihak yang menyerang kampus UIN Ar-Raniry dengan berbagai isu, di antaranya UIN Ar-Raniry disebut sebagai sarang Wahabi. Dalam berita tersebut Prof Farid selaku Rektor UIN Ar-Raniry tidak secara tegas menyebut pihak mana yang menuding UIN sebagai sarang Wahabi. Tidak disebutnya pihak penuding oleh Prof Farid, bukan berarti tudingan itu tidak ada alias isapan jempol, tetapi (bisa jadi) Prof Farid ingin menerapkan pola komunikasi santun, yaitu tidak membalas tudingan dengan tudingan.

Saya berkenalan dengan UIN Ar-Raniry (dulu masih IAIN) pada tahun 1999. Saat itu saya sempat menjadi salah satu mahasiswa di Fakultas Tarbiyah Jurusan Bahasa Arab, namun sayang, karena satu dan lain hal saya tidak sempat menyelesaikan pendidikan di fakultas tersebut dan terpaksa hijrah ke perguruan tinggi lain. Setelah terpisah lama dari IAIN, pada tahun 2014 saya kembali melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry sampai sekarang. Keterangan tersebut sengaja saya cantumkan guna menepis “keraguan” sebagian pihak terhadap isi tulisan ini. Artinya, apa yang saya tulis dalam tulisan ini adalah berdasarkan pengetahuan saya sebagai mahasiswa UIN, bukan asal tebak atau asal tulis, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang berada di luar UIN yang sama sekali tidak mengenal UIN Ar-Raniry.

Sebagaimana telah maklum, bahwa UIN Ar-Raniry adalah salah satu Perguruan Tinggi kebanggaan masyarakat Aceh, selain Universitas Syiah Kuala (Unsyiah). Singkatnya, UIN Ar-Raniry dan Unsyiah adalah *jantung hate* (jantung hati) rakyat Aceh. Apabila *jantung hatee* ini “terluka” maka “terusiklah” seluruh tubuh rakyat Aceh. Normatifnya seperti itu, tapi faktanya *wallahu a’lam*. Artinya, bisa jadi saat ini, ada sebagian kalangan yang “bergembira hati” ketika UIN Ar-Raniry “diserang” atau bahkan “dicelecehkan” dengan stigma-stigma buruk semisal sarang Wahabi, markas liberal, otak sekuler dan sejumlah *laqab-laqab* “tak senonoh” lainnya.

Jika serangan kepada lembaga pendidikan modern semisal UIN Ar-Raniry terjadi pada era 20-30-an, tentu masih bisa dimaklumi mengingat pola pikir kala itu masih “gelap”. Wajar saja jika saat itu kalangan modernis “diserbu” habis-habisan oleh kalangan konservatif. Sebenarnya di Aceh, pergerakan modernis sudah muncul jauh sebelum berdirinya Republik Indonesia. Organisasi Persatuan Ulama Seluruh

Aceh (PUSA) yang didirikan oleh para ulama Aceh pada 05 Mei 1939 di Kota Matangglumpangdua punya “jasa besar” dalam memperkenalkan pola pikir modern di Aceh. Bahkan pola pendidikan modern ini juga sudah sudah terlebih dahulu diterapkan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dengan mendirikan Madrasah Almuslim di Matangglumpangdua pada tahun 1929. Dengan demikian, adalah “sangat aneh” jika pada tahun 2015 seperti sekarang ini masih ada pihak-pihak yang “anti” pada lembaga pendidikan modern. Padahal kalangan tradisional-koservatif pun sudah “menyerap” pola pendidikan modern dengan didirikannya sekolah-sekolah dan perguruan tinggi di lingkungan pesantren (dayah).

Di sisi lain, sudah banyak pula kader-kader dayah di Aceh yang menjadi sarjana, magister dan bahkan doktor di lembaga-lembaga pendidikan modern, baik di Aceh maupun di luar Aceh. Dengan demikian, *kredo* “*Jak sikula jeut keu kaphe*” (belajar di sekolah menjadi kafir) sudah tidak relevan untuk dipertahankan di tengah menjamurnya lembaga pendidikan modern di Aceh. Jika pun saat ini masih ada orang yang menuduh UIN Ar-Raniry sebagai sarang Wahabi, maka dengan meminjam istilah Quraisy Syihab, orang-orang seperti itu patut disebut sebagai orang yang lahir terlambat.

Tentang Wahabi Aceh

Pada tahun 2013, saya pernah menulis satu artikel dengan judul “Wahabi di Mata Orang Aceh” yang dimuat Harian Waspada Medan. Tema Wahabi juga sudah pernah beberapa kali saya angkat dalam beberapa tulisan saya di beberapa media lokal di Aceh, seperti Harian Aceh (2011) dan Harian Pikiran Merdeka (2012). Tulisan dengan topik yang hampir sama, meskipun dalam materi yang berbeda juga sudah sering saya tulis di media Hidayatullah.com (2012/2015), dan baru-baru ini pasca “insiden Baiturrahman” tulisan saya tentang

Wahabi juga diterbitkan oleh media Repbulika Online (2015). Dengan demikian, dalam artikel ini, saya tidak akan mengulang lagi pembahasan tersebut.

Tujuan saya menulis dan bahkan mengulang-ulang topik Wahabi dalam beberapa tulisan, khususnya dalam konteks Aceh bukanlah untuk memperpanjang perdebatan yang menurut saya “sangat tidak penting”. Tapi hanya sekedar usaha “kecil-kecilan” agar umat Islam, khususnya di Aceh tidak hanyut dalam “perpecahan” hanya karena perbedaan-perbedaan *ijtihadiah*. Namun demikian, saya pun sadar bahwa usaha tersebut terkesan sia-sia saja karena tidak mungkin bisa mengubah keadaan dalam seketika. Usaha ini tidak lebih seperti kisah burung *bulbul* memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim ‘*alaihissalam*. Terlepas benar tidaknya kisah ini, tapi yang jelas ada spirit yang bisa diambil.

UIN Ar-Raniry dan Wahabi

Tudingan sebagian kalangan terhadap UIN Ar-Raniry sebagai sarang Wahabi sebagaimana diungkapkan oleh Prof Farid (Rektor) harus disikapi dengan cermat dengan mengedepankan mental ilmiah, bukan nafsu amarah. Harus disenaraikan dulu apa itu Wahabi dan apa saja indikator seseorang atau lembaga dapat disebut sebagai Wahabi. Apakah hanya karena membaca buku seseorang dapat dituding sebagai Wahabi? Kalau begitu, Soekarno dan Hatta pun seorang Wahabi, karena mereka menjadikan buku sebagai teman hidup. Apakah hanya karena belajar dalam ruangan/gedung (klasikal) bisa disebut sebagai Wahabi? Jika ia, maka pesantren pun sudah menjadi Wahabi, karena mereka juga sudah memakai meja, papan tulis dan ruangan dalam belajar, dan bahkan di lingkungan pesantren juga sudah banyak didirikan sekolah. Apakah hanya karena dosen-dosen UIN Ar-Raniry bergelar Doktor dan Profesor lantas secara otomatis mereka menjadi Wahabi? Kalau

begitu, Prof. Said Agil Siradj (ketua PBNU) dan almarhum Prof. Dr. Muhibuddin Waly *rahimahullah* (ulama Aceh) juga Wahabi. Atau mungkin hanya karena kurang sepakat dengan tradisi *nujoe* (kenduri hari ke 7 kematian), maka orang tersebut dapat dilabel sebagai Wahabi? Jika begitu, maka dengan berat hati kita harus menyebut bahwa Syaikh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Fathani juga seorang Wahabi, karena mereka dalam kitabnya masing-masing *Sabilal Muhtadin* dan *Furu'ul Masail* justru “memakruhkan” praktek tersebut. Sedemikian “liarkah” *ta'rif* Wahabi itu sehingga mudah saja dilabelkan kepada orang-orang yang tidak sepakat dengan pendapat kita?

Tanpa sadar kita telah menghabiskan banyak energi dengan mendengungkan klaim-klaim “tak bermutu” dan jauh dari tradisi ilmiah. Bagaimana kita ingin membangun peradaban jika sesama saudara kita masih saling “sikut” dan “sikat”? Dalam bukunya, Amin Rais (1989) pernah mengkritik pernyataan Fazlur Rahman yang menyatakan bahwa “Indonesia (tentunya termasuk Aceh di dalamnya) akan menerbitkan fajar menyingsing kebangkitan Islam”. Rais menyebut bahwa optimisme Fazlur Rahman tersebut salah arah dan hanya berfungsi sebagai ungkapan “penyenang hati”. Jika kita lihat kondisi umat muslim di Indonesia (termasuk Aceh) saat ini yang tersibukkan dengan *dawa-dawi* sesama muslim, maka mau tidak mau kita harus sepakat dengan Amin Rais, bahwa kebangkitan Islam tidak akan pernah muncul di Indonesia, apalagi di Aceh. *Wallahu A'lam*.

[Bireuen, 14 Juli 2015, *khairilmiswar.com*]

WAHABI. WAHABI DAN WAHABI

Ada perasaan geli, ketika membaca sebuah surat terbuka di Serambi Indonesia (Jumat, 27/02/15) dengan tajuk “Surat Terbuka kepada Kapolda Aceh”. Surat tersebut ditulis oleh seorang “faqih terkenal” Abuya Muhammad Iqbal Jalil yang menyebut dirinya sebagai seorang santri di Samalanga (Bireuen, Aceh). Dalam surat tersebut, Abuya *Al-Mukarram Al-Imam Al-‘Allamah* Muhammad Iqbal Jalil (MIJ) menyatakan keberatannya kepada Kapolda Aceh, Husein Hamidi, yang kononnya akan mendatangkan seorang penceramah dari Arab Saudi, Syekh Adil Al-Kalbani. Yang menjadi alasan utama penolakan dari Abuya MIJ adalah disebabkan Syaikh Adil Al-Kabani adalah seorang Wahabi.

Abuya MIJ berdalih bahwa mayoritas masyarakat Aceh

menganut mazhab Syafi'i dalam bidang fiqih dan *Ahlussunnah waljama'ah* dalam bidang teologi. Menurut Abuya MIJ, Syekh Adil Al-Kalbani adalah sosok yang kontroversial sehingga bisa mengundang penolakan dari sejumlah masyarakat. Abuya MIJ juga menyarankan kepada Kapolda untuk mengundang para Masyaikh Al-Azhar di Mesir yang menurut Abuya memiliki kesamaan idiologi dengan mayoritas masyarakat Aceh. Demikian penjelasan dari Al Faqih Muhammad Iqbal Jalil, seorang "Ulama Besar" di Aceh.

Siapa Syaikh Adel Al-Kabani?

Dari beberapa sumber disebutkan bahwa Syaikh Al-Kalbani adalah salah seorang ulama di Saudi Arabiya. Beliau sudah 20 tahun menjadi imam di berbagai masjid di Saudi. Sejak tahun 2008, Al-Kalbani menjabat sebagai imam Masjidil Haram di Mekkah. Namanya sudah sangat terkenal di kalangan warga Saudi, bahkan Raja Khalid Bin Abdul-Aziz di Riyadh sangat mengagumi keindahan suara Syaikh Al-Kalbani saat melantunkan ayat-ayat suci al-Quran. Oleh para pengagumnya Al-Kalbani diberi julukan "si burung bulbul hitam" (<http://www.eramuslim.com/>).

Namun demikian, tulisan singkat ini bukanlah dimaksudkan untuk memuat biografi Syaikh Adil Al-Kalbani secara utuh. Tulisan ini hanyalah sebagai jawaban terhadap tudingan yang disampaikan oleh Muhammad Iqbal Jalil yang dengan penuh semangat telah menyatakan penolakannya terhadap kedatangan Al-Kalbani ke Aceh.

Al-Kalbani Seorang Wahabi?

Dalam suratnya, Abuya MIJ menyebut Syaikh Al-Kalbani sebagai seorang Wahabi. Nampaknya Abuya MIJ kekurangan informasi tentang siapa Syaikh Al-Kalbani. Seingat penulis, Syaikh Al-Kalbani adalah seorang muslim, beliau tidak pernah mencantumkan di KTP-

nya bahwa dirinya adalah seorang Wahabi. Jika MIJ ragu, mungkin bisa langsung dicek di KTP Syaikh Al-Kalbani, apakah di kolom agama beliau ditulis Wahabi? Jika tidak, dari mana pula sebutan Wahabi itu muncul?

Apakah beliau disebut sebagai Wahabi karena beliau seorang Saudi? Atau apakah sebutan Wahabi disematkan kepada beliau hanya karena beliau menjadi imam Masjidil Haram? Nampaknya MIJ, harus mampu menyebutkan indikator apa saja yang bisa dijadikan alat ukur untuk menyebut seseorang sebagai Wahabi. Lagi pula, sedalam mana pengetahuan seorang MIJ tentang Wahabi? Jangan-jangan MIJ mengambil istilah Wahabi dari buku Sirajuddin Abbas atau dari buku Idahram. Tentunya, kedua buku tersebut tidak dapat dijadikan rujukan untuk menilai Wahabi.

Jika ingin mengetahui hakikat Wahabi, maka Abuya HIJ harus mempelajarinya dari buku atau kitab-kitab yang ditulis langsung oleh Wahabi. Abuya MIJ harus mampu melihat Wahabi dari perspektif Wahabi. Jangan melihat Wahabi dari perspektif *Syi'ah* dan jangan pula menilai Wahabi dari perspektif *Asy'ariyah*, karena akan jauh panggang dari api.

Masyarakat Aceh Bermazhab Syafi'i?

Di bagian lain suratnya, Abuya MIJ menyimpulkan bahwa mayoritas masyarakat Aceh bermazhab Syafi'i dalam fiqh. Menurut penulis, kesimpulan ini hanyalah kesimpulan asal-asalan belaka. Kesimpulan yang tepat adalah, masyarakat Aceh menganut Mazhab *Syafi'iyah*, bukan Mazhab Syafi'i. Hal ini sudah pernah diulas oleh Dr. Aslam M. Nur dalam salah satu artikelnya di Serambi Indonesia.

Secara lebih tegas dapat dikatakan bahwa, mazhab fiqh sebagian besar masyarakat Aceh hanya merujuk kepada kitab-kitab yang

ditulis oleh ulama-ulama kemudian yang menisbahkan mazhabnya kepada Imam Syafi'i. Di antara ulama yang menjadi rujukan sebagian masyarakat Aceh adalah Imam Ramli, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, Imam Subqi, dll. Dengan demikian tepatlah, jika disebut bahwa mazhab fiqih yang berkembang di Aceh adalah *Syafi'iyah*, bukan mazhab Syafi'i.

Teologi *Ahlussunnah Waljama'ah*

Salah satu alasan lainnya yang diajukan oleh Abuya MIJ guna menolak kedatangan Syaikh Al-Kalbani adalah karena masyarakat Aceh menganut teologi *Ahlussunnah Waljama'ah*. Sebenarnya sebutan yang tepat untuk teologi yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh adalah teologi *Asy'ariyah*. Bahkan, jika ditelisik, banyak pendapat-pendapat dalam teologi *Asy'ariyah* yang justru bertolak belakang dengan pemahaman Imam Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri.

Namun demikian, penyebutan *Ahlussunnah Waljama'ah* juga tidak sepenuhnya salah, karena dalam buku-buku teologi, aliran *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah* memang dimasukkan dalam katagori *Ahlussunnah*. Cuma saja, Abuya MIJ telah “memonopoli” istilah *Ahlussunnah* hanya kepada *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah* saja. Padahal, *Salafiyah*, yang oleh sebagian pihak digelar sebagai Wahabi juga merupakan bagian dari *Ahlussunnah Waljama'ah*.

Di sisi lain, Abuya MIJ mencoba menggiring opini publik, bahwa Wahabi bukanlah *Ahlussunnah Waljama'ah*, atau lebih tepatnya Wahabi adalah sesat, demikian pemahaman Abuya kita MIJ. Dalam pandangan penulis, anggapan ini wajar-wajar saja dimiliki oleh seorang MIJ, karena yang dijadikan rujukan oleh MIJ untuk menilai Wahabi adalah kitab-kitab yang ditulis oleh orang-orang anti Wahabi. Dengan demikian, kesimpulan MIJ tidak dapat disebut ilmiah, karena dalam

kajiannya, MIJ tidak memakai sumber-sumber primer, yaitu kitab-kitab yang ditulis sendiri oleh Wahabi. MIJ justru memakai sumber sekunder yang belum tentu benar dan bahkan banyak berisi fitnah belaka.

Dengan demikian dapatlah dipahami bahwa Abuya *Al-Mukarram Al-'Allamah* Muhammad Iqbal Jalil tidak memahami apa itu Wahabi. Sebutan Wahabiyah adalah nama yang diciptakan oleh orang-orang yang anti kepada sunnah Nabi. Nama yang tepat untuk mereka adalah Salafiyah, bukan Wahabiyah.

Abuya MIJ juga lupa, bahwa ramai tokoh Aceh masa lalu yang pemahaman keagamaannya serupa dengan pemahaman *Salafiyah* (Wahabi). Sebut saja Teungku Muhammad Daud Beureueh, Tgk Hasballah Indrapuri, Tgk. Hasbi Ash-Shiddiqie dan Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Di samping itu, organisasi PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh) yang didirikan di Matanggumpangdua, sebagian besar anggotanya juga berpahaman *Salafiyah*.

Dengan demikian, sangat tidak patut Abuya MIJ menolak kedatangan ulama *Salafiyah* ke Aceh. Penulis juga tidak tahu, apakah Abuya Muhammad Iqbal Jalil lebih 'alim dari Syaikh Al-Kalbani, sehingga menolak kedatangan beliau? Syaikh Al-Kalbani adalah ulama yang memimpin shalat di Masjidil Haram. Sedangkan kita, jangankan menjadi imam, menjadi makmum saja belum tentu. Berhentilah menuding Wahabi, Wahabi dan Wahabi, karena belum tentu yang menuding itu lebih baik dari yang dituding. *Wallahu A'lam*.

[*Kompasiana*, 28 Februari 2015]

WAHABI BACA QUNUT DI ACEH

Jujur saja, saya sudah merasa “muak” terus-menerus memperbincangkan Wahabi. Padahal masih banyak topik lain yang penting untuk dibahas. Namun apa hendak dikata, orang-orang terus “membidik” Wahabi dengan sejuta tuduhan tak berdasar. Isu Wahabi telah dijadikan sebagai sarana untuk meluapkan emosi “kejahilan” yang telah mengakar di kepala “mereka”. Lagi-lagi, tulisan ini tidak bermaksud memprovokasi siapa pun, tidak pula untuk menggurui, tapi hanya sekedar “usaha kecil-kecilan” untuk membela saudara se-iman yang terus-menerus dijadikan “bulan-bulanan” oleh saudaranya sendiri.

Tulisan ini pada hakikatnya adalah kelanjutan dari tulisan sebelumnya yang bertajuk “Wahabi, Wahabi dan Wahabi” yang sempat

tersiar di forum ini. Akibat tulisan tersebut, berbagai komentar pun bermunculan. Ada sebagian kecil yang mendukung, namun tidak sedikit pula yang “mengecam”. Malah ada yang menyarankan saya untuk banyak-banyak membaca. Saya berterima kasih atas berbagai koreksi yang disampaikan. Bahkan ada yang marah-marah, karena saya mengkritik Sirajuddin Abbas. Tapi sayangnya, mereka tak adil – ketika Sirajuddin Abbas mengkritik Ibn Taimiyah dan “menghujat” Wahabi, mereka justru diam saja. Segala konsekwensi, baik yang manis (dukungan) maupun yang pahit (hujatan), keduanya – meminjam istilah Thayeb Loh Angen – saya minum dalam waktu bersamaan.

Sebenarnya, tulisan sebelumnya dengan judul “Wahabi, Wahabi dan Wahabi” adalah bentuk “kekesalan” saya kepada saudara saya Syaikhul Akbar Muhammad Iqbal Jalil yang secara tidak langsung telah “merusak” *ukhuwah Islamiyah* dengan tulisannya yang mengkritik kedatangan Syaikh Adil Al-Kalbani ke Aceh. Syaikh Al-Kalbani disebut-sebut sebagai Wahabi.

Ada sebagian rekan bertanya, kenapa tulisan saya tersebut tidak dikirim ke media cetak saja seperti Serambi Indonesia, Waspada Medan atau media cetak lainnya agar bisa dibaca oleh Muhammad Iqbal Jalil. Rasanya tak perlu saya jawab, selama media-media itu masih “waras” tentunya tulisan tentang Wahabi akan sulit mendapat tempat, kecuali jika saya punya media sendiri. Jika saya punya media sendiri, tentu saya akan tulis tentang Wahabi setiap hari. Sampai-sampai, jika satu hari saja saya lupa menulis, orang-orang akan bertanya: “apa tidak ada berita tentang Wahabi hari ini?” Begitulah.

Sebagai seorang muslim, saya merasa punya kewajiban untuk mendamaikan saudara saya yang bertikai, tentunya sesuai dengan kemampuan yang ada. Hal ini sebagaimana telah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran. *Innamal mukminuna ikhwah, fa ashlihu baina*

akhawaikum (setiap mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah saudaramu).

Saya juga teringat sebuah hadits Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* yang oleh para ulama dikatakan *shahih* riwayatnya. “*La yu`minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsih*” (tidaklah disebut beriman seseorang itu, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri). Atas dasar ini-lah saya berani menulis sekedar perlu, demi saudara saya yang “dihantam” habis-habisan oleh saudaranya sendiri.

Baca Qunut dan Jahar Basmillah

Sekedar mengingatkan, bahwa tulisan ini masih berkaitan erat dengan surat terbuka yang dilayangkan oleh saudara saya Al-Imam Muhammad Iqbal Jalil di kolom *droe keu droe* Harian Serambi Indonesia beberapa waktu lalu. Akhirnya Allah ‘Azza Wajalla telah “menggulung lidah” orang-orang yang selama ini menaruh syak wasangka tak berdasar kepada seorang ulama besar di tanah haram. Berbagai tudingan emosional yang dituduhkan kepada Syaikh Adel Al-Kalbani oleh Imam Muhammad Iqbal Jalil tidak terbukti adanya.

Dalam suratnya, Muhammad Iqbal Jalil menyebut bahwa Syaikh Adel Al-Kalbani adalah seorang Wahabi yang idologinya berseberangan dengan keyakinan umum masyarakat Aceh. Demikian pula dengan mazhab fiqih yang dianut oleh Al-Kalbani juga dianggap bertolak belakang dengan mazhab *Syafi’iyah* yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh.

Namun apa lacur? Syaikh Al-Kalbani justru telah menunjukkan kebesaran jiwanya yang sangat menghargai pemahaman agama masyarakat Aceh. Beredar informasi, bahwa Syaikh Al-Kalbani *menjaharkan* bacaan *bismillah* ketika membaca *Fatihah*. Tidak hanya

itu, beliau juga membaca doa *qunut* pada saat memimpin shalat Shubuh. Sesuatu yang tak pernah terduga sebelumnya dan mungkin tak pernah terpikir oleh Al-Imam Muhammad Iqbal Jalil. Ketakutan berlebihan yang melanda Muhammad Iqbal Jalil cs selama ini hanyalah ketakutan yang tak beralasan.

Apa yang telah dilakukan oleh Al-Kalbani di Aceh, tentunya berbeda jauh dengan tingkah sebagian masyarakat Aceh yang datang ke tanah suci. Ada sebagian kecil masyarakat Aceh yang tidak mau shalat di belakang Imam Masjidil Haram ketika mereka pergi haji atau umrah. Alasan mereka, karena imamnya Wahabi. *Han ek takhem* (tak sanggup tertawa).

Beberapa waktu lalu, ada sebuah akun *facebook* di Aceh yang mengomentari kedatangan Syaikh Al-Kalbani ke Aceh. Si pemilik akun menulis: “*jameun awak Arab keuno bak ulama Aceh dijak meureuno agama, jino pu pasai awak Arab jak peurateb ureung Aceh*” (dulu orang Arab belajar agama pada ulama Aceh, sekarang kok tiba-tiba orang Arab mau mengajarkan orang Aceh), kira-kira seperti itulah kalimatnya. Pernyataan seperti ini, bukan hanya bertentangan dengan fakta sejarah, tapi juga membuktikan sungguh congkak dan sombongnya kita, padahal ilmu kita barulah secuil.

Adapula yang menulis: “*Aceh nyo seuramoe Mekkah, hana peurle jak meuruno bak awak Mekkah*” (Aceh ini Serambi Mekkah, jadi tidak perlu belajar pada orang Mekkah). Aneh. Kalau memang tidak senang kepada Mekkah, buat apa pakai nama Mekkah segala. Kenapa tidak sebut saja serambi lain, jangan Serambi Mekkah. Lagi pula di Mekkah juga Wahabi semua, itu artinya Serambi Mekkah sama saja dengan Serambi Wahabi. Nah! Bingung jadinya. *Wallahul Musta'an*.

[*Kompasiana*, 06 Maret 2015]

ACEH DAN WAHABI, SEBUAH WACANA MENARIK

Meskipun telah muncul hampir selama tiga abad (sejak abad 18), namun isu Wahabi masih saja “laris manis” dan selalu menjadi topik hangat dalam perbincangan kaum muslimin di seluruh dunia. Tidak seperti isu-isu lain yang hilang ditelan zaman, tapi isu tentang Wahabi (Wahabisme/Wahabiyah) terus menggelinding mengikut alur masa. Nampaknya, sebelum dunia ini kiamat, topik tentang Wahabi tidak akan pernah mati dan bahkan akan terus menyita perhatian kaum muslimin dari dua kutub yang saling bertentangan.

Di satu pihak, Wahabiyah dianggap sebagai gerakan pemurnian agama paling sukses di panggung sejarah – yang di beberapa

wilayah telah berhasil mengembalikan ajaran Islam ke dalam bentuk aslinya. Namun di pihak lain, gerakan Wahabi justru dianggap sebagai petaka yang telah merusak tradisi nenek moyang. Dalam perkembangan selanjutnya, ramai pula pihak-pihak yang menghubungkan Wahabi dengan ekstrimisme dan terorisme. Terlepas di kutub mana kita berdiri, tapi yang jelas isu Wahabi telah membuat kita saling bertegang urat saraf sesama kaum muslimin. Padahal Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah memperingatkan kita, bahwa kaum muslimin itu bagaikan tubuh yang satu, di mana ketika satu bagian tubuh merasa sakit, bagian lain juga ikut merasakan kesakitan itu. Namun yang terjadi hari ini, jauh panggang dari api, tanpa sengaja kita telah terjebak dalam skenario *divide et impera* yang dilancarkan oleh kaum *kafirin*. Dalam beberapa *literatur*, di antaranya sebagaimana disebut oleh Ruray, bahwa stigma Wahabi adalah istilah yang digunakan oleh penjajah Inggris untuk menamakan Gerakan Mujahidin di Deoband India.

Oleh sebagian pihak, Wahabi sering dicitrakan sebagai penentang adat istiadat sehingga istilah Wahabi menjadi momok yang menakutkan. Bahkan, tragisnya lagi, oleh sebagian kalangan, Wahabi telah dianggap sebagai golongan di luar *Ahlussunnah Waljama'ah*. Padahal jika ditelisik secara objektif, Wahabi juga bagian dari *Ahlussunnah Waljama'ah*, sama halnya dengan *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*, meskipun terdapat perbedaan yang ketat di beberapa sisi. Dalam hal teologi, banyak terdapat persamaan antara Salafiyah (Wahabi) dengan pendapat-pendapat Abu Hasan Al-Asy'ari. Demikian pula dalam bidang *fiqh*, umumnya Salafiyah (Wahabi) lebih dekat kepada Mazhab Hanbali, cuma saja, mereka tidak mengikatkan diri dengan mazhab-mazhab yang ada. Tapi, jika dicermati, pendapat-pendapat Salafiyah “tidak pernah keluar” dari pusaran empat “Mazhab Mu'tabar”. *Wallahu A'lam*.

Aceh dan Wahabi

Aceh yang terletak di ujung Barat Indonesia sebenarnya juga telah “akrab” dengan Wahabi. Pada masa-masa pergerakan kemerdekaan, di Aceh telah berdiri Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diketuai oleh Teungku Muhammad Daud Beureu-eh. Secara ideologis, jika diteliti dengan cermat, pemikiran keagamaan PUSA memiliki banyak kesamaan (untuk tidak menyebut identik) dengan pemikiran-pemikiran yang dikembangkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi Arabiya pada abad ke 18. Bahkan, berdasarkan riset yang pernah dilakukan oleh Djami’ah IAIN Ar-Raniry sekira tahun 70-an, disebutkan bahwa Tgk. Hasballah Indrapuri, seorang ulama di Aceh Besar menggunakan Kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengajarkan tauhid kepada umat.

Bahkan, di Aceh banyak ulama-ulama, khususnya di masa lampau yang pemikiran keagamaannya “serumpun” dengan pemikiran Salafiyah (Wahabi), sebut saja Prof. Dr. Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddiqie yang buku-bukunya masih dibaca sampai sekarang. Uniknya lagi, ramai pula tokoh-tokoh Aceh di masa pergerakan kemerdekaan yang konsep keagamaannya serupa dengan Wahabi (Salafiyah). Dan bahkan organisasi PUSA yang merupakan organisasi besar di Aceh kala itu, mayoritas anggotanya memiliki pemahaman keagamaan yang seirama dengan “Wahabi”.

Terlepas dari berbagai kekurangan (namanya manusia), diakui atau pun tidak, khususnya di Aceh, Wahabi memiliki kontribusi besar dalam memajukan pendidikan di Aceh, khususnya pendidikan modern. Didirikannya Al-Muslim di Aceh, tepatnya di Kota Matanggumpungdua, yang pada perkembangan selanjutnya telah melahirkan sekolah-sekolah modern, sekolah tinggi dan universitas, merupakan bukti paling otentik bahwa Wahabi punya “pengaruh besar” kala itu.

Pengaruh Wahabi baru “meredup” di Aceh pada era 90-an, di mana – seiring dengan populernya Gerakan Aceh Merdeka, “hegemoni” gerakan tradisional konservatif semakin kuat di Aceh. Demikianlah guliran sejarah yang tak bisa dihalau. Timbul-tenggelamnya suatu gerakan pemikiran dalam pentas sejarah adalah lumrah saja. Tapi, narasi di atas setidaknya bisa mengingatkan kita bahwa Wahabi bukanlah istilah baru di Aceh. Suka tidak suka, senang tidak senang, Wahabi telah mengukir prestasi gemilang di masa lalu, khususnya di awal-awal kemerdekaan. Beberapa tokoh besar di Indonesia, semisal HOS Cokroaminoto, Muhammad Natsir, Ahmad Dahlan, Hamka dan sederetan nama-nama besar lainnya, tentunya tidak bisa dipisahkan dari pengaruh Wahabi (meskipun tidak selamanya identik). Demikian pula di Aceh, terkenal nama di antaranya, Teungku Daud Beureueh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku Hasballah Indrapuri, Ayah Hamid Namploh, Ali Hasyimi, Husen Al-Mujahid, M. Nur El-Ibrahimi dan sejumlah nama lainnya yang tidak mungkin semuanya disenaraikan dalam tulisan ini, adalah tokoh-tokoh yang (dalam banyak hal) tidak bisa dipisahkan dari pemikiran Wahabi.

Ketika “Santri” Menolak Wahabi

Beberapa waktu lalu (Jumat, 27/02/15), seorang yang mengaku santri menulis sebuah surat terbuka di Serambi Indonesia dengan tajuk “Surat Terbuka kepada Kapolda Aceh”. Surat tersebut ditulis oleh Muhammad Iqbal Jalil. Dalam surat tersebut, Muhammad Iqbal Jalil menyatakan keberatannya kepada Kapolda Aceh, Husein Hamidi, yang kononnya akan mendatangkan seorang penceramah dari Arab Saudi, Syekh Adil Al-Kalbani. Yang menjadi alasan utama penolakan santri tersebut adalah disebabkan Syaikh Adil Al-Kabani adalah seorang Wahabi. Santri tersebut berdalih bahwa mayoritas masyarakat Aceh menganut mazhab Syafi’i dalam bidang fiqh dan

Ahlussunnah waljama'ah dalam bidang teologi. Menurut santri tersebut, Syekh Adil Al-Kalbani adalah sosok yang kontroversial sehingga bisa mengundang penolakan dari sejumlah masyarakat. Sang santri juga menyarankan kepada Kapolda untuk mengundang para Masyaikh Al-Azhar di Mesir yang menurutnya memiliki kesamaan idiologi dengan mayoritas masyarakat Aceh.

Namun apa yang terjadi? Akhirnya Allah ‘Azza Wajalla telah “menggulung lidah” orang-orang yang selama ini menaruh “syak wasangka” tak berdasar kepada seorang ulama besar di tanah haram. Berbagai tudingan emosional yang dituduhkan kepada Syaikh Adel Al-Kalbani oleh santri Muhammad Iqbal Jalil tidak terbukti adanya.

Wahabi Baca Qunut

Dalam suratnya, Muhammad Iqbal Jalil menyebut bahwa Syaikh Adel Al-Kalbani adalah seorang Wahabi yang idiologinya berseberangan dengan keyakinan umum masyarakat Aceh. Demikian pula dengan mazhab fiqh yang dianut oleh Al-Kalbani juga dianggap bertolak belakang dengan mazhab *Syafi'iyah* yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Aceh.

Namun apa lacur? Syaikh Al-Kalbani justru telah menunjukkan kebesaran jiwanya yang sangat menghargai pemahaman agama masyarakat Aceh. Beredar informasi, bahwa Syaikh Al-Kalbani *menjaharkan* bacaan *bismillah* ketika membaca *Fatihah*. Tidak hanya itu, beliau juga membaca doa *qunut* pada saat memimpin shalat Shubuh, sesuatu yang tidak pernah beliau lakukan di negerinya. Tentunya hal ini tak pernah terduga sebelumnya dan mungkin tak pernah terpikir oleh santri kita Muhammad Iqbal Jalil. Ketakutan berlebihan yang melanda Muhammad Iqbal Jalil cs selama ini hanyalah ketakutan yang tak beralasan.

BAGIAN KEDUA:

Apa yang telah dilakukan oleh Syaikh Al-Kalbani di Aceh, tentunya berbeda jauh dengan tingkah sebagian masyarakat Aceh yang datang ke tanah suci. Ada sebagian kecil masyarakat Aceh yang tidak mau shalat di belakang Imam Masjidil Haram ketika mereka pergi haji atau umrah. Alasan mereka, karena imamnya Wahabi. Tapi anehnya mereka (masyarakat kita) masih *berthawaf* di Ka'bah yang saban tahun dijaga dan dibersihkan oleh Wahabi. Kita menghujat Wahabi, tapi setiap musim haji kita masih *berwuquf* di “negeri Wahabi”. Tentunya *Allah Subhanahu wata'aala* Maha Tahu, kepada siapa tanah haram itu pantas dititipkan.

Semoga saja, apa yang telah dilakukan oleh Syaikh Al-Kalbani di Aceh dapat menjadi renungan bagi kita semua. Meskipun beliau adalah Imam Besar di tanah haram dan bermazhab “non Syafi’i”, tapi beliau sangat menghormati mazhab yang dianut orang Aceh. Hal serupa juga sangat sering dilakukan oleh imam-imam kaum muslimin di masa lalu, semisal Imam Syafi’i yang meninggalkan bacaan qunut ketika beliau shalat di seputaran makam Imam Abu Hanifah. Tentunya toleransi seperti ini harus terus kita lestarikan.

Akhirnya kita cuma bisa berharap agar kaum muslimin tidak terkotak-kotak dan saling tuding-menuding satu sama lain dengan stigma-strigma buruk semisal stigma Wahabi. Ego mazhab harus dikesampingkan dan *ukhuwah Islamiyah* harus dikedepankan. *Wallahu A'lam*.

[*Hidayatullah.com, 25 Maret 2015*]

(Endnotes)

1. Sofyan Chalid: *Salafi Antara Tuduhan dan Kenyataan*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2011), hal. 38.
2. Abu Mujahid & Haneef Oliver, *Virus Wahabi*, (Bandung: Toobagus Publishing, 2010), hal. 120-121.
3. Muhammad Jamil Zainu, *Mitos Wahabi*, terj. Abu Muhammad Farhan&Abu Yusuf, (Jogjakarta: Al-Husna, 2010), hal. 45-46.
4. Lihat: Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab Tauhid*, terj. Abu Ismail Fuad, (Yogyakarta: Pustaka Al Haura, 2009).
5. Lihat: Zaid bin Muhammad Al – Madkhaly, *Syarah Aqidah Muhammad bin Abdul Wahab*, terj. Hanan Hoesin Bahanan, (Solo, Pustaka Ar-Rayyan, 2007).
6. Lihat: Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin, *Syarah Tiga Landasan Agama*, terj. Abu ‘Abdirrahman Muhammad, (Tegal: Ash-Shaf Media, 2009).





BAGIAN KETIGA:

MONOPOLI MAZHAB

MPU ACEH DAN FATWA PUJANGGA

(Analisis terhadap Fatwa MPU Aceh No. 09 Tahun 2014
tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan
dan Penyiaran Agama Islam di Aceh)

Aceh Serambi Mekkah, demikianlah sanjungan yang saban hari terdengar ketika orang-orang menyebut nama Aceh. Sebutan Serambi Mekkah bukan-lah isapan jempol semata, tetapi memiliki landasan historis yang cukup kuat. Dalam beberapa catatan sejarah, disebutkan bahwa Aceh adalah jalur pertama masuknya Islam ke Nusantara. Sebagian ahli sejarah menyatakan bahwa Islam pertama sekali bertapak di Samudra Pasai sekira abad ke 7 Hijrah (13 Masehi). Namun teori tersebut akhirnya “terbantahkan” dengan ditemukannya bukti-bukti baru bahwa Islam telah masuk ke Aceh melalui Peureulak pada abad pertama Hijrah (7 Masehi). Baru-baru ini, di Banda Aceh,

juga telah ditemukan beberapa benda peninggalan sejarah di Kampung Pande. Bukan tidak mungkin, penemuan benda-benda arkeologis ini akan turut melahirkan teori baru terkait sejarah masuknya Islam ke Aceh.

Terlepas dari “*khilafiyah*” para ahli sejarah terkait waktu dan lokasi masuknya Islam ke Aceh, namun para sejarawan nampaknya hampir sepakat, bahwa di masa lampau Aceh pernah menjadi pusat peradaban Islam di Nusantara. Di Aceh juga pernah hidup beberapa ulama besar semisal Syaikh Nuruddin ar-Raniry dan Syaikh Abdurrauf as-Singkili yang lebih dikenal dengan Syiah Kuala. Tokoh lainnya yang pernah hidup di Aceh adalah Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin as-Sumatrani. Di sisi lain, dalam konteks sosio-historis, masyarakat Aceh juga dikenal sebagai masyarakat yang fanatik terhadap Islam. Masyarakat Aceh juga memiliki sensitifitas yang tinggi terhadap agama. Hal ini dibuktikan dengan penolakan besar-besaran yang dilakukan oleh masyarakat Aceh terhadap paham dan aliran sesat.

Di sisi lain, perlu pula diketahui bahwa dalam hal *teologi*, mayoritas masyarakat Aceh merujuk kepada pemikiran *Asy’ariyah* dan dalam bidang *fiqih* berpedoman kepada Mazhab *Syafi’iyah*. Di samping itu, secara teoritis, para *teungku* dan ulama di Aceh mengakui keberadaan dan kebenaran empat mazhab *mu’tabar*. Namun dalam pelaksanaannya, hal ini sering “terabaikan”. Dalam kondisi tertentu, terkadang perbedaan tata cara ibadah juga menjadi pemicu timbulnya stigma-stigma sesat terhadap komunitas tertentu yang dianggap menyalahi tradisi beragama yang telah mengakar dan dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat Aceh.

Fatwa MPU Aceh

Sebagai daerah yang telah diberi hak untuk menjalankan

Syariat Islam, Aceh memiliki beberapa kekhususan yang diatur secara khusus dalam undang-undang dan *qanun*. Majelis Permusyawaratan Ulama merupakan lembaga keagamaan yang memiliki otoritas dalam melakukan kajian terkait persoalan agama di Aceh. Bagi masyarakat Aceh, MPU merupakan rujukan terakhir dalam menyelesaikan berbagai permasalahan keagamaan. Sebagai masyarakat yang dikenal fanatik terhadap Islam, dapat dikatakan bahwa fatwa MPU memiliki kedudukan tinggi dalam pandangan masyarakat Aceh. Hal ini disebabkan karena personalia MPU diisi oleh ulama-ulama yang dihormati oleh masyarakat.

Beberapa waktu lalu, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh telah mengeluarkan Fatwa No. 9 Tahun 2014 tentang Pemahaman, Pemikiran, Pengamalan dan Penyiaran Agama Islam di Aceh. Meskipun fatwa tersebut dikeluarkan oleh para ulama, namun dalam pandangan penulis, beberapa poin dalam fatwa tersebut tampak janggal dan terkesan tidak ilmiah, di antaranya:

Pertama, “mengimani bahwa zat Allah di atas langit atau ‘Arasy adalah sesat dan menyesatkan.” Klaim yang difatwakan oleh MPU ini jelas-jelas bertentangan dengan dalil, Alquran dan Sunnah. Tentang persoalan *istiwa* Allah di atas ‘Arasy telah jelas disebutkan dalam Alquran dan hadits shahih. Para ulama besar dan Imam Mazhab juga telah secara terang menyatakan bahwa Allah *beristiwa* di atas ‘Arasy dan juga turun ke langit dunia pada sepertiga malam. Imam Darul Hijrah, Malik bin Anas dalam salah satu keterangannya telah menyatakan bahwa wajib bagi kaum muslimin untuk beriman kepada *istiwa* Allah. Demikian pula dengan Abu Hasan Al-Asy’ari dalam *Al-Ibanah* secara tegas menyatakan bahwa Allah *beristiwa* di atas ‘Arasy tanpa ada penakwilan. Sangat kontradiktif, ketika di satu sisi MPU Aceh menyatakan mengikut kepada pemahaman Al-Asy’ari, tetapi di sisi lain

MPU Aceh justru (baik sengaja atau pun tidak) menolak fatwa-fatwa dari Imam Al-Asy'ari.

Kedua, “pemahaman yang menyatakan bahwa wajib mengikuti Alquran dan Hadits dalam bidang akidah, syariah dan akhlak adalah salah.” Poin ini semakin mempertegas bahwa MPU Aceh telah tergesa-gesa dalam membuat keputusan, sehingga fatwa MPU Aceh No. 9 tahun 2014 bertentangan dengan fatwa sebelumnya. Dalam fatwa MPU Aceh No. 04 Tahun 2007 tentang pedoman Identifikasi Aliran Sesat, dalam salah satu poinnya disebutkan bahwa mengingkari kebenaran Alquran dan mengingkari kedudukan hadits sebagai sumber ajaran Islam merupakan salah satu kriteria aliran sesat. Jika merujuk pada fatwa MPU Aceh No. 4 tersebut, maka MPU Aceh telah “menelan ludah sendiri”, karena telah mengingkari kedudukan Alquran dan hadits sebagai sumber ajaran Islam.

Ketiga, dalam bab Taushiyah, MPU Aceh meminta pemerintah untuk segera menutup pengajian yang dinyatakan sesat oleh MPU, seperti pengajian kelompok Salafi di Gampong Pulo Raya, Kecamatan Titeu, Kabupaten Pidie. Dalam hal ini, menurut penulis, MPU Aceh telah keluar dari kewenangannya. MPU Aceh, sesuai dengan Qanun Aceh No. 11 Tahun 2002 hanya memiliki kewenangan untuk menetapkan kriteria aliran sesat. Adapun pihak yang berwenang memeriksa dan mengadili pelaku aliran sesat adalah Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan Qanun Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam. Dengan kata lain, MPU Aceh tidak berwenang untuk menetapkan seseorang atau pun sebuah kelompok sebagai penganut aliran sesat, apalagi hal tersebut dilakukan tanpa proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah.

Hasil Investigasi Wartawan Waspada

Pasca terbitnya fatwa MPU Aceh No. 9 Tahun 2014, wartawan

Harian Waspada Medan (Muhammad Riza) telah melakukan upaya untuk mewawancarai tokoh-tokoh Salafi di pedalaman Pidie. Dalam wawancara tersebut, terungkap beberapa hal aneh, di mana MPU Aceh telah melakukan beberapa “kesalahan” dalam fatwanya tersebut. MPU Aceh, entah karena sengaja atau pun tidak, telah menambah dan mengurangi keterangan yang diperoleh dari tokoh Salafi. Di antara “keteledoran” MPU sebagaimana tercatat dalam laporan Muhammad Riza adalah sebagai berikut:

Pertama, dalam bidang Akidah; “mengimani bahwa zat Allah *hanya* di atas langit atau *‘Arasy* adalah sesat dan menyesatkan.” Menurut Tgk. Adam Abu Rifqi (tokoh Salafi), penambahan kata “hanya” dalam fatwa tersebut adalah tambahan dari pihak MPU dan bukan berasal dari keterangan Salafi. Penambahan kata “hanya” tersebut tentunya akan berimplikasi pada pergeseran makna kalimat. Sebagaimana kita ketahui, berdasarkan informasi dari Alquran dan Sunnah, juga dari para ulama bahwa Allah juga turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Dalam fatwa tersebut, terkesan bahwa penambahan kata “hanya” yang dilakukan oleh MPU Aceh adalah sebuah upaya untuk “menjerat” Salafi.

Kedua, “mengimani bahwa zat Allah terikat dengan waktu, tempat dan arah (*berjihah*) adalah sesat dan menyesatkan”. Menurut Tgk. Adam, pihak Salafi justru menolak keyakinan ini dan tidak pernah menyatakan bahwa Allah *berjihah*. Tapi sayangnya, pihak MPU Aceh, lagi-lagi “menjerat” Salafi dengan sesuatu yang tidak pernah mereka yakini.

Ketiga, dalam bidang ibadah; “pemahaman yang membolehkan niat shalat di luar *takbiratul ihram* adalah salah.” Pada prinsipnya persoalan ini adalah masalah fiqih, di mana para ulama telah berbeda pendapat. Tapi anehnya MPU Aceh telah berlagak layaknya “Mujtahid Agung” yang dengan penuh percaya diri menetapkan bahwa

pemahaman tersebut sebagai sesuatu yang salah.

Fatwa Pujangga

Dari tiga poin penting yang penulis kutip dari Harian Waspada di atas, terlihat jelas bahwa MPU Aceh telah menunjukkan sikap tergesa-gesa dalam mengeluarkan sebuah fatwa. Bagi masyarakat awam, fatwa MPU merupakan sebuah “titah” yang tidak boleh dibantah, sehingga akan memunculkan paradigma keliru terhadap kelompok tertentu. Dan bukan tidak mungkin, dalam kondisi tertentu, jika tidak cermat, fatwa MPU justru dapat memicu konflik di tengah masyarakat.

Anehnya lagi, fatwa MPU Aceh terkesan tidak ilmiah dan berseberangan dengan fatwa yang pernah dikeluarkan oleh MUI Jakarta Utara tentang Salafi. Dalam fatwa yang diterbitkan pada 08 April 2009 tersebut, MUI Jakarta Utara menegaskan bahwa Salafi tidak termasuk dalam 10 kriteria aliran sesat yang telah ditetapkan oleh MUI Pusat. Menurut MUI Jakarta Utara, dakwah salaf adalah ajakan untuk memurnikan ajaran Islam dengan kembali kepada Alquran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat *Radhiallahu ‘anhum*.

Lagi pula, komunitas Salafi tidak hanya berada di Aceh, tetapi menyebar di seluruh dunia, khususnya di Saudi Arabiya. Sehingga menjadi aneh, ketika MPU Aceh menyatakan Salafi sebagai aliran sesat, sedangkan ulama Nusantara lainnya tidak berpendapat demikian. Uniknya lagi, MUI pusat yang lebih otoritatif justru tidak pernah mengeluarkan fatwa sesat terhadap komunitas Salafi.

Akhirnya kita hanya bisa berharap agar MPU Aceh dapat bersikap lebih dewasa dalam menyikapi persoalan umat. Jangan sampai ego Mazhab menjadi alasan bagi MPU untuk “menyingkirkan” keberagaman yang telah tertata rapi di tengah masyarakat. Segala keputusan yang dilahirkan oleh MPU Aceh mestilah memiliki dasar

BAGIAN KETIGA:

hukum yang kuat, sehingga fatwa MPU tidak berubah menjadi “fatwa pujangga. *Wallahul Musta'an*.

[*Harian Waspada Medan, 13 Oktober 2014*]

REZIM MUTAZILAH DAN KONFLIK MAZHAB ACEH

Dalam bukunya, Muhammad Ahmad menyebutkan bahwa kata Mu'tazilah berasal dari kata *i'tizal* yang berarti memisahkan diri. Sedangkan Mu'tazilah adalah orang-orang yang memisahkan diri. Sebagian ulama menyebut bahwa nama Mu'tazilah adalah sebuah nama yang diberikan oleh orang dari luar golongan Mu'tazilah. Adapun orang-orang Mu'tazilah sendiri lebih senang menggunakan nama *Ahlut Tauhid wal 'Adl*.¹ Pendapat lain, sebagaimana dikutip oleh Harun Nasution dari Ibn Al-Murtadha, menyatakan bahwa kaum Mu'tazilah sendirilah yang memakai nama tersebut dan bukan diberikan oleh orang lain.² Menurut Syahrastani, *firqah* Mu'tazilah disebut juga dengan kaum

Qadariyah, akan tetapi Mu'tazilah sendiri menyatakan bahwa sebutan tersebut *mubham* sehingga mereka menolak disebut Qadariyah.³

Aliran Mu'tazilah lahir lebih kurang tahun 120 H, di Kota Bashrah. Aliran ini pernah menjadi mazhab resmi negara pada masa pemerintahan Abbasiyah di bawah pimpinan Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq.⁴ Aliran Mu'tazilah diangkat sebagai mazhab resmi negara pada masa Khalifah Al-Makmun. Saat itu, keberadaan mazhab Mu'tazilah ini ditentang oleh kalangan *Muhadditsin* (Ahlul Hadits/Sunni).⁵

Dalam rangka menancapkan pengaruh Mu'tazilah, Khalifah Al-Makmun memerintahkan untuk melakukan *al-mihnat* (pemeriksaan) terhadap keyakinan yang dianut oleh setiap pejabat dan pembesar pemerintahan, khususnya pejabat dan pembesar lembaga peradilan (hakim). Al-Makmun juga memerintahkan agar dilakukan pemeriksaan terhadap tokoh-tokoh terkemuka dalam masyarakat. Menurut Joesoef Sou'yb, tindakan yang dilakukan oleh Khalifah Al Makmun ini adalah sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai *Amirul Mukminin* dalam memelihara kemurnian agama Islam.⁶

Akibat pengaruh dari seorang tokoh besar Mu'tazilah, Ahmad bin Abi Daud yang saat itu bertindak sebagai Hakim Agung, Khalifah Al-Makmun pun melancarkan aksinya untuk memaksakan Mazhab Mu'tazilah kepada kaum muslimin yang saat itu mayoritas Sunni. Tindakan yang dilakukan oleh Rezim Mu'tazilah ini pada prinsipnya sangat bertentangan dengan slogan yang sering dikampanyekan oleh Mu'tazilah sendiri, yaitu kebebasan berkehendak dan kebebasan berbuat (*free will and free act*).⁷

Khalifah Al-Makmun memaksa seluruh tokoh-tokoh agama untuk mengakui bahwa Alquran adalah makhluk yang merupakan

salah satu keyakinan Mu'tazilah. Dalam pemeriksaan tahap pertama, seluruh tokoh agama yang terdiri dari Ahlul Hadits dan Fuqaha menolak keyakinan Alquran sebagai makhluk. Mendengar jawaban-jawaban tersebut, Khalifah Al-Makmun kembali mengeluarkan peringatan keras agar membunuh siapa saja yang tidak mengakui Alquran sebagai makhluk.

Saat itu dilakukan kembali pemeriksaan terhadap 30 orang tokoh agama yang terdiri dari kalangan Kehakiman (*Al-Qudhat*), kalangan Ahlul Hadits (*Muhadditsin*) dan kalangan ahli hukum (*Fuqaha*). Akibat ancaman keras dari Khalifah, akhirnya 26 orang tokoh Sunni tersebut mengakui Alquran sebagai makhluk. Adapun empat tokoh lagi tetap mempertahankan prinsipnya dan tidak mengakui Alquran sebagai makhluk. Empat tokoh tersebut adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Sajjadat, Imam Al-Qarairiri dan Imam Muhammad bin Nuh. Keempat tokoh tersebut akhirnya dimasukkan dalam tahanan. Namun keesokan harinya, Imam sajjadat mengakui Alquran sebagai makhluk dan keesokan harinya lagi, Imam Al-Qarairiri juga membuat pengakuan serupa. Dengan demikian, hanya tinggal dua tokoh saja yang tetap berpendirian bahwa Alquran bukan makhluk. Mereka adalah Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Muhammad bin Nuh.⁸

Melalui suratnya, Khalifah Al-Makmun memerintahkan agar kedua tokoh keras kepala tersebut dibawa kepadanya. Namun dalam perjalanan menghadap Khalifah di Tarsus, tersebarlah berita bahwa khalifah Al-Makmun telah wafat. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh dibawa pulang ke Baghdad. Namun dalam perjalanan pulang ke Baghdad, Imam Muhammad bin Nuh jatuh sakit dan wafat. Dengan wafatnya Imam Muhammad bin Nuh, saat itu hanya tinggal Imam Ahmad bin Hanbal yang dengan teguh mempertahankan keyakinan Sunni sehingga akhirnya ia dikenal sebagai Imamnya

Ahlussunnah (nama lain dari *Ahlul Hadits*).

Sepeninggal Khalifah Al-Makmun, *mihnat* terus dilanjutkan oleh Khalifah Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq. Kekerasan demi kekerasan dalam rangka pemaksaan Mazhab Mu'tazilah kepada kaum muslimin terus berlanjut. Mu'tazilah berhasil menjadi mazhab resmi negara selama 34 tahun dan baru berakhir pada saat jabatan Khalifah dipegang oleh Al-Mutawakkil. Pada saat Khalifah Al-Mutawakkil berkuasa, beliau menghapuskan Mu'tazilah sebagai mazhab resmi negara dan menggantikannya dengan mazhab Sunni.⁹

Demikian sekelumit kisah Mu'tazilah yang pernah memimpin dunia Islam pada masa kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Sebagaimana telah maklum, bahwa Daulah Abbasiyah telah berhasil mengantarkan peradaban Islam pada puncak kejayaannya di masa klasik, di mana saat itu Eropa dan dunia Barat masih “terlelap” dari tidur panjangnya. Pada masa Abbasiyah pula lahir dan hidup para mujtahid besar seperti Imam Syafi'i *Rahimahullah*. Pada masa ini pula muncul para filosof dan ilmuwan terkemuka dalam dunia Islam. Namun dalam perjalanan sejarahnya, Daulah Abbasiyah di bawah kepemimpinan Mu'tazilah telah pula menoreh noda hitam yang mengundang kebencian kaum muslimin.

Penjelasan singkat di atas setidaknya dapat memberi gambaran kepada kita semua bagaimana ekstrimnya Mu'tazilah dalam menyebarkan mazhabnya dengan pemaksaan dan kekerasan yang dilakukan melalui “tangan-tangan” pemerintah. Ulama-ulama Mu'tazilah telah berhasil dengan sukses mempengaruhi para Khalifah untuk menyebarkan pahamnya.

Sosok Khalifah yang “lugu” dan ‘awam” agama telah berhasil dijadikan sebagai alat oleh ulama-ulama Mu'tazilah untuk memaksakan mazhab mereka kepada rakyat. Sebagaimana diakui sendiri oleh

Khalifah Al-Makmun bahwa tindakannya tersebut adalah untuk menyelamatkan aqidah kaum muslimin yang menurutnya telah syirik karena tidak mengakui Alquran sebagai makhuk. Dengan alasan inilah para khalifah Abbasiyah (Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq) melakukan berbagai kekerasan dan bahkan pembunuhan.

Untuk mengetahui pokok-pokok pemikiran Mu'tazilah secara lengkap dapat dilanjutkan dengan membaca buku-buku Teologi/Tauhid/ Ilmu Kalam dan kitab-kitab tentang Mu'tazilah. Dan secara ringkas dapat juga membaca artikel saya yang berjudul Teologi Mu'tazilah via www.patahkekeringan.blogspot.com

Mu'tazilah dan Aceh

Mungkin akan timbul pertanyaan dari para “agresor”, apa hubungannya Mu'tazilah dengan Aceh. Saya jawab, bahwa TIDAK ADA HUBUNGAN antara Mu'tazilah dengan Aceh. Catat ini! Hal ini penting ditegaskan karena bukan tidak mungkin para “agresor” akan mempelintir isi tulisan ini guna melancarkan fitnah.

Dalam konteks Teologi, secara lahiriyah TIDAK ADA penganut Mu'tazilah di Aceh. Sebagaimana telah maklum bahwa ada lima ajaran pokok Mu'tazilah yang dikenal dengan *Ushulul Khamsah*. Menurut tokoh-tokoh Mu'tazilah, seseorang baru dapat disebut sebagai Mu'tazili apabila dia mengakui kelima ajaran pokok tersebut. Apabila dia mengakui empat ajaran dan menolak satu ajaran saja, maka orang tersebut bukanlah Mu'tazilah. Dilihat dari sisi ini maka hampir dapat dipastikan bahwa TIDAK ADA yang namanya Mu'tazilah di Aceh. Bahkan Harun Nasution yang oleh sebagian pihak disebut-sebut sebagai Mu'tazilah bukanlah Mu'tazilah hakiki, karena (sepanjang bacaan saya yang terbatas) tidak ada bukti yang otentik bahwa Nasution menganut *Ushulul Khamsah*. Harun Nasution hanya menyerap pola pikir rasional

yang merupakan salah satu ciri khas Mu'tazilah. Seorang Mu'tazilah itu cenderung berpikir rasional, namun tidak setiap yang berpikir rasional itu dapat disebut sebagai Mu'tazilah.

Beberapa Kasus Terakhir di Aceh

Beberapa waktu lalu, tersiar kabar bahwa acara dakwah yang akan diisi oleh ulama Yaman gagal dilakukan di Mesjid Pulo Raya Pidie karena tidak adanya izin dari pemerintah setempat. Demikian pula dengan acara serupa yang direncanakan dilaksanakan di Pidie Jaya juga gagal. Saat itu berkembang isu, bahwa ulama Darul Hadits dari Yaman tersebut adalah Wahabi Radikal. Tidak begitu jelas, apakah pelarangan acara ini di Pidie dan Pidie Jaya disebabkan oleh isu "RADIKAL" tersebut atau oleh alasan-alasan lain yang tidak diketahui. *Wallahu A'lam.*

Baru-baru ini, Aceh juga sempat dihebohkan dengan berkembangnya informasi "pengepungan" Ma'had As-Sunnah di Lampeuneurut Aceh Besar. Informasi ini pertama kalinya disebarkan melalui media *facebook* oleh akun Serambi Mekkah – sebuah akun "misterius" yang tidak jelas "sanad-perawinya". Dalam pemberitaan tersebut, Ma'had As-Sunnah diklaim sebagai lembaga pendidikan Wahabi sehingga harus ditutup. Oleh para "pengepung", diberikan waktu tiga hari kepada pengelola untuk mengosongkan Ma'had.

Menurut informasi yang berkembang, salah satu dalil yang dijadikan dasar hukum untuk penutupan Ma'had As-Sunnah adalah Fatwa MPU Aceh tahun 2014 yang meminta agar pengajian Salafi di Mesjid Pulo Raya, Titeu dihentikan karena dianggap menyesatkan. Menurut pengakuan Salafi di Pulo Raya bahwa pasca keluarnya fatwa tersebut mereka sudah mengirimkan surat kepada MPU Aceh untuk diadakan dialog, tapi (masih menurut mereka) MPU menolak (tidak menanggapi). Benar tidaknya pengakuan ini *Wallahu a'lam*. Tapi, oleh

para “pengepung” Ma’had As-Sunnah menyatakan bahwa Ma’had tersebut memiliki hubungan dengan Salafi di Pulo Raya sehingga harus ditutup.

Sebelumnya aksi hampir serupa juga terjadi di Banda Aceh, di mana beberapa ormas telah berhasil dengan sukses mengubah tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman. Dalam kasus Baiturrahman ini juga tidak terlepas dari isu Wahabi yang oleh sebagian pihak disebut-sebut telah menguasai Baiturrahman.

Pola Gerakan Massa dan Penguasa

Aksi pelarangan (pembatalan) dakwah yang terjadi di Pidie dan Pidie Jaya merupakan salah satu bentuk keterlibatan pemerintah (negara) dalam menyikapi perbedaan pemahaman keagamaan. Di satu sisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah Pidie dan Pidie Jaya memang dapat “dimaklumi”, mungkin untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun di sisi lain, sesuai dengan konstitusi Republik Indonesia, pemerintah tidak bisa membatasi dakwah keagamaan, kecuali jika mereka sudah terbukti sesat (menyimpang) yang dibuktikan di muka hukum.

Berbeda dengan pelarangan dakwah di Pidie dan Pidie Jaya yang melibatkan pemerintah, aksi yang terjadi Mesjid Baiturrahman pada bulan Ramadhan lalu dan aksi “pengepungan” Ma’had As-Sunnah di Lampeuneurut baru-baru ini adalah salah satu bentuk keterlibatan rakyat yang lebih tepat disebut sebagai “gerakan massa” (atau massa yang digerakkan?). Gerakan yang melibatkan massa memang sulit dibendung dan akan berkonsekwensi pada lahirnya akibat yang cenderung *destruktif*.

Saya ingat dengan satu kasus “mengerikan” yang terjadi beberapa tahun lalu di Kecamatan Peulimbang Kabupaten Bireuen.

Sepintas dapat dibaca dalam tulisan saya “*Mazhab Hamok dan Tragedi Peulimbang*”. Penyelesaian berbagai bentuk dugaan penyimpangan melalui kekerasan seolah telah menjadi hal yang “lumrah” di negeri ini. Fitnah, pemukulan, penyerangan, perusakan harta benda, pembunuhan dan pembakaran seakan telah menjadi cara paling “ampuh” untuk menyikapi berbagai dugaan penyimpangan yang sebagian besarnya tidak pernah dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan.

Tudingan sesat yang diringi dengan aksi kekerasan terus terjadi dari waktu ke waktu dan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Aksi penjemputan paksa terhadap para terduga pengikut Millata Abraham beberapa tahun lalu di Bireuen juga telah menjadi ajang untuk membalas dendam pribadi dengan cara memanfaatkan kesempatan. Kita tidak memungkiri bahwa Millata Abraham adalah SESAT DAN MENYESATKAN, tapi kita juga jangan sembarangan menuduh seseorang sebagai pengikut ajaran tersebut tanpa didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Seharusnya, sebagai negara hukum, khususnya Aceh, yang masyarakatnya dikenal religius dan telah pula melaksanakan Syariat Islam, maka sudah sepatutnya para terduga sesat (menyimpang) itu dihadapkan ke meja pengadilan, bukan justru “dikeroyok” ramai-ramai oleh massa. Jika memang mereka terbukti SESAT maka negara berhak menghukum mereka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula sebaliknya, jika tidak terbukti, maka pemerintah harus berjiwa besar dan nama mereka (tertuduh sesat) harus DIPULIHKAN seperti semula.

Negara sebagai wadah perlindungan bagi rakyat seharusnya mampu menyelesaikan berbagai persoalan terkait “konflik” keagamaan secara beradab dan bermartabat, bukan justru melakukan pembiaran terhadap berbagai tindak kekerasan yang dilakukan oleh massa. Jika

negara lalai, maka kerusakan demi kerusakan akan terus merajalela.

Di sisi lain, ulama sebagai “*warasatul anbiya*” juga harus mampu bersikap arif dan bijak dalam menyikapi setiap perbedaan yang ada dengan memberikan nasehat-nasehat yang “sejuk” kepada umat. Ulama harus mampu mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, bukan justru “melibatkan diri” dalam “pertikaian”. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Mu’tazilah di masa lalu sudah cukup menjadi “noda hitam” dalam sejarah. Ulama Mu’tazilah di masa lalu telah menyulut permusuhan dengan cara mempengaruhi khalifah. Fatwa bahwa Alquran makhluk yang dikampanyekan oleh ulama-ulama Mu’tazilah telah mengakibatkan korban berjatuh, di mana banyak orang dipenjara, dan bahkan dibunuh. Demikian pula penyiksaan demi penyiksaan pun dilakukan sebagaimana yang menimpa Imam Ahmad bin Hanbal. Berbagai aksi kekerasan yang dilakukan oleh Rezim Mu’tazilah dilandasi oleh satu alasan bahwa AQIDAH UMAT ISLAM HARUS DISELAMATKAN.

Dalam kondisi tertentu, dengan alasan ingin menyelamatkan akidah umat, terkadang negara yang disokong oleh faksi mayoritas juga melakukan berbagai “kedhaliman” sebagaimana halnya pada masa Mu’tazilah. Keterlibatan negara yang terlalu jauh dalam persoalan-persoalan keagamaan akan berdampak pada rusaknya keberagaman. Demikian pula dengan isu penyeragaman mazhab yang diserukan oleh sebagian pihak juga akan mempermulus jalan bagi munculnya stempel-stempel sesat terhadap pihak-pihak yang berbeda. Penyeragaman mazhab tidak lebih hanyalah satu upaya untuk mempertahankan hegemoni mayoritas.

Semoga saja, perbedaan pemahaman agama (mazhab) yang terjadi di Aceh saat ini tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mempraktekkan politik *divide et impera* sehingga kita saling

BAGIAN KETIGA:

“mengacung pedang” sesama anak bangsa. Kita juga berharap agar isu-isu ini tidak dimanfaatkan oleh para politisi demi kepentingan politik kelompok tertentu. *Wallahu A'lam.*

[Bireuen, 23 Agustus 2015, patahkekeringan.blogspot.com]

MITOS WAHABI DALAM TRAGEDI BAITURRAHMAN

Setelah terjadi “ketegangan” dalam beberapa hari terakhir, akhirnya polemik tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman “terjawab sudah”. Para *mujahid* media sosial menyebarkan selebar surat yang ditandangani oleh Gubernur dan beberapa tokoh agama di Aceh. Kabarnya tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman telah kembali kepada *Ahlussunnah Waljama’ah* yaitu dengan penerapan fiqih *Syafi’iyah*. Meskipun hasil “negosiasi” ini disebut-sebut sebagai solusi sementara, dan untuk selanjutnya menunggu hasil Muzakarah Ulama yang akan dilaksanakan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), tapi setidaknya “kesepakatan” tersebut telah berhasil meredam “konflik” untuk sementara waktu. Untuk itu, langkah ini patut kita apresiasi, walau pun dalam “tanda kutip”.

BAGIAN KETIGA:

Namun, di sebalik kisah ini, ada beberapa hal yang rasanya perlu untuk diperbincangkan kembali, bukan untuk memperkeruh dan bukan pula untuk menggugat “ketentraman” yang telah dirajut, tapi hanya sekedar mengurai “benang kusut” yang telah terlanjur merasuk ke dalam kalbu sebagian kaum muslimin di *tanoh indatu*.

Jika dicermati, “kisruh” terkait tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman yang berlangsung “alot” akhir-akhir ini, membuat kita dihadapkan pada beberapa “isu” yang sulit dipahami. Sebagian kalangan (via media sosial) menduga bahwa “kisruh” Mesjid Raya merupakan satu momen yang sengaja diciptakan demi kepentingan politik. Ada pula sebagian pihak (juga via media sosial) yang menyebut fenomena yang terjadi di Baiturrahman sebagai “konflik” antara Profesor dan Ulama (tepatnya Teungku Dayah). Isu lainnya yang tak kalah menarik adalah isu Wahabi yang kononnya selama ini telah “menguasai” Baiturrahman. Isu terakhir inilah yang paling santer disebut-sebut di media sosial.

Terkait dua isu yang disebut pertama *insya Allah* akan dikupas dalam tulisan tersendiri pada kesempatan lain. Untuk kali ini, saya hanya akan mengulas sedikit terkait isu terakhir (Wahabi), di mana isu tersebut lumayan “laris” dan “laku keras” jika dihubungkan dengan “kisruh” Mesjid Raya Baiturrahman.

Beberapa pihak menyebut bahwa selama ini Mesjid Raya Baiturrahman telah dikuasai oleh Wahabi dan tata laksana ibadah di mesjid tersebut tidak sesuai dengan *Ahlussunnah Waljama'ah* dan Mazhab Syafi'i (tepatnya *Syafi'iyah*). Saya melihat, alasan inilah yang dijadikan sebagai “dalil” oleh sebagian pihak untuk mengembalikan Mesjid Raya Baiturrahman ke dalam pangkuan *Ahlussunnah Waljama'ah*.

Khususnya di Aceh, stigma Wahabi umumnya dilekatkan

kepada pihak-pihak non dayah. Pihak non dayah ini sendiri terbagi ke dalam dua golongan. *Pertama*, golongan yang memang tidak pernah mengecap pendidikan di dayah, seperti para siswa yang menempuh pendidikan di sekolah-sekolah agama dan juga mahasiswa yang belajar agama di Perguruan Tinggi. *Kedua*, golongan yang pernah belajar di dayah, tetapi kemudian meninggalkan pola pikir doktrinal serta terbuka kepada pemikiran-pemikiran baru, sehingga identitas “kedayahannya” tidak lagi dominan. Oleh sebagian masyarakat, dua golongan ini cenderung disebut sebagai Wahabi.

Di sisi lain, jika dikerucutkan, pengertian *Ahlussunnah* dalam pemahaman sebagian masyarakat Aceh sebenarnya sangat sederhana, di mana *Ahlussunnah* itu dimaknai sebagai “bertauhid Asy’ari, ber-fiqih Syafi’i dan bertashawuf Ghazali”. Dengan demikian, jika ada pihak-pihak yang tidak bertauhid Asy’ari, tidak ber-fiqih Syafi’i dan praktek tashawufnya tidak sesuai dengan Ghazali, maka orang tersebut adalah Wahabi.

Di Aceh, Wahabi juga sering diindentikkan dengan orang-orang yang “suka baca” buku. Ada satu “keyakinan” yang berkembang di Aceh bahwa belajar agama dari buku adalah “sangat terlarang”. Namun jika ditelisik dengan jujur, sebenarnya ramai pula ulama-ulama dayah yang menulis buku. “Pengharaman” baca buku juga terkesan tidak adil ketika dihadapkan pada buku-buku yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas, di mana buku Sirajuddin Abbas telah dianggap “halal” oleh mereka yang mengharamkannya. Dengan demikian, sangat “janggal” rasanya jika membaca buku disebut sebagai Wahabi.

Isu Wahabi akan semakin menarik ketika dikontraskan dengan term *Ahlussunnah Waljama’ah*, di mana “kapling” *Ahlussunnah Waljama’ah* telah “diborong” oleh satu atau dua golongan saja, yaitu *Asy’ariyah* dan *Maturidiyah*. Adapun Wahabiyah (lebih tepat disebut

Salafiyah) telah dikeluarkan “secara paksa” dari lingkungan *Ahlussunnah Waljama'ah*.

Diakui atau pun tidak, definisi Wahabi yang berkembang di Indonesia, khususnya di Aceh, lebih banyak merujuk kepada definisi yang dibuat oleh Sirajuddin Abbas melalui buku-bukunya yang “laris manis” di kalangan “santri”. Buku *I'tiqad Ahlussunnah Waljama'ah* yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas sudah menjadi semacam “kitab keramat” bagi sebagian masyarakat Indonesia, tak terkecuali Aceh.

Seorang cendekiawan muslim dari Aceh, Prof. Dr. H. Aboebakar Atjeh pernah menulis sebuah buku yang mengulas tentang sejarah Salafiyah di Indonesia. Aboebakar Atjeh (1970) dengan mengutip Hafiz Wahbah, menulis bahwa istilah Wahabi tidak dikenal di negeri Arab. Istilah Wahabi sengaja dilancarkan oleh pihak-pihak yang kontra terhadap dakwah Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab dengan maksud propaganda.

Adalah kontradiktif jika kita mengkaji Wahabi dari perspektif *Asy'ariyah* atau *Maturidiyah*, apalagi jika menggunakan perspektif *Syi'ah* tentu hasilnya akan semakin “parah”. Wahabi harus dilihat dari perspektif Wahabi. Jika kita ingin tahu tentang Wahabi, maka tanyalah kepada Wahabi. Jika kita hendak paham apa itu Wahabi, maka bacalah buku dan kitab-kitab yang ditulis oleh Wahabi. Jangan menghakimi Wahabi hanya berdasarkan buku-buku *Asy'ariyah*, *Maturidiyah* dan *Syi'ah*, karena hasilnya akan jauh panggang dari api.

Dengan mengutip pepatah Melayu, Hamka pernah berpesan melalui tulisannya: “*Hendak tahu di baik orang tanyakan kepada kawannya, hendak tahu di buruk orang tanyakan kepada lawannya*”. Bagi kita yang mau berpikir dan bersikap adil, maka falsafah yang dipesankan oleh Hamka bisa menjadi satu metode untuk mendefinisikan Wahabi

secara objektif. Namun, bagi sebagian pihak, pesan Hamka ini pun akan turut dipermasalahkan, mengingat Hamka pun pernah dituduh sebagai Wahabi.

Jika kita mau membaca buku dan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Wahabi secara cermat, maka kita akan menemukan “cahaya terang” bahwa Wahabi juga *Ahlussunnah Waljama’ah* yang ‘aqidahnya serumpun dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Jika kita cermat membaca sejarah, maka kita akan mengetahui bahwa Imam Ahmad bin Hanbal dan sahabatnya Muhammad bin Nuh adalah “satu-satunya” tokoh yang sangat kuat mempertahankan keyakinan *Ahlussunnah Waljama’ah* di tengah hegemoni Mu’tazilah yang menguasai dunia Islam saat itu. Dan, jika kita berani jujur, Imam Abu Hasan Al-Asy’ari sebagai tokoh besar *Ahlussunnah Waljama’ah* pasca “keruntuhan” Mu’tazilah juga banyak menyandarkan pendapatnya kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita, apakah Abu Hasan Al-Asy’ari dan Imam Ahmad bin Hanbal juga seorang Wahabi? *Wallahul Musta’an.*

[Republika.co.id, 01 Juli 2015]

INSIDEN BAITURRAHMAN DAN UKHUWAH ISLAMIAH

Sebagai bagian dari masyarakat Aceh, tentunya saya sangat paham bahwa apa yang hendak saya uraikan dalam tulisan ini adalah satu persoalan sensitif yang bisa memicu reaksi dari pihak-pihak yang “berseberangan”. Namun demikian, saya ingat pada pesan Nabi, bahwa agama itu adalah nasehat. Dalam kondisi segenting apapun, saya juga merasa harus “merealisasikan” kalam Allah dalam Alquran: *watawashau bil haqqi watawashau bi shabri*. Dua “titah” inilah yang “memaksa” saya untuk menulis sekedar perlu, meskipun “hujatan” datang menyerbu.

Apa yang saya tulis dalam tulisan ini adalah hasil pengamatan

saya dalam beberapa hari terakhir melalui informasi yang tersebar luas di media sosial. Informasi ini juga tersebar secara terbatas melalui beberapa media online yang ada di Aceh. Meskipun “media *mainstream*” terkesan menutup kisah ini – mungkin karena dianggap sebagai “aib”, namun akibat perkembangan teknologi komunikasi yang “tanpa batas”, arus informasi tersebut tak dapat dibendung.

Konon, kisah ini diawali oleh pertemuan pimpinan DPR Aceh bersama beberapa tokoh ormas (MUNA, FPI, Insyafuddin dan HUDA). Pertemuan tersebut menghasilkan satu rekomendasi tentang tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman. Pada Jumat 12 Juni 2013 tersiar kabar *via* media sosial, bahwa di Mesjid Raya Baiturrahman terjadi “kegaduhan” terkait tata laksana shalat Jumat. Namun sayangnya, perubahan tata laksana ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman sebagaimana termaktub dalam surat rekomendasi dimaksud tidak berhasil dilaksanakan alias gagal. Melalui video yang diupload *via* media *youtube* (12/06/15) terlihat seseorang berpakaian jubah berpidato di depan para jamaah bahwa mereka akan kembali Jumat depan (19 Juni 2015) untuk melaksanakan hasil rekomendasi yang telah disepakati oleh beberapa tokoh tersebut.

Alhasil, pada Jumat 19 Juni 2015 terjadilah satu “fenomena unik” di Mesjid Raya Baiturrahman – sebuah “insiden” yang sulit dimengerti. Satu “tontonan” mengharukan, satu gurisan sejarah yang patut “ditangisi”. Terlihat seseorang mengumandangkan azan dengan menggunakan Toa. Beberapa jamaah tampak berdiri sambil menunjuk-nunjuk ketika sang khatib menaiki minbar. Selepas shalat, beberapa orang berpidato di depan jamaah, sesekali terdengar suara “riuh” dari jama’ah.

Seorang teman menulis di akun *facebook*nya bahwa ia “kehabisan” bahasa untuk menjelaskan fenomena tersebut kepada

anaknya yang baru berumur sepuluh tahun. “*Kenapa orang-orang berteriak-teriak di dalam mesjid?*” Sudahlah, saya tidak ingin berpanjang-panjang kalam terkait fenomena ini.

Pasca kejadian 19 Juni 2015 tersebut, media sosial di Aceh kembali diramaikan oleh beragam komentar, di mana fenomena yang terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman tersebut ditanggapi secara kontroversial. Sebagian pihak menyatakan dukungannya terhadap “gerakan toa” (istilah yang populer di media sosial) yang dipelopori oleh beberapa ormas di Mesjid Raya Baiturrahman, dan sebagian pihak lainnya menyatakan “keberatan” dengan perilaku tersebut.

Informasi terakhir yang berkembang di media sosial, Imam Besar Masjid Raya Baiturrahman kononnya telah menyurati Kapolda Aceh untuk melakukan pengamanan pada saat shalat Jumat mendatang (26 Juni 2015). Surat yang diduga ditulis oleh Imam Mesjid Raya Baiturrahman ini tersebar bebas via media sosial sehingga memunculkan kontroversi, khususnya di kalangan *nitizen*.

Jika dianalisis lebih jauh, “insiden” yang terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman beberapa waktu lalu telah melahirkan berbagai isu “mengerikan”. Namun dalam tulisan singkat ini, saya tidak ingin berspekulasi terlalu jauh, mengingat persatuan umat itu lebih penting, karena ia adalah pesan Rasulullah yang senantiasa harus kita jaga bersama.

Ramadhan dan Persatuan Umat

Jujur, secara pribadi saya merasa “risih” jika “mengenang” kejadian di Baiturrahman, di mana “insiden” tersebut terjadi di Bulan Ramadhan, bulan mulia yang di salah satu malamnya terdapat “*lailatul qadar*”. Namun tak perlu “ditangisi”, karena ia telah pun terjadi.

Pada bulan Ramadhan, di siang harinya kita disyariatkan untuk berpuasa sebagai latihan mental dan fisik dalam rangka *bertaqarrub* kepada-Nya. Di malam harinya kita disunnahkan melaksanakan shalat yang dikenal dengan *tarawih*. Kita pula dianjurkan untuk memperbanyak membaca Alquran. Allah juga menyediakan *lailatul qadar* di mana kita dianjurkan untuk berlomba-lomba mencarinya.

Di sisi lain, ibadah puasa yang kita lakukan di bulan Ramadhan juga menjadi media bagi kita untuk merasakan “rasa lapar” sebagaimana dirasakan oleh saudara-saudara kita yang hidup dalam kekurangan. Sudah sepatutnya ibadah ini dapat menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada sesama, sehingga kita bisa berbagi dengan saudara-saudara kita.

Shalat tarawih yang kita laksanakan di malam harinya selayaknya tidak hanya menjadi “ritual” belaka, di mana ibadah tersebut harus benar-benar kita manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Di sisi lain, shalat tarawih yang dilakukan berjamaah di mesjid-mesjid juga semestinya mampu menjadi media silaturahmi sesama muslim. Mungkin selama ini kita tersibukkan dengan profesi masing-masing, namun melalui media tarawih kita bisa saling bertegur sapa dan mempererat *ukhuwah*.

Terkait dengan “insiden” yang terjadi di Baiturrahman beberapa waktu lalu, hendaknya kita saling menahan diri dan saling menghargai satu sama lain. Saya melihat, bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh para pengelola Baiturrahman sudah cukup baik, di mana aspirasi semua pihak bisa tertampung. Tata laksana ibadah di Baiturrahman selama ini sudah cukup akomodatif. Apalagi jamaah di Mesjid Baiturrahman berasal dari berbagai latar belakang yang bersifat heterogen. Untuk itu, marilah toleransi yang sudah tertata selama ini kita jaga bersama.

Memang tak dapat dipungkiri, bahwa di Aceh, sebagaimana juga daerah lainnya di Indonesia “dihuni” oleh dua komunitas besar, yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Warga *Nahdiyyin* di Aceh mayoritas berasal dari kalangan Dayah (pesantren tradisional), sedangkan warga Muhammadiyah umumnya berasal dari dunia kampus dan juga masyarakat perkotaan. Penyebutan warga *Nahdiyyin* dan warga Muhammadiyah dalam tulisan ini harus dipahami dalam konteks luas, di mana “warga” dimaksud belum tentu memiliki kaitan dengan institusi NU dan Muhammadiyah. Penyebutan “warga” di sini lebih merujuk kepada pemahaman keagamaan, artinya warga *Nahdiyyin*, belum tentu dia anggota NU, demikian pula warga Muhammadiyah, belum tentu pula dia anggota Muhammadiyah. Penting pula diingat, bahwa tidak ada istilah mayoritas dan minoritas, yang ada adalah “muslim bersatu”.

Kedua komunitas ini, meskipun terdapat perbedaan dalam beberapa hal (*furu'iyah*), namun keduanya masih dalam lingkup teologi Sunni. Dengan demikian, keinginan sebagian pihak untuk “mengembalikan” Mesjid Raya Baiturrahman dalam ajaran *Ahlussunnah wal Jama'ah* menjadi “tidak relevan” untuk dibahas, mengingat tata laksana ibadah di mesjid kebanggaan rakyat Aceh tersebut masih dalam koridor *Ahlussunnah wal Jama'ah*. Jika pun ada aspirasi sebagian pihak yang selama ini belum tertampung, tentunya bisa dimusyawarahkan dengan elegan tanpa harus “bersangar muka” sesama muslim. Seandainya memungkinkan, kepengurusan Mesjid Raya Baiturrahman untuk kedepan harus diisi oleh dua komunitas (NU dan Muhammadiyah) secara proporsional, di mana aspirasi kedua pihak akan tertampung hendaknya.

Di akhir tulisan ini, saya mohon maaf kepada semua pihak, tulisan ini hanyalah sebagai bentuk tanggung jawab moral saya sebagai sesama muslim untuk saling mengingatkan, dan mendamaikan, karena

kita semua adalah saudara. Kita jangan terjebak dalam perdebatan *furu'iyah* yang tidak berkesudahan. Mari kita jadikan Ramadhan yang mulia ini sebagai momentum untuk bersatu dalam keberagaman. *Wallahu Waliyut Taufiq.*

[*Harian Waspada Medan*, 24 Juni 2015]

REBUTAN MESJID DI ACEH

“**M**enyedihkan”. Mungkin kata inilah yang tepat digunakan untuk melukiskan satu fenomena unik yang terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman beberapa waktu lalu. Mesjid kebanggaan masyarakat Aceh yang berdiri megah di pusat Kota Banda Aceh tersebut telah dibuat “sedih” akibat ulah beberapa oknum yang menamakan dirinya sebagai pembela Islam. Kehormatan Mesjid Raya yang *notabene* adalah “Rumah Allah” telah diusik oleh perilaku yang tak patut. Sungguh tragis dan memalukan!

Ironisnya lagi, aksi “tak sedap” tersebut terjadi pada hari Jumat – hari yang dimuliakan oleh Allah, di mana pada hari tersebut, kaum muslimin “sekalian alam” bermunajat kepada Tuhan-Nya. Namun sayangnya, di Mesjid Tanah Rencong (Mesjid Raya Baiturrahman), justru terjadi “keriuhan” yang “menusuk kalbu” para insan beradab.

Pertemuan Tokoh Ulama dan Ketua DPR Aceh

Beberapa waktu lalu, tepatnya pada 09 Juni 2015, Aceh dihebohkan dengan beredarnya surat hasil rapat pimpinan DPR Aceh dengan beberapa orang yang disebut-sebut sebagai tokoh ulama Aceh beserta beberapa ormas-ormas Islam. Surat yang beredar via media sosial tersebut berisi tentang tata cara ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman dan juga *kaifiyat* shalat tarawih.

Surat kesepakatan tersebut ditandatangani oleh Muharuddin selaku ketua DPR Aceh. Dalam surat itu disebutkan bahwa pelaksanaan tata cara ibadah di Mesjid Raya Baiturrahman sebagaimana telah disepakati oleh pimpinan DPR Aceh beserta beberapa tokoh ulama dan ormas harus dilaksanakan pada Jumat 12 Juni 2015. Beberapa orang yang disebut sebagai tokoh ulama sebagaimana tertera di surat tersebut adalah: Tgk. Ali Basyah Usman, Tgk. Bulqaini Tanjongan, Tgk. H. Ahmad Tajuddin dan Tgk. Muhammad Daud Hasbi. Adapun ormas yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah: MUNA (Majelis Ulama Nanggroe Aceh), HUDA (Himpunan Ulama Dayah), FPI Aceh dan PB. Inshafuddin Aceh.

Saya sepakat saja bahwa beberapa nama yang disebut dalam surat tersebut adalah ulama, atau setidaknya tokoh agama, tapi yang menjadi pertanyaan apakah ulama Aceh hanya mereka saja? Saya juga sepakat bahwa beberapa ormas yang ikut dalam pertemuan tersebut adalah ormas Islam, tapi apakah ormas Islam di Aceh cuma itu saja? Tentunya pertanyaan ini membutuhkan jawaban.

Secara umum, jika hendak diklasifikasikan, di Aceh ada dua tipe ulama; yaitu ulama dayah (pesantren) dan ulama kampus (intelektual Islam). Dilihat dari nama-nama yang tertera dalam surat pertemuan dengan DPR Aceh, maka dapat dipastikan bahwa beberapa

tokoh tersebut berasal dari dayah (ulama dayah), itu pun tidak representatif. Ada pun ulama kampus tidak dilibatkan dalam pertemuan itu, hal ini terbukti dengan tidak adanya nama mereka dalam surat tersebut. Demikian pula dengan ormas Islam hanya dihadiri oleh empat ormas saja, sedangkan ormas lain seperti Muhammadiyah dan NU tidak terlibat.

Dengan demikian pengatassnaman ulama Aceh dan juga ormas Islam sebagaimana termaktup dalam surat tersebut patut dipertanyakan keabsahannya, karena sifatnya tidak representatif. Mesjid Raya Baiturrahman adalah milik masyarakat Aceh, bukan milik segelintir orang, sehingga segala keputusan terkait mesjid tersebut haruslah terlebih dahulu “diamini” oleh masyarakat Aceh.

Di sisi lain, surat yang ditandatangani oleh ketua DPR Aceh tersebut hanyalah sebuah rekomendasi dan sifatnya tidak mengikat. Surat tersebut harus diverifikasi dan diuji kelayakannya oleh pengelola Mesjid Raya Baiturrahman, dalam hal ini Pemerintah Aceh. Secara hukum, pihak eksekutiflah yang berhak melaksanakan “eksekusi” di Mesjid Raya Baiturrahman, setelah menempuh langkah-langkah prosedural. Artinya, eksekusi bukan domain legislatif, apalagi ormas.

Tragedi Mesjid Raya Baiturrahman

Pada Jumat, 12 Juni 2015, beredar informasi bahwa ratusan teungku dayah dan santri Aceh (mungkin oknum) melaksanakan shalat Jumat di Mesjid Raya Baiturrahman guna memantau pelaksanaan ibadah di mesjid tersebut. Aksi ini, sebagaimana informasi yang berkembang di media sosial adalah sebagai bentuk tindak lanjut dari rapat ketua DPR Aceh dengan sejumlah tokoh sebagaimana telah penulis jelaskan di atas. Menurut informasi yang penulis peroleh aksi tersebut gagal.

Pasca kejadian pada 12 Juni tersebut, juga beredar video dari

media *youtube* yang berjudul “Kudeta Mesjid Raya Baiturrahman”. Dalam video tersebut terlihat seorang laki-laki bersurban dengan selempang hijau “berteriak-teriak” di dalam mesjid. Sesekali lelaki tersebut juga bertakbir yang disambut oleh pekikan *takbir* dari para pendukungnya. Lelaki tersebut berseru bahwa Mesjid Raya Baiturrahman harus kembali kepada *Ahlussunnah Waljama’ah*. “*Jika Jumat depan (19 Juni 2015) tidak ada perubahan maka akan ada pertumpahan darah*”, demikian pesan yang disampaikan oleh lelaki bersurban tersebut. Sungguh memilukan!

Sepanjang amatan penulis, Mesjid Raya Baiturrahman selama ini sangat toleran dalam hal tata cara ibadah, di mana perbedaan antara Nahdhiyyin (NU) dan Muhammadiyah sudah terakomodir dalam tata laksana ibadah di mesjid kebanggaan rakyat Aceh tersebut. Khususnya di bulan Ramadhan, shalat tarawih di Mesjid Raya Baiturrahman dilaksanakan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama dilaksanakan delapan rakaat dan kemudian witir. Pada saat jamaah 8 rakaat melaksanakan witir, jamaah 20 rakaat menunggu. Setelah witir jamaah 8 rakaat selesai, kemudian dilanjutkan dengan shalat 20 rakaat. Kedua jamaah tersebut saling menghargai dan tidak pernah terjadi persinggungan disebabkan pengelola Mesjid Raya mengakomodir semua pihak sehingga terjadi keharmonisan dalam ibadah.

Dengan demikian, sangat aneh ketika ada pihak-pihak yang ingin “merusak” tatanan ini, apalagi sampai mengancam akan menumpahkan darah sesama muslim. Haruskah *ukhuwah* yang telah terjalin puluhan tahun itu dicemar hanya karena nafsu sebagian pihak? Sebagai daerah yang digelari dengan *laqab* Serambi Mekkah, seharusnya kita bisa menahan diri dan saling menghormati satu sama lain. Apa yang sudah dilakukan oleh pengelola Mesjid Raya Baiturrahman selama ini sudah sangat adil dan tidak ada pihak yang dirugikan. Sudah sepatutnya kita terus bersatu dalam keberbedaan itu, bukan justru mencari celah

untuk memecah persatuan umat.

Aksi Rebut Mesjid

Jika ditelisik lebih jauh, sebenarnya aksi rebut mesjid tidak hanya terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman, tetapi aksi ini juga sangat sering terjadi di berbagai daerah di Aceh. Dan tidak hanya di Aceh, di wilayah lain di Indonesia juga sudah tidak asing dengan aksi ini.

Rasa fanatisme yang berlebihan telah membuat kita terjebak dalam perdebatan tak penting, di mana *ukhuwah* yang seharusnya kita rajut, justru terburai akibat ulah kita yang tidak mampu bersikap toleran pada perbedaan. Tanpa sadar Islam yang satu tubuh itu telah terpecah dalam faksi-faksi yang saling bertentangan. Saya yakin, tidak ada satu mazhab pun yang mengajarkan seperti ini.

Perbedaan mazhab yang *notabene* adalah perbedaan *ijtihadiah* dalam *furu'iyah* telah membuat kita saling “bersangar” muka, dan bahkan saling serang satu sama lain. Mari kita buka kembali lembaran-lembaran riwayat para pendiri mazhab itu. Adakah mereka saling berseteru seperti kita hari ini? Jika mereka masih hidup, saya yakin mereka akan “menangis tersedu”. Mazhab yang mereka bangun dengan curahan pikiran di masa lalu adalah untuk mempermudah kita para “awam” dalam rangka memahami teks-teks syariat. Tapi, kita telah “mengkhianati” mereka dengan menjadikan mazhab sebagai alat untuk saling “bermusuhan” sesama muslim. Sungguh tragis!

Bukankah Rasul yang mulia telah mengingatkan bahwa kita saling bersaudara ibarat satu tubuh? Di mana ketika satu bagian merasa sakit, maka anggota tubuh yang lain juga merasakan kesakitan itu. Mari berpikir saudaraku! *Wallahu Waliyut Taufiq*.

[Bireuen, 19 Juni 2015]

MENDAMAIKAN KAUM MUSLIMIN DI ACEH

I*nnamal mukminuuna ikhwah, fa ashlihu baina akhawaikum,* demikianlah potongan surat *Al-Hujurat* ayat 10 yang termaktub dalam *Al-Qur'an Al Karim*. Dalam ayat tersebut, Allah *Subhanahu wata'aala* menyatakan bahwa orang-orang beriman itu bersaudara. Tidak hanya bersaudara, tapi kita juga dilarang untuk bercerai berai. Dalam surat Ali Imran ayat 103, Allah juga berfirman: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu saling bercerai-berai”.

Terkait dengan persatuan kaum muslimin, Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam* telah bersabda dalam banyak hadits yang

mana hadits-hadits tersebut telah terbukukan dengan baik, sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengetahui keberadaan hadits-hadits itu. Dalam hal kasih sayang, Rasulullah mengumpamakan orang-orang beriman itu layaknya satu tubuh, di mana jika satu bagian merasa sakit, maka bagian lain juga akan merasakan kesakitan itu. Dalam riwayat lain, Rasul yang mulia memberi ibarat orang-orang beriman seperti satu bangunan di mana masing-masing bagian saling menguatkan satu sama lain. Dalam redaksi yang lebih tegas, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari *Rahimahullah* dan juga beberapa perawi lainnya, Rasul telah bersabda bahwa mencela seorang muslim adalah kefasiqan dan membunuhnya adalah kekufuran. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits dengan makna yang hampir serumpun bahwa tidak sempurna iman seseorang itu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.

Beberapa ayat dan hadits sebagaimana telah penulis kemukakan di atas cukuplah menjadi media pengingat bagi kita dalam rangka menggagas persatuan kaum muslimin, khususnya di Aceh.

Mencermati fenomena di Aceh akhir-akhir ini, khususnya pasca damai yang telah berlangsung 10 tahun, penulis melihat “ruh” persatuan kaum muslimin di Aceh telah mulai memudar. Pudarnya ruh persatuan ini, tentunya disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Di antara faktor internal adalah “menyeruaknya” perbedaan-perbedaan *furu'iyah* di kalangan kaum muslimin Aceh. Adapun faktor eksternal, di antaranya adalah munculnya pengaruh-pengaruh dari luar, baik bermotif politik atau pun motif lainnya. Namun terkait faktor eksternal ini masih sebatas asumsi dan dibutuhkan penelitian lebih lanjut oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Memahami Aliran Pemikiran dalam Islam

Dalam dunia Islam telah tumbuh dan berkembang berbagai aliran teologi dan hukum. Di antara aliran teologi dimaksud adalah Syi'ah, Khawarij, Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Aliran-aliran tersebut pada awalnya merupakan aliran-aliran politik yang pada perkembangan selanjutnya berevolusi menjadi aliran teologi.

Aliran Syi'ah adalah satu aliran yang bersikap ekstrim dalam “memuja” Ali bin Abi Thalib *Radhiallahu 'anhu*. Aliran ini terbagi dalam beberapa sekte, di antara sekte yang ekstrim bahkan ada yang menganggap Ali sebagai Tuhan dan juga mengkafirkan para sahabat Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam*. Berbeda dengan Syi'ah, aliran Khawarij adalah golongan yang pada awalnya merupakan pengikut Ali, tapi kemudian mereka memusuhi dan bahkan mengkafirkan Ali pasca peristiwa *tahkim* antara Ali dan Mu'awiyah.

Pada perkembangan selanjutnya, aliran Khawarij juga mengkafirkan para pelaku dosa besar. Sebagai antitesa dari aliran Khawarij muncul pula aliran Murji'ah yang menyatakan bahwa perbuatan seseorang tidak membawa pengaruh terhadap iman. Di tengah perdebatan Khawarij dan Murji'ah terhadap pelaku dosa besar, muncul pula aliran Mu'tazilah yang berusaha “mendamaikan” kedua paham tersebut. Mu'tazilah berpendapat bahwa pelaku dosa besar bukan mukmin dan bukan pula kafir, tapi berada di antara dua posisi yang mereka sebut *manzilah baina manzilatain*. Dalam rangka menghambat dan menentang paham Mu'tazilah, dalam dunia Islam juga lahir aliran Asy'ariyah dan Maturidiyah yang dalam buku-buku teologi dikategorikan sebagai aliran *Ahlusunnah*.

Selain aliran teologi, dalam Islam juga tumbuh dan berkembang berbagai mazhab hukum. Di antara mazhab-mazhab yang

dianut oleh golongan Sunni adalah Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Zahiriah. Empat mazhab disebut pertama merupakan mazhab *mu'tabar* yang masih berkembang sampai sekarang.

Tentang Wahabi

Adapun Wahabiyah yang lumayan “populer” di Aceh akhir-akhir ini bukanlah aliran teologi atau pun mazhab. Dalam berbagai literatur disebut bahwa Wahabiyah adalah sebuah gerakan keagamaan (pemurnian/purifikasi) yang dipelopori oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Gerakan Wahabiyah ini terlahir dalam lingkungan teologi Sunni dan dalam bidang hukum berafiliasi dengan mazhab Hanbali, meskipun mereka tidak mengikatkan diri dengan satu mazhab saja.

Dalam beberapa sumber disebut bahwa pengaruh Wahabiyah masuk ke Indonesia melalui Sumatera Barat. Di Aceh sendiri, organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) yang diketuai oleh Teungku Muhammad Dawud Beureueh dalam beberapa hal juga diwarnai oleh pemikiran ini. Bahkan dalam beberapa “riwayat” disebutkan bahwa Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri menggunakan Kitab Tauhid karangan Muhammad bin Abdul Wahab dalam mengajarkan murid-muridnya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengaruh gerakan Wahabiyah sudah masuk ke Aceh pra dan pasca kemerdekaan RI, bukan pasca tsunami sebagaimana disebut oleh sebagian kalangan.

Menuju Persatuan Masyarakat Aceh

Beberapa waktu lalu sebagaimana dilansir oleh Serambi Indonesia, telah digelar parade Aswaja di Banda Aceh yang diikuti oleh ribuan santri Aceh dan beberapa ormas. Dalam salah satu tuntutananya disebutkan tentang pelarangan Salafi-Wahabi di Aceh. Dalam negara hukum seperti Indonesia, menyampaikan pendapat adalah sah-sah saja.

Cuma saja, sebagaimana penulis sebutkan di atas, bahwa pengaruh dari gerakan Wahabi itu sudah ada di Aceh sejak lama. Dengan meminjam istilah yang sering disebut-sebut oleh teman penulis, Muhammad Alkaf (bung-alkaf.com), bahwa Wahabi di Aceh adalah Wahabi “rasa lokal”.

Di sisi lain, keberadaan organisasi Muhammadiyah di Aceh juga telah memberi warna tersendiri dalam pemikiran keagamaan di Aceh. Sebenarnya jika dikerucutkan, perbedaan yang terjadi di Aceh lebih banyak didominasi oleh perbedaan antara Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama (NU), di mana organisasi disebut terakhir memiliki basis besar dalam lingkungan dayah di Aceh. Memang, Muhammadiyah bukanlah “Wahabi” dalam maknanya yang hakiki. Tapi dalam studi pemikiran, tidak dapat dipungkiri bahwa kelahiran organisasi modernis di Indonesia, seperti Muhammadiyah, Persis dan Al-Irsyad juga dipengaruhi oleh gerakan Wahabiyah. Cuma saja, dalam perkembangannya, sebagaimana disebut oleh beberapa penulis, Muhammadiyah lebih banyak menyerap pemikiran-pemikiran Muhammad Abduh. Dan Muhammad Abduh sendiri dalam hal mengajak kaum muslimin untuk kembali kepada Alquran dan Sunnah (meninggalkan taqlid) juga tidak jauh berbeda dengan spirit Wahabiyah.

Di sisi lain, yang sangat penting dipahami bahwa di Aceh, persinggungan antara Muhammadiyah dan NU atau Wahabiyah dengan dayah masih dalam batas-batas *ukhuwah Islamiyah*. Hampir tidak ada gejolak yang berarti antara dua kutup pemikiran ini di Aceh. Keduanya bisa berjalan beriringan dan bisa saling menghargai. Jika pun terdapat perbedaan hanyalah dalam bidang *furu'iyah* di mana masing-masing pihak bisa saling menghargai dan menahan diri.

Di akhir tulisan ini, penulis mengajak kita semua untuk kembali memperkuat *ukhuwah Islamiyah* sesama kaum muslimin di Aceh. Jika pun ada perbedaan-perbedaan mari kita selesaikan secara

BAGIAN KETIGA:

elegan dan beradab tanpa harus “bersangar muka” sesama *syedara*. Mari kita jaga kedamaian Aceh agar kesejahteraan yang selama ini kita idamkan dapat segera terwujud. Mari kita bangun kembali “kemesraan” itu. Semoga saja Aceh dapat menjadi daerah yang *baldatun thaiyyibatun wa rabbun ghafur*. Wallahul Musta'an.

[*Harian Serambi Indonesia*, 17 September 2015]

MONOPOLI MAZHAB DI ACEH

Dengan dikeluarkannya Maklumat Perang 1873 oleh Belanda, Aceh memasuki perang panjang dengan para penjajah kulit putih. Perang Aceh-Belanda ini berlangsung lama dan memakan banyak korban di kedua belah pihak. Satu versi menyebut perang ini berlangsung selama 30 tahun (1873-1903), sedangkan versi yang lain menyebut 69 tahun (1873-1942), yaitu sampai datangnya Jepang ke Aceh. Tidak lama setelah Belanda pergi, Aceh kembali menggempur Jepang sampai akhirnya Jepang pun menyerah atas tekanan pihak sekutu. Pertumpahan darah di Aceh tidak berhenti di sini. Pada awal-awal kemerdekaan RI, tragedi berdarah kembali terjadi di Aceh dengan

meletusnya Perang Cumbok, antara pihak ulama dan masyarakat – berhadapan dengan Ulee Balang yang berlanjut pada Revolusi Sosial yang sangat “menyedihkan” itu.

Pada tahun 1953, tersebut tidak terealisasinya janji-janji Soekarno dan juga didorong oleh sebab-sebab lain, Aceh kembali bergolak di bawah pimpinan Teungku Muhammad Dawud Beureu-eh yang didukung oleh ulama Aceh. Setelah merasa aman beberapa waktu pasca kembalinya Dawud Beureu-eh ke pangkuan Ibu Pertiwi, perang baru pun dimulai di Aceh dengan diproklamirkannya Gerakan Aceh Merdeka oleh Hasan Tiro pada 1976. Kekacauan politik dan gerakan bersenjata yang digagas Hasan Tiro ini berlangsung selama kurang lebih 29 tahun. Selanjutnya Aceh ditimpa musibah besar yang mengakibatkan ratusan ribu orang meninggal akibat gempa dan tsunami. Musibah gempa dan tsunami pada 26 Desember 2004 telah mengantarkan kedua belah pihak (RI-GAM) dengan difasilitasi CMI – di mana sebelumnya telah mengalami beberapa kali perundingan, untuk menandatangani nota kesepahaman pada 15 Agustus 2005 (MoU Helsinki) sehingga damai pun tercipta di Aceh. Rentetan konflik (perang dan ketegangan politik) yang telah disenaraikan di atas jika dikalkulasikan, maka dapat disimpulkan bahwa terhitung sejak Maklumat Perang 1873 sampai dengan MoU Helsinki 2005, masyarakat Aceh telah hidup dalam ketegangan, ketakutan dan perang selama kurang lebih 106 tahun – lebih satu abad!

Pasca MoU Helsinki, khususnya dalam beberapa tahun terakhir aroma konflik Aceh nampaknya telah mulai bermetamorfosis dari konflik politik menuju “konflik mazhab.” Memang dugaan ini masih sebatas asumsi awal yang masih butuh kajian serius sehingga menghasilkan jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Di luar itu, “konflik mazhab” ini, tentunya juga sangat terkait

dengan perkembangan politik kekinian di Aceh. Saya melihat ada dua kepentingan yang sedang menjalin “kemesraan” untuk mewujudkan tujuan masing-masing. Pihak pertama bermain di domain politik – di mana mereka memanfaatkan isu-isu keagamaan yang *notabene*nya cukup sensitif guna mempertahankan kekuasaannya. Adapun pihak kedua berada di area keagamaan – yang juga berafiliasi dengan kekuatan politik demi mempertahankan posisinya sebagai “penerjemah tunggal” teks-teks keagamaan. Dua pihak ini saling berpimpin tangan “seayun-selangkah” dalam memainkan perannya masing-masing. Namun demikian, seperti ditegaskan di atas, pola ini masih sebatas asumsi belaka.

Kudeta Mesjid dan “Monopoli Mazhab”

Diakui atau pun tidak, upaya “monopoli mazhab” di Aceh sudah berlangsung sekian lama. Upaya ini dilakukan melalui minbar-minbar Jumat, ceramah-ceramah keagamaan dan juga forum-forum pengajian. Indikasi “monopoli” ini terlihat jelas ketika seorang oknum pendakwah, oknum khatib atau oknum ustaz (di Aceh disebut *teungku*) dalam pengajian, khutbah atau ceramah secara terang benderang menyampaikan kepada masyarakat bahwa tata cara laksana ibadah harus sesuai dengan mazhab *fulan*.

Upaya “monopoli mazhab” ini pada perkembangan selanjutnya berkembang dalam aksi-aksi yang melibatkan massa, semisal Parade Aswaja yang pernah menyita perhatian publik di Aceh. Dalam parade dimaksud para peserta yang terdiri dari ratusan santri dan *teungku* membawa spanduk dan poster yang bertuliskan: “usir wahabi”, “wahabi harus keluar dari Aceh”, “masyarakat Aceh menolak wahabi” dan kalimat-kalimat serumpun lainnya. Namun sayangnya, sampai dengan saat ini tidak diketahui siapa wahabi yang mereka maksud.

Tidak hanya parade, gerakan “monopoli mazhab” di Aceh juga terbaca pada saat pihak-pihak yang menamakan dirinya Aswaja melakukan aksi “kudeta mesjid” di beberapa tempat di Aceh. Jika ditelusuri, aksi “kudeta mesjid” bukanlah hal baru di Aceh dan sudah terjadi sekian lama, namun sayang tidak semuanya terliput media. Upaya “kudeta” yang paling menghebohkan terjadi di Mesjid Raya Baiturrahman Banda Aceh pada Jumat 12 Juni 2015. Aksi pada 12 Juni tersebut tidak membuahkan hasil dan kemudian dilanjutkan pada Jumat 19 Juni 2015. Aksi 19 Juni ini terbilang “sukses.”

Pasca “insiden” Mesjid Raya, aksi “kudeta” ini terus berlanjut di tempat-tempat lain. Di antara upaya “kudeta” paling heboh pada 2016 terjadi di Mesjid Al-Izzah Cot Seurani di Krueng Manee Aceh Utara. Aksi tersebut terjadi pada Jumat 20 Mei 2016, di mana Mesjid Al-Izzah didatangi oleh sejumlah jamaah yang menamakan dirinya sebagai Aswaja. Dalam prosesi Jumat hari itu terjadi kericuhan dan keributan yang dilakukan oleh “jamaah pendatang” yang menghendaki khutbah diulang karena dianggap tidak *muwalat*. Akan tetapi, khatib, imam dan bilal tidak merespon permintaan tersebut. Selesai khutbah, langsung dilaksanakan *iqamah* dan shalat Jumat. Dalam rekaman video yang beredar tampak keributan, di mana terjadi saling dorong dan juga suara keras dari “jamaah Aswaja.” Sayangnya, aksi “kudeta” pada hari itu gagal dan tidak mencapai hasil. Pada Jumat selanjutnya, 27 Mei 2016, prosesi Jumat di Mesjid Al-Izzah tersebut berjalan lancar dan aman dengan pengawasan personil Polri dan TNI.

Beberapa aksi “kudeta” sebagaimana disebut di atas dimaksudkan untuk menerapkan tata laksana ibadah sesuai dengan mazhab Syafi’i. Oleh sebagian kalangan yang menamakan dirinya Aswaja mendasarkan aksinya pada hasil Muzakarah Ulama Aceh yang mereka tafsirkan secara “keliru.” Padahal, hasil muzakarah ulama tersebut

tidak pernah memberi sinyal kepada pihak manapun untuk melakukan tindakan-tindakan “anarkis” di rumah Allah. Tidak ada satu pasal pun dalam hasil muzakarah tersebut yang menganjurkan berteriak-teriak di dalam mesjid ketika jamaah lainnya sedang melaksanakan shalat Jumat. Bahkan, jika ditilik lebih jauh, tindakan membuat “rusuh” di mesjid pada hakikatnya bertentangan dengan hasil Muzakarah Ulama yang justru menganjurkan toleransi.

Perang Mazhab

Jika dikerucutkan, secara umum hanya ada dua model praktek keagamaan yang berkembang di Aceh, yaitu model Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Model disebut pertama umumnya berkembang di kalangan dayah dan juga masyarakat yang berhaluan “tradisionalis.” Adapun model kedua dipraktekkan oleh kader-kader “sekolahan” dan kader Muhammadiyah dan juga sebagian masyarakat yang “berwawasan modernis.”

Secara khusus, tidak ada konflik antar dua ormas ini di Aceh. Namun dalam praktik di lapangan kadang-kadang sering terjadi persinggungan dalam persoalan-persoalan *furu'iyah* antar masyarakat dari dua kubu yang berbeda. Kubu tradisionalis yang didominasi oleh kalangan dayah beranggapan bahwa merekalah *Ahlussunnah Waljama'ah* yang sering mereka singkat sendiri dengan Aswaja. Kemudian, ada segelintir dari kalangan tradisionalis yang menganggap kubu modernis semisal Muhammadiyah sebagai “bukan” *Ahlussunnah Waljama'ah*. Di sinilah pangkal ketegangan itu yang akhirnya bermuara pada tindakan-tindakan intoleran, seperti “kudeta mesjid.”

Jika klaim-klaim kebenaran seperti ini terus dipertahankan, maka bukan tidak mungkin Aceh akan memasuki “perang baru,” yaitu “perang mazhab” yang tentunya akan membuat umat Islam di Aceh

BAGIAN KETIGA:

tercerai-berai. Untuk menjaga keharmonisan antar kaum muslimin di Aceh sudah semestinya ditumbuhkan kembali sikap saling menghargai dan tidak merasa diri sebagai paling benar. Untuk ke depan kita berharap tidak ada lagi “kudeta mesjid” dan tindakan-tindakan anarkis lainnya yang dapat merusak *ukhuwah Islamiyah*. Usia konflik di Aceh sudah terlalu panjang. Jangan diperpanjang lagi! Mari menyambut Ramadhan dengan semangat persatuan. *Wallahul Musta'an*.

[*Harian Waaspada Medan, 08 Juni 2016*]

TEUKU WISNU, WAHABI DAN KHILAFIYAH KARET¹⁰

Sebagai masyarakat “kampung”, saya tidak banyak tahu tentang dunia keartisan (dunia hiburan), karena saya paling malas nonton acara-acara berbau artis di TV, apalagi yang namanya *SI-NE-TRON*, kecuali film-film layar lebar yang diangkat dari novel-novel ternama, semisal El-Syirazi itu. Dari kecil, saya tidak pernah hafal nama-nama artis, karena tidak pernah ditanyakan di sekolah. Hanya beberapa artis yang saya ingat namanya, seperti Rhoma Irama, Rano Karno, Titik Puspa dan artis-artis “lawas” lainnya.

Saya juga paling “murka” melihat tayangan-tayangan *infotainment* yang umumnya tidak bermutu dan “kampungan”. Coba bayangkan, kita capek-capek *ngumpul*in uang untuk beli TV, tapi justru dapat tayangan artis lagi “menyusui”, artis *brantem*, artis pakai

“jilbabeb”, artis selingkuh, artis hamil dan bahkan artis “melahirkan”. Kalau tayangannya model-model itu, di kampung saya juga banyak Bro...!

Teuku Wisnu

Dalam dua hari terakhir ini, beranda *facebook* dan juga *twitter* di Indonesia penuh dengan berbagai komentar tentang sosok Teuku Wisnu, seorang pria berdarah Aceh yang telah sukses menjadi artis di Ibu Kota. Seperti telah saya jelaskan, bahwa pengetahuan saya tentang artis sangat minim. Dengan demikian, adalah wajar jika saya juga tidak banyak tahu tentang sosok artis bernama Teuku Wisnu.

Cuma saja, dalam beberapa waktu terakhir, secara tidak sengaja, saya pernah beberapa kali membaca berita di media *online* bahwa artis bernama Teuku Wisnu sudah “berjenggot” dan memakai celana “cingkrang”. Bahkan ada kabar yang menyebut bahwa Teuku Wisnu sudah mulai menjaga jarak dengan dunia hiburan. Benar tidaknya kabar tersebut *wallahu a’lam*. Namun sebagai masyarakat Aceh, tentu ada kebanggaan tersendiri melihat Wisnu yang nampak telah “berubah” itu.

Baru-baru ini, kononnya, Teuku Wisnu dan Sazkia Mecca telah membuat kehebohan di TV, melalui program “Berita Islam Masa Kini”. Diriwayatkan bahwa dalam acara tersebut, Sazkia menyebut bahwa membacakan surat *Al-Fatihah* untuk orang-orang yang sudah meninggal adalah perbuatan *bid’ah*, kerena tidak dicontohkan oleh Rasul. Pada saat itu, Teuku Wisnu turut menguatkan apa yang disampaikan Sazkia dan mengatakan bahwa mengirim *Al-Fatihah* untuk orang yang sudah meninggal tidak ada dalilnya dan tidak sesuai dengan tuntunan *Rasulullah*, demikian dilaporkan oleh *Tribunnews*.

Tanpa diduga, komentar Teuku Wisnu dalam acara tersebut

mendapat respon publik, khususnya *nitizen*, di antaranya dari akun Imron Rosyadi yang menyatakan bahwa komentar tersebut adalah *khilafiyah* yang dapat mengundang perdebatan. Setelah membaca berita tersebut, saya mencoba *googling* untuk mencari vidio dimaksud. Setelah menonton vidio tersebut berulang kali, saya melihat tidak ada yang aneh, biasa-biasa saja. Adapun statemen tentang kiriman *Fatihah* itu juga tidak “seradikal” informasi yang berkembang di media sosial.

Saya melihat, bahwa respon yang ditujukan kepada Wisnu terlalu berlebihan. Bahkan ada beberapa akun yang menuding Teuku Wisnu sebagai “ustaz Wahabi”. Dalam pandangan awam saya, apa yang disampaikan oleh Teuku Wisnu masih lebih baik jika dibandingkan dengan bahasa “olok-olok” seorang ustaz di TV dengan ucapan khasnya “*Alhamdoo-lillaaaaah*”.

“Serbuan” terhadap Teuku Wisnu di media sosial semakin *lebay* dan liar. Wisnu disebut-sebut telah menyebarkan doktrin Wahabi. Akibat reaksi yang berlebihan, kabar terakhir menyebutkan bahwa Teuku Wisnu sudah meminta maaf atas komentarnya yang “heboh” itu. Di satu sisi, permintaan maaf yang dilakukan Wisnu memang patut diapresiasi, artinya Wisnu telah berjiwa besar dan menghargai perbedaan. Namun pada hakikatnya, permintaan maaf itu tidak perlu dilakukan, karena apa yang disampaikan Wisnu masih dalam katagori wajar dan bukanlah hal baru.

Jika hanya karena statemen *Fatihah* itu Wisnu dituduh Wahabi dan harus minta maaf, maka Said Agil Siradj juga harus minta maaf kepada publik atas statemennya bahwa orang yang menolak *tahlilan* sebagai tidak Pancasila. Si Armando yang banyak *nyeleneh* itu pun harus minta maaf kepada umat Islam. Nusron Wahid yang kononnya menyebut bahwa ayat konstitusi lebih tinggi dari Alquran juga harus minta maaf.

Adalah tidak adil jika cuma Wisnu yang dijadikan “bulan-bulanan”, sedangkan yang lain terlihat *enjoy* saja. Bagi saya, fokusnya bukan masalah benar tidaknya apa yang disampaikan Wisnu, tapi objektivitasnya itu yang harus dikedepankan.

Jika memang kita meyakini bahwa persoalan kirim *Fatihah* itu *khilafiyah*, maka konsekwensinya kita juga harus sepakat bahwa ada dua golongan yang punya pendapat berbeda terhadap amalan tersebut. Jelasnya, ada yang menyatakan kiriman *Fatihah* itu sampai, dan ada pula yang berkeyakinan tidak sampai. Seharusnya, jika ada seseorang yang mengatakan *Fatihah* itu tidak sampai dianggap sebagai “mengundang perdebatan” karena membincangkan *khilafiyah*, maka orang yang mengatakan kiriman *Fatihah* itu sampai juga harus dilarang, karena statemen itu pun *khilafiyah* dan juga mengundang perdebatan. Ini baru adil.

Adalah aneh, jika Teuku Wisnu dan juga siapa pun yang mengatakan kiriman *Fatihah* tidak sampai langsung diberi stempel Wahabi, sesat dan menyesatkan, tapi ketika ada pihak lain yang juga di depan publik menyatakan kiriman *Fatihah* sampai justru disambut dengan “tepuk tangan” dan bebas dari tuduhan *khilafiyah*. Yang mengatakan kiriman *Fatihah* tidak sampai disebut sebagai tidak toleran, sebaliknya yang mengatakan kiriman *Fatihah* sampai disebut TOLLERANS. Di mana logikanya, Bro!

Ini namanya “*khilafiyah* karet”, jika merugikan kita, maka dengan penuh semangat kita menyebutnya sebagai *khilafiyah*, tapi jika menguntungkan kita, itu bukan *khilafiyah*. Tak naik ketawa saya. *Wallahul Musta'an*.

[*Kompasiana*, 04 September 2015]

INSIDEN FATIHAH DAN CACI MAKI ALA NETIZEN

Pasca “insiden” *Fatihah* yang menimpa Teuku Wisnu beberapa hari lalu, saya sempat posting satu artikel di Kompasiana pada 04 September 2015 dengan tajuk “Teuku Wisnu, Wahabi dan Khilafiyah Karet”. Artikel dimaksud sampai dengan hari ini (6 September) sudah terbaca lebih dari 167 ribu kali dan dibagikan lebih dari 26 ribu kali di *facebook*. Sebagian pembaca menyambutnya dengan sangat baik, dan sebagian lagi justru membalas dengan “caci maki”.

Oleh pihak-pihak yang mengaku diri “Aswaja”, Wisnu dituding telah meremehkan amalan mereka dengan mengatakan bahwa kiriman *Fatihah* kepada orang yang sudah meninggal tidak sampai. Wisnu juga

disebut-sebut telah mengumandangkan *khilafiyah*. Tersebab itu, Wisnu pun terpaksa (dipaksa?) harus menyandang *titel* Wahabi – sebuah praktek jurus “mabuk” yang terus diulang-ulang oleh mereka yang mengaku diri sebagai toleran.

Pasca “insiden” tersebut, masyarakat media sosial (*nitizen*) pun terjebak dalam “pertempuran” hebat. Dalam pertempuran di dunia nyata, biasanya para pasukan memakai pedang, parang, meriam, tank dan pesawat tempur untuk menyerang lawan, tapi di dunia maya pertempurannya simpel saja, tinggal “melempar” *link* (artikel) dan sesekali “menyerbu” pakai *meme* – cukup sederhana. Maka jangan heran, kalau dalam beberapa hari terakhir, artikel tentang sampainya kiriman *Fatihah* menjadi sangat populer dan “berhamburan” di beranda *facebook*.

Uniknya lagi, dalam memperjuangkan pendapat tentang sampainya *Fatihah* kepada orang yang sudah meninggal, nama Ibn Taimiyah – yang sebelumnya “dicaci maki” karena sering dirujuk oleh Wahabi, sekarang “dipuja-puja” (untuk sementara waktu) oleh para “pejuang” dengan maksud “menghantam” statemen Teuku Wisnu. Mereka menggunakan pendapat Ibn Taimiyah terkait sampainya *fatihah* kepada orang mati, padahal sebelumnya, mendengar nama Ibn Taimiyah saja mereka sudah “kepanasan”, tapi sekarang pendapatnya justru dikutip. Bahkan ada sebuah *meme* yang menggambarkan bahwa Teuku Wisnu telah durhaka kepada gurunya Ibn Taimiyah – sebuah lelucon berkualitas rendah.

Di sebalik itu, pasca “insiden” *Fatihah*, beragam komentar miring pun ditujukan kepada sosok Wisnu. Ironisnya, setelah minta maaf pun Wisnu masih saja “dihantam” dengan *laqab-laqab* (sebutan) “tak senonoh” oleh sebagian *nitizen* yang kualitas keagamaannya *wallahu a’lam*. Ada pula sebagian komentator yang berlagak punya

ilmu tinggi, tapi miskin adab – sebuah “tragedi moral” yang sangat mengkhawatirkan. Dalam Islam, musuh (*kafir*) saja yang apabila sudah menyerah tidak boleh lagi diserang, apalagi seorang muslim yang sudah punya itikad baik untuk minta maaf. Tak perlu tepuk jidat, ini *reality*.

Kabar terakhir, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) juga melayangkan teguran atas pernyataan Wisnu yang dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI tahun 2012 pasal 6. Menurut KPI, program siaran tidak boleh mempertentangkan ajaran dan pemahaman baik intra maupun antar agama apalagi mengklaim paling benar sendiri dan menyalahkan pihak lain.

Pada prinsipnya kita sepakat dengan sikap KPI, tapi mampukah KPI untuk konsisten dengan sikapnya itu? Mulai hari ini, jika ada statemen-statemen *khilafiyah* di Televisi maka KPI harus segera bertindak. Jangan hanya berani dengan Wisnu. Jika ada ustaz atau pun pihak lainnya yang menyebut “Wahabi Sesat” di Televisi, maka harus segera dicegat karena statemen tersebut juga melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) KPI tahun 2012. *Wallahu Waliyut Taufiq*.

[Bireuen, 06 September 2015]

MAZHAB DAN TOLERANSI

Mustafa Masyhur, sebagaimana dikutip oleh Muhammad AR (2007: 16), menyebut bahwa Islam adalah suatu *nizam*, suatu sistem hidup yang lengkap, *syumul* dan merangkumi setiap realitas kehidupan. Dengan kata lain, Islam adalah agama “terlengkap” yang pernah ada di muka bumi ini. Islam tidak hanya mengurus masalah-masalah ritual (*hablu minallah*) semata, tapi juga membahas masalah keduniawian (*hablu minan nas*), semisal ekonomi, politik dan juga persoalan-persoalan kenegaraan.

Allah Swt telah menyediakan rambu-rambu dan juga aturan-aturan dalam Alquran yang merupakan petunjuk bagi manusia.

Sebagaimana diuraikan oleh Zainuddin Ali (2009), bahwa dalam Al-Qur'an mengandung ayat-ayat tentang ibadah (shalat, puasa, haji, zakat, dll); ayat tentang masalah keluarga (perkawinan, perceraian dan hak waris); ayat tentang perdagangan, perekonomian, jual beli, sewa menyewa, gadai, perseroan dan kontrak; ayat tentang kriminologi; hubungan dengan non muslim; persoalan kehakiman dan pengadilan; dan juga ayat-ayat tentang kenegaraan.

Berdasarkan ulasan singkat di atas, adalah wajar jika Islam menolak paham Sekularisme yang merupakan produk Barat. Sebagaimana dikemukakan oleh Ashim Ahmad Ajillah (2003), bahwa inti dari sekularisme adalah pemisahan agama dari urusan negara, politik, sosial, undang-undang dan ekonomi sehingga membuat agama menjadi terkungkung dalam urusan ibadah saja.

Di sisi lain, Islam bukanlah agama yang “kaku” dan *jumud*. Meskipun Islam telah muncul pada 14 abad lalu, tapi Islam tidaklah ketinggalan zaman dan ia akan tetap relevan sepanjang zaman. Islam memberikan peluang bagi penganutnya untuk terus “*berijtihad*” guna menjawab berbagai persoalan-persoalan keagamaan di abad modern.

Kebebasan Berpikir

Seandainya kebebasan “berpikir” (*ijtihad*) itu tidak ada, tentunya kita tidak akan pernah mengenal Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Mereka adalah pembangun mazhab-mazhab hukum dalam dunia Islam. Kemunculan orang-orang seperti mereka tentunya tidak terlepas dari “kebebasan berpikir”. Kebebasan berpikir (*ijtihad*) yang penulis maksud bukanlah kebebasan absolut yang tanpa batas dan aturan, tetapi kebebasan tersebut adalah kebebasan dalam bingkai Alquran dan Sunnah, di mana orang-orang yang *berijtihad* itu pun harus memiliki syarat-syarat tertentu.

Akibat adanya kebolehan *ijtihad* itu pula yang menyebabkan lahirnya mazhab-mazhab hukum yang berbeda dalam dunia Islam. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan interpretasi terhadap “teks-teks agama” di antara para imam mazhab. Jika kita telisik lebih jauh, perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu bukanlah hal baru yang muncul pada abad modern seperti sekarang ini, tetapi perbedaan tersebut telah ada pada awal-awal Islam. Jika kita buka buku-buku (kitab) *Tarikh Tasyri'* tentu kita akan dapat memahami mengapa perbedaan itu bisa muncul. Di masa-masa awal pembentukan hukum Islam kita telah mengenal adanya dua kutup pemikiran, yaitu madrasah hadits di Madinah dan madrasah rasyidi di Kufah. Imam Malik bin Anas adalah salah seorang imam yang fatwa-fatwanya banyak dipengaruhi oleh pemikiran Madinah (hadits), adapun imam Abu Hanifah lebih banyak terpengaruh oleh pemikiran Kufah (rasio).

Namun yang patut dicermati, perbedaan-perbedaan itu tidak sampai membuat kaum muslimin berpecah belah, tetapi mereka justru bisa saling menghargai satu sama lain. Jika pun ada perdebatan di antara mereka, maka perdebatan tersebut lebih menjurus pada perdebatan ilmiah, bukan permusuhan.

Di sisi lain, mazhab yang berbeda-beda itu juga saling terkait satu sama lain. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik di Madinah, demikian pula Imam Ahmad bin Hanbal juga pernah belajar kepada Imam Syafi'i. Seandainya Imam Syafi'i itu seorang yang “fanatik” dalam bermazhab, tentunya beliau akan menjadi seorang *Malikiyah* karena beliau pernah belajar kepada Malik, dan bahkan sebelum berangkat ke Madinah, beliau telah hafal Kitab *Al-Muwattha* karangan Malik. Tapi ternyata Imam Syafi'i membangun mazhab sendiri yang berbeda dengan Malik. Demikian pula halnya dengan Imam Ahmad bin Hanbal, jika beliau “fanatik”

tentunya beliau akan menjadi seorang *Syafi'iyah* karena pernah berguru kepada Imam Syafi'i, tapi sejarah menunjukkan bahwa Imam Ahmad justru membuat mazhab sendiri (mazhab Hanbali).

Sekarang mari kita berpikir, jika para Imam Mazhab saja bisa saling menghargai satu sama lain, lantas kenapa kita saling berseteru? Kita harus dengan lapang dada mengakui bahwa tidak ada mazhab yang benar 100%, demikian pula sebaliknya tidak ada mazhab yang salah 100%. Jika kita mengatakan bahwa mazhab A benar 100%, maka konsekwensinya mazhab B adalah salah 100%. Kita harus paham bahwa setiap mazhab mengandung kebenaran dan juga kekeliruan yang bersifat *ijtihadiah*. Jika kita belajar *Fiqih Muqarran* (perbandingan mazhab), kita tentu akan memahami kenapa Imam A menetapkan begini dan Imam B menetapkan begitu. Terkadang dalam satu persoalan, pendapat Imam A lebih kuat dari segi dalil jika dibanding dengan pendapat Imam B. Demikian seterusnya.

Wacana Penyeragaman Mazhab

Beberapa waktu lalu, berhembus informasi bahwa tata cara ibadah di Aceh harus memprioritaskan mazhab Syafi'i. Dan tata cara ibadah yang tidak mengacu pada *Syafi'iyah* juga dibolehkan selama dalam bingkai mazhab yang empat. Prioritas atas mazhab *Syafi'iyah* adalah sah-sah saja selama hal tersebut hanya sebatas anjuran guna meminimalisir perbedaan. Tetapi jika prioritas ini dimaksudkan sebagai sebuah upaya penyeragaman mazhab, maka ini harus dikaji ulang demi terjaganya hak-hak kaum muslimin (kebebasan bermazhab).

Salah satu negara di Asia Tenggara yang telah melaksanakan penyeragaman mazhab adalah Brunei Darussalam. Muthohhar menulis dalam bukunya, bahwa pada proklamasi kemerdekaan dari Inggris tahun 1984, Brunei Darussalam mengumumkan Islam di Brunei adalah

Islam ala *Ahlussunnah Waljama'ah* dan bermazhab Syafi'i sebagai dasar negara. Oleh sebab itu, di negara Brunei tidak dibenarkan mazhab lain dan juga modernisme.

Di Aceh sendiri, secara teoritik mengakui empat mazhab *mu'tabar*, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Tapi dalam prakteknya, perbedaan ini masih menimbulkan persinggungan di sana sini. Kita berharap para ulama di Aceh mampu memberikan pencerahan kepada umat, bahwa tidak setiap yang berbeda itu sesat dan menyimpang. Jika memungkinkan, dalam memberikan pembelajaran agama, baik kepada santri di dayah, maupun kepada siswa di sekolah, hendaknya tidak dipadai hanya dengan satu mazhab saja, tetapi disajikan juga pendapat-pendapat dari mazhab lain. Boleh saja memprioritaskan satu mazhab seperti mazhab *Syafi'iyah*, tetapi perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ulama juga harus dijelaskan agar tumbuh toleransi di benak kita semua.

Di akhir tulisan ini, kita semua berharap agar umat Islam di Aceh bisa bersatu dan saling menghargai satu sama lain. Kejayaan tidak akan pernah ada jika kita saling tuding dan menyalahkan, apalagi jika sampai bermusuhan. Semoga saja kita mampu menjadikan perbedaan-perbedaan yang ada sebagai “warna” yang memperindah persatuan, bukan justru dijadikan sebagai senjata untuk saling “melukai.” *Wallahu Waliyut Taufiq.*

[*Tabloid Pikiran Merdeka, Edisi 91. 21 September – 5 Oktober 2015*]

MENYOAL PELARANGAN MESJID MUHAMMADIYAH

Aceh Serambi Mekkah. Begitulah gelar yang selama ini disematkan kepada provinsi paling Barat Indonesia. Tidak diketahui pasti sejak kapan gelar “Serambi Mekkah” ini disandang oleh Aceh. Sepanjang bacaan penulis yang terbatas, tidak ditemukan catatan yang menjelaskan secara detil tentang kapan dan siapa yang menabalkan gelar “Serambi Mekkah” kepada Aceh. Namun demikian, sejarah telah membuktikan bahwa Aceh pernah menjadi pusat Islam di Nusantara. Bahkan menurut riwayat, dari Acehlah ajaran Islam tersebar ke beberapa wilayah di Indonesia. Salah seorang Wali Songo (Sunan Gunung Jati) dikabarkan juga berasal dari Aceh. Di Aceh juga pernah

berdiri beberapa kerajaan Islam, seperti Kerajaan Peureulak, Kerajaan Samudera Pasai dan Kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan disebut terakhir adalah Kerajaan Islam terbesar di Nusantara yang mencapai puncak kejayaannya di bawah kepemimpinan Sultan Iskandar Muda.

Masyarakat Aceh dikenal sebagai masyarakat yang religius, dan bahkan “fanatik” terhadap Islam. Lembaga pendidikan *dayah* (pesantren) bertebaran hampir di seluruh Aceh. Sesuai dengan amanat Undang-Undang, Aceh juga diberi hak untuk menerapkan syariat Islam secara *kaffah* sehingga lahirilah berbagai *qanun* (perda) yang bernuansa syariah. Penerapan syariat itu sendiri pada awalnya merupakan “produk politik” Jakarta guna meredam gejolak Gerakan Aceh Merdeka. Namun dalam perkembangan selanjutnya (pasca konflik) penerapan syariat Islam ini kemudian disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Aceh.

Aceh menganut paham *Ahlussunnah Waljama'ah* dan bermazhab Syafi'i. Begitulah kalimat yang sering terdengar di minbar-minbar mesjid yang ada di Aceh. Statemen-statemen serupa itu juga sering diulang-ulang dalam berbagai pengajian yang diasuh oleh para oknum *teungku dayah* (ulama tradisional) di Aceh. *Ahlussunnah* yang dimaksudkan oleh *dayah-dayah* tradisional di Aceh adalah sebuah paham keagamaan (teologi) yang merujuk kepada pemikiran-pemikiran *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*. Adapun pemikiran teologi di luar dua paham tersebut oleh sebagian kalangan di Aceh tidak dianggap sebagai *Ahlussunnah Waljama'ah*. Fakta ini kemudian berimplikasi pada munculnya klaim-klaim sesat (menyimpang) kepada kelompok lain, seperti halnya Wahabi – sebuah gerakan tajdid yang muncul pada abad 18.

Dalam beberapa tahun terakhir, isu Wahabi juga “laris manis”

di Aceh. Isu ini terus diproduksi sehingga mengganggu keharmonisan antar masyarakat (sesama muslim). Pada tahun 2015, isu ini telah berhasil menggerakkan sejumlah santri di Aceh untuk melakukan demonstrasi di Banda Aceh. Aksi demonstrasi yang dinamai dengan Parade Aswaja tersebut bermaksud hendak “mengambil alih” Masjid Raya Baiturrahman yang kononnya sebagian pengurusnya adalah Wahabi. Para demonstran meminta kepada Pemerintah Aceh untuk mengubah tata cara ibadah di Masjid Raya sesuai dengan mazhab Syafi’i. Gerakan ini dalam perkembangan selanjutnya telah melahirkan berbagai upaya untuk “merebut” mesjid-mesjid lain yang ada di Aceh. Sasaran “perebutan” adalah mesjid-mesjid yang diidentifikasi sebagai mesjid Wahabi.

Ulasan singkat di atas setidaknya menjadi gambaran bagi kita semua, bahwa telah terjadi upaya menciptakan “kegaduhan” di Aceh. Tidak diketahui secara pasti apakah kondisi tersebut dilatari oleh “pertentangan teologis” atau pun disebabkan oleh kesenjangan sosial (persoalan sosiologis) antar kelompok. Yang jelas, beberapa realitas tersebut telah melahirkan sikap intoleran dari sebagian pihak – yang pada prinsipnya bertentangan dengan karakter asli orang Aceh.

Pelarangan Mesjid Muhammadiyah

Kejadian yang tidak kalah menghebohkan adalah terkait pelarangan pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen, Aceh beberapa waktu lalu. Pada awalnya, terjadi penolakan dari sebagian masyarakat, namun kemudian rekomendasi untuk pembangunan mesjid tersebut terhambat di Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Informasi terakhir, upaya “menghambat” pembangunan Mesjid Muhammadiyah justru dilakukan oleh Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bireuen. Anehnya, alasan yang digunakan oleh FKUB sangat tidak masuk akal dan

terkesan dibuat-buat. FKUB berdalih bahwa pembangunan Mesjid Muhammadiyah dapat memicu terjadinya konflik antara Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

Alasan yang digunakan oleh FKUB ini sama sekali tidak memiliki landasan historis, di mana dalam realitas sejarah tidak pernah terjadi konflik antara NU dan Muhammadiyah di Aceh. Adapun perbedaan-perbedaan praktik ibadah sudah ada di Aceh dari dulu. Namun perbedaan ini tidak pernah memicu terjadinya konflik antara dua ormas tersebut. Demikian pula antara Muhammadiyah dengan dayah (pesantren) juga tidak pernah terjadi persinggungan yang berarti. Secara sosiologis, warga Muhammadiyah dan warga dayah (sering diidentikkan dengan NU) dapat hidup harmonis.

Adapun “riak-riak kecil” dalam persoalan teologis di Aceh baru muncul dalam beberapa tahun terakhir – dan kenyataan ini tidak bisa serta merta diinterpretasikan sebagai bentuk konflik antara NU dan Muhammadiyah. Dalam parade Aswaja misalnya, NU sama sekali tidak terlibat dalam upaya pengerahan massa, di mana gerakan tersebut hanya melibatkan beberapa ormas lain di luar NU, seperti Front Pembela Islam (FPI) Aceh, Himpunan Ulama Dayah (HUDA), Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) dan Organisasi Inshafuddin Aceh.

Terkait penyelesaian kasus pelarangan pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Bireuen juga sudah pernah dimediasi oleh Komnas HAM yang saat itu dipimpin oleh Otto Syamsuddin. Pihak Komnas HAM, menurut keterangan yang saya peroleh dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Bireuen, merekomendasikan agar Bupati Bireuen menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antar masyarakat tersebut dengan merujuk kepada UU No. 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Komnas HAM juga merekomendasikan agar setelah proses rekonsiliasi, pembangunan mesjid dapat dilanjutkan sesuai

dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAK Asasi Manusia. Namun sayangnya, beberapa rekomendasi ini belum dijalankan oleh Bupati Bireuen.

Di sisi lain, seperti dilaporkan oleh Tabloid Modus, anggota FKUB Bireuen terdiri dari beberapa dinas seperti Badan Dayah, Dinas Syariat Islam, Kemenag Bireuen, Majelis Permusyawaratan Ulama, Bagian Hukum Sekda dan Bagian Pemerintahan Sekda Bireuen. Jika informasi ini benar, maka di sini juga terdapat keanehan, karena sesuai dengan SKB Tiga Menteri, yang menjadi anggota FKUB adalah para tokoh lintas agama, bukan dimonopoli oleh satu agama ataupun lembaga pemerintah seperti dinas. Dalam hal ini, Bupati Bireuen selaku pemerintah setempat juga terkesan tidak melakukan apa-apa untuk menyelesaikan persoalan ini.

Negara Jangan Jadi Penonton

Saya berkesimpulan bahwa FKUB Bireuen dan juga Bupati Bireuen telah bertindak diskriminatif terhadap Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sudah ada di Aceh sejak tahun 1928 – jauh sebelum Indonesia merdeka. Muhammadiyah juga memiliki kontribusi besar di Indonesia. Di Aceh sendiri banyak terdapat lembaga pendidikan yang didirikan oleh Muhammadiyah, baik tingkat dasar, menengah dan bahkan Perguruan Tinggi. Di Aceh juga terdapat sejumlah panti asuhan yang dikelola oleh Muhammadiyah. Tapi, Muhammadiyah telah diperlakukan tidak adil tanpa alasan yang jelas.

Untuk itu, pemerintah tidak boleh diam saja menyikapi persoalan ini. Jangan biarkan benih-benih konflik subur di Aceh. Masyarakat Aceh sudah sangat lelah dengan konflik bersenjata selama puluhan tahun. Jika hal ini dibiarkan, bukan tidak mungkin akan melahirkan konflik baru yang bernuansa agama di Aceh. Diperlukan

BAGIAN KETIGA:

sikap bijak dari penguasa negeri ini agar anak negeri bisa hidup rukun dan damai. *Wallahul Musta'an.*

[Bireuen, 05 Oktober 2016]

ACEH DAN TOLERANSI UMAT YANG GAGAL

Beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada Februari 2016, saya mendapatkan satu eks salinan (copian) surat yang ditandatangani oleh Camat Juli, Drs. Munir. Salinan surat dan sejumlah lampiran tersebut saya peroleh dari seorang informan di Kabupaten Bireuen. Hal ini tidaklah aneh, karena saya sendiri adalah warga Kabupaten Bireuen. Surat tersebut berisi Hasil Rapat Musyawarah Rencana Pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah di Kecamatan Juli.

Dalam surat yang ditandatangani oleh Camat Juli pada 03 Januari 2016 tersebut, pada poin (a) tertulis: *“Bahwa Keputusan Masyarakat Juli menolak dan tidak menerima atas Rencana Pembangunan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah di Dusun Teungoh Gampong Juli Keude Dua Kemukiman Juli Utara Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen,*

*karena mesjid yang akan dibangun tersebut merupakan **Mesjid Kelompok dan bukan Mesjid Ahlul Sunnah Waljama'ah**”.*

Dalam Notulen Rapat yang terlampir dalam surat Camat tersebut, terdapat saran dari Tgk. Saifuddin yang merupakan utusan MPU untuk Kecamatan Juli. Tgk. Saifuddin berpendapat bahwa “*Dalam hal rencana mendirikan Mesjid At-Taqwa Muhammadiyah adalah merupakan pendirian mesjid kelompok (ormas). Sesuai dengan Al-Quran surat At-Taubah menjelaskan bahwa mendirikan Mesjid kelompok dilarang karena dapat memecah belah umat...*” Dalam tanggapan peserta rapat (masih dalam Notulen), seorang mantan kombatan GAM, Keuchiek Malek mengatakan: “*...81% penduduk setempat menolak pembangunan mesjid tersebut...*”

Sementara itu, dalam berita yang dirilis *sangpencerah.com*, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, Athaillah A. Latief mengatakan bahwa pihak Muhammadiyah telah mendapatkan donator yang siap membangun mesjid, tempat *wudhu*, rumah imam dan dua kelas untuk program *tahfidhul Quran*. Menurut Athaillah, semua persyaratan pembangunan mesjid sudah dipenuhi, termasuk dukungan dari masyarakat yang dibuktikan dengan penyerahan foto copy KTP sejumlah 150 orang. Kemudian IMB juga sudah didapatkan dari keuchik kampung, camat dan Sekda Kabupaten Bireuen. Namun, masih menurut Athaillah, rekomendasi pembangunan mesjid mulai tersendat di Kantor Kementrian Agama Bireuen.

Uniknya lagi, dalam keterangan yang dirilis oleh *republika.co.id*, Atthailah menyebut bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) menyamakan mesjid yang akan dibangun Muhammadiyah dengan Mesjid Dhirar sehingga berdasarkan surat At-Taubah ayat 107, mesjid tersebut boleh dirusak, dibakar dan dihancurkan. Selain itu, Atthailah mengatakan bahwa Kemenag Bireuen menolak memberikan

rekomendasi pembangunan mesjid atas dasar surat yang dikirimkan oleh pihak kecamatan dan Polres Bireuen.

Setelah menyimak uraian di atas, kira-kira apa yang terpikir oleh kita? Tentunya sulit bagi kita, khususnya sebagai seorang muslim untuk memahami fenomena ini. Pembangunan mesjid dilarang (ditolak) di daerah yang mayoritas penduduknya muslim. Anehnya lagi, pelarangan tersebut didasarkan pada argumen rapuh dan bahkan irrasional. Pembangunan Mesjid Muhammadiyah ditolak oleh “segelintir” orang dengan alasan akan terjadi perpecahan dalam masyarakat. Ditinjau dari sudut pandang manapun, alasan ini tentunya tidak dapat diterima dan terkesan mengada-ngada. Jika argumen ini disederhanakan, maka hampir dapat disimpulkan bahwa pihak yang menolak pembangunan mesjid tersebut secara tidak langsung telah menganggap bahwa Muhammadiyah adalah biang perpecahan. Lantas benarkah demikian?

Secara tidak langsung mereka (penolak mesjid) telah mengkhinai sejarah. Tidakkah mereka tahu bahwa Muhammadiyah punya kontribusi besar terhadap negeri ini? Tidakkah mereka paham bahwa Muhammadiyah telah beramal untuk bangsa ini jauh sebelum Republik Indonesia lahir? Tidakkah mereka sadar bahwa lahirnya pendidikan modern seperti sekarang ini juga tidak terlepas dari usaha-usaha Muhammadiyah? Bahkan mungkin sebagian anak-anak mereka adalah lulusan sekolah dan kampus-kampus Muhammadiyah. Apa mungkin mereka lupa? Atau pura-pura tidak tahu? *Wallahu A'lam.*

Beberapa Catatan

Saat ini, kita dihadapkan pada kenyataan yang benar-benar tidak masuk akal. Seandainya aksi penolakan mesjid ini terjadi di daerah minoritas muslim, mungkin masih bisa dipahami. Tetapi

anehnya, penolakan pembangunan mesjid justru terjadi di Serambi Mekkah. Miris memang, tapi apa hendak dikata, ini adalah fakta yang harus “ditelan.”

Terkait penolakan pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian kita semua. *Pertama*, penyebutan Mesjid Muhammadiyah sebagai mesjid kelompok. Dari sisi bahasa penyebutan ini sah-sah saja, mengingat Muhammadiyah adalah sebuah ormas. Yang namanya ormas sudah tentu kelompok. Jika yang dimaksudkan bahwa mesjid tersebut dibangun oleh kelompok Muhammadiyah, maka dapat dibenarkan. Tetapi jika yang dimaksudkan bahwa mesjid tersebut hanya dikhususkan untuk kelompok Muhammadiyah, maka ini keliru besar. Buktinya, ketika saya perhatikan orang-orang shalat di mesjid At-Taqwa Muhammadiyah Bireuen, para pengurus mesjid tidak pernah meminta mereka untuk menunjukkan kartu anggota Muhammadiyah. Saya bukan anggota Muhammadiyah, tapi saya juga bisa shalat di Mesjid Muhammadiyah tanpa kena *sweeping*. Dengan demikian, tudingan Mesjid Muhammadiyah sebagai mesjid kelompok hanya “bualan” belaka.

Kedua, pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli dilarang karena mesjid tersebut bukan mesjid *Ahlussunnah Waljama'ah*. Jika yang dimaksudkan sebagai *Ahlussunnah Waljama'ah* adalah khutbah Jumat pegang tongkat, selesai shalat zikir berjamaah, atau shalat tarawih dua puluh rakaat, maka tudingan ini mungkin saja benar, karena di mesjid-mesjid Muhammadiyah tidak ada praktik semacam itu. Tetapi jika yang dimaksud dengan *Ahlussunnah Waljama'ah* adalah orang-orang yang konsisten terhadap Alquran dan Sunnah serta anti kepada segala bentuk kesyirikan, sekecil apa pun, maka Muhammadiyah adalah *Ahlussunnah Waljama'ah* yang paling

“orisinil”. Dengan demikian, tudingan mesjid Muhammadiyah sebagai bukan mesjid *Ahlussunnah Waljama’ah* harus dikaji kembali dengan merujuk kepada literatur keilmuan yang bisa dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Artinya, pendefinisian *Ahlussunnah* harus terbebas dari “ego mazhab” tertentu.

Ketiga, tudingan pihak MPU yang menyatakan mesjid Muhammadiyah sama dengan mesjid Dhirar, seperti dikutip Atthaillah – merupakan klaim yang tidak bertanggung jawab dan justru bisa merusak wibawa MPU di mata umat. Semestinya pihak yang mewakili MPU harus melakukan kajian secara mendalam sebelum mengeluarkan statemen yang membingungkan semacam ini. Sampai saat ini belum ditemukan fatwa resmi dari MPU Aceh yang menyebut mesjid Muhammadiyah sama dengan mesjid Dhirar. Hal ini harus disikapi dengan serius oleh MPU, jangan sampai ada pihak-pihak yang ingin mencermarkan nama MPU melalui pernyataan-pernyataan destruktif-provokatif. Selain itu, sampai saat ini Majelis Ulama Indonesia juga tidak pernah mengeluarkan statemen bahwa mesjid Muhammadiyah sama dengan mesjid Dhirar. Lagi pula, Majelis Ulama Indonesia juga pernah dipimpin oleh kader-kader Muhammadiyah, dan bahkan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) pertama adalah orang Muhammadiyah – HAMKA.

Keempat, terkait dengan kekhawatiran akan adanya pertumpahan darah jika pembangunan mesjid Muhammadiyah dilakukan, maka hal ini menjadi tugas tokoh agama dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada umat bahwa Islam menganjurkan toleransi dan saling menghargai. Tidak ada alasan untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Alquran dan Sunnah secara terang benderang telah menjelaskan dan menegaskan bahwa haram hukumnya menumpahkan darah kaum muslimin tanpa hak

(alasan *syar'i*). Sebagai muslim kita tentu paham akan hal ini.

Kelima, pihak kecamatan (Camat Juli) selaku perpanjangan tangan Pemerintah harus mampu bersikap arif, bijaksana dan tidak diskriminatif dalam melayani warga negara. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Terkait dengan pelarangan pembangunan mesjid Muhammadiyah oleh sebagian warga di Juli – Camat selaku pemerintah harus mampu memberi pencerahan kepada masyarakat bahwa Muhammadiyah sebagai salah satu ormas Islam terbesar juga berhak hidup di seluruh jengkal tanah Indonesia. Artinya, seorang camat tidak serta-merta harus menuruti keinginan sebagian pihak dan mengabaikan hak pihak-pihak lain. Mesjid adalah tempat ibadah umat Islam. Dengan demikian, melarang umat Islam mendirikan mesjid sama saja dengan melarang umat Islam untuk beribadah. Terkait adanya perbedaan praktik ibadah tidaklah menjadi alasan untuk melakukan pelarangan, karena UUD 1945 menjamin kebebasan beribadah sesuai keyakinannya masing-masing.

Keenam, sebagaimana dikemukakan oleh Atthaillah bahwa pihak Kementrian Agama Kabupaten Bireuen juga terkesan mempersulit (tidak memberikan rekomendasi) pembangunan mesjid At-Taqwa Muhammadiyah di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini, tentu patut dipertanyakan “kualitas” kepala Kemenag Bireuen yang jelas-jelas tidak mampu mengendalikan situasi sehingga terkesan “mengikuti arus.” Adalah sangat naïf jika seorang kepala Kemenag tidak mengenal Muhammadiyah. Tidak tegasnya kepala Kemenag Bireuen dalam menangani kasus ini, secara tidak langsung telah “mencoreng” kewibawaan Kementerian Agama di mata masyarakat Indonesia. Semoga saja Kemenag Bireuen tidak terjebak dalam “kepentingan pragmatis.”

Di akhir tulisan ini, sebagai sesama muslim, saya mengajak

kita semua untuk saling menghargai satu sama lain. Semoga saja, dalam bulan Ramadhan tahun ini kita dapat memaksimalkan ibadah kepada Allah Swt dan juga mampu menebar kasih sayang sesama kita. Mari hilangkan “ego mazhab” dan saling menahan diri dalam menyikapi segala perbedaan. Semoga saja kita benar-benar menjadi insan yang bertaqwa. *Wallahu Waliyut Taufiq.*

[*Republika.co.id*, 13 Juni 2016]

WAFATNYA TOLERANSI DI BIREUEN

Saya yakin, siapa pun akan tersenyum dan terkagum-kagum pada saat membaca komentar ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Bireuen, saudara Hamdani. Komentar yang lumayan lucu dan bahkan menggelitik. Komentar dimaksud adalah terkait tidak dikeluarkannya rekomendasi pembangunan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Juli dengan alasan yang “aduhai”.

Dalam komentarnya sebagaimana dirilis Tabloid Modus beberapa waktu lalu, Ketua FKUB Bireuen mengatakan bahwa yang menjadi alasan tidak dikeluarkannya rekomendasi pembangunan mesjid Muhammadiyah di Juli adalah untuk menghindari terjadinya

konflik antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Meskipun terdengar bijak, tapi ini adalah sebuah statemen yang sulit dinalar dengan akal sehat! Tegasnya, pernyataan serupa ini tidak pantas diucapkan oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama. Lain halnya jika diucapkan oleh Forum Konflik Umat Beragama. Kita kahawatir jika nantinya statemen FKUP ini justru menjadi pemantik konflik NU dan Muhammadiyah yang sebelumnya hidup harmonis.

Disadari atau tidak, komentar yang dilontarkan oleh Ketua FKUB Bireuen telah mencoreng keharmonisan yang selama ini sudah tertata dengan baik di Kabupaten Bireuen. Apa hubungannya pembangunan mesjid dengan konflik NU dan Muhammadiyah? Jika pembangunan mesjid dianggap sebagai pemicu konflik, lantas apa bedanya FKUB dengan “preman-preman” Barat yang mendefinisikan Islam sebagai biang terorisme? Jika pun potensi konflik itu benar adanya, bukankah ini menjadi tugas FKUB untuk mendamaikan para pihak yang terlibat konflik? Bukan justru “menceburkan kaki” kepada salah satu pihak. Seharusnya FKUB mampu menjadi perukun – sesuai dengan namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, bukan justru menjadi “pemicu” konflik itu sendiri dengan mengeluarkan statemen-statemen bernada “provokatif.”

NU dan Muhammadiyah adalah ormas terbesar di negeri ini. Keduanya telah eksis jauh sebelum Republik ini diproklamkan oleh Soekarno-Hatta. Jika dilihat dari usia berdirinya, Muhammadiyah (berdiri 1912) bahkan lebih tua daripada NU (berdiri 1926). Meskipun antara kedua ormas ini terdapat beberapa perbedaan, namun seiring perkembangan zaman, “gesekan” antara dua ormas ini sudah sangat sulit ditemukan, di mana kedua ormas tersebut bisa berjalan beriringan dalam membangun bangsa ini dengan kontribusinya masing-masing.

Muhammadiyah telah berdiri di Aceh pada tahun 1928 – jauh

sebelum FKUB Bireuen lahir. Dengan demikian, tindakan FKUB Bireuen yang meminta akta notaris Muhammadiyah dari pusat sampai ranting sebagai salah satu persyaratan mendirikan mesjid semakin mempertegas bahwa FKUB Bireuen tidak memahami fungsinya dengan baik. FKUB Bireuen seperti hendak menafikan keberadaan Muhammadiyah yang selama ini telah berjasa besar dalam membesarkan bangsa ini.

Kemudian, dengan meminjam istilah Quraish Shihab – hampir dapat disimpulkan bahwa komentar Ketua FKUB Bireuen yang menyebut rekomendasi pembangunan mesjid dapat memicu konflik NU dan Muhammadiyah adalah komentar orang yang “lahir terlambat” atau dalam istilah orang Aceh *teulat jaga*. Secara tidak langsung, kalimat yang diucapkan oleh Ketua FKUB Bireuen akan melahirkan penafsiran bahwa NU “terlibat” dalam menghambat pembangunan mesjid Muhammadiyah di Juli. Lantas benarkan demikian? Sanggupkah FKUB membuktikan ini? Jika tidak, maka statemen tersebut harus diralat sembari meminta maaf kepada NU. Saya yakin bahwa NU adalah ormas yang sangat toleran terhadap perbedaan. Kemudian, siapakah yang dimaksud dengan NU dalam statemen Ketua FKUB Bireuen? Apakah para oknum dan pihak-pihak tertentu yang tidak menginginkan keberadaan Mesjid Muhammadiyah dapat dengan serampangan dikategorikan sebagai NU?

Bagaimana pula jika kondisinya terbalik? Seandainya ada pihak NU yang ingin mendirikan mesjid, apa lantas kemudian FKUB juga akan menghambat pembangunan tersebut dengan dalih akan terjadi konflik dengan Muhammadiyah? Ada baiknya logika-logika dangkal semacam ini ditinggalkan oleh FKUB Bireuen agar hubungan yang harmonis dapat tercipta.

Penting pula dipahami oleh FKUB Bireuen bahwa sepanjang perjalanan sejarah tidak pernah terjadi konflik antara NU dan

Muhammadiyah di Aceh. Lantas apa yang menjadi dasar kekhawatiran FKUB Bireuen?

FKUB seharusnya berperan aktif dalam menciptakan toleransi antar umat beragama, tidak hanya dengan penganut agama yang berbeda, tetapi juga antar sesama pemeluk agama. Setiap potensi konflik seharusnya bisa disikapi dengan baik, bukan justru bersikap diskriminatif dengan merugikan salah satu pihak. Klaim mayoritas dan minoritas harus bisa dikelola dengan baik dan hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan untuk melakukan diskriminasi, apalagi terhadap komunitas (ormas) yang punya kontribusi besar terhadap negeri ini seperti halnya Muhammadiyah.

Pihak FKUB Bireuen harus jujur kepada publik karena isu ini telah menjadi konsumsi publik. Harus dijelaskan seterang-terangnya agar masyarakat tidak kebingungan. Benarkah penolakan terhadap pembangunan Mesjid Muhammadiyah tersebut dilatari oleh persoalan ajaran (agama)? Atau hanya konflik antar pribadi yang kemudian merembes dan dipolitisir sedemikian rupa sehingga terkesan sebagai konflik agama? Persoalan agama adalah persoalan sensitif yang jika tidak disikapi dengan bijak maka akan melahirkan konflik yang sesungguhnya. Ruang konflik ini tentunya harus ditutup rapat agar tidak melebar, tentunya dengan mekanisme yang tepat, elegan dan tanpa diskriminasi.

Isu tentang pelarangan pembangunan mesjid di Bireuen sudah menjadi isu nasional. Jika tidak disikapi dengan baik oleh pihak terkait, khususnya Pemda Bireuen, bukan tidak mungkin kejadian ini akan memperburuk wajah Bireuen sebagai daerah yang katanya akan menjadi kota santri. Bupati Bireuen selaku penguasa yang otiritatif seharusnya mampu menyelesaikan permasalahan ini dengan bijak demi terciptanya toleransi dan keharmonisan dalam masyarakat. Jika hal ini

BAGIAN KETIGA:

dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian, maka kita semua akan menyaksikan “wafatnya” toleransi di Bireuen. *Wallahul Musta'an.*

[*Wartaaceh.com, 26 Agustus 2016*]

TOLERANSI HANYA DI BIBIR

Sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin*, Islam telah mengenal konsep toleransi (*tasamuh*) jauh sebelum konsep tersebut dikampanyekan oleh Barat. Islam juga sudah mempraktikkan Hak Azasi Manusia ketika Eropa masih “tertidur.” Islam adalah agama yang *syumul* (sempurna) yang tidak hanya mengatur tentang hubungan manusia dengan *Rabbnya*, tetapi juga mengandung sejumlah pedoman terkait hubungan antar sesama manusia, baik hubungan seagama maupun lintas pemeluk agama. Islam juga menyediakan azas-azas yang menyangkut dengan politik dan tata negara serta segudang konsep lainnya.

Dalam Islam, konsep toleransi tidak hanya bersifat teoritik, tetapi telah dipraktekkan sendiri oleh Nabi Saw ketika membangun Negara Madinah. Di antara agenda penting yang dilakukan oleh Rasulullah di Madinah adalah mempersaudarakan antara kaum *Muhajirin* dan *Anshar* yang merupakan landasan bagi tegaknya *ukhuwah Islamiyah*. Untuk menjaga stabilitas negara Nabi Saw juga mempersatukan masyarakat lintas agama di Madinah (Islam, Yahudi dan Nasrani) menjadi satu *ummah* sebagai wujud dari *ukhuwah wathaniyah*. Adapun landasan tentang HAM dalam Islam tercermin dalam khutbah Nabi Saw pada haji *wada'* – di mana Nabi Saw menegaskan bahwa seluruh manusia memiliki derajat dan hak yang sama di mata Allah. Perbedaan manusia hanyalah pada ketaqwaannya, bukan pada status sosial, suku dan warna kulit.

Pelarangan Mesjid Muhammadiyah

Di Indonesia, akhir-akhir ini kembali muncul berbagai insiden intoleransi, baik yang melibatkan pemeluk antar agama seperti insiden Tolikara, Singkil dan Tanjung Balai – maupun antar sesama pemeluk agama seperti parade Aswaja di Aceh pada tahun 2015, aksi perebutan mesjid dan terakhir aksi pelarangan pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Bireuen. Sebagai negara yang mengakui pluralitas agama (bukan pluralisme), seharusnya “tragedi” serupa ini tidak terjadi di Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia menganut agama yang berbeda, namun *ukhuwah wathaniyah* tetap harus dipupuk agar stabilitas negara dapat terjaga. Demikian pula antar sesama pemeluk agama, khususnya Islam – meskipun menganut mazhab yang berbeda, *ukhuwah Islamiyah* harus tetap dipertahankan.

Aksi pelarangan Mesjid Muhammadiyah di Kabupaten Bireuen adalah salah satu bentuk “tragedi” yang sangat memalukan. Mungkin ini adalah kejadian pertama di Indonesia, di mana pembangunan mesjid

ditolak oleh sekelompok orang yang mengaku dirinya sebagai muslim. Menurut berbagai sumber, aksi penolakan ini awalnya dilakukan oleh sebagian masyarakat setempat. Kemudian aksi ini berlanjut dengan tertahannya rekomendasi pembangunan mesjid di Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Bireuen yang *notabene* adalah lembaga negara. Setelah “hambatan” di Kemenag Bireuen selesai, rekomendasi pembangunan Mesjid Muhammadiyah kembali tertahan di Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Bireuen. Anehnya lagi ketua FKUB Bireuen juga berstatus sebagai muslim.

Parahnya lagi, Bupati Bireuen selaku kepala daerah juga terkesan tidak melakukan apa, apa untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini terbukti dengan semakin “molornya” rekomendasi dari FKUB. Sebagai wilayah yang dihuni oleh mayoritas muslim, seharusnya insiden ini tidak terjadi. FKUB memiliki peran penting untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama. FKUB harus mampu bersikap adil dan bijaksana terhadap semua pemeluk agama, apalagi kepada muslim yang merupakan penduduk mayoritas. Jangan sampai FKUB “dikendalikan” oleh oknum-oknum yang tidak ingin masyarakat hidup rukun. FKUB harus bebas dari intervensi pihak manapun. Seharusnya, FKUB memberi pencerahan kepada pihak yang menolak pembangunan mesjid, bukan sebaliknya menahan rekomendasi dengan alasan yang membuat non muslim tertawa, bahkan “terbahak.”

Sekilas tentang Muhammadiyah di Aceh

Hasballah Thaib dalam kata sambutannya terhadap buku Said Ali bin Habib Chik Alaydrus, menyebut bahwa Muhammadiyah sudah berdiri di Aceh pada tahun 1928. Konsul pertama Muhammadiyah di Aceh berasal dari keluarga uleebalang. Aslamnur dkk (2015) dalam buku *Jelang Satu Abad Muhammadiyah di Aceh*, dengan mengutip Rusdi Sufi

menyatakan bahwa Muhammadiyah berdiri di Aceh pada tahun 1927. Pengaruh dari Muhammadiyah sudah masuk ke Aceh beberapa tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 1923. Sampai dengan tahun 1942, masih menurut Aslamnur dkk, Muhammadiyah sudah menjangkau seluruh Aceh dengan 8 cabang. Teuku Muhammad Hasan Glumpang Payong sebagaimana disebut Rusdi Sufi (1989) dalam buku *Pendidikan Sebagai Faktor Dinamisasi dan Integrasi Sosial* adalah konsulat Muhammadiyah Aceh yang pertama.

Aboebakar Atjeh (1970) dalam bukunya *Gerakan Salafijah di Indonesia*, menulis bahwa dalam bidang kemasyarakatan, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi yang mempopulerkan penanggalan dan tahun hijrah. Di masa lalu, Muhammadiyah juga telah berhasil menghidupkan salam secara Islam, baik dengan perseorangan maupun dalam rapat dan sidang-sidang; memisahkan tempat antara laki-laki dan wanita (dalam forum) dan mendirikan sejumlah mesjid untuk umum. Dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mendirikan berbagai sekolah yang berazaskan Islam. Dalam bidang kemanusiaan, masih menurut Aboebakar Atjeh, Muhammadiyah mendirikan panti asuhan untuk anak yatim dan orang miskin; balai-balai kesehatan dan pengobatan; persatuan juru rawat dan berbagai lembaga kemanusiaan untuk membantu korban bencana alam.

Dalam skala nasional sebagaimana dirilis *muhammadiyah.or.id*, saat ini amal usaha Muhammadiyah terdiri dari: 4623 TK/TPQ; 2604 SD/MI; 1772 SMP/MTs; 1143 SMA/MA/SMK; 67 pesantren; 172 Perguruan Tinggi; 457 RS/ Rumah Bersalin; 318 Panti Asuhan; 54 Panti Jompo; 82 Rehabilitasi Cacat; 71 SLB; 6118 mesjid; 5080 mushalla; dan 20.945.5004 M luas tanah. Dalam usianya yang sudah lebih dari satu abad, tentunya amal usaha Muhammadiyah ini akan terus berkembang dari masa ke masa.

Di Aceh, sampai dengan tahun 2010, seperti dicatat Aslamnur, Muhammadiyah telah mendirikan sejumlah lembaga pendidikan yang tersebar di berbagai kabupaten: 20 Taman Kanak-Kanak; 10 Sekolah Dasar dan MI; 12 Madrasah Tsanawiyah/ Sekolah Menengah Pertama; 11 Sekolah Menengah Atas dan satu Universitas dengan 8 Prodi dan 13 Program Studi. Muhammadiyah di Aceh juga sudah mendirikan sejumlah panti asuhan dan rumah bersalin/ balai pengobatan.

Di Kabupaten Bireuen sendiri Muhammadiyah sudah lama berkiprah untuk umat dengan didirikannya beberapa lembaga pendidikan, seperti: SMKK Muhammadiyah Bireuen, Akper Muhammadiyah Bireuen, MTs Muhammadiyah Bireuen dan SDIT Muhammadiyah Bireuen. Dan bahkan banyak PNS di Bireuen saat ini yang merupakan alumnus PGA Muhammadiyah. Beberapa tahun lalu, pengurus Muhammadiyah Bireuen juga sudah mendirikan Mesjid Taqwa Muhammadiyah di Kecamatan Kota Juang.

Ulasan singkat di atas setidaknya telah memberi gambaran kepada kita semua bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi asing di Aceh, khususnya di Bireuen. Dengan demikian, ditinjau dari sudut pandang manapun, aksi penolakan mesjid Muhammadiyah di Juli oleh sekelompok orang adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Demikian pula halnya dengan sikap FKUB Bireuen yang “mengulur waktu” untuk mengeluarkan rekomendasi pembangunan mesjid adalah sikap yang “dicela” oleh Undang-Undang (tentang kebebasan beragama) dan juga ditentang oleh *syara*’. Tersebab itu negara jangan menutup mata. Toleransi jangan hanya di bibir! *Wallahul Waliyut Taufiq*.

[*Harian Waspada Medan*, 19 September 2016]

WARGA MUHAMMADIYAH DITINDAS, DI MANA PERAN NEGARA?

Uroe get, bulen get, tapi akai han tom get (hari yang baik, bulan yang baik, tapi akhlak tidak pernah baik). Kata-kata ini terucap secara tidak sengaja ketika saya membaca beberapa status di media sosial (*facebook*) terkait pelarangan qurban di lokasi mesjid Muhammadiyah Juli. Padahal, kemarin (12/09/16) adalah hari raya, hari untuk gembira sembari *bertaqarrub* kepada Allah dengan melaksanakan shalat Idul Adha, plus menyembelih hewan qurban bagi yang mampu. Semenjak shubuh, alunan takbir terus bergemuruh di seluruh pelosok negeri, pertanda hari raya sudah tiba.

Sepasang anak kecil yang sedang “bermusuhan” dan sudah mogok bicara sehari-hari pun akan tersenyum melihat temannya di hari raya. Mereka akan mencari alasan agar bisa berbaikan dengan teman yang selama ini dimusuhinya. Ada banyak media yang mereka gunakan, bisa dengan mengajak bermain balon bersama, bertukar senjata mainan atau menawarkan setumpuk *kueh seupet* (sejenis kue). Ini dilakukan hanya dengan satu harapan, agar mereka bisa kembali saling senyum. Setiap anak pasti tahu bahwa hidup tanpa teman itu sepi, apalagi di hari raya. Inilah kelebihan anak-anak. Dendamnya hanya sesaat dan tidak pernah abadi. Karena mereka paham arti persaudaraan.

Lantas bagaimana dengan kita yang sudah menjadi ayah dan ibu dari anak-anak atau mungkin sudah menjadi kakek-nenek? Haruskah kita mengorbankan persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*) hanya demi mempertahankan ego *syathaniyah*? Agar dianggap kuat, apakah kita harus selalu menindas? Agar dianggap cerdas, apakah kita harus terus menghina orang lain? Agar dikira konsisten, apakah kita harus terus menebar permusuhan terhadap saudara kita, walau di hari raya sekali pun? Jika jawabannya adalah “ia”, maka menangislah atas kekebalan yang telah menancap di hati kita. Moga-moga Allah mengampuni.

Muhammadiyah ditindas di Bireuen

Ulasan singkat di atas hanyalah pengantar – yang akan mengantarkan kita ke arena sebenarnya. Uraian di atas hanya sebatas refleksi untuk saya renungkan sendiri – syukur jika pembaca ikut merenung.

Di Kabupaten Bireuen, di tanah tempat saya dilahirkan, saat ini sedang terjadi “bencana” – sebuah “bencana” yang sangat serius. Tapi ia nampak dingin – bahkan terkubur dan tenggelam di tengah

sejumlah isu lainnya yang sedang melanda negeri ini. Bahkan media pun, khususnya media *mainstream* di Aceh nampak tidak tertarik dengan isu ini. Saya menyebutnya isu, meskipun ia bukan sekedar isu, tapi aksi.

Kemarin (12/09/16), sebelum berangkat ke mesjid, saya sempat membaca sebuah postingan di *facebook* yang berisi informasi terkait pelarangan qurban oleh sekelompok orang di lokasi mesjid Muhammadiyah Juli. Si empunya status yang juga warga Muhammadiyah Bireuen sangat menyesalkan aksi pelarangan tersebut – tentu kita pun “berkewajiban” untuk kesal dengan perilaku-perilaku semacam ini – yang seharusnya “disembelih” bersama disembelihnya qurban.

Beberapa jam kemudian, seorang warga Muhammadiyah yang lain juga memposting informasi yang sama. Kali ini, warga Muhammadiyah tersebut memperlihatkan beberapa foto tentang pengamanan lokasi qurban Muhammadiyah oleh aparat kepolisian. Sungguh miris! Berqurban saja harus dijaga ketat oleh aparat. Kejadian ini terjadi di Aceh, di bumi Serambi Mekkah, bukan di Tepi Barat atau Gaza, Palestin, bukan pula di Israel.

Apa yang terjadi kemarin hanyalah kelanjutan dari kasus-kasus sebelumnya, di mana ada sekelompok orang yang melarang pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli. Sampai saat ini, menurut beberapa sumber, rekomendasi pembangunan Mesjid Muhammadiyah masih tertahan di Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bireuen. Tidak begitu jelas siapa saja yang menjadi anggota FKUB Bireuen. Apakah komposisi anggota FKUB Bireuen sudah sesuai dengan PBM Tiga Menteri juga tidak diketahui secara pasti. Namun yang jelas, alasan yang digunakan FKUB untuk menahan rekomendasi tidak dapat diterima dan terkesan dibuat-buat. Dalam hal ini, Muhammadiyah sebagai sebuah ormas besar di Indonesia telah

diperlakukan secara tidak layak.

Terkait kasus yang menimpa warga Muhammadiyah di Juli Bireuen, saya tidak melihat ada peran serius dari negara, untuk tidak mengatakan bahwa negara telah absen, dan bahkan kalah dengan sikap intoleran sekelompok orang. Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) yang semestinya menjadi media untuk menciptakan kerukunan antar umat ternyata gagal berfungsi. Kita tentu sangat khawatir jika FKUB “beralih fungsi” menjadi corong “penindasan.” Kekhawatiran ini disebabkan oleh beberapa statemen FKUB di media yang sangat “menggelikan.”

Menurut informasi dari berbagai sumber, kasus Mesjid Muhammadiyah Juli juga sudah pernah diusahakan penyelesaiannya oleh Komnas HAM. Pihak Komnas HAM telah merekomendasikan agar pemerintah setempat menyelesaikan konflik sosial yang terjadi antar masyarakat di Juli. Namun sayangnya, rekomendasi ini pun belum terlaksana sebagaimana mestinya. Hal ini menyebabkan pembangunan Mesjid Muhammadiyah terus tertunda.

Negara, melalui UUD telah menjamin kebebasan untuk beragama dan menjalankan ibadah sesuai keyakinan masing-masing. Mesjid adalah salah satu sarana dan tempat ibadah. Melarang pembangunan mesjid, sama halnya dengan melarang ibadah. Melarang ibadah sama dengan menabrak UUD, dan menabrak UUD sama dengan *mita pake* (cari ribut) dengan negara. Cari ribut dengan negara tentunya berkonsekwensi berhadapan dengan hukum. Namun saya tidak tahu di mana posisi hukum dalam menyikapi kasus Mesjid Muhammadiyah di Juli. Memang benar bahwa pendekatan sosiologis akan menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Namun pendekatan sosiologis saja tanpa dibarengi pendekatan hukum, tentu tidak memadai dan tidak akan menyelesaikan masalah.

BAGIAN KETIGA:

Untuk itu, negara tidak boleh lalai. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut, sama saja dengan menyuburkan benih-benih intoleran dalam masyarakat. Di sisi lain, juga dibutuhkan peran tokoh-tokoh agama yang dianggap “kharismatik” guna mencari titik temu agar persoalan ini cepat terselesaikan. Tentunya dengan tidak mengorbankan salah satu pihak. Semua pihak harus terlayani dengan baik, termasuk Muhammadiyah yang juga berhak hidup di setiap jengkal tanah Indonesia. Selamat Hari Raya Qurban!

[Bireuen, 13 September 2016]

(Endnotes)

1. Muhammad Ahmad, *Tauhid-Ilmu Kalam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), hal. 163.
2. Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan*, (Jakarta: UI-Press, 1986), cet. 5, hal. 42.
3. Muhammad bin Abdul Karim Syahrastani, *Sekte-Sekte Islam; Bagian tentang Sekte-Sekte Islam dalam Kitab Al-Milal wan Nihal*, terj. Karsidi Diningrat, (Bandung: Pustaka, 2004), cet. 2, hal. 57.
4. Muhammad Ahmad, *Tauhid-Ilmu Kalam...*, hal. 163.
5. H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah dan Peranannya dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam*, (Jakarta: Al Husna Zikra, 1982), hal. 151.
6. H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah dan Peranannya...*, hal. 152.
7. H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah dan Peranannya...*, hal. 160.
8. H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah dan Peranannya...*, hal. 170.
9. H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah dan Peranannya...*, hal. 181.
10. Tulisan ini sempat masuk dalam *trend google* di kompasiana dan dibaca 297.000 kali.





BAGIAN KEEMPAT:

WAHABI DALAM PERBINCANGAN

ANTARA KI JOKO BODO, YAHUDI DAN SUNNAH JENGGOT

Dalam suatu ceramah di sebuah desa di Aceh penulis sempat terkejut ketika mendengar oknum penceramah membuat pernyataan aneh dan melecehkan sunnah Nabi Saw. Penceramah tersebut menyatakan bahwa orang-orang yang berjenggot adalah Yahudi. Entah apa yang menyebabkan oknum penceramah tersebut terlalu ekstrim terhadap jenggot. Anehnya penceramah tersebut merupakan orang yang dihormati oleh masyarakat di sekitarnya. Beliau juga dianggap sebagai seorang *'alim* di daerahnya.

Di kesempatan lain penulis juga sempat mendengar pernyataan seorang oknum imam mesjid di sebuah kampung di Bireuen. Imam tersebut mengatakan bahwa orang-orang yang memelihara jenggot sama dengan *kameng bhok* (kambing bandot). Di kesempatan lain lagi

penulis juga menangkap pernyataan seorang oknum imam desa yang mengatakan bahwa memelihara jenggot bukan lagi sunnah Nabi Saw karena kaum Yahudi juga sudah memelihara jenggot. Menurut beliau, kita tidak boleh melakukan hal yang menyerupai Yahudi. Karena Yahudi sudah memelihara jenggot maka kita tidak perlu lagi memelihara jenggot, demikian fatwa oknum imam tersebut. Aneh memang, tapi kejadian ini nyata.

Seiring dengan kampanye terorisme yang digaungkan Amerika Serikat (AS) dan sekutunya, tiba-tiba di kalangan aparat dan beberapa kelompok Islam ikut terprovokasi dengan menjadikan urusan jenggot sebagai simbol teror. Beberapa orang dan bahkan sebagian berasal dari tokoh agama menjadikan istilah Wahabi identik dengan gerakan radikal atau teror.

Yang berjenggot “Wahabi”

Penulis juga sering mendapati stigma buruk yang dilontarkan oleh mereka yang anti sunnah Nabi Saw. Mereka mengatakan bahwa orang yang memanjangkan jenggot adalah Wahabi (gerakan pembaharuan yang dipelopori oleh Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahab). Sampai saat ini tidak diketahui apa hubungannya antara jenggot dan wahabi? Tanpa harus belajar ke Timur Tengah, banyak para seniman dan penyanyi *rock* juga berjenggot. Seorang dukun seperti Ki Joko Bodo atau pentolan Band Dewa, Ahmad Dhani juga berjenggot. Namun demikian, belum tentu mereka mau dikaitkan dengan gerakan radikal atau Wahabi. Dan belum tentu pula Ki Joko Bodo dan Ahmad Dhani memanjangkan jenggot karena mengikuti sunnah Nabi. Dengan demikian, anggapan orang berjenggot sebagai Wahabi adalah anggapan yang sangat rendah kualitasnya.

Jika memang benar memanjangkan jenggot itu Wahabi

bagaimana dengan para Nabi, para sahabat, *tabi`in*, *tabiut tabi`in*, dan para imam mujtahid? Apakah mereka juga Wahabi karena mereka memanjangkan jenggot? Apakah Nabi Harun As yang jenggotnya pernah ditarik oleh Musa As juga wahabi karena beliau memanjangkan jenggot? Apakah Imam Syafi`i yang mazhabnya dianut hampir di sepertiga benua juga Wahabi? Imam Ghazali dan Ibnu `Arabi yang menjadi panutan kaum sufi juga memanjangkan jenggot, lantas apa kita harus menyebut mereka sebagai Wahabi? Sungguh dangkal dan kerdil pemikiran mereka yang menuduh orang-orang berjenggot sebagai Wahabi. Marilah berfikir jernih karena berfikir merupakan cermin yang cemerlang, demikian dikatakan oleh para penyair dalam naskah-naskah mereka.

Yahudi sudah berjenggot!

Anggapan sebagian orang yang menyatakan bahwa kita tidak boleh lagi berjenggot karena Yahudi sudah berjenggot adalah anggapan yang sama sekali tidak berdasar. Rasul Saw memerintahkan kita untuk menyelisihi Yahudi dalam segala hal. Adapun sekarang, pada saat Yahudi memelihara jenggot bukan berarti kita tidak boleh lagi memelihara jenggot karena takut menyamai Yahudi. Anggapan ini tentunya keliru dan tidak pada tempatnya. Kita tidak boleh meninggalkan sunnah Nabi Saw hanya karena amalan tersebut sudah dilakukan oleh Yahudi. Seorang muslim memanjangkan jenggot dalam rangka menjalankan sunnah Nabi Saw, berbeda dengan Yahudi yang statusnya *kafir*. Walaupun Yahudi memanjangkan jenggot bukanlah untuk mengikuti sunnah, karena Yahudi sendiri tidak beriman dengan Nabi saw. Bagaimana mungkin Yahudi mengikuti perintah orang yang tidak ia imani (Nabi Saw).

Jika sekarang kita mencukur jenggot karena Yahudi sudah memanjangkan jenggot maka yakinlah suatu saat satu persatu sunnah

Nabi Saw akan musnah karena dianggap menyamai Yahudi. Bagaimana jika suatu saat Yahudi berpuasa di bulan Ramadhan, apa kita juga harus meninggalkan puasa dikarenakan Yahudi sudah berpuasa? Bagaimana pula jika seandainya nanti ada Yahudi yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul Saw? Apa kita juga harus meninggalkan keimanan kita kepada Allah dan Rasul dikarenakan takut menyamai si Yahudi?

Jenggot Dalam Islam

Menurut penulis, pernyataan yang dilontarkan oleh orang-orang yang anti kepada jenggot adalah pernyataan yang menyelishi sunnah Nabi Saw. Meskipun pernyataan tersebut keluar dari mulut seorang yang dianggap *'alim* sekali pun, apabila bertentangan dengan sunnah Nabi Saw maka harus tetap dibantah dengan *hujjah* yang shahih. Agama ini dibangun dan ditegakkan dengan dalil, bukan dengan logika dan pendapat.

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Rh, Rasul Saw bersabda: “*Ahfu syawariba wa a'ful liha*” (pangkaslah kumis dan panjangkan jenggot). Dalam hadits lain yang juga diriwayatkan oleh Muslim, Nabi saw bersabda: “*Arkhlul liha*” (biarkan jenggot memanjang turun). Dalam sebuah riwayat sahih juga disebutkan bahwa jenggot Rasulullah Saw memenuhi dadanya. Hal ini dibuktikan dengan periwayatan dari para sahabat yang mengetahui bacaan Rasul Saw dengan bergerakanya jenggot beliau.

Syaikh Muqbil bin Hadi Al Wadi'i dalam risalah tanya jawab yang ditulisnya menyebutkan bahwa memangkas jenggot merupakan perbuatan menyerupakan diri dengan perempuan dan *kuffar*. Syaikh Muqbil juga menjelaskan bahwa yang pertama sekali membuat kebiasaan buruk ini (mencukur) jenggot di tengah-tengah kaum muslimin adalah kaum sufi sebagaimana tersebut dalam kitab “*Talbis Iblis*”.

Lebih jauh lagi Syaikh Muqbil menyebutkan bahwa ada sebagian orang memelihara jenggot untuk menipu maka hal ini bukanlah dosa jenggot, namun dosa penjahat tersebut. Kaum musyrik tetap saja musyrik walaupun dia memelihara jenggot. Bisa jadi orang yang mencukur jenggotnya lebih taat dan *'alim* daripada orang yang berjenggot, tapi orang yang memangkas jenggot tetap dihukumi *fasiq* karena menyelisihi perintah Nabi Saw. Adapun bagi orang-orang yang menganggap jenggot sebagai kekurangan layaknya bulu kemaluan dan bulu ketiak maka dia dihukumi kafir murtad, demikian penjelasan Syaikh Muqbil dalam risalahnya.

Seperti kita ketahui bersama bahwa para sahabat Ra, Imam Mujtahid dan ulama-ulama terdahulu semuanya memelihara jenggot dikarenakan hal tersebut merupakan sunnah Nabi Saw. Dalam sebuah hadits yang bersumber dari Anas bin Mali Ra, Rasul Saw bersabda: *"faman ragiba 'an sunnati falaisa minni"* (barang siapa menyelisihi sunnahku maka dia bukan dari golonganku). Hadits ini sahih diriwayatkan oleh dua Imam besar Bukhari dan Muslim. Sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah Kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Saw. *Wallahul Waliyut Taufiq.*

[*Hidayatullah.com, 7 Desember 2011*]

MENJAWAB KEGUNDAHAN MUHAMMAD IQBAL JALIL CS TERHADAP WAHABI

Dalam status *facebooknya* tertanggal 09 Agustus 2015, *Al-Imam Al-Muhaddits Al-'Allamah Asy-Syaikhul Akbar Al-Mukarram Muhammad Iqbal Jalil Hafidhahullah* kembali mengeluarkan “fatwa” mencengangkan dengan menyebut bahwa “Aceh Darurat Aqidah”. Satu “fatwa” yang patut diacungi jempol oleh semua pihak. Fatwa tersebut bukanlah sembarang fatwa karena ia lahir dari hasil *ijtihad* mendalam seorang ‘*alim* besar nan *wara*’, seorang maha guru bernama Muhammad Iqbal Jalil.

Dalam fatwanya kali ini, *Asy-Syaikh Muhammad Iqbal Jalil* menyatakan keresahannya atas kehadiran beberapa ulama dari Darul Hadits Yaman yang oleh Abuya Muhammad Iqbal Jalil disebut sebagai

Wahabi Radikal. Dengan sangat “emosional”, Abuya Muhammad Iqbal Jalil menulis: “*kemana rakyat Aceh? Di mana pemimpin Aceh? Sebegitu lemahkah kita hari ini hingga tega membiarkan negeri mulia ini dijamahi oleh mereka (Wahabi)*”, demikianlah potongan “fatwa” dari Al-Mujahid Muhammad Iqbal Jalil.

Kononnya, keresahan Asy-Syaikh Muhammad Iqbal Jalil ini dilatarbelakangi oleh kehadiran beberapa ulama Yaman, yaitu Asy-Syaikh ‘Utsman As-Salimy dan Asy-Syaikh Ahmad Syamlan Ar-Roda’i. Agenda *tabligh* akbar tersebut kononnya dilaksanakan di Mesjid Jami’ Unsyiah, Mesjid Agung Al-Makmur Lampriek, Mesjid Ibn Sina RSUZA dan Mesjid Pulo Raya. Adapun di Mesjid yang disebut terakhir nampaknya gagal dilaksanakan *daurah* akibat tidak adanya izin dari Muspika Titeu Kabupaten Pidie. Informasi tentang gagalnya acara ini tersebar via *facebook* dengan beredarnya surat yang ditandatangani Muspika Pidie.

“Fatwa unik” yang dikeluarkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Iqbal Jalil kali ini bukanlah yang pertama. Sebelumnya, di awal tahun 2015, Paduka Yang Mulia Muhammad Iqbal Jalil juga pernah menunjukkan keresahan serupa dengan tulisannya di rubrik *droe keu droe*_Harian Serambi Indonesia. Saat itu, Yang Dipertuan Agong Muhammad Iqbal Jalil menyatakan keberatannya atas kehadiran Ulama Arab Saudi, Syaikh Adil Al-Kalbani. Namun berkat pertolongan Allah ‘Azza wa Jalla, segala tuduhan dan tudingan yang dilontarkan oleh Abuya Muhammad Iqbal Jalil terhadap Syaikh Adil Al-Kalbani menjadi tidak terbukti. Uniknya lagi, Syaikh Al-Kalbani justru telah mempraktekkan sikap toleransi yang sedianya tidak pernah terlintas di pikiran Al-Imam Muhammad Iqbal Jalil.

Sebagai seorang awam yang terpaksa “menceburkan diri” dalam perdebatan ini, saya menawarkan dua solusi kepada Al-Imam

Muhammad Iqbal Jalil guna menyikapi perkembangan dakwah Salafiyah di Aceh yang dalam istilah Muhammad Iqbal Jalil disebut dengan Wahabi. *Pertama*, silahkan Tuanku Imam Muhammad Iqbal Jalil mengirim surat terbuka kepada ulama-ulama Saudi atau ulama Yaman guna melaksanakan debat terbuka dengan mereka. *Kedua*, jika debat ilmiah tidak mungkin dilaksanakan, maka saya menawarkan solusi lain yang mungkin agak “ekstrim”, yaitu dengan cara menyerukan “jihad” melawan Wahabi.

Debat Terbuka

Untuk menghilangkan keresahan dan kegundahan yang melanda batin Abuya Muhammad Iqbal Jalil, akan lebih elok jika dilakukan debat terbuka antara Al-Imam Muhammad Iqbal Jalil dengan para ulama Salafi (Wahabi). Hal ini penting, agar Abuya Muhammad Iqbal Jalil bisa mengupas secara elegan, lugas dan tuntas berbagai “dosa” dan “kesesatan” Wahabi di depan publik, sebagaimana hal ini sudah sangat sering dikampanyekan oleh Muhammad Iqbal Jalil dalam berbagai kesempatan

Saya super yakin, bahwa *kefaqihan* Asy-Syaikh Muhammad Iqbal Jalil sudah sangat teruji dan mumpuni, sehingga akan membuat ulama-ulama Wahabi kewalahan dan harus pulang ke negerinya dengan rasa kecewa. Saya yakin, ulama-ulama Wahabi akan merasa malu dan tidak akan berani lagi menginjakkan kakinya di Aceh setelah “kalah tarung” dengan Muhammad Iqbal Jalil.

Keberhasilan dalam debat ilmiah antara Abuya Muhammad Iqbal Jalil dengan ulama-ulama Wahabi tentu nantinya akan menjadi catatan sejarah yang sangat berharga, di mana ulama-ulama Yaman dan Mekkah akan dibuat malu di Serambi Mekkah. Bukankah ini satu prestasi besar yang patut diukir dengan tinta emas? Dan bukan

tidak mungkin, suatu masa nanti, Abuya Muhammad Iqbal Jalil akan menjelma sebagai sosok kharismatik di Aceh, satu lebel yang mungkin sangat dinanti-nanti oleh Yang Mulia Muhammad Iqbal Jalil.

Namun, jika Asy-Syaikh Muhammad Iqbal Jalil tidak berkenan melakukan debat ilmiah dengan ulama Wahabi secara terbuka di hadapan publik, maka saya sarankan untuk berhenti saja menuding Wahabi sebagai sesat, ekstrim dan radikal. Hal ini lebih baik demi menjaga *ukhuwah Islamiyah*, sebagaimana dipesankan oleh Rasul *Shallallahu 'alaihi wasallam*.

“Jihad fi Sabilillah”

Seandainya debat ilmiah sulit untuk direalisasikan oleh Abuya Muhammad Iqbal Jalil, maka saya sarankan agar beralih kepada solusi kedua, yaitu “jihad”. Jika memang Al-Mujahid Muhammad Iqbal Jalil yakin bahwa Wahabi adalah sesat dan menyesatkan maka tidak ada halangan untuk menyerukan jihad melawan Wahabi. Mari susun kekuatan guna memerangi Wahabi sampai ke akar-akarnya. Jangan biarkan Wahabi merusak akidah kaum muslimin.

Ayo jangan lagi berlama-lama. Bukankah pahala *syahid* itu cukup besar? Bukankah bidadari akan menunggu orang-orang yang *syahid fi sabilillah*? Lantas kenapa Abuya Muhammad Iqbal Jalil masih ragu? Mari serukan jihad kepada kaum muslimin untuk merebut Mekkah dan Madinah dari Wahabi! Mari kita taklukkan Masjidil Haram, kita usir Wahabi dari Haramaian. Jangan biarkan Wahabi menebar “kesesatan” di tanah suci. Bukankah Abuya Muhammad Iqbal Jalil sangat gemar menyebut Wahabi sebagai “tanduk setan”. Ayo kita patahkan tanduk setan itu! Ayo tunjukkan semangat jihadmu! Bukankah Wahabi itu produk “Mister Hemper”? Ayo hilangkan keraguan dan bersatulah! Mari berjihad membela kebenaran dan mengalahkan *kebathilan*. Ayo

hancurkan Wahabi sampai titi darah penghabisan!

Tapi, jika memang Al-Imam Muhammad Iqbal Jalil masih ragu dengan fatwanya sendiri dan enggan untuk berjihad, saya sarankan untuk menyudahi saja celaan kepada Wahabi, karena Allah dan Rasulnya melarang kita untuk mencela sesama muslim. Lagi pula belum tentu yang dicela itu lebih baik dari yang mencela. *Wallahul Musta'an.*

[Bireuen, 12 Agustus 2015, www.patahkekeringan.blogspot.com]

KUTUP PEMIKIRAN TEUKU ZULKHAIRI, NAUVAL DAN SYAH REZA

Telah berlangsung diskusi menarik via tulisan di rubrik *kupi beungoh* pada Ramadhan lalu antara Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran. Setelah menyimak ulasan dari dua sosok tersebut, maka dapat dipastikan jika keduanya berasal dari dua kutup pemikiran yang berbeda. Jika hendak memakai istilah yang digunakan oleh penulis-penulis kontemporer, maka Teuku Zulkhairi berada di kutup tradisionalisme skolastik yang sangat terikat dengan mazhab tertentu, sedangkan Nauval Pally Taran masuk dalam katagori tradisionalisme Salafi yang tidak terikat dengan mazhab tertentu, di mana pemikirannya banyak merujuk pada praktek Salaf. Namun

demikian klasifikasi ini tidaklah absolut. Artinya, masih terbuka peluang untuk direvisi kembali. Saya mungkin terlalu buru-buru dalam mengelompokkan kedua sosok ini, tapi klasifikasi ini penting guna mengurai “benang kusut” antaranya keduanya.

Perbedaan kutup pemikiran kedua sosok ini tentunya akan berimplikasi pada perbedaan cara pandang dan landasan pijak yang digunakan oleh keduanya. Sebagai seorang tradisionalisme skolastik, Teuku Zulkhairi juga merujuk kepada Alquran dan Sunnah. Tetapi seperti dikatakan oleh Tariq Ramadan (2002), bahwa Alquran dan Sunnah dalam pemahaman tradisionalisme skolastik adalah sebagaimana dipahami oleh ulama mazhab dan tidak ada ruang untuk pembaharuan. Kenyataan ini tentu berbeda dengan Nauval Pally Taran yang menurut dugaan saya berada di kutub tradisionalisme Salafi. Menurut Ramadan, kubu ini tidak terikat dengan ulama mazhab dalam memahami Alquran dan Sunnah, tetapi mereka cenderung mengikuti praktik langsung dari para sahabat Nabi Saw. Kubu ini memiliki banyak persamaan dengan kelompok *ahlul hadits*, seperti halnya Imam Ahmad bin Hanbal.

Sementara itu, dalam konteks teologi, baik Teuku Zulkhairi maupun Nauval Pally Taran masih berada dalam lingkup teologi Sunni. Sebagaimana terlihat dalam tulisan-tulisan mereka, bahwa keduanya sama-sama mengaku dan menyebut diri sebagai *ahlussunnah waljama'ah*. Tentunya hal ini bukanlah sebatas klaim, tetapi dibuktikan oleh argumen dan tokoh-tokoh yang dimunculkan dalam tulisan mereka. Baik Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran sama-sama menggunakan referensi dari kalangan Sunni dan terbebas dari unsur-unsur teologi Syi'ah. Tegasnya, Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran bukan Syi'ah.

Tanggapan Syah Reza

Menyikapi “polemik” antara Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran, seorang penulis lainnya juga ikut *nimbrung* guna menyemarakkan diskusi tersebut. Syah Reza dalam tulisannya telah berusaha mengurai “benang kusut” antara Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran dengan memposisikan keduanya sesuai *manhaj* masing-masing. Sebagai bentuk apresiasi, bahkan Syah Reza menyebut bahwa “perdebatan” antara Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran sebagai bentuk tradisi ilmiah yang pernah dipraktekkan oleh Imam Al-Ghazali dan Ibn Rusyd.

Di awal tulisannya Syah Reza menukil kisah perdebatan ilmiah via tulisan antara Imam Al-Ghazali dan Ibn Rusyd, di mana pihak pertama menghasilkan *Tahafut Al-Falasifah* dan pihak kedua melahirkan *Tahafut Al-Tahafut*, meskipun kedua perdebatan ini sebenarnya tidak terjadi dalam satu masa. Seperti kita ketahui, Ibn Rusyd menulis bantahannya terhadap Al-Ghazali jauh setelah Al-Ghazali wafat sehingga tidak memungkinkan bagi Al-Ghazali untuk melakukan kritik balik. Al-Ghazali wafat pada tahun 505 H, sedangkan Ibn Rusyd baru lahir pada tahun 520 H. Kondisi ini tentunya berbeda dengan “perdebatan” Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran yang berlangsung semasa – yang di abad modern ini mungkin agak serupa dengan debat Soekarno versus Natsir.

Selain itu, Syah Reza juga nampak “kurang adil” dalam memberikan contoh, misalnya Syah Reza menyebut bahwa Ibn Taimiyah yang bermanhaj Salaf membid’ahkan filsafat. Secara tidak langsung contoh ini memberi kesan bahwa seolah-olah hanya Ibn Taimiyah saja yang tidak toleran terhadap filsafat. Padahal jika ditelisik, kritik terhadap para filosof juga dilakukan oleh Al-Ghazali yang *notabene* bermanhaj *Asy’ariyah* dalam *Tahafut Al-Falasifah*.

Secara umum, tulisan Syah Reza memang cukup mencerahkan – dan saya juga mengambil manfaat dari tulisan beliau. Tetapi (mohon maaf), saya melihat Syah Reza “tidak setia” pada tujuannya sendiri. Tujuan awal dari Syah Reza adalah ingin mendamaikan Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran – dan ini tercermin dari tajuk tulisannya. Namun sayangnya di akhir tulisan tersebut saudara saya Syah Reza justru membuat konklusi yang lumayan “melenceng”. Artinya Syah Reza bukannya mendamaikan keduanya (TZ dan NPT), tetapi justru memperkuat posisi Teuku Zulkhairi. Terkait “tuduhan” saya ini tercermin dalam kalimat Syah Reza: *“Untuk menyelesaikan persoalan perbedaan manhaj di tengah ummat tentu menjadi tugas pemimpin untuk berpegang dan merumuskan pedoman pemerintah [sic] pada manhaj yang sudah mengakar dalam aqidah mayoritas masyarakat Aceh”*. Hampir bisa dipastikan bahwa manhaj yang mengakar dalam aqidah mayoritas masyarakat Aceh yang dimaksud oleh Syah Reza adalah Asy’ariyah. *Wallahu A’lam*.

Memahami Teologi Sunni

Syafiq A. Mughni dalam salah satu tulisannya mengatakan bahwa istilah *Ahlussunnah waljama’ah* merupakan cikal bakal dari aliran Sunni (*proto-Sunnism*). Istilah *Ahlussunnah Waljama’ah* (sebagai sebuah aliran pemikiran) itu sendiri baru muncul pada abad ke-9. Adapun istilah Sunni dalam bentuk kata sifat baru digunakan pada akhir abad ke-10 yang dipelopori oleh Ibn Batta, seorang pemikir dari mazhab Hanabilah. Lebih jauh, Mughni menyebut bahwa mazhab Hanabilah dalam perkara akidah merupakan tulang punggung dari *Ahlussunnah Waljama’ah*. Adapun *Asy’ariyah* dan *Maturudiyah* belum dikenal pada masa itu, karena kedua pemikiran ini baru muncul pada abad ke-10.

Dalam tinjauan historis, kemunculan *Ahlussunnah Waljama’ah*

merupakan reaksi atas pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Terkait hal ini telah diulas panjang lebar oleh Harun Nasution dalam bukunya. Namun *Ahlussunnah Waljama'ah* yang dimaksud oleh Nasution di sini adalah *Asy'ariyah* dan *Maturidiyah*. Tetapi perlu dipahami bahwa, istilah *Ahlussunnah Waljama'ah* ini sudah ada sebelum munculnya Imam Abu Hasan Al-Asy'ari (lahir 260 H), yaitu pada masa Imam Ahmad bin Hanbal (lahir 164 H). Istilah *Ahlussunnah Waljama'ah* yang digunakan pada masa Imam Ahmad bin Hanbal merupakan sebutan lain dari istilah *Ahlul Hadits*. Selain itu, dari berbagai sumber bacaan, telah kita ketahui bersama bahwa Imam Ahmad bin Hanbal pernah menjadi korban dari kekejaman Mu'tazilah Abbasiyah di masa lalu di bawah kepemimpinan Al-Makmun, Al-Mu'tashim dan Al-Watsiq.

Pada saat melemahnya posisi Mu'tazilah, seperti disebut Nasution, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari bertaubat (keluar) dari Mu'tazilah dan merumuskan konsep teologi sendiri yang dikenal dengan *Asy'ariyah*. Namun demikian, menurut Mughni, yang memegang peranan dalam perumusan teologi *Asy'ariyah* bukanlah Abu Hasan Al-Asy'ari, tetapi oleh para pengikutnya pada periode kedua, yaitu: Al-Baghdadi, Al-Baqillani dan Al-Juwaini. Dengan kata lain, masih menurut Mughni – pemikiran Abu Hasan Al-Asy'ari tidak identik dengan teologi *Asy'ariyah*.

Hal menarik lainnya adalah kontra antar aliran. Sebelum kemunculan *Asy'ariyah*, mazhab Hanabilah (dalam teologi) merupakan musuh utama bagi Mu'tazilah. Tetapi pada akhir abad ke-10 seperti dijelaskan oleh Mughni, kredibilitas *Mu'tazilah* semakin menurun. Dengan surut dan jatuhnya kredibilitas *Mu'tazilah*, maka pada akhir abad ke-10 kalangan *Asy'ariyah* menggantikan posisi Mu'tazilah. Dengan demikian, *Asy'ariyah* menjadi lawan utama bagi Hanabilah. Jika *Mu'tazilah* sering disebut sebagai teologi rasional, maka *Asy'ariyah* dapat dikatakan sebagai teologi “semi rasional” dan menerima metode

takwil (penafsiran metaforis). Hal ini berbeda dengan teologi Hanabilah yang cenderung “literalis” dan menolak *takwil*, kecuali terdapat dalil yang mendukung upaya *takwil* tersebut.

Persoalan *takwil* ini merupakan salah satu topik yang sampai kini masih diperdebatkan oleh *Asy'ariyah* pasca *Mu'tazilah* berhadapan dengan Salafiyah yang merupakan “pewaris” pemikiran Hanabilah. Harun Nasution (1982) dalam *Ceramah Kedudukan Akal dalam Islam*, menulis bahwa Al-Farabi (lahir 259 H) adalah filosof pertama yang mengusahakan keharmonisan antara agama dan filsafat dengan melakukan penafsiran metaforis (*takwil*) terhadap ayat-ayat Alquran. Ayat-ayat yang menggambarkan Tuhan mempunyai sifat antropomorfis oleh Al-Farabi diberi arti metaforis. Sebagaimana telah kita pahami bahwa metode *takwil* (penafsiran metaforis) ini berkembang pesat pada masa kekuasaan *Mu'tazilah* di Baghdad. Setelah *Mu'tazilah* “lenyap” di pentas sejarah, “tradisi” *takwil* ini kemudian kembali dipakai oleh *Asy'ariyah*. Oleh sebab itu, “pertentangan” yang terjadi antara *Salafiyah* dan *Asy'ariyah* yang masih berlangsung sampai saat itu hanya pengulangan dari “konflik” Hanabilah versus *Mu'tazilah*.

Ketegangan Antar Pemikiran

Taufik Abdullah (1987: 7) mengatakan bahwa para pembaru merasa apa yang mantap tersebut bertentangan dengan ajaran yang murni dan benar, sedangkan para penentang merasa bahwa apa yang baru tersebut hanyalah penyimpangan yang tidak wajar. Terkait dengan perdebatan Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran, saya menduga Nauval Pally Taran berada dalam posisi pembaru (semoga benar) dan Teuku Zulkhairi berada pada posisi sebaliknya. Tersebab perbedaan posisi inilah perdebatan itu dimungkinkan untuk berlangsung. Tapi perlu ditegaskan bahwa kesimpulan ini tidak absolut, artinya, dugaan saya ini bisa saja keliru.

Namun demikian, terlepas dari materi yang dibahas oleh Teuku Zulkhairi dan Nauval Pally Taran yang kemudian juga disemarakkan oleh kehadiran Syah Reza, saya melihat bahwa diskusi santun semacam ini penting dilestarikan guna memperkaya khazanah keilmuan Islam. Dalam sejarah Islam, seperti dikatakan Taufik Abdullah (1987), ketika ketegangan itu tidak lagi dirasakan, maka kita telah memasuki periode kejumudan atau keterlenaan intelektual.

Dengan demikian, diskusi ilmiah, baik melalui tulisan maupun forum-forum ilmiah harus tetap dipertahankan demi perkembangan intelektual kaum muslimin. Namun demikian, dalam diskusi tersebut hendaknya tidak melibatkan rasa fanatisme yang “membabi-buta.” Jika rasa fanatisme ikut bermain maka yang dihasilkan bukanlah ilmu, tetapi hanyalah rasa benci dan permusuhan yang tentunya akan bermuara pada retaknya *ukhuwah Islamiyah*. *Wallahu A'lam*. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1437 H.

[Kupi Beungoh, Serambi Indonesia, 09 Juli 2016]

IDRUS RAMLI, JANGAN GANGGU ACEH KAMI

Tulisan ini aku tujukan ke hadapan Yang Mulia Kiyai Haji Muhammad Idrus Ramli *Hafizahullah*. Anggap saja tulisan ini sebagai “surat cintaku” kepadamu. Bukannya aku tidak mengenal kantor Pos, bukan pula aku tak punya ongkos, tapi sengaja kutulis surat ini di sini, agar saudara-saudaraku dan juga saudara-saudaramu dapat membaca surat ini. Meskipun surat ini kutujukan kepadamu, tapi tidak ada secuil rahasia pun dalam surat ini.

Idrus Ramli yang dirahmati Allah, sebelum berpanjang kalam, izinkan aku untuk memperkenalkan diriku padamu. Bukan berarti aku begitu penting untuk engkau kenal, tapi aku hanya menjalankan firman Tuhanku, bahwa kita diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa

untuk saling mengenal. Sama halnya seperti dikau yang tak mengenal diriku, pada hakikatnya aku pun tidak mengenal dirimu, aku cuma tahu sedikit saja tentang dirimu. Baiklah, perkenalkan, Aku ini orang Aceh yang lahir di Aceh dan bernenek-moyang Aceh.

Idrus Ramli yang berbahagia, kemarin (10 September 2015) orang-orang di “negeriku” telah melaksanakan satu acara yang mereka sebut sebagai “Parade *Ahlussunnah Waljama’ah*.” Dalam surat ini, aku tak hendak mengomentari acara tersebut, tersebut aku tahu bahwa itu adalah hak mereka sebagai warga negara. Mereka mau buat parade, karnaval, maraton, jalan santai atau apapun namanya, itu tidaklah menjadi urusanku. Cuma saja, aku “dengar-dengar”, dikau turut hadir dalam acara itu.

“Sayangku” Idrus Ramli, aku menulis surat ini singkat saja, karena aku tahu engkau tidak punya cukup waktu untuk berlama-lama membaca surat ini. Aku sangat paham akan jadwalmu yang “super sibuk”, hari ini engkau diundang ke Aceh, mungkin besok lusa engkau di undang ke Papua. Kesibukanmu dapat kumaklumi karena engkau adalah “Singa Aswaja” di Asia Tenggara, demikian *khabaran* yang kudengar dari kawan-kawanmu.

Begini Idrus Ramli, dalam acara “parade” itu, aku melihat beberapa spanduk yang berisikan penolakan terhadap Wahabi, PKI dan Syi’ah. Seperti aku katakan di atas, itu bukan urusanku, karena spanduk itu milik mereka dan yang menulis pun mereka. Cuma saja, aku merasa heran kepada dirimu yang turut memposting foto-foto itu di akun *facebook*mu. Engkau nampaknya sangat setuju dengan tulisan-tulisan itu. Secara tidak langsung, engkau telah *ridha* jika Wahabi disederajatkan dengan PKI dan Syi’ah. Meskipun engkau paham, bahwa Wahabi bukanlah Syi’ah, dan Syi’ah pun bukan Wahabi. Aku yakin seyakin yakinnya bahwa dikau juga paham bahwa Wahabi bukanlah

PKI, dan PKI bukanlah Wahabi. Tapi engkau terlihat sangat berbahagia memposting foto-foto itu di *facebookmu*.

Idrus Ramli yang berbahagia. Soal kedatanganmu ke Aceh, pada prinsipnya tidaklah menjadi urusanku, karena engkau memakai biayamu sendiri. Aku juga paham bahwa kedatanganmu bukanlah “murni” kehendakmu, tapi hanya sekedar memenuhi undangan. Tapi, kemarin engkau pasti telah mendengar dan membaca di spanduk-spanduk bahwa Wahabi tidak layak hidup di Aceh. Dalam hal ini, aku melihat keterlibatanmu sudah terlalu jauh. Engkau telah turut campur dalam urusan rumah tangga kami (Aceh) yang semestinya bisa terselesaikan tanpa kehadiranmu.

Idrus Ramli yang dimuliakan Allah, terkait kebencianmu terhadap Wahabi, itu adalah hakmu, tiada yang mampu melarangmu untuk menebar kebencian terhadap Wahabi. Silahkan dikau membenci Wahabi, tapi lakukan itu di tanahmu sendiri (Jawa), jangan engkau “tebar kebencian” di tanah kami (Aceh). Jika pun Wahabi ingin diusir dari Aceh, maka biarlah itu menjadi urusan masyarakat Aceh, tanpa perlu engkau melibatkan diri.

Idrus Ramli “sayangku”, saat ini kaum muslimin di Papua tengah diuji. Engkau tentu ingat beberapa waktu lalu mesjid mereka dibakar. Datanglah ke sana untuk memberi peringatan kepada pihak-pihak yang telah “mengganggu” saudara-saudara kita. Engkau juga pasti tahu, bahwa kaum muslimin di Suriah juga hidup dalam kesusahan dan terpaksa mengungsi menghindari perang akibat kekejaman si Basyar yang telah melampaui batas. Datangilah mereka, bantu mereka, semangati mereka, karena mereka adalah saudara-saudara kita seiman. Dan yang terpenting, lupakanlah Aceh!

Sebelum aku mengakhiri surat ini, aku pertegas kembali

BAGIAN KEEMPAT:

bahwa surat ini aku tujukan kepada engkau seorang wahai Idrus Ramli “tersayang”, bukan untuk yang lain. Idrus Ramli “cintaku”, di akhir surat ini, aku berharap agar engkau tidak lagi “mengusik” kebersamaan kaum muslimin di tanah kami (Aceh). Biarkan Aceh kami hidup damai. Kami sudah lelah berperang. Pergilah, pergilah, dan pergilah engkau, pulang ke “negerimu.”

[Kompasiana, 11 September 2015]

MENGINTIP TUNTUTAN ASWAJA ACEH

Beberapa media mengabarkan bahwa pada 1 Oktober 2015 lalu, Parade *Ahlussunnah Waljama'ah* (Aswaja) gelombang kedua kembali dilaksanakan di Banda Aceh. Parade ini merupakan lanjutan dari parade sebelumnya yang dilaksanakan pada 10 September 2015 yang saat itu turut dihadiri oleh tokoh NU, Idrus Ramli. Para santri dan juga beberapa ormas yang menamakan diri “pecinta *Ahlussunnah Waljama'ah* Aceh” membawa sejumlah tuntutan yang ditujukan kepada Pemerintah Aceh dan juga Pemerintah Pusat. Dalam parade kali ini sejumlah tuntutan tersebut (12 poin) telah ditandatangani oleh Wagub Aceh.

Dari sejumlah tuntutan yang diajukan oleh Aswaja tersebut, saya tertarik untuk mencoba mengulas beberapa poin saja yang menurut saya sangat *debatable*. Beberapa poin dimaksud sangat layak

untuk didiskusikan dan dikritisi.

Pertama, “mendesak Pemerintah Aceh untuk mengatur tata cara pelaksanaan ibadah di Aceh, sesuai mazhab Syafi’i sebagaimana pernah dilaksanakan oleh Syaikh Abdurrauf As-Singkili.” Poin ini secara tidak langsung “memaksa” kita untuk kembali ke masa lalu guna melihat bagaimana “model” mazhab Syafi’i yang diterapkan oleh Syaikh Abdurrauf. Artinya, yang menjadi “rujukan” pelaksanaan mazhab Syafi’i di Aceh adalah mengacu pada tata cara yang dipraktekkan oleh Syaikh Abdurrauf. Dengan demikian, tata cara ibadah yang dilaksanakan sebelum masa Syaikh Abdurrauf, seperti masa Nuruddin Ar-Raniry dan juga mufti-mufti yang lain adalah tidak berlaku, atau mungkin saja pada masa Nuruddin belum ada mazhab Syafi’i, atau setidaknya mazhab tersebut belum berkembang. Untuk dapat terlaksananya poin ini, maka harus dicari dulu dokumen-dokumen sejarah yang menjelaskan tata cara ibadah pada masa Syaikh Abdurrauf. Jika hal ini tidak dilakukan, maka ditakutkan pelaksanaan ibadah yang dimaksud tidak akan tercapai alias menyimpang dari tujuan awal.

Kedua, “mendesak Pemerintah Aceh untuk menjalankan wasiat pendiri Kesultanan Aceh untuk berpedoman kepada paham *Ahlussunnah Waljama’ah* mazhab Syafi’i.” Poin ini sedikit “menggelitik” karena berbicara tentang wasiat. Menurut saya, harus ada kejelasan siapa pendiri Kesultanan Aceh yang dimaksud oleh Aswaja Aceh. Apakah Sultan Ali Mughayat Syah? Di sisi lain, poin ini akan nampak sedikit “error” jika dikaitkan dengan poin di atas (poin pertama), di mana sangat sulit untuk menghubungkan antara wasiat pendiri Kesultanan Aceh yang kononnya terbit pada 1507 M dengan keberadaan Syaikh Abdurrauf As-Singkili yang kononnya baru lahir pada 1615 M.

Jika merujuk pada poin pertama bahwa mazhab Syafi’i diterapkan pada masa Abdurrauf, lantas bagaimana mungkin ada

wasiat dari pendiri Kesultanan Aceh untuk berpedoman kepada *Ahlussunnah Waljama'ah* mazhab Syafi'i, sedangkan Abdurrauf baru muncul kemudian, yaitu pada masa pemerintahan para Sultanah (Ratu)? Jika memang wasiat itu benar adanya, maka penerapan mazhab Syafi'i di Aceh tidak harus mengacu kepada masa Abdurrauf, tapi bisa juga dirujuk pada masa-masa sebelumnya, seperti masa Syamsuddin As-Sumatrani.

Ketiga, “mendesak Pemerintah Aceh untuk melarang dan mencabut izin lembaga-lembaga pendidikan di Aceh yang bertentangan dengan paham *Ahlussunnah Waljama'ah*.” Untuk dapat melaksanakan misi ini, maka harus segera dilakukan identifikasi terhadap lembaga-lembaga pendidikan dimaksud untuk kemudian diverifikasi oleh pihak terkait. Nah, yang menjadi pertanyaan di sini, siapa yang memiliki otoritas untuk menilai dan menentukan lembaga pendidikan tersebut bertentangan dengan *Ahlussunnah Waljama'ah* atau tidak. Kondisi ini juga akan semakin parah jika dihadapkan pada fenomena saling klaim diri sebagai *Ahlussunnah Waljama'ah*. Kemudian *Ahlussunnah* versi manakah yang akan dijadikan rujukan?

Keempat, “mendesak Pemerintah Aceh untuk menempatkan Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) dan ketua badan di jajaran Pemerintah Aceh orang-orang yang berakidah *Ahlussunnah Waljama'ah*.” Secara tidak langsung, poin ini mengisyaratkan kepada pemerintah Aceh untuk segera membentuk Komisi Akidah. Komisi ini tentunya harus diisi oleh pakar-pakar *Ahlussunnah Waljama'ah*.

Tugas Komisi Akidah adalah melakukan pemeriksaan akidah kepada calon-calon kepala SKPA dan kepala Badan yang akan diangkat sebagai pejabat. Bagi calon-calon yang lulus ujian harus dikeluarkan sertifikat yang distempel oleh Komisi Akidah. Namun penulis melihat bahwa keberadaan Komisi Akidah nantinya juga sangat

rawan penyimpangan. Kekhawatiran ini bukan tanpa alasan. Lembaga KPU dan KIP saja yang sudah profesional bisa kecolongan ijazah palsu. Padahal ijazah palsu tersebut berupa dokumen fisik, apalagi akidah yang wujudnya abstrak, sehingga potensi kecolongan akan lebih besar.

Kelima, “mendesak Pemerintah Aceh dan Pemerintah Pusat untuk menjalankan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.” Dan *keenam*, “mendesak Pemerintah Pusat untuk merealisasi seluruh butir-butir MoU Helsinki dan turunan UUPA.” Dua poin ini nampaknya tidak *linier* dengan poin-poin lain. Tentunya sangat sulit untuk mencari relevansi antara MoU Helsinki, UUPA, Wali Nanggroe, dan Aswaja. Konkritnya bahwa MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 lalu, sama sekali tidak memperbincangkan Aswaja. Demikian pula dengan UUPA juga tidak secara tegas menyindir tentang Aswaja dan mazhab Syafi’i. Apalagi jika Aswaja dihubungkan dengan Qanun Wali Nanggroe, tentu tidak jelas titik temunya. Akhir hanya kepada Allah kita kembali, semoga saja Allah memberikan yang terbaik bagi kita semua. *Wallahul Musta’an*.

[Banda Aceh, 04 Oktober 2015, www.khairilmiswar.com]

RAJA SALMAN. ACEH DAN WAHABI

Dua tahun lalu, tepatnya pada 28 Februari 2015, saya pernah menulis artikel singkat di kompasiana dengan tajuk “Wahabi, Wahabi, dan Wahabi.” Artikel tersebut adalah jawaban singkat saya kepada salah seorang santri Aceh yang terlihat begitu resah dan gelisah dengan “Wahabi.” Pada saat itu, seorang yang mengaku sebagai santri Aceh menulis sebuah surat terbuka kepada Kapolda Aceh yang pada saat itu akan mendatangkan seorang penceramah dari Arab Saudi, Syaikh Adil Al-Kalbani. Sayangnya surat terbuka santri tersebut tidak mendapat respon dari Kapolda saat itu dan tetap mendatangkan Syaikh Al-Kalbani ke Aceh.

Gelombang penolakan terhadap Wahabi di Aceh terus berlanjut dan mencapai puncaknya pada 10 September 2015 dengan digelarnya sebuah “demonstrasi” besar-besaran yang dikenal dengan

Parade Aswaja. Aksi Parade Aswaja ini melibatkan berbagai ormas keagamaan, seperti FPI, MUNA, Inshafuddin dan HUDA. Aksi ini juga dihadiri oleh ribuan massa yang datang dari berbagai daerah lengkap dengan karton dan spanduk yang bertuliskan tolak Wahabi.

Pasca Parade Aswaja, gerakan penolakan terhadap Wahabi terus berlanjut dengan beberapa aksi “pengambil-alihan” mesjid yang dituding dikuasai oleh Wahabi. Di antara mesjid yang coba direbut adalah Mesjid Al-Izzah Krueng Mane, tetapi usaha tersebut gagal. Gerakan anti Wahabi, sedikit banyaknya juga turut mempengaruhi kebijakan pemerintah yang pada tahun 2016 sempat menghambat izin pembangunan Mesjid Muhammadiyah di Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

Sampai saat ini, gerakan anti Wahabi di Aceh juga marak dilakukan melalui media sosial. Bagi sebagian kalangan, memusuhi Wahabi adalah salah satu bentuk “jihad” sehingga mereka terus bergerak tanpa kenal lelah. Bahkan ada segelintir kalangan yang berkeyakinan bahwa mencaci Wahabi akan mendapat pahala dan bernilai ibadah.

Kunjungan Raja Salman

Saya menangkap beberapa fenomena aneh ketika King Salman bin Abdul Aziz Alu Saud berkunjung ke Indonesia baru-baru ini. Keanehan dimaksud terlihat jelas di kalangan pengguna media sosial di Aceh. Hal ini saya temukan setelah saya melakukan observasi maya melalui status-status yang diposting oleh sebagian *netizen* Aceh. Setelah merangkum beberapa status yang nampak senada dan seirama tersebut, saya menyimpulkan bahwa ada aroma kekecewaan dari beberapa *netizen* terkait kunjungan King Salman ke Indonesia.

Kononnnnya kekecewaan tersebut muncul karena tidak ada catatan agenda bahwa King Salman akan berkunjung ke Aceh.

Menurut mereka, seharusnya Aceh adalah daerah pertama yang harus dikunjungi Salman. Aceh semestinya lebih diprioritaskan dari Bali yang penuh dengan aroma “gimana gitu.” Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat Islam. Dan bahkan Aceh wilayah pertama masuknya agama Islam ke Indonesia sehingga dijuluki sebagai serambi Mekkah. Tapi kenapa King Salman tidak singgah ke Aceh? Kira-kira demikian bentuk guratan kekecewaan sebagian *netizen*.

Jawaban paling “normatif” dan terkesan “klasik” yang coba ditawarkan oleh beberapa kalangan adalah tidak siapnya Pemerintah Aceh menampung jumlah rombongan King Salman yang kononnya mencapai 1.500 orang. Ketidaksiapan ini diduga akibat minimnya fasilitas yang dimiliki oleh Pemerintah Aceh. Saya tidak tahu apakah tawaran jawaban semacam ini cukup memuaskan atau tidak.

Mengingat belum adanya jawaban final dan konkrit kenapa Salman tidak ke Aceh, maka saya akan mencoba memberikan beberapa jawaban alternatif. *Pertama*, Aceh dikenal dengan Serambi Mekkah. Sebutan Serambi Mekkah ini tentunya memiliki sejarah tersendiri dan tidak muncul dengan sendirinya. Dari sebutan ini dapat diduga bahwa Aceh memiliki hubungan yang sangat kuat dengan Mekkah, baik di masa lalu maupun masa sekarang. Hal ini dibuktikan dengan masih “kekalnya” gelar Serambi Mekkah yang disandang oleh Aceh. Artinya gelar Serambi Mekkah yang diberikan kepada Aceh tidak mengenal istilah *expired* (kadaluarsa). Akibat sudah sangat akrabnya Aceh dan Mekkah, maka ada kemungkinan Raja Salman merasa tidak perlu lagi berkunjung ke Aceh, karena telah kuatnya hubungan batin antara Mekkah dan Aceh.

Kedua, Raja Salman tidak ingin menyusahkan orang lain. Mungkin ada yang membisikkan kepada Raja Salman jika dirinya berkunjung ke Aceh akan membuat sebagian kalangan menjadi resah

dan gelisah. Artinya kunjungan Raja Salman akan mendapat protes melalui surat terbuka seperti yang terjadi terhadap Syaikh Al-Kalbani dua tahun lalu. Tentunya, Raja Salman tidak ingin menyusahkan pihak-pihak yang anti kepada Wahabi untuk bersusah payah menulis surat terbuka kepada beliau. Jika Syaikh Al-Kalbani diprotes melalui satu surat terbuka di sebuah Koran terkemuka di Aceh, maka kehadiran King Salman tentunya akan disambut dengan ribuan surat terbuka. Dan bahkan koran-koran di Aceh akan penuh dengan surat terbuka. Dan jika ini terjadi, tentunya akan membuat perusahaan Koran harus tutup, karena tidak ada lagi kolom yang tersedia untuk berita dan iklan.

Ketiga, Raja Salman cinta ketenangan. Sebagai seorang Raja yang memimpin negeri Arab, beliau tentu sangat paham arti sebuah ketenangan dan ketertiban. Dulu, ketika Mekkah masih dikuasai oleh Syarif Husein, kondisi Mekkah sangat “kacau balau” dengan banyaknya perampok yang mengganggu perjalanan haji kaum muslimin. Kondisi tanah Arab saat itu juga penuh ketegangan dengan terjadinya perang antar suku padang pasir yang dikenal keras. Ketertiban di Mekkah baru tercipta kembali ketika Tanah Arab berhasil dikuasai oleh King Abdul Aziz bin Abdurrahman Alu Saud, Raja pertama Arab Saudi. Dan ketenangan serta persatuan antar suku-suku padang pasir terus berlanjut sampai saat ini dibawah kendali King Salman.

Lantas apa hubungannya dengan kunjungan King Salman ke Aceh? Tentu ada hubungannya, kalau tidak ada hubungan tidak mungkin saya menulis seperti ini. Kita tentu masih ingat dengan Parade Aswaja dua tahun lalu. Ada kemungkinan Raja Salman sudah mengetahui informasi ini melalui orang-orang terdekatnya. Dengan demikian, Raja Salman tidak mau mengambil resiko untuk berkunjung ke Aceh. Tentu yang menjadi alasan beliau bukanlah faktor “ketakutan”, karena sejarah telah mencatat bahwa keberanian orang-orang Arab

padang pasir jauh lebih tinggi dari keberanian orang-orang kita. Tapi saya menduga, bahwa keputusan Raja Salman untuk tidak berkunjung ke Aceh disebabkan faktor ketenangan sebagaimana disinggung di atas. Artinya, beliau tidak ingin jika kunjungannya nanti disambut dengan demo anti Wahabi yang tentunya akan membuat jalan-jalan menjadi macet serta menyusahkan banyak orang untuk membeli karton dan spanduk.

Logikanya sangat sederhana. Pada saat Parade Aswaja tahun 2015, ribuan massa saat itu menyatakan menolak dan akan mengusir Wahabi dari bumi Aceh, padahal pada saat itu tidak ada Wahabi di Aceh, yang ada cuma tersangka-tersangka Wahabi. Nah, bagaimana jadinya jika King Salman datang ke Aceh, sedangkan beliau (semoga Allah menjaganya) adalah *“The King of Wahabi”*? Tentu *tuha adoe nibak aduen*. Jika Salman benar-benar berkunjung ke Aceh, bukan tidak mungkin akan disambut dengan Parade yang jauh lebih besar dan dahsyat.

Demikian beberapa jawaban alternatif yang bisa saya tawarkan terkait pertanyaan kenapa Raja Salman tidak berkunjung ke Aceh. Namun seperti telah ditegaskan di awal, bahwa tawaran jawaban tersebut hanyalah asumsi-asumsi belaka. Jika ingin jawaban yang pasti, silahkan hubungi sendiri King Salman, atau coba tanya kepada pria tinggi tegap berkepala plontos yang setia mendampingi King Salman, mungkin dia tahu. Selamat mencoba. *Wallahu A'lam*.

[*Harian Serambi Indonesia*, 08 Maret 2017]



BAGIAN KELIMA:

**BIOGRAFI
ABU INDRAPURI**

ABU INDRAPURI, SEORANG MUJAHID WAHABI

Belakangan ini banyak beredar poster yang berisi foto-foto ulama kharismatik Aceh. Poster-poster tersebut bisa dengan mudah kita dapatkan di toko-toko buku yang ada di Aceh. Di sebagian tempat juga ada para pedagang keliling yang membawa poster-poster tersebut pada hari-hari pasaran (*uroe peukan*). Keberadaan poster-poster tersebut yang memuat foto dan juga biografi singkat para ulama Aceh tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat guna mengenal ulama dan tokoh-tokoh pendahulunya.

Namun di sebalik itu, saya melihat ada “kejanggalan” dalam poster-poster tersebut, di mana ramai ulama-ulama besar di Aceh yang namanya tidak tercantum dalam poster dimaksud. Pada awalnya, saya berpikir cuma saya saja yang merasa heran, tapi ternyata dugaan saya ini keliru. Beberapa waktu lalu, saya sempat membaca sepucuk surat terbuka yang dikirimkan oleh salah seorang masyarakat Aceh melalui

rubrik *droe keu droe* di Harian Serambi Indonesia. Penulis surat tersebut mempertanyakan kenapa Teungku Muhammad Daud Beureueh tidak masuk dalam poster ulama Aceh.

Sebenarnya, jika ditelisik lebih jauh, bukan saja Teungku Muhammad Daud Beureueh yang tidak masuk dalam poster tersebut, tetapi ramai ulama lainnya yang juga tidak tercantum foto dan namanya di poster dimaksud. Di antara ulama yang tidak masuk dalam katagori ulama Aceh “versi poster” adalah Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap, Teungku Syekh Hamid Samalanga, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri dan masih banyak lagi ulama lainnya yang tidak mungkin kita sebut satu persatu.

Muncul pertanyaan. Apakah karena nama-nama mereka tidak tercantum dalam poster lantas mereka bukan ulama? Untuk menjawab pertanyaan ini, baiknya kita ajukan saja pertanyaan serumpun. Apakah untuk menjadi seorang ulama harus dipampang di poster? Nah! Semoga saja pertanyaan ini menjadi PR bagi kita semua.

Demi mengisi kekosongan informasi, dalam artikel singkat ini, saya akan berusaha menampilkan riwayat singkat dan juga sekelumit pemikiran dari ulama-ulama besar Aceh yang namanya tidak masuk atau mungkin “*terdelete*” di poster-poster ulama kharismatik yang terpajang di kedai-kedai kopi.

Untuk kali ini, saya memilih menulis tentang sosok *Al Mujahid* Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri *Rahimahullah*. Beliau adalah seorang ulama besar Aceh yang pernah memimpin Dayah Indrapuri. Di antara murid beliau yang di kemudian hari juga menjadi ulama besar di Aceh adalah Teungku Syekh Mudawali Al-Khalidi *Rahimahullah*, pimpinan Dayah Labuhan Haji Aceh Selatan yang saat ini murid-muridnya tersebar hampir di seluruh Aceh.

Adapun riwayat singkat tentang *Al Mujahid* Teungku Muhammad Daud Beureueh *Rahimahullah* sudah pernah saya tulis dalam artikel yang bertajuk “Teungku Muhammad Daud Beureueh, Sang Revolusioner dan Mujaddid Tanah Rencong”.

Dalam menulis nama Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri, para penulis sejarah memakai sebutan yang berbeda-beda tetapi tetap bermuara pada orang yang sama. Nama-nama dimaksud adalah Teungku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Ahmad Hasballah Indrapuri (tanpa kata haji), Teungku Hasballah Indrapuri (tanpa Ahmad dan Haji), Teungku Syekh Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Chik Indrapuri dan Abu Indrapuri. Ada pula sebagian penulis yang menyebut beliau dengan nama Teungku Ahmad Hasbullah, *wallahu a'lam*.

Sebenarnya kita bebas saja menggunakan nama mana pun sebagaimana tersebut di atas. Tapi dalam artikel singkat ini, saya memilih memakai nama Abu Indrapuri dan akan saya gunakan secara konsisten *Insy Allah*.

Adapun istilah Wahabi atau Wahabiyah yang juga akan anda temukan dalam artikel ini pada prinsipnya hanyalah sebuah istilah yang dinisbahkan kepada Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab. Sebenarnya saya kurang tertarik menggunakan nama ini (Wahabi), karena nama yang cocok untuk mereka adalah Salafiyah. Lebih tepat lagi nama mereka adalah “Muwahhidun”, nama yang mereka pakai sendiri. Namun dalam artikel ini saya “terpaksa” menggunakan nama Wahabi atau Wahabiyah dengan pertimbangan bahwa nama tersebut sudah cukup dikenal dan telah akrab di telinga kaum muslimin.

Nama lengkap Abu Indrapuri adalah Teungku Haji Ahmad Hasballah bin Teungku Haji Umar bin Teungku Auf. Ali Hasjimi menceritakan bahwa Abu Indrapuri dilahirkan di Kampung Lam-U,

Aceh Besar pada tanggal 03 Juni 1888. Abu Indrapuri adalah anak dari pasangan, Teungku Haji Umar dan Hajjah Safiah.¹ Ayah Abu Indrapuri yaitu Teungku Umar bin Auf adalah salah seorang ulama, pejuang dan juga pimpinan Dayah Lam-U Aceh Besar.²

Abu Indrapuri dilahirkan dalam suasana peperangan melawan Belanda di Aceh. Pada saat beliau lahir, ayahnya sedang berada dalam medan pertempuran melawan Belanda. Sejak kecil (remaja) Abu Indrapuri telah dibawa oleh ayahnya ke medan perang untuk berjihad.³

Pada saat masih kecil Abu Indrapuri belajar langsung kepada ayahnya Teungku Haji Umar. Abu Indrapuri sangat tertarik untuk menjadi *qari* yang baik. Bakatnya tersebut terus dikembangkan pada saat beliau belajar di Mekkah. Tidak hanya belajar pada ayahnya, Abu Indrapuri muda juga menuntut ilmu di beberapa dayah di Aceh, seperti Dayah Piyeung, Dayah Samalanga, Dayah Titeu dan Dayah Lamjabat. Dengan ketekunan belajar, akhirnya Abu Indrapuri dapat menguasai bahasa Arab, Fiqih, Tauhid, Sejarah, Tafsir dan Hadits.⁴

Dalam perjalanan ilmiahnya untuk menuntut ilmu, di tengah kondisi Aceh yang tidak kondusif, Abu Indrapuri muda memiliki daya nalar yang cukup kuat sehingga beliau mampu menguasai bahasa Arab dengan predikat *mumtaz*.⁵

Pada saat sebagian wilayah Aceh dapat dikuasai oleh Belanda, beberapa tokoh dan masyarakat Aceh atas izin dari pimpinan perang gerilya berhijrah ke Semenanjung Tanah Melayu. Pada saat itu, Abu Indrapuri bersama ayahnya juga turut berhijrah ke sana. Di tanah Melayu, Abu Indrapuri belajar di Dayah Yan yang merupakan pusat pendidikan Islam di Kerajaan Kedah. Di antara pemuda-pemuda dari Aceh saat itu yang seangkatan dengan beliau adalah Hasan Krueng Kalee dan Muhammad Saman. Ketiga pemuda ini kemudian melanjutkan

pendidikan ke Mekkah. Setelah belajar di Mekkah beberapa lama, akhirnya ketiga pemuda tersebut kembali ke Aceh dan menjadi ulama besar. Selanjutnya ketiga pemuda tersebut dikenal dengan Tengku Haji Ahmad Hasballah Indrapuri, Teungku Haji Hasan Krueng Kalee dan Teungku Syekh Muhammad Saman.⁶

Dayah Indrapuri dibangun oleh Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam pada tahun 1607-1636 M. Dayah tersebut berpusat di Mesjid Jami' Indrapuri yang saat ini dikenal dengan nama *Mesjid Tuha* (mesjid lama) yang terletak di Gampong Pasar Indrapuri Aceh Besar.⁷

Pada masa Kerajaan Aceh, Mesjid Indrapuri merupakan salah satu pusat pendidikan Islam. Semenjak dahulu, sebagaimana dikemukakan oleh Hasjimi, Dayah Indrapuri telah melahirkan banyak ulama dan juga tokoh yang berpengaruh dalam Kerajaan Aceh. Namun akibat peperangan dengan Belanda, banyak dayah-dayah di Aceh yang macet dalam melaksanakan aktivitas pendidikan. Seperti halnya dayah-dayah lain, Dayah Indrapuri juga mengalami kevakuman disebabkan para pemimpin dayah tersebut juga turut dalam pertempuran melawan Belanda.⁸

Atas anjuran dan bantuan dari Tuanku Raja Keumala dan Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, pada tahun 1912 Teungku Haji Ismail (Teungku Chiek *Empeu Trieng*) berusaha menghidupkan kembali Dayah Indrapuri yang telah berhenti beraktivitas selama puluhan tahun. Setelah aktivitas Dayah Indrapuri berjalan selama sepuluh tahun di bawah pimpinan Teungku Haji Ismail, namun kemajuan Dayah Indrapuri belum terlihat. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kesibukan Teungku Haji Ismail yang tidak hanya memimpin Dayah Indrapuri, tetapi juga memiliki tugas untuk mengajak masyarakat membangun dayah-dayah lain yang sudah terhenti aktivitasnya selama perang berlangsung.⁹

Pada tahun 1922 dilaksanakan satu musyawarah yang dihadiri oleh Tuanku Raja Keumala, Teuku Panglima Polem Muhammad Daud, Teungku Haji Ismail dan Teungku Haji Abdullah Lam-U. Musyawarah tersebut memutuskan untuk mencari seorang tokoh ulama lain yang mampu memimpin Dayah Indrapuri. Atas saran dari Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, akhirnya dipilihlah Abu Indrapuri untuk memimpin dayah tersebut. Pada saat itu Abu Indrapuri masih bermukim di Yan, Semenanjung Tanah Melayu. Setelah mendapat pesan dari utusan Tuanku Raja Keumala, akhirnya Abu Indrapuri bersedia pulang ke Aceh untuk memimpin dayah tersebut. Sejak saat itulah, Dayah Indrapuri dipimpin oleh Abu Indrapuri, seorang ulama muda yang banyak terinspirasi dengan semangat Gerakan Wahabiyah di Mekkah *Al-Mukarramah*.¹⁰

Selama berada di bawah pimpinan Abu Indrapuri, Dayah Indrapuri semakin maju dan berkembang pesat. Pada saat itu ramai para santri dari seluruh tanah Aceh datang dan belajar di Dayah Indrapuri.¹¹

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, bahwa Abu Indrapuri pernah menuntut ilmu di Mekkah di bawah asuhan ulama-ulama Wahabi (Salafi). Sesuai dengan ajaran yang pernah diperolehnya di Mekkah, Abu Indrapuri berpendapat bahwa iman dan ibadah yang murni merupakan syarat mutlak bagi umat Islam jika ingin bangkit dan maju. Akidah dan ibadah harus dibersihkan dari berbagai *bid'ah* dan *khurafat*. Tidak hanya itu, dalam proses pembelajaran di Dayah Indrapuri, Abu Indrapuri juga menggunakan *Kitab Tauhid* yang dikarang oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab.¹²

Abu Indrapuri menolak segala bentuk *bid'ah* dan *khurafat* seperti *kupanji*, yaitu meletakkan kain putih di kuburan dengan maksud melepas nazar. Beliau juga menolak ritual tolak bala (*tulak bala*) dengan memakai sesajen dari bubur nasi. Tradisi *rabu abeh*, yaitu pergi ke laut

pada akhir bulan Safar untuk *peulheuh jalen* (buang sial) juga ditolak oleh Abu Indrapuri, karena menurut beliau perbuatan tersebut masuk dalam katagori *syirik*.¹³

Abu Indrapuri merupakan ulama yang punya pengaruh besar di Aceh, khususnya Aceh Besar. Abu Indrapuri sangat giat dalam melaksanakan pemurnian akidah dan pembaharuan pemikiran umat Islam di Aceh. Sebagaimana disebut di atas bahwa Abu Indrapuri menggunakan *Kitab Tauhid* karangan Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab sebagai pegangannya. Kitab tersebut telah memberi inspirasi kepada Abu Indrapuri dalam mengadakan pembaharuan dan juga menanam semangat anti penjajahan kepada masyarakat Aceh.¹⁴

Abu Indrapuri pernah mendirikan sebuah organisasi yang beliau beri nama *Jam'iyah Al-Ataqiyah Al-Ukhrawiyah* (Persatuan Kemerdekaan Akhirat). Organisasi ini bertujuan untuk membebaskan masyarakat dari *khurafat* dan *bid'ah*. Menurut Abu Indrapuri “apabila manusia telah bebas dari perbudakan hawa nafsu, dari akidah yang salah dan dari ibadah bukan kepada Allah, maka ia akan menjadi manusia yang dapat dengan sendirinya berjuang untuk membebaskan dirinya dari belenggu perbudakan jasmani”.¹⁵

Di sisi lain, Abu Indrapuri adalah salah seorang ulama yang sangat anti kepada paham komunisme dan atheisme. Sebagai seorang “ulama Wahabiyah” beliau berkeyakinan bahwa hanya dengan kemurnian akidah dan ibadah umat Islam akan menang menghadapi musuh-musuhnya. Abu Indrapuri juga sempat merasa sangat kecewa kepada Pemerintah Republik Indonesia saat itu yang memberi keleluasaan kepada kaum komunis melalui Partai Komunis Indonesia (PKI).¹⁶

Nazaruddin Sjamsuddin menyatakan bahwa Abu Indrapuri

dan Teungku Hasan Krueng Kalee adalah ulama kelas satu di Aceh, khususnya pasca revolusi. Cuma saja mereka berdua memiliki pandangan keagamaan yang berbeda. Abu Indrapuri seorang ulama reformis, sedangkan Teungku Hasan Krueng Kalee lebih condong kepada tradisional. Namun menurut Sjamsuddin, pengaruh dua ulama besar tersebut tidaklah mampu menandingi pengaruh dari Teungku Muhammad Daud Beureueh.¹⁷

Abu Indrapuri adalah ulama tertua dalam kubu reformis. Menurut Sjamsuddin hal tersebutlah yang membuat Abu Indrapuri sangat dekat dengan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam konferensi pertama PUSA pada tahun 1940 di Sigli, Abu Indrapuri diangkat sebagai penasehat PUSA. Wafatnya Abu Indrapuri pada tahun 1956 [1959?] dirasakan sebagai satu kehilangan besar bagi perjuangan Darul Islam, terutama bagi Teungku Muhammad Daud Beureueh.¹⁸

Abu Indrapuri adalah salah seorang ulama yang sangat berpengaruh di masanya. Nazaruddin Sjamsuddin mengisahkan suatu kejadian yang menimpa Abu Indrapuri. Pada awal tahun 1953, Abu Indrapuri mengalami musibah kecelakaan lalu lintas di Kutaraja. Pada saat itu beliau ditabrak oleh sebuah truk militer. Kejadian tersebut telah menggoncangkan masyarakat di pedesaan, khususnya di Aceh Besar. Melihat gelagat masyarakat yang tegang akibat kejadian tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan militer. Pihak militer takut terjadinya huru-hara akibat kejadian yang menimpa ulama besar tersebut. Akibat kekhawatiran tersebut, akhirnya pihak militer meminta maaf kepada Abu Indrapuri secara terbuka dan menyatakan bahwa kejadian tersebut tidak disengaja. Pihak militer juga mengumumkan bahwa supir truk militer tersebut sudah dihukum.¹⁹

Kontribusi dalam Pembaharuan Pendidikan Islam

Abu Indrapuri adalah salah satu tokoh yang sangat peduli kepada pendidikan umat Islam di Aceh. Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo juga memasukkan nama Abu Indrapuri dalam bukunya *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*.

Nazaruddin Sjamsuddin, mengemukakan bahwa para pemimpin reformis di masa lalu, yaitu Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Abu Indrapuri tidak hanya mendirikan sekolah-sekolah di seluruh daerah Aceh, tetapi mereka juga mengembangkan gagasan keagamaan yang baru dan belum dikenal oleh masyarakat Aceh. Waktu itu juga sempat terjadi perbedaan pendapat dan pertentangan dengan ulama-ulama tradisional yang dipimpin oleh Teungku Hasan Krueng Kalee.²⁰

Hasjimi menceritakan bahwa dalam rangka melaksanakan pembaharuan pendidikan Islam, Abu Indrapuri mendirikan Madrasah Hasbiyah dalam lingkungan Dayah Indrapuri. *Madrasah Hasbiyah* ini terdiri dari *Madrasah Ibtidaiyah* dan *Madrasah Tsanawiyah* dengan menggunakan kurikulum baru yang sesuai dengan kurikulum madrasah di seluruh Indonesia. Tidak hanya Madrasah Hasbiyah, Abu Indrapuri juga mendirikan madrasah khusus perempuan di *Tanjung Karang Lhue* dengan nama *Madrasah Lil Ummahat*.²¹

Dayah Indrapuri dan Madrasah Hasbiyah dibawah asuhan Abu Indrapuri telah melahirkan banyak ulama yang menjadi pemimpin umat di Aceh. Di antara lulusan Dayah Indrapuri adalah Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi yang di kemudian hari menjadi pimpinan Madrasah Islamiah Labuhan Haji Aceh Selatan.²² Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi sebagaimana diceritakan oleh Hasjimi belajar ilmu-ilmu *Al-Qur'an* di Dayah Indrapuri.

Teungku Haji Mudawali Al-Khalidi yang dikenal dengan

sebutan Teungku Muda Wali lahir di Labuhan Haji pada tahun 1917. Teungku Mudawali sempat menjadi murid Abu Indrapuri. Sebagaimana diceritakan oleh Said Abubakar, bahwa Abu Indrapuri melihat sosok Teungku Muda Wali sebagai seorang yang cerdas dan berbakat. Abu Indrapuri kemudian meminta kepada T.M Hasan Glumpang Payong yang menjabat sebagai wakil ketua *Aceh Studi Fonds* agar membantu Teungku Muda Wali untuk melanjutkan pendidikan pada Normal Islam di Padang yang dipimpin oleh Mahmud Yunus yang juga beraliran reformis.²³

Abu Indrapuri bukan hanya ulama besar dan tokoh pendidikan, tetapi beliau juga terlibat aktif dalam gerakan politik, pra dan pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Beliau adalah salah seorang pemimpin politik yang sangat berpengaruh di Aceh, selain Teungku Muhammad Daud Beureueh dan Teungku Hasan Krueng Kalee.

Sebelum kemerdekaan, Abu Indrapuri pernah menjabat sebagai ketua Majelis Syura Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA).²⁴ Sebagaimana diterangkan oleh Aboebakar Atjeh, bahwa organisasi PUSA bertujuan untuk menyiarkan, menegakkan dan mempertahankan syiar Islam yang suci, khususnya di Aceh.²⁵

Pasca kemerdekaan, dalam musyawarah ulama seluruh Aceh pada 23 November 1945 di Mesjid Raya Baiturrahman disepakati untuk membentuk Barisan *Hizbullah* dengan ketua umum Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam Barisan *Hizbullah* tersebut Abu Indrapuri menjabat sebagai wakil ketua umum.²⁶

Di antara jabatan dalam pemerintah yang pernah dipikul oleh Abu Indrapuri adalah: (1) Kadi pada Teungku Panglima Polem Muhammad Daud di zaman Belanda; (2) Ketua Pengadilan pada zaman pendudukan Jepang; (3) Anggota Pengadilan Tentara Divisi X pada

zaman Republik Indonesia; (4) Ketua Bagian Kehakiman pada Dewan Agama Kerisidenan Aceh; (5) Ketua Mahkamah Syar'iyah Kerisidenan Aceh; (6) Anggota Mahkamah Islam Tertinggi; dan (7) Ketua Majelis Ifta pada Jawatan Agama Kerisidenan Aceh.²⁷

Jabatan dalam organisasi politik yang pernah diemban oleh Abu Indrapuri, di antaranya: (1) Ketua Majelis Syura Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA); (2) Penasehat Pemuda PUSA; (3) Penasehat Kepanduan Islam; (4) Penasehat Pergerakan Angkatan Muda Islam Indonesia (PERAMINDO); Penasehat Serikat Pemuda Islam Aceh (SEPIA); (5) Penasehat Pucuk Pimpinan Serikat Pegawai Republik Indonesia (SERPRI); dan (6) Penasehat Lasykar Mujahidin.²⁸

Sejak bulan Oktober 1945, pada awal-awal revolusi kemerdekaan, Abu Indrapuri pernah menjabat sebagai Kepala Mahkamah Syari'ah Daerah Aceh.²⁹ Abu Indrapuri adalah salah seorang dari empat ulama besar yang mengeluarkan fatwa perang sabil untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat revolusi fisik. Fatwa tersebut keluar pada tanggal 15 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Teungku Haji Hasan Krueng Kalee, Teungku Muhammad Daud Beureueh, Teungku Haji Jakfar Shiddiq dan Abu Indrapuri³⁰.

Sebagaimana dicatat oleh Kahin, bahwa dalam pernyataan tersebut keempat ulama dimaksud, termasuk Abu Indrapuri di dalamnya, menyerukan kepada seluruh rakyat Aceh untuk bersatu dan berada di belakang Pemimpin Besar Revolusi, Soekarno, dalam rangka melawan agresi Belanda yang akan kembali ke Indonesia.³¹

Abu Indrapuri adalah salah seorang pendiri Majelis Ifta Daerah dalam konferensi di Kutaraja pada tanggal 15 Februari 1950. Majelis tersebut berfungsi untuk menasehati pemerintah daerah dalam masalah-masalah keagamaan pasca revolusi fisik.³² Majelis Ifta yang

berfungsi memberikan fatwa ini diketuai langsung oleh Abu Hasballah Indrapuri.³³

Abu Indrapuri juga salah satu tokoh Darul Islam yang terlibat aktif dalam pemberontakan terhadap pemerintah Republik di bawah pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh. Dalam gerakan DI TII di Aceh, Abu Indrapuri menjabat sebagai ketua mahkamah.³⁴

Setelah Panglima Kodam I Iskandar Muda, Syamaun Gaharu dan Gubernur Aceh Ali Hasjimi berhasil meyakinkan ulama-ulama Aceh yang tergabung dalam DI TII bahwa PKI tidak akan sanggup menghapus sila Ketuhanan Yang Maha Esa dari Pancasila, maka para ulama Aceh tersebut bersedia kembali ke pangkuang Republik Indonesia. Pada saat itu, Abu Indrapuri juga turun gunung bersama ulama-ulama lainnya.³⁵

Atas persetujuan Panglima dan juga Gubernur Aceh, akhirnya Abu Indrapuri hijrah kembali untuk kedua kalinya ke Semenanjung Tanah Melayu. Salah satu alasan beliau hijrah ke sana adalah karena ayah beliau dikuburkan di Kampung Yan Keudah. Abu Indrapuri ingin apabila dia wafat juga dikuburkan di samping ayahnya yang sekaligus juga merupakan gurunya. Abu Indrapuri berangkat ke Semenanjung Tanah Melayu pada akhir tahun 1958. Hanya lebih kurang satu tahun berada di Tanah Melayu, Abu Indrapuri wafat pada 26 April 1959. Beliau dikuburkan di Kampung Yan Keudah, dekat dengan makam ayahnya Teungku Haji Umar bin Auf.³⁶

Sebagai masyarakat Aceh, tentunya kita harus bersyukur karena di Aceh pernah hidup ulama-ulama besar, di antaranya Abu Indrapuri yang telah menghabiskan usianya untuk menjaga kemurnian tauhid kaum muslimin di Aceh. Sebagaimana telah penulis kemukakan di atas bahwa Teungku Haji Mudawali Labuhan Haji yang juga ulama

besar di Aceh adalah salah seorang murid yang diasuh dan bahkan direkomendasikan untuk belajar di Padang oleh Abu Indrapuri. Sekarang mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, pantaskah kita “mencaci” ulama-ulama “Wahabi” semisal Abu Indrapuri yang memiliki kontribusi besar dalam melahirkan ulama-ulama besar Aceh di kemudian hari?

Abu Indrapuri tidak hanya berperan sebagai guru umat bagi masyarakat Aceh, tapi beliau juga salah seorang *mujahid* (pejuang) yang sejak remaja telah maju di medan tempur melawan *kafir* Belanda. Dan, sebagaimana telah diulas di atas, Abu Indrapuri juga merupakan salah seorang ulama besar yang mengeluarkan fatwa Perang Sabil melawan Belanda dalam mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Akhinya hanya kepada Allah kita kembali dan menyerahkan diri. Mari kita berdoa kepada Allah ‘Azza Wajallah agar mengampuni dosa-dosa Abu Indrapuri, seorang *mujahid*, seorang *mujaddid* dan ulama besar di Aceh. Kita berdoa kepada Allah agar kebaikan beliau dibalas oleh Allah, dan ditempatkan di sisi-Nya – Insya Allah. *Allahumagfirlahu warhamhu.* []

[Bireuen, 16 September 2015, www.patahkekeringanblogspot.com]

(Endnotes)

1. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangunan Tamaddun Bangsa*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 46.
2. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 47.
3. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 46.
4. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 47.
5. Muliadi Kurdi dkk (Ed), *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh (The Encyclopedia of Great Acehnese Ulamas) Volume 1*, (t.t: Lembaga Kesehteraan Aceh Semata, 2010), hal. 157.
6. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 49.
7. Muliadi Kurdi dkk (Ed), *Ensiklopedi...*, hal. 159.
8. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 49.
9. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 50-51.
10. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 51.
11. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 51.
12. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 52.
13. Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, (Banda Aceh: Badan Perpustakaan Prov Aceh, 2007), hal. 109-110.
14. Lembaga Research dan Survey IAIN Djami'ah Ar-Raniry, *Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, (Banda Aceh: Lembaga Research dan Survey IAIN Djami'ah Ar-Raniry, 1978), hal. 34.
15. A. Hasjimi, *50 Tahun Aceh Membangun*, (Banda Aceh: t.p, 1995),

- hal. 70.
16. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 59.
 17. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul Islam di Aceh*, (Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1990), hal. 194.
 18. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, hal. 194.
 19. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, hal. 184.
 20. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, hal. 21.
 21. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 53.
 22. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 53.
 23. Said Abubakar, *Berjuang Untuk Daerah: 70 Tahun H. Said Abubakar*, (Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995), hal. 117.
 24. A. Hasjimi, *50 Tahun...*, hal. 81.
 25. Aboebakar Atjeh, *Salaf Muhji Atsaris Salaf Gerakan Salafijah di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Permata, 1970), hal. 184.
 26. Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1990), hal. 55.
 27. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 55.
 28. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 54.
 29. Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, (Jakarta: Depdikbud, 1983), hal. 186.
 30. Tgk. A. K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area*, (Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001), hal. 91.
 31. Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemedekaan*, terj. Satyagraha Hoerip, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990),

hal. 98.

32. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, hal. 38.
33. Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terj. Grafiti Press, (Jakarta: Garfiti Press, 1983), hal. 299.
34. Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan...*, hal. 187.
35. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 60.
36. Ali Hasjimi, *Ulama Aceh...*, hal. 60.





BAGIAN KEENAM:

**BUKAN
SYAIR FANSURI**

BUKAN SYAIR FANSURI

Di kala kaum muslimin sekalian alam sedang bermunajat kepada Tuhan-Nya. Di Mesjid *tanoh indatu* justru terjadi keriuhan yang menusuk kalbu para insan beradab. Seandainya Syaikh Abdurrauf (syiah Kuala) yang tenar itu masih hidup, tentunya beliau akan menangis dan bahkan tersedu akibat ulah segelintir “anak cucunya” yang hilang malu.

“*Meunyoe Jumat ukeu hana perubahan siap roe darah*” (kalau Jumat depan tidak ada perubahan, siap tumpahkan darah), demikianlah “kalimat syahdu” yang diucapkan oleh seorang “tokoh ulama” di dalam “Rumah Tuhan”. Sebuah seruan estetik “*berbalaghah*” tinggi yang tanpa sadar telah mencabik-cabik norma etis. Sese kali kalimat takbir pun ikut “dijual” demi menarik simpati para prajurit. Sungguh mengharukan.

“*Mesjid nyoe harus dengan syariat ahlussunnah waljama’ah*” (mesjid ini harus bersyariat *ahlussunnah waljama’ah*). Luar biasa. Bergetar hati ini mendengar “fatwa pujangga” yang mendayu-dayu itu. Dengan semangat menggebu dan tangan mengepal, istilah *Ahlussunnah* pun dimonopoli hingga “tak terbeli”. Demikian mahalanya istilah itu, sehingga hanya menjadi milik orang-orang tertentu. Kita ibarat para “proletar” hanya bisa “gigit jari”, kita kalah dengan “borjuis” berlagak “suci”.

“*Harus Mazhab Syafi’i*”. Lagi-lagi kita harus “pasang gigi” dan tersenyum lebar. Mungkin telah tiba “ajalnya” *tanawwu’* itu, dan kita harus relakan ia pergi. Sudah tiba masanya tiga mazhab itu “gulung tikar” dari tanah ini. Tinggal kita sendiri, bersepi-sepi dengan satu “lirik” saja.

“*Hudep mulia mate syahid*”. Betapa sejujunya hati ini mendengar slogan “keramat” dari sosok bergaya “malaikat”. Seolah tuturnya benar sangat, padahal racun menyengat yang hendak memburai persatuan umat. Beginilah jadinya, ketika *laqab* syahid dibeli di “kedai kopi”.

Sesaat lagi kita akan terkurung dalam kamar-kamar jumud. Kita akan dihipit oleh fanatisme yang telah membatu. Saat itulah “stempel-stempel sesat” akan menyasar jidat-jidat “tak berdosa.”

Ini bukan kebangkitan! Tapi satu hegemoni menuju “tirani”. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan *Inna lillahi wa inna ilaihi raji’un*.

Dan tak perlu risih, karena coretan ini bukan syair Fansuri.

[*Bireuen, 16 Juni 2015, www.patahkekeringan.blogspot.com*]

PERBEDAAN, KEPENATAN DAN LAUTAN

Dr. Danial, M. A

*“Seandainya pendapatku benar tentu masih mengandung unsur-
unsur kesalahan, dan seandainya pendapat mereka salah tentu masih
mengandung unsur-unsur kebenaran.”*

(Imam al-Syafi'i)

Setelah membaca buku ini, kita akan menikmati hidangan sehat *made in* Khairil Miswar yang menyegarkan intelektualitas, mengasah emosionalitas, sekaligus mempertajam spiritualitas. Sesekali mengajak kita bercumbu dengan kelucuan yang membangunkan rasa humor. Penulis tidak hanya berhasil merekam fenomena sosial-keagamaan yang aktual di Aceh, melainkan juga

mampu mengutarakannya dalam bahasa yang rileks dan mudah dicerna. Meskipun judul buku ini *Setelah Sesat Terbitlah Stress*, tapi setelah melahap semua tema yang disajikan membuat pembaca seperti melakukan rekreasi ke lautan. Rekreasi menghilangkan kepenatan, kegundahan, dan kegelisahan terhadap berbagai fenomena yang menyentak kesadaran keberagamaan kita sebagai Muslim. Mengapa tidak, kehidupan keIslaman/ keberagamaan kita terasa begitu sesak, penat, dan sarat dengan hiruk-pikuk perseteruan atau kontestasi memperebutkan pengaruh, gengsi, mungkin juga sumber daya politik, sosial, dan ekonomi. Seolah-olah kita berada di jalan yang sempit lagi menghimpit.

Padahal Allah SWT menegaskan bahwa jalan Islam adalah *sirātā mustaqīmā* (jalan yang luas lagi lurus) alias jalan TOL. Karena jalan yang luas, kita tidak perlu bergesekan dengan pengguna jalan yang searah, dan karena lurus kita tidak usah bertabrakan dengan pengguna jalan yang berlawanan arah. Karena Islam ini jalan yang luas dan lurus, maka seandainya semua manusia yang ada di planet ini berjalan di atas jalan agama (Islam), maka tetap masih muat dan lapang. Dengan begitu tidak perlu berdesakan, apalagi menyenggol teman seiring dan menggunting dalam lipatan. Bukankah setiap hari minimal 17 kali kita memohon kepada Yang Maha Benar KetetapanNya dan Maha Luas IlmuNya; *Ihdinā al-Sirāt al-Mustaqīm* (tunjukilah kami kejalan yang luas lagi lurus). Pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah berada di jalan yang luas dan lurus? Kita dapat mengukurnya melalui pengalaman apakah kita sebagai masyarakat Aceh yang beragama Islam sudah hidup bebas dari perselisihan pemahaman keagamaan/ keIslaman (dan lainnya), absen dari kegaduhan sosial, dan merdeka dari perseteruan dan klaim kebenaran atau kesesatan. Kita masih bergelut dengan itu semua.

Kesesatan dan Perbedaan

Kesesatan dalam Al-Qur'an sering disebut dengan *dhalāl*. Allah SWT menyebut kata *dhalāl* dalam Al-Qur'an sebanyak 191 kali. Kata ini tidak selamanya berarti sesat, melainkan juga dapat berarti hilang/ lenyap/ hancur/ sia-sia (al-Sajadah: 10, al-Fil: 2, al-Rādu: 14), lupa (al-Baqarah: 282), terhapus, bingung (al-Dhuha: 7), keliru (Yusuf: 95), khilaf (al-Syu'ara: 20), dan seterusnya. Di sisi lain, kata *dhalal* yang berarti sesatpun maknanya tidak sesempit yang dipahami banyak masyarakat kita hari ini. Kita berharap hasrat untuk menyesatkan orang dalam pikiran dan tindakan tidak lebih luas dan besar ketimbang ilmu kita tentang kesesatan dalam Al-Qur'an. Lalu, menurut Al-Qur'an siapakah orang-orang yang sesat itu?

Menurut Al-Qur'an, orang yang sesat itu adalah; *pertama*, orang yang mengingkari rukun iman ditegaskan oleh al-Qur'an sebagai kesesatan yang sangat jauh (al-Nisā': 136). Keyakinan bahwa Allah SWT dan malaikatNya senantiasa mengawasi setiap tindakan kita adalah wujud dari ekspresi keimanan kepada Allah dan malaikatNya. Karena itu, menggelapkan uang negara alias korupsi dengan keyakinan tidak terdeteksi Komisi Pemberantasan Korupsi dan penegak hukum adalah salah satu indikasi pengingkaran kepada rukun iman. *Kedua*, kemunafikan, kebohongan, dan mendustakan ayat-ayat Allah adalah kesesatan (al-Ankabūt: 21 dan al-Ahqāf: 11). *Ketiga*, menyembah Tuhan selain Allah juga merupakan wujud dari kesesatan yang paling menyesatkan (al-Ahqāf: 5). *Keempat*, berbuat zalim adalah kesesatan yang nyata (Luqmān: 11). *Kelima*, menjadikan nafsu sebagai Tuhan (al-Jāsiyah: 23) dan mengikuti hawa nafsu tanpa disertai ilmu adalah sesat dan tidak memiliki penolong (al-Rūm: 29). *Keenam*, orang kafir dan yang menghalangi orang lain dari jalan Allah adalah sesat yang jauh (al-Nisā': 167). *Ketujuh*, orang yang tidak menghukum dengan hukum Allah

dan orang yang mengubah aturan Allah untuk kepentingan diri dan kelompoknya adalah bentuk kesesatan (al-Mā'idah: 48-50). *Kedelapan*, orang yang hatinya membatu dan tidak mau mengingat ayat-ayat Allah adalah kesesatan yang nyata (al-Zumar: 22). *Kesembilan*, mendahului kehidupan dunia ketimbang akhirat adalah kesesatan (Ibrāhīm: 3). *Kesepuluh*, berputus asa terhadap rahmat Allah adalah sesat (al-Hijr: 56). *Kesebelas*, berpaling dari kebenaran adalah sesat (Yūnus: 32). *Keduabelas*, menimbun harta (al-Humazah: 2). *Ketigabelas*, lebih mencintai keluarga, harta, dan usahanya ketimbang Allah dan Rasul adalah kesesatan (al-Taubah: 24). *Keempatbelas*, tidak menggunakan hati, mata, dan telinga untuk Allah (al-A'rāf: 179) adalah bentuk-bentuk dari kesesatan.

Di sisi lain, berbeda pendapat dalam memahami ajaran agama yang bersifat *furu'iyah* bukanlah kesesatan. Sebagian umat Islam membaca qunut subuh dan sebagian lainnya tidak membaca adalah perbedaan. Sebagian salat tarawih di bulan ramadhan 8 rakaat, sementara sebagian lainnya 20 rakaat adalah perbedaan. Menjaharkan bacaan *bismillah* atau tidak sebelum al-Fatihah adalah perbedaan. Ulang *khutbah* atau tidak, salat witir sekali salam atau dua kali salam adalah perbedaan. Semua fenomena di atas adalah keragaman dalam ekspresi keIslaman di bidang ibadah. Saya NU (Nahdhatul Ulama) anda Muhammadiyah, mereka PERTI dan dia Persis adalah perbedaan organisasi keagamaan. Saya suka rujak, anda doyan POP Mie, saya minum kopi dan anda teh hijau adalah perbedaan selera makan-minum. Sebagian pakai baju koko sebagian lagi menggunakan kemeja adalah keragaman dalam berbusana. Sebagian masyarakat Aceh berbahasa Gayo, sebagian lainnya berbahasa *Jamee*, *Kleut*, *Alas*, dan saya berbahasa Aceh adalah bagian dari perbedaan budaya. Semua perbedaan di atas merupakan kekayaan khasanah keIslaman dan kebudayaan yang mendewasakan, mencerahkan, dan mematangkan cara kita beragama

dan berbudaya. Perbedaan menolong kita untuk saling melengkapi, keragaman membantu kita untuk saling menghormati. Intinya, semua itu membimbing kita untuk bersaudara bukan berperkara.

Belajar Kepada Lautan

Dan Dialah yang membiarkan kedua laut yang mengalir (berdampungan); yang ini tawar lagi segar(sungai) dan yang lain asin lagi pahit (laut). Dan Dia telah menjadikan antara keduanya pemisah dan pembatas yang menghalanginya (QS. Al-Furqān: 53).

Ayat di atas menggunakan isyarat dekat (ini, هَذَا) kepada kedua laut itu. Hal ini mengesankan bahwa meskipun laut dan sungai sangat dekat satu sama lain, namun yang satu tidak bercampur dengan yang lain. Para ulama mengatakan seandainya anda menggali di pantai laut yang asin –walau pada jarak yang sangat dekat dengannya--- maka anda akan menemukan air yang sangat tawar. Air asin yang merembas dan mengalir dari lautan ke batu-batuan di dekat pantai itu, tidak bercampur dengan air sungai yang merembas dan mengalir dari daratan ke lautan. Pembatas atau pemisah yang Allah ciptakan adalah posisi sungai dan laut di mana air laut yang banyak tidak menawarkan rasa air sungai, begitupun air sungai yang mengalir ke laut tidak mempengaruhi asinnya air laut. Allah SWT telah menciptakan *barzakh/ mixed area* yaitu pemisah yang memelihara ciri masing-masing air laut dan sungai. Walaupun air sungai terjun dengan derasny dari tempat yang sangat tinggi, ciri-ciri yang menjadi identitas masing-masing tetap terpelihara. Air sungai tetap tawar begitupun air laut tetap asin.

Hal serupa juga terjadi pada air sungai amazon yang mengalir ke laut Atlantik sampai batas 200 mil masih tetap tawar. Begitu juga mata air di teluk Persia. Berbagai jenis ikan sangat khas terdapat di dalamnya dan masing-masing tidak dapat hidup kecuali di lokasinya

(‘Abdul Hamid al-Zanjani). Perumpamaan air sungai dan lautan mengisyaratkan bagaimana keduanya tidak saling mengalahkan dan berseteru. Melainkan tetap hidup berdampingan satu sama lain sebagai satu kesatuan yang memperindah semesta dan mempercantik jagad raya. Begitulah *sunnatullah* yang telah Allah SWT tetapkan pada setiap makhluknya agar menjadi pelajaran yang mencerahkan pikiran dan membeningkan hati, sehingga terpatri keluasan dan kedalaman ilmu serta kebijaksanaan dalam hidup dan kehidupan ini.

Selanjutnya, surat al-Furqan: 53 di atas dapat juga dipahami sebagai pemisah antara mukmin dan kafir. Keduanya dapat hidup berdampingan tetapi tidak boleh bercampur, sehingga menghilangkan identitas keIslaman orang beriman. Aqidah yang dianut menjadi *mixed area* bagi keduanya. Jika dengan orang yang berbeda agama saja (kafir) Allah mengajarkan kita untuk hidup saling berdampingan, maka dengan saudara seiman dan seaqidah, toleransi dan persaudaraan jauh lebih kuat dan kokoh.

Lautan atau samudera adalah luas dan dalam. Ia sanggup menampung apa saja di dalam dan melaluinya. Mulai dari sampah yang dibuang nelayan saat mencari ikan, perahu yang didayung di atasnya, sampai kapal yang berlayar di atasnya. Menjadi lautan adalah menjadi orang yang sanggup menerima aspirasi dan memahami berbagai sudut pandang. Menjadi lautan juga berarti memiliki ilmu pengetahuan yang luas dan dalam, sehingga membimbingnya menjadi lebih bijaksana. Ia berhasil keluar dari kesempitan pandangan menuju ketajaman kesadaran keIslaman serta keindahan tindakan. Di samping itu, lautan juga penuh dengan riak dan gelombang, meluap ke seluruh penjuru. Kondisi ini dapat dipahami sebagai simbol material dari alam ruhani manusia yang tak tampak. Ternyata dalam kehidupan spiritualpun ada riak dan gelombangnya, ada pasang dan surutnya sebagaimana dalam

kehidupan material manusia. Riak sosial-budaya dan politik serta gelombang keberagamaan atau keberIslaman merupakan hakikat dan estetika kehidupan. Bukankah indah laut karena gelombang dan indah kehidupan karena dinamikanya.

Melampaui semua itu, kita hendaknya menyadari bahwa perseteruan telah menguras banyak energi spiritual, daya intelektual, dan kekuatan emosional kita sebagai muslim. Padahal semua itu dapat dimanfaatkan untuk membangun agama dan peradaban, bukan untuk menghancurkan kebudayaan dan meruntuhkan persaudaraan. Caranya, mencari persamaan dan memahami perbedaan. Akhirnya, kita dapat berkata; *jika engkau yang terluka, akulah yang berdarah*. Dengan demikian, iklim keberIslaman kita yang selama ini sarat dengan kepenatan dan perseteruan yang menyesak dada, menuju kepada suasana rekreasi di tepi pantai, memandang lautan luas yang melapangkan dada dan menyegarkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Mujahid dan Haneef Oliver, *Virus Wahabi (Mitos Negatif Bagi Salafi)*, terj. Abu Husain, Bandung: Toobagus Publishing, 2010
- Abdul Qadir Abu Fa'izah Al-Atsary, *Beda Salafi dan Hizbi*, Bandung: Toobagus Publishing, 2008
- Afrizal M, *Ibn Rusyd, Tujuh Perdebatan Utama dalam Teologi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2006
- A. Hasjimi, *50 Tahun Aceh Membangun*, Banda Aceh: t.p, 1995
- A. K. Jakobi, *Aceh Daerah Modal Long March Ke Medan Area*, Jakarta: Yayasan Seulawah RI-001
- Aboebakar Atjeh, *Salaf Muhji Atsaris Salaf Gerakan Salafijah di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Permata, 1970
- Ali Hasjimi, *Ulama Aceh Mujahid Pejuang Kemerdekaan dan Pembangun Tamaddun Bangsa*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997
- Amran Zamzami, *Jihad Akbar di Medan Area*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990
- Audrey R. Kahin, *Pergolakan Daerah Pada Awal Kemedekaan*, terj. Satyagraha Hoerip, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1990
- Cornelis Van Dijk, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, terj. Grafiti Press, Jakarta: Garfiti Press, 1983
- Depdikbud, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Istimewa Aceh*, Jakarta: Depdikbud, 1983
- Fuad bin Abdul Aziz Asy-Syalhub, *Aqidah Nan Murni Solusi Problematika Umat*, terj. Abu Abdirrahman Abdul Aziz, Klaten: Nurul Qalb, 2008

- Hepi Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran, Sejarah, Analisa dan Perbandingan*, Jakarta: UI Press, 1986
- H. M. Joesoef Sou'yb, *Mu'tazilah, Peranannya dalam Perkembangan Alam Pikiran Islam*, Jakarta: Al-Husna Zikra, 1997
- Ihsan Ilahi Zhahir, *Salah Faham Sunnah Syi'ah*, Risalah, 1984
- Lembaga Research dan Survey IAIN Djami'ah Ar-Raniry, *Laporan Penelitian Pengaruh PUSA terhadap Reformasi di Aceh*, Banda Aceh: Lembaga Reseach dan Survey IAIN Djami'ah Ar-Raniry, 1978
- Muhammad bin Abdul Wahab, *Kitab Tauhid*, terj. Abu Ismail Fuad, Yogyakarta: Pustaka Al-Haura, 2009
- Muhammad bin Abdul Karim Syahrastani, *Sekte-Sekte Islam*, terj. Karsidi Diningrat, Bandung: Pustaka, 2004
- Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarah Tiga Landasan Agama*, terj. Abu 'Abdir-Rahman Muhammad Daz bin Munir, Tegal, Ash-Shaf Media, 2009
- Muhammad bin Jamil Zainu, *Mitos Wahabi, Mengungkap Hakikat Dakwah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab*, terj. Abu Muhammad Farhan dan Abu Yusuf Abdurrahman, Jogjakarta: Al-Husna, 2010
- Muhammad Ahmad, *Tauhid Ilmu Kalam*, Pusataka Setia, 1997
- Muliadi Kurdi dkk (Ed), *Ensiklopedi Ulama Besar Aceh (The Encyclopedia of Great Acehnese Ulamas) Volume 1*, t.t: Lembaga Kesehteraan Aceh Semata, 2010
- Nazaruddin Sjamsuddin, *Pemberontakan Kaum Republik Kasus Darul*

Islam di Aceh, Jakarta: Pustaka Utama Graviti, 1990

Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, *Tokoh-Tokoh Pendidikan di Aceh Awal Abad XX*, Banda Aceh: Badan Perpustakaan Prov Aceh, 2007

Said Abubakar, *Berjuang Untuk Daerah: 70 Tahun H. Said Abubakar*, Banda Aceh: Yayasan Nagasakti, 1995

Sofyan Chalid bin Idham Ruray, *Salafy Antara Tuduhan dan Kenyataan (Jawaban Ilmiah untuk Buku Sejarah Berdarah Sekte Salafi Wahabi)*, Bandung: Toobagus Publishing, 2011

Utsman Ismail bin Abdurrahman Ash-Shabuni, *Aqdah Salaf Ash-Habul Hadits*, terj. Abu Athiyah Rismal, Yogyakarta: Gema Ilmu, 2008

Zaid bin Muhammad Al-Madkhali, *Syarah Akidah Muhammad bin Abdul Wahab*, terj. Hanan Hoesen Bahanan, Solo: Pustaka Ar-Rayyan, 2007

BIOGRAFI PENULIS

K*hairil Miswar* dilahirkan di Kabupaten Bireuen pada 24 Juli 1981. Pendidikan formal dijalani di MIN, MTsN, MAN di Kabupaten Bireuen. Penulis juga pernah belajar di Dayah Darussada (1987-1999). Pendidikan tinggi di IAIN Ar-Raniry dan STAI Al-Muslim Bireuen. Pada tahun 2014, melanjutkan pendidikan di Program Pascasarjana UIN Ar-Raniry pada konsentrasi Pemikiran dalam Islam dan saat ini sedang menyelesaikan tesis dengan judul “Wahabi dalam Perspektif Himpunan Ulama Dayah (HUDA).”

Dalam rentang waktu 1999-2004, penulis juga pernah menjadi kader beberapa organisasi kemahasiswaan seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Palang Merah Indonesia (PMI) dalam lingkungan IAIN Ar-Raniry. Penulis juga sempat bergabung dengan Front Mahasiswa dan Pemuda Aceh Jeumpa (Jeumpa Mirah) yang fokus dalam aksi-aksi kemanusiaan di Aceh dan juga Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA). Pasca konflik, penulis juga sempat terlibat dalam salah satu partai politik lokal sebagai Ketua DPW Partai SIRA Kabupaten Bireuen (2007-2009).

Tulisan-tulisan penulis terbit di beberapa media cetak di Aceh,

di antaranya Harian Aceh, Harian Pikiran Merdeka, Tabloid Modus, Tabloid Pikiran Merdeka, Harian Serambi Indonesia, Harian Waspada Medan, Majalah Santunan, Tabloid Minbar, Harian Rakyat Aceh dan juga beberapa media online, di antaranya: atjehpost.com, atjehlink.com, acehtraffic.com, thegloubejurnal.com,juangnews.com, acehtrend.co, arrahmah.com, hidayatullah.com dan republika.co.id, dll.

Tulisan-tulisan Khairil Miswar dapat diakses melalui blog pribadi penulis: www.patahkekeringan.blogspot.com dan www.khairilmiswar.com. Penulis dapat dihubungi melalui email: khairilmiswar@yahoo.com; fb: Khairil Miswar dan Twitter: @khairilmiswar1 atau melalui kontak WA: 081360660766.

